

LAPORAN KEUANGAN KOTA CILEGON

AUDITED

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN 2019

BPKAD KOTA CILEGON
PEMERINTAH KOTA CILEGON



KATA PENGANTAR

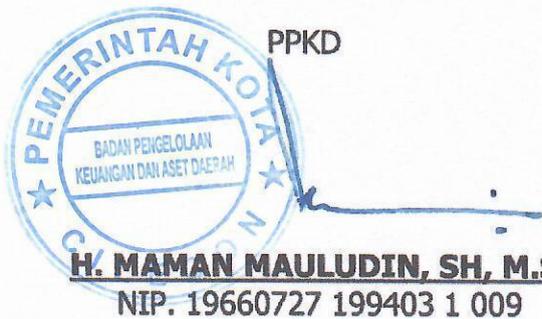
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 10 ayat 2 bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pemerintah Kota Cilegon, dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Cilegon sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 yang merupakan laporan konsolidasian dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Cilegon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Cilegon, Juni 2020

PPKD



H. MAMAN MAULUDIN, SH, M.Si
NIP. 19660727 199403 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Eksekutif	2
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Neraca	
F. Laporan Arus Kas	
G. Catatan atas Laporan Keuangan	
I. Pendahuluan	7
II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD	19
III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	64
IV. Kebijakan Akuntansi	76
V. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan	92
VI. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan	289
VII. Penutup	313



WALIKOTA CILEGON

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Kami memberikan surat pernyataan tanggung jawab ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat sebagai penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019.

Cilegon, 4 Juni 2020

WALIKOTA CILEGON



G. EDI ARIADI, M.Si

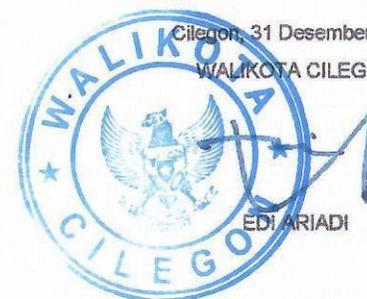


PEMERINTAH KOTA CILEGON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMDA
TAHUN ANGGARAN 2019
PERIODE : 01 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	688.080.294.550,00	634.798.056.162,00	92,26	578.335.346.296,00
411	Pendapatan Pajak Daerah	540.425.611.122,00	488.733.692.539,00	90,43	429.234.596.141,00
412	Pendapatan Retribusi Daerah	17.557.451.636,00	18.727.531.650,00	106,66	18.827.127.530,00
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.127.092.370,00	17.127.057.370,00	100,00	18.027.533.084,00
414	Lain-lain PAD yang Sah	112.970.139.422,00	110.209.774.603,00	97,56	112.246.089.541,00
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.153.595.310.925,00	1.093.318.737.900,00	94,77	1.013.335.686.813,00
421	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	912.378.533.000,00	866.731.464.020,00	95,00	841.804.102.872,00
42101	Dana Bagi Hasil Pajak	129.306.337.000,00	96.543.890.961,00	74,66	118.362.788.466,00
42102	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.114.103.000,00	1.582.740.490,00	74,87	1.593.297.207,00
42103	Dana Alokasi Umum	643.891.037.000,00	643.891.037.000,00	100,00	597.861.841.963,00
42104	Dana Alokasi Khusus	137.067.056.000,00	124.713.795.569,00	90,99	123.996.175.236,00
422	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	33.166.816.000,00	33.166.816.000,00	100,00	0,00
42201	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
42203	Dana Penyesuaian	33.166.816.000,00	33.166.816.000,00	100,00	0,00
423	Transfer Pemerintah Provinsi	168.049.961.925,00	153.420.457.880,00	91,29	141.530.983.941,00
42301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	168.049.961.925,00	153.420.457.880,00	91,29	141.530.983.941,00
424	Bantuan Keuangan-LRA	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	30.000.000.000,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	39.774.000.000,00	38.863.765.413,00	97,71	38.349.591.841,00
431	Pendapatan Hibah	39.774.000.000,00	38.863.765.413,00	97,71	38.349.591.841,00
432	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.881.449.605.475,00	1.766.980.569.475,00	93,92	1.630.020.024.950,00
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI	1.553.893.677.539,00	1.409.108.464.098,00	90,68	1.284.537.968.032,00
511	Belanja Pegawai	750.625.913.914,00	681.225.108.290,00	90,75	597.044.773.746,00
512	Belanja Barang	744.825.411.841,00	673.160.001.768,00	90,38	638.168.701.242,00
513	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
514	Subsidi				
515	Hibah	53.371.238.000,00	52.488.994.040,00	98,35	43.287.073.044,00
516	Bantuan Sosial	5.171.113.784,00	2.232.360.000,00	43,17	6.036.520.000,00
62	BELANJA MODAL	504.881.312.179,00	413.224.916.445,00	81,85	304.836.619.602,00
521	Belanja Tanah	140.111.739.784,00	117.515.997.654,00	83,87	57.333.558.721,00
522	Belanja Peralatan dan Mesin	101.942.388.655,00	89.775.337.181,00	88,06	48.497.428.363,00
523	Belanja Gedung dan Bangunan	134.177.315.042,00	117.471.215.752,00	87,55	113.648.316.910,00
524	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	111.839.663.727,00	72.802.132.456,00	65,10	81.626.705.244,00
525	Belanja Aset Tetap Lainnya	11.406.595.271,00	10.630.570.252,00	93,20	3.026.360.364,00
526	Belanja Aset Lainnya	5.403.609.500,00	5.029.663.150,00	93,08	504.250.000,00
63	BELANJA TAK TERDUGA	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
531	Belanja Tak Terduga	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	2.063.374.989.718,00	1.822.331.380.543,00	88,32	1.588.173.687.634,00
6	TRANSFER				
62	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	976.730.599,00	976.730.599,00	100,00	913.397.208,00
621	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	976.730.599,00	976.730.599,00	100,00	913.397.208,00
	JUMLAH TRANSFER	976.730.599,00	976.730.599,00	100,00	913.397.208,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.064.351.720.317,00	1.823.308.111.142,00	88,32	1.590.087.084.842,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(182.902.114.842,00)	(56.327.551.667,00)	30,80	39.932.940.108,00
7	PEMBIAYAAN				
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	192.902.114.842,00	192.902.114.842,00	100,00	158.869.172.934,00
711	Penggunaan SILPA	192.902.113.042,00	192.902.114.842,00	100,00	158.869.172.934,00
712	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
714	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
71401	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
71402	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
71403	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
715	Penerimaan Kembali Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
71503	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	1.800,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	0,00	0,00	5.999.998.200,00
721	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
722	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	5.999.998.200,00
723	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
72301	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
72302	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
72303	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
72304	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
72305	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
724	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
72402	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
72403	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	182.902.114.842,00	192.902.114.842,00	105,47	152.969.174.734,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	136.574.563.175,00	0,00	192.902.114.842,00



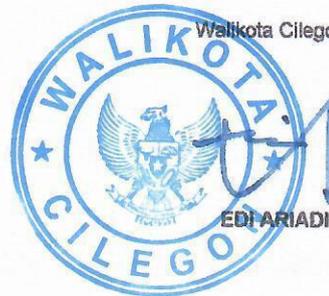


PEMERINTAH KOTA CILEGON
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO	URAIAN	31 DESEMEBR 2019	1 JANUARI 2019
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	192.902.114.842,00	158.969.172.934,00
2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	(192.902.114.842,00)	(158.969.172.934,00)
	JUMLAH SUB TOTAL (1+2)	0,00	0,00
3	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	136.574.563.175,00	192.902.114.842,00
	JUMLAH SUB TOTAL (1+2+3)	136.574.563.175,00	192.902.114.842,00
4	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	0,00	0,00
5	LAIN-LAIN	0,00	0,00
	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (1+2+3+4+5)	136.574.563.175,00	192.902.114.842,00

Cilegon, 31 Desember 2019

Wakil Kota Cilegon,



EDI ARIADI



PEMERINTAH KOTA CILEGON
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

PERIODE : 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019

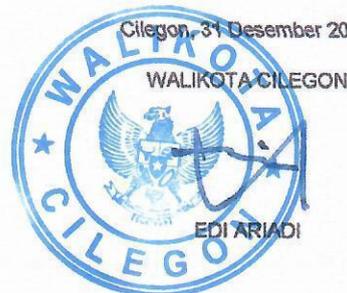
HAL: 1 / 2

No	Uraian	2019	2018
1	2	3	4
	KEGIATAN OPERASIONAL		
8	PENDAPATAN - LO		
81	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
811	Pendapatan Pajak Daerah	498.917.517.419,00	488.865.098.513,00
812	Pendapatan Retribusi Daerah	18.404.304.701,00	19.090.325.962,00
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.127.057.370,00	18.027.533.084,00
814	Lain-lain PAD Yang Sah	112.047.516.194,00	113.241.845.968,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	644.496.395.684,00	639.224.803.527,00
82	PENDAPATAN TRANSFER		
821	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00
821	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	866.731.464.020,00	841.804.102.872,00
82101	Dana Bagi Hasil Pajak	96.543.690.961,00	118.352.788.466,00
82102	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.582.740.490,00	1.593.297.207,00
82103	Dana Alokasi Umum	643.891.037.000,00	597.861.841.963,00
82104	Dana Alokasi Khusus	124.713.795.569,00	123.996.175.236,00
82105	Alokasi dana Desa	0,00	0,00
	JUMLAH Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	866.731.464.020,00	841.804.102.872,00
822	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00
822	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	33.166.816.000,00	0,00
82201	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
82203	Dana Penyesuaian	33.166.816.000,00	0,00
	JUMLAH Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	33.166.816.000,00	0,00
823	Transfer Pemerintah Provinsi	0,00	0,00
823	Transfer Pemerintah Provinsi	162.533.909.851,00	136.783.178.156,00
82301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	162.533.909.851,00	136.783.178.156,00
82302	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH Transfer Pemerintah Provinsi	162.533.909.851,00	136.783.178.156,00
824	Transfer Pemerintah Provinsi	40.000.000.000,00	30.000.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.102.432.189.871,00	1.008.587.281.028,00
83	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
831	Pendapatan Hibah	53.261.151.166,00	67.094.557.811,00
832	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
833	Pendapatan Lainnya	28.488.059.380,00	1.007.256.045.593,00
834	Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	81.729.210.546,00	1.074.350.603.404,00
	JUMLAH PENDAPATAN - LO	1.828.657.796.101,00	2.722.162.687.959,00
9	BEBAN		
911	Beban Pegawai	682.377.338.889,00	597.044.773.746,00
912	Beban Jasa	669.913.656.342,00	649.130.269.864,00

SIMRAL

No	Uraian	2019	2018
1	2	3	4
913	Beban Bunga	0,00	0,00
914	Beban Subsidi	0,00	0,00
915	Beban Hibah	52.699.361.490,00	43.287.073.044,00
916	Beban Bantuan Sosial	2.232.360.000,00	6.036.520.000,00
917	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00
91701	Beban Penyusutan	221.151.169.430,00	171.721.916.937,00
91702	Beban Amortisasi	2.262.297.380,00	1.238.800.757,00
918	Beban Penyisihan Piutang	203.837.137,05	8.688.309.438,00
919	Beban Lain-lain	1.236.966.009,88	636.336.762,00
921	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00
922	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
923	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
924	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00
925	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	976.730.599,00	913.397.208,00
926	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN	1.633.053.737.276,93	1.478.897.397.756,00
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	195.604.058.824,07	1.243.465.290.203,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		
841	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
842	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
843	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	257.818.326,00
931	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
932	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
933	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	165.144.916,00	179.032.022.275,00
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	(165.144.916,00)	(178.774.203.949,00)
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	195.438.913.908,07	1.064.691.086.254,00
	POS LUAR BIASA		
851	Pendapatan Pos Luar Biasa	0,00	0,00
941	Beban Luar Biasa	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT L.O	195.438.913.908,07	1.064.691.086.254,00

Cilegon, 31 Desember 2019



WALIKOTA CILEGON

EDY ARIADI



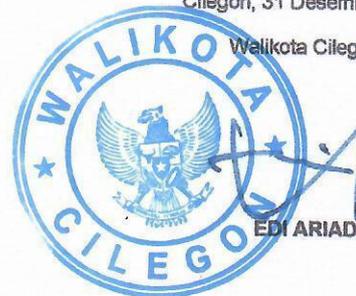
PEMERINTAH KOTA CILEGON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO	URAIAN	2019	2018
1	EKUITAS AWAL	4.499.088.372.886,00	3.437.408.548.552,00
2	SURPLUS DEFISIT -LO	185.438.913.908,07	1.064.691.086.254,00
3	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	0,00	0,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(11.321.684.484,24)	(3.011.261.920,00)
41	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
42	SELISIH EVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
43	LAIN-LAIN	(11.321.684.484,24)	(3.011.261.920,00)
	EKUITAS AKHIR	4.683.205.602.309,83	4.499.088.372.886,00

Cilegon, 31 Desember 2019

Walikota Cilegon,





PEMERINTAH KOTA CILEGON
NERACA PEMERINTAH DAERAH
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

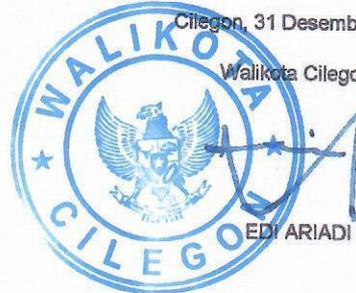
No	Uraian	Jumlah	
		31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	ASET		
11	ASET LANCAR		
11101	Kas di Kas Daerah	131.065.822.742,00	188.396.494.503,00
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.000,00	10.000,00
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	16.059.430,00	0,00
11104	Kas di BLUD	2.337.760.775,00	2.745.760.554,00
11105	Kas Lainnya	3.154.920.228,00	1.759.859.785,00
11106	Setara Kas	0,00	0,00
11201	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
11301	Piutang Pajak	166.997.762.963,00	158.690.593.026,00
11302	Piutang Retribusi	1.079.818.950,00	1.289.000.950,00
11303	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disisahkan	0,00	0,00
11304	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
11305	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	0,00
11306	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	0,00	0,00
11307	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	14.733.460.793,00	5.620.008.822,00
11308	Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
11401	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
11402	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
11403	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
11404	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
11405	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
11406	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	1.130.443.654,00
11407	Piutang Lainnya	34.575.558.522,00	32.672.208.576,00
11408	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
11501	Penyisihan Piutang	(111.378.690.358,29)	(102.612.076.080,00)
11601	Belanja Dibayar Dimuka	2.466.447.868,00	2.639.536.814,00
11701	Persediaan	17.408.170.699,00	17.814.974.979,00
	JUMLAH ASET LANCAR	252.455.093.613,71	310.146.805.583,00
12	INVESTASI JANGKA PANJANG		
121	Investasi Nonpermanen	4.672.657.347,00	5.028.832.394,00
12101	Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00
12102	Investasi dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00
12103	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
12104	Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir	7.660.637.371,00	5.028.832.394,00
12105	Dana Bergulir diragukan tertagih	(2.987.980.024,00)	0,00
12106	Investasi Nonpermanen Lainnya	0,00	0,00
122	Investasi Permanen	1.413.021.305.092,12	1.385.787.333.852,00
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.413.021.305.092,12	1.385.787.333.852,00
12202	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	1.417.693.962.439,12	1.390.816.166.246,00
13	ASET TETAP		

No	Uraian	Jumlah	
		31 Desember 2019	31 Desember 2018
13101	Tanah	805.724.663.235,00	683.799.065.335,00
13201	Peralatan dan Mesin	663.651.054.988,00	592.607.978.460,00
13301	Gedung dan Bangunan	926.572.368.016,00	867.884.393.534,00
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.784.894.257.011,00	1.710.178.685.204,00
13501	Aset Tetap Lainnya	125.829.530.869,00	118.000.635.706,00
13601	Konstruksi dalam Pengerjaan	246.002.403.678,00	167.456.703.571,00
13701	Akumulasi Penyusutan	(1.560.171.344.858,00)	(1.360.430.657.391,00)
JUMLAH ASET TETAP		2.992.502.932.939,00	2.779.496.804.419,00
14	DANA CADANGAN		
14101	Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
15	ASET LAINNYA		
15101	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
15102	Tuntutan Ganti Rugi	1.139.701.495,00	216.757.841,00
15103	Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian	(918.974.799,00)	0,00
15201	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
15301	Aset Tak Berwujud	24.204.600.094,00	19.240.116.607,00
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(12.870.402.422,00)	(10.608.105.042,00)
15401	Aset Lain-lain	31.373.086.725,00	31.565.835.550,00
15402	Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain	(540.878.095,00)	(368.278.095,00)
15403	Uang Jaminan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		42.387.132.998,00	40.046.326.861,00
JUMLAH ASET		4.715.039.121.989,83	4.520.506.103.109,00
2	KEWAJIBAN		
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.000,00	0,00
21201	Utang Bunga	0,00	0,00
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	1.071.711.808,00	830.507.033,00
21501	Utang Belanja	2.632.685.640,00	1.782.127.122,00
21601	Utang Jangka Pendek Lainnya	27.929.121.232,00	18.805.096.068,00
21602	Utang Uang Jaminan	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		31.833.519.680,00	21.417.730.223,00
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
22101	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0,00	0,00
22102	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
22103	Premium (Diskonto) Obligasi	0,00	0,00
22104	Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
22105	Utang Pemerintah Pusat	0,00	0,00
22106	Utang Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
22107	Utang Dalam Negeri Lainnya	0,00	0,00
22201	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		31.833.519.680,00	21.417.730.223,00
3	EKUITAS		
31	EKUITAS		

No	Uraian	Jumlah	
		31 Desember 2019	31 Desember 2018
31101	Ekuitas	4.683.205.602.309,83	4.499.088.372.886,00
JUMLAH EKUITAS		4.683.205.602.309,83	4.499.088.372.886,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.716.039.121.989,83	4.520.506.103.109,00

Cilegon, 31 Desember 2019

Walikota Cilegon,



EDI ARIADI



PEMERINTAH KOTA CILEGON
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

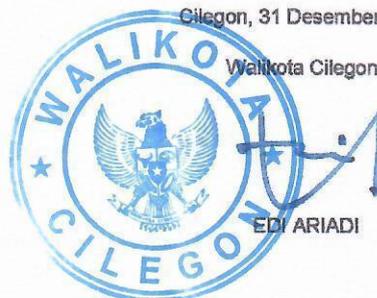
No	Uraian	2019	2018
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
11	Arus Masuk Kas		
1101	Penerimaan Pajak Daerah	488.733.692.539,00	429.234.598.141,00
1102	Penerimaan Retribusi Daerah	18.727.531.650,00	18.827.127.530,00
1103	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.127.057.370,00	18.027.533.084,00
1104	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	109.382.807.083,00	111.653.562.641,00
1105	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	96.543.890.961,00	118.352.788.468,00
1106	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.582.740.490,00	1.593.297.207,00
1107	Penerimaan Dana Alokasi Umum	643.891.037.000,00	597.861.841.963,00
1108	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	124.713.795.569,00	123.996.175.236,00
1109	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
1110	Penerimaan Dana Penyesuaian	33.166.816.000,00	0,00
1111	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	153.420.457.880,00	141.530.983.941,00
1112	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
1113	Penerimaan Hibah	38.863.765.413,00	38.349.591.841,00
1114	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
1115	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	40.000.000.000,00	30.000.000.000,00
1116	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	1.766.153.591.956,00	1.628.427.497.950,00
12	Arus Keluar Kas		
1201	Pembayaran Pegawai	681.225.108.290,00	597.044.773.748,00
1202	Pembayaran Barang dan Jasa	673.160.001.788,00	638.168.701.242,00
1203	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
1204	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
1205	Pembayaran Hibah	52.488.994.040,00	43.287.073.044,00
1206	Pembayaran Bantuan Sosial	2.232.360.000,00	6.036.520.000,00
1207	Pembayaran Tak Terduga	0,00	0,00
1208	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1209	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1210	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
1211	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
1212	Belanja Bantuan Keuangan	976.730.599,00	913.397.208,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1.410.083.194.697,00	1.285.450.465.240,00
	ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	356.070.397.258,00	343.977.032.710,00
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
21	Arus Masuk Kas		
2101	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
2102	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
2103	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	785.967.520,00	592.527.000,00
2104	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
2105	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
2106	Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
2107	Penjualan Aset Lainnya	41.000.000,00	0,00
2108	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
2109	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	826.967.520,00	592.527.000,00

No	Uraian	2019	2018
22	Arus Keluar Kas		
2201	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2202	Perolehan Tanah	117.515.997.654,00	57.333.558.721,00
2203	Perolehan Peralatan dan Mesin	89.775.337.181,00	48.497.428.363,00
2204	Perolehan Gedung dan Bangunan	117.471.215.752,00	113.648.316.910,00
2205	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.802.132.456,00	81.626.705.244,00
2206	Perolehan Aset Tetap Lainnya	10.630.570.252,00	3.026.360.364,00
2207	Perolehan Aset Lainnya	5.029.663.150,00	504.250.000,00
2208	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	5.999.998.200,00
2209	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	413.224.916.445,00	310.636.617.802,00
	ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(413.397.948.925,00)	(310.044.090.802,00)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
31	Arus Masuk Kas		
3101	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
3102	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
3103	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
3104	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
3105	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
3106	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
3107	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
3108	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
3109	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
32	Arus Keluar Kas		
3201	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
3202	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah	0,00	0,00
3203	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	0,00	0,00
3204	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	0,00	0,00
3205	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
3206	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
3207	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
3208	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
3209	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0,00	0,00
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
41	Arus Masuk Kas		
4101	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	106.270.264.470,00	91.043.973.587,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	106.270.264.470,00	91.043.973.587,00
42	Arus Keluar Kas		
4201	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	106.270.263.470,00	91.043.973.587,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	106.270.263.470,00	91.043.973.587,00
	ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	1.000,00	0,00
	KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS SELAMA PERIODE	(56.327.550.667,00)	33.932.941.908,00

No	Uraian	2019	2018
	SALDO AWAL KAS BUD	188.396.494.503,00	158.969.172.934,00
	SALDO AKHIR KAS DI KAS DAERAH	131.066.822.742,00	188.396.494.503,00
	SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	1.000,00	10.000,00
	SALDO KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	16.059.430,00	0,00
	SALDO KAS DI KAS LAINNYA	3.154.920.228,00	1.759.859.785,00
	SALDO KAS DI BLUD	2.337.760.775,00	2.745.750.564,00
	SALDO AKHIR KAS	136.574.564.175,00	192.902.114.842,00

Cilegon, 31 Desember 2019

Wali Kota Cilegon,



EDI ARIADI



*Ringkasan
Eksekutif*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 10 ayat 2 bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bab. XI Akuntansi Keuangan Daerah Bagian I pasal 232 ayat 5 menerangkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 telah disusun dan disajikan menyesuaikan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adapun kodifikasi anggaran mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sedangkan untuk pertanggungjawaban mengacu pada kode rekening Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Namun demikian kami tetap melakukan pendekatan penyesuaian kodifikasi anggaran dan pertanggungjawaban kepada SAP.

1. Laporan Realisasi Anggaran

*Laporan
Realisasi
Anggaran*

Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2019 menggambarkan realisasi anggaran yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

*Realisasi
Pendapatan*

Realisasi pendapatan pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.766.980.559.475,00 atau mencapai 93.92% dari anggaran.

Realisasi Belanja pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.822.331.380.543,00 atau mencapai 88.32% dari anggaran.

*Realisasi
Belanja
APBD*

Realisasi Transfer pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar

<i>Realisasi Transfer APBD</i>	Rp976.730.599,00 atau mencapai 100% dari anggaran.
<i>Surplus/ (Defisit)</i>	Defisit pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp56.343.842.183,00 atau mencapai (30.80%) dari anggaran.
<i>Realisasi Penerimaan Pembiayaan</i>	Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp192.902.114.842,00 atau mencapai 100% dari anggaran.
<i>Realisasi Pengeluaran Pembiayaan</i>	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 atau mencapai 0% dari anggaran
<i>Silpa</i>	Silpa pada akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp136.574.563.175,00 terdiri dari Kas di Kas Umum Daerah sebesar Rp131.065.822.742,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp16.059.430,00, Kas di BLUD PDB sebesar Rp1.474.720.125,00, Kas di BLUD RSUD sebesar Rp863.040.650,00, Kas Lainnya FKTP JKN sebesar Rp1.416.230.346,00 dan Kas Lainnya Dana BOS sebesar Rp1.738.689.882,00

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

<i>SAL Awal</i>	Laporan Perubahan SAL yang berakhir 31 Desember 2019 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2019.
<i>Penggunaan SAL</i>	Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp192.902.114.842,00.
<i>SILPA</i>	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2018 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, yaitu sebesar Rp192.902.114.842,00.
<i>SAL Akhir</i>	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Cilegon pada Tahun Anggaran 2019 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp136.574.563.175,00. Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp136.574.563.175,00.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang

<i>Pendapatan LO</i>	penyajianya disandingkan dengan periode sebelumnya.
<i>Beban</i>	Pendapatan LO pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.828.657.796.101,00.
<i>Surplus /Defisit LO</i>	Beban pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.633.053.737.276,93.
	Surplus Operasi pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp195.604.058.824,07.
	Surplus Non Operasional pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00.
	Defisit Non Operasional pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp165.144.916,00.
	Surplus/Defisit Pos Luar Biasa pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00
	Surplus LO pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp195.438.913.908,07.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019 adalah sebesar Rp4.499.088.372.886,00. Ekuitas tersebut merupakan ekuitas akhir neraca tahun 2018.

Surplus/ (Defisit)

Surplus/(Defisit) LO pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp195.438.913.908,07 yang dihasilkan dari Laporan Operasional.

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung merubah ekuitas pada tahun 2019. Koreksi tersebut yaitu koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp11.321.684.484,24.

Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019 adalah sebesar Rp4.683.205.602.309,83.

Neraca

5. Neraca

Aset

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2019 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan.

Kewajiban

Jumlah aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.715.039.121.989,83.

Ekuitas

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp31.833.519.680,00.

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.683.205.602.309,83.

6. Laporan Arus KasLaporan
Arus Kas

Laporan Arus Kas yang berakhir 31 Desember 2019 menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Aktivitas
Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp356.070.397.258,00.

Aktivitas
Investasi
Non Keu

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar (Rp 412.397.948.925,00).

Aktivitas
Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00.

Aktivitas
Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.000,00.

Kenaikan/
(Penurunan)
Kas

Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Tahun Anggaran 2019 sebesar (Rp56.327.550.667,00).

Posisi Kas

Posisi Kas pada akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar sebesar Rp136.574.564.175,00 terdiri dari Kas di Kas Umum Daerah sebesar Rp131.065.822.742,00, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.000,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp16.059.430,00, Kas di Kas Lainnya sebesar Rp3.154.920.228,00, Kas di BLUD sebesar Rp2.337.760.775,00.

CALK

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan.



BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam rangka otonomi daerah, menjadikan Pemerintah Daerah Kota Cilegon terus mengusahakan tingkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan tetap memperhatikan hubungan pemerintah pusat - daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, setiap entitas di pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan dalam bentuk laporan keuangan entitas akuntansi. Laporan keuangan entitas akuntansi tersebut kemudian dikonsolidasikan sehingga menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Cilegon sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, agar kinerja entitas dapat terukur lebih baik. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Cilegon khususnya dalam bidang pelaporan keuangan daerah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian pelaporan secara paripurna berdasarkan kaidah-kaidah pelaporan dan

pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Upaya Pemerintah Kota Cilegon untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah dengan pengungkapan secara paripurna atas capaian kinerja keuangan, posisi keuangan maupun berbagai hal yang sedang menjadi perhatian, disajikan secara obyektif sehingga para pengguna laporan dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Cilegon. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta terwujudnya *good governance and clean government* untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Perangkat Daerah Kota Cilegon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Pada tahun 2019 susunan Perangkat Daerah Kota Cilegon mengalami perubahan struktur organisasi. Perubahan Struktur terjadi diantaranya adalah pada:

1. UPT Dinas Pendidikan pada 8 kecamatan dihapus
2. UPT P2KP Dinas kesehatan dihapus
3. Sekretariat Daerah membentuk 2 sub unit baru dan 1 sub unit bergabung ke sub unit lain-dalam SETDA
4. Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBD): struktur dihapus, sampai dengan laporan ini dibuat PERDA masih di provinsi.

Daftar SKPD
Kota Cilegon

Daftar perubahan struktur organisasi OPD Kota Cilegon disajikan pada Table berikut:

NO	PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI OPD KOTA CILEGON TAHUN 2019			KETERANGAN		
	NOMENKLATUR OPD LAMA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 3 TAHUN 2016	NOMENKLATUR OPD/UPTD BARU TAHUN 2019	DASAR HUKUM			
1	DINAS PENDIDIKAN		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 56 TAHUN 2016	TETAP		
	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cilegon	-	DICABUT DENGAN PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 5 TAHUN 2019	STRUKTUR DIHAPUS		
	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ciwandan					
	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cibeer					
	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Grogol					
	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pulomerak					
	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purwakarta					
	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jombang					
	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Citangkil					
	SMPN 1					
	SMPN 2				TETAP	
	SMPN 3		TETAP			
	SMPN 4		TETAP			
	SMPN 5		TETAP			
	SMPN 6		TETAP			
	SMPN 7		TETAP			
	SMPN 8		TETAP			
	SMPN 9		TETAP			
	SMPN 10		TETAP			
	SMPN 11		TETAP			
2	DINAS KESEHATAN		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 17 TAHUN 2019	TETAP		
	Puskesmas UPT Cilegon		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 17 TAHUN 2019	TETAP		
	Puskesmas UPT Ciwandan					
	Puskesmas UPT Cibeer					
	Puskesmas UPT Grogol					
	Puskesmas UPT Pulomerak					
	Puskesmas UPT Purwakarta					
	Puskesmas UPT Jombang					
	Puskesmas UPT Citangkil					
	UPT Kesehatan P2KP				DICABUT DENGAN PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 5 TAHUN 2019	STRUKTUR DIHAPUS
	UPTD JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN	UPTD JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (A)			PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 17 TAHUN 2019	STRUKTUR TETAP (BERUBAH NOMENKLATUR)
	UPT PLGDT	UPTD PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU (PUBLIC SAFETY CENTRE) (KELAS A)	STRUKTUR TETAP (BERUBAH NOMENKLATUR)			
	UPT LABKESDA	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (KELAS A)	STRUKTUR TETAP (BERUBAH NOMENKLATUR)			
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 21 TAHUN 2019	STRUKTUR TETAP PERUBAHAN HANYA PADA SYARAT JABATAN DIREKTUR		
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 13TAHUN 2019	TETAP		
	UPTD LABORATORIUM DAN ALAT BERAT	UPTD PERLENGKAPAN, PERBENGKELAN, DAN LABORATORIUM (A)	PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 13TAHUN 2019	STRUKTUR TETAP (NOMENKLATUR BERUBAH)		
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			TETAP		
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			TETAP		
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			TETAP		
8	DINAS SOSIAL		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 16 TAHUN 2019	TETAP		
	UPT Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	UPTD DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TIPE B	PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 16 TAHUN 2019	STRUKTUR BARU (BERUBAH TIPE & NOMENKLATUR)		
9	DINAS TENAGA KERJA		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 15 TAHUN 2019	TETAP		
	UPT Balai Latihan Kerja	UPTD LATIHAN KERJA (A)	PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 15 TAHUN 2019	STRUKTUR BARU NOMENKLATUR BERUBAH		
10	DINAS PP, PA DAN KB		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 18 TAHUN 2019	TETAP		
	UPT KADER CILEGON MANDIRI (KCM I)	UPTD KELUARGA BERENCANA (A)	PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 18 TAHUN 2019	STRUKTUR TETAP (NOMENKLATUR BERUBAH)		
	UPT KADER CILEGON MANDIRI (KCM II)	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (A)				
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 11 TAHUN 2019	TETAP		
	UPTD PUSKESWAN (2016)	UPTD PUSAT KESIWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (A)	PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 11 TAHUN 2019	STRUKTUR ADA TETAPI TIDAK ADA PEJABAT		
	UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR H	UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR HEWAN (A)		STRUKTUR BARU NOMENKLATUR BERUBAH		
	UPTD PERIKANAN (2016)	UPTD BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DAN AIR PAYAU (A)		STRUKTUR BARU NOMENKLATUR BERUBAH		
	UPTD KAWASAN PERTANIAN TERPADU DAN P	UPTD KAWASAN PERTANIAN TERPADU (A)		STRUKTUR BARU NOMENKLATUR BERUBAH		

Lanjutan:

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI OPD KOTA CILEGON TAHUN 2019				
NO	NOMENKLATUR OPD LAMA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 3 TAHUN 2016	NOMENKLATUR OPD/UPTD BARU TAHUN 2019	DASAR HUKUM	KETERANGAN
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 8 TAHUN 2019	TETAP
	UPT Kebersihan Wilayah I	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH CILEGON CIBEBER (KELAS A)	PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 8 TAHUN 2019	STRUKTUR TETAP (BERUBAH NOMENKLATUR)
	UPT Kebersihan Wilayah II	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH CITANGKIL CIWANDAN (KELAS A)		
	UPT Kebersihan Wilayah III	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH GROGOL PULOMERAK (KELAS A)		
	UPT Kebersihan Wilayah IV	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH JOMBANG PURWAKARTA (KELAS A)		
	UPT TPSA dan IRLT (INSTALASI PENGELOLAAN)	UPTD TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR (KELAS A)		
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			TETAP
14	DINAS PERHUBUNGAN		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 10 TAHUN 2019	TETAP
	UPT Terminal	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN (KELAS A)	PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 10 TAHUN 2019	STRUKTUR TETAP (BERUBAH NOMENKLATUR)
	UPT Parkir	UPTD PARKIR (KELAS B)		
15	DINAS KOMINFO, SANDI DAN STATISTIK		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 20 TAHUN 2019	TETAP
	UPT RADIO			DIHAPUS
16	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 9 TAHUN 2019	TETAP
	UPTD PENGELOLAAN DANA BERGULIR	UPTD PENGELOLAAN DANA BERGULIR (B)	TURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 9 TAHUN 2019	STRUKTUR BARU NOMENKLATUR BERUBAH
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			TETAP
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 14 TAHUN 2019	TETAP
	UPT Sport Center Dan Pemusatan Latihan Cabang Olahraga Binaan	UPTD PUSAT OLAHRAGA DAN PEMUSATAN LATIHAN CABANG OLAH RAGA BINAAN (A)	PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 14 TAHUN 2019	STRUKTUR TETAP (NOMENKLATUR BERUBAH)
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH			TETAP
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 7 TAHUN 2019	TETAP
	UPTD BALAI BUDAYA	UPTD BALAI BUDAYA (B)	PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 7 TAHUN 2019	STRUKTUR BARU NOMENKLATUR BERUBAH
21	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 34 TAHUN 2019	TETAP
	UPT PASAR MERAK	UPTD PASAR BARU MERAK (KELAS B)	PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 34 TAHUN 2019	STRUKTUR BARU (BERUBAH TIPE)
	UPT PASAR KRANGGOT (PS BARU CILEGON)	UPTD PASAR BARU KRANGGOT (KELAS A)		STRUKTUR TETAP (NOMENKLATUR BERUBAH)
	UPTD PASAR BLOK F DAN PASAR CIGADING	UPTD PASAR BARU BLOK F DAN PASAR CIGADING (KELAS A)		STRUKTUR BARU (NOMENKLATUR BERUBAH)
	UPTD METROLOGI LEGAL	UPTD PELAYANAN METROLOGI LEGAL (KELAS B)		STRUKTUR BARU (BERUBAH TIPE & NOMENKLATUR)
22	SEKRETARIAT DAERAH		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 23 TAHUN 2019	
	Bagian Pemerintahan		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 23 TAHUN 2019	TETAP
	Bagian Hukum dan HAM			TETAP
	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi			TETAP
	Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan			DIHAPUS
	-	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		STRUKTUR BARU (NOMENKLATUR BARU)
	Bagian Perekonomian dan SDA	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		MERGER MENJADI BAG. PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	Bagian Pembangunan dan Sarpraswil			
	-	BAGIAN PENGADAAN BARJAS		STRUKTUR BARU (NOMENKLATUR BARU)
	Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	BAGIAN SOSIAL KEMASYARAKATAN		STRUKTUR TETAP (NOMENKLATUR BERUBAH)
	Bagian Program dan Keuangan	BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN SETDA		STRUKTUR TETAP (NOMENKLATUR BERUBAH)
	Bagian Administrasi Umum	BAGIAN UMUM		STRUKTUR TETAP (NOMENKLATUR BERUBAH)
	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH			TETAP
23	SEKRETARIAT DPRD			
24	KECAMATAN CILEGON			TETAP
	KELURAHAN CIWADUK			TETAP
	KELURAHAN BENDUNGAN			TETAP
	KELURAHAN BAGENDUNG			TETAP
	KELURAHAN KETILENG			TETAP
	KELURAHAN CIWEDUS			TETAP
25	KECAMATAN CIWANDAN			TETAP
	KELURAHAN RANDAKARI			TETAP
	KELURAHAN KEPUH			TETAP
	KELURAHAN GUNUNGSUGH			TETAP
	KELURAHAN BANJARNEGARA			TETAP
	KELURAHAN TEGAL RATU			TETAP
	KELURAHAN KUBANGSARI			TETAP

Lanjutan:

NO	PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI OPD KOTA CILEGON TAHUN 2019			KETERANGAN
	NOMENKLATUR OPD LAMA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 3 TAHUN 2016	NOMENKLATUR OPD/UPTD BARU TAHUN 2019	DASAR HUKUM	
26	KECAMATAN CIBEBER			TETAP
	KELURAHAN KE DALEMAN			TETAP
	KELURAHAN KALITIMBANG			TETAP
	KELURAHAN KARANG ASEM			TETAP
	KELURAHAN CIKERAI			TETAP
	KELURAHAN BULAKAN			TETAP
	KELURAHAN CIBEBER			TETAP
27	KECAMATAN GROGOL			TETAP
	KELURAHAN KOTASARI			TETAP
	KELURAHAN RAWA ARUM			TETAP
	KELURAHAN GEREM			TETAP
	KELURAHAN GROGOL			TETAP
28	KECAMATAN PULOMERAK			TETAP
	KELURAHAN LEBAK GEDE			TETAP
	KELURAHAN TAMAN SARI			TETAP
	KELURAHAN MEKAR SARI			TETAP
	KELURAHAN SURALAYA			TETAP
29	KECAMATAN PURWAKARTA			TETAP
	KELURAHAN RAMANUJU			TETAP
	KELURAHAN KEBONDALEM			TETAP
	KELURAHAN KOTABUMI			TETAP
	KELURAHAN PABEAN			TETAP
	KELURAHAN TEGAL BUNDER			TETAP
	KELURAHAN PURWAKARTA			TETAP
30	KECAMATAN JOMBANG			TETAP
	KELURAHAN JOMBANG WETAN			TETAP
	KELURAHAN MASIGIT			TETAP
	KELURAHAN SUKMAJAYA			TETAP
	KELURAHAN PANGGUNG RAWI			TETAP
	KELURAHAN GEDONG DALEM			TETAP
31	KECAMATAN CITANGKIL			TETAP
	KELURAHAN CITANGKIL			TETAP
	KELURAHAN KEBONSARI			TETAP
	KELURAHAN WARNASARI			TETAP
	KELURAHAN SAMANGRAYA			TETAP
	KELURAHAN LEBAK DENOK			TETAP
	KELURAHAN TAMAN BARU			TETAP
	KELURAHAN DRINGO			TETAP
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 22 TAHUN 2019	STRUKTUR BARU
33	BADAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMER	-		DIHAPUS (PERDA MASIH DIPROVINSI)
34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			TETAP
35	INSPEKTORAT DAERAH			TETAP
36	B A P P E D A			TETAP
37	BPKAD		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 19 TAHUN 2019	TETAP
	UPTD PAJAK WILAYAH I	UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH I (KELAS A)		
	UPTD PAJAK WILAYAH II	UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH II (KELAS A)		
	UPTD PAJAK WILAYAH III	UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH III (KELAS A)		
	UPTD PAJAK WILAYAH IV	UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH IV (KELAS A)		
38	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 12 TAHUN 2019	TETAP
	UPT Data dan Informasi Kepegawainan			UPTD TETAP BERUBAH TIPE (A.) KE TIPE (B)
	SEKRETARIAT KORPRI			TETAP

LKPD ini tidak mencakup entitas :

- Pemerintah Pusat
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD Kota Cilegon

Adapun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cilegon terdiri atas :

- Perseroan Terbatas Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT. PCM)
- Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PT. BPRS)
- Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri (PDAM-CM)

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Cilegon adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan-perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah; diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas atas tata kelola keuangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tujuan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas serta kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon selama periode pelaporan serta dapat memberikan manfaat bagi pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai sumber daya. Adapun secara spesifik penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian antara cara perolehan sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
4. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah beserta hasil-hasil yang telah dicapai;
5. Menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah baik pada saat mengalami kenaikan maupun penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
7. Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;

8. Menyajikan informasi yang relevan terkait hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan yang meliputi : Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Saldo Anggaran Lebih, Pendapatan-LO, Beban, dan Arus Kas. Hal tersebut di atas dapat dilihat dari output laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*), Laporan Finansial (*financial report*), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

*Landasan
Hukum*

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 12);
 20. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 6);
 21. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon;
 22. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon;
 23. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 38 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 108 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 38 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon;
 24. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi Dan Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi Dan Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kota Cilegon;
 25. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;
 26. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;
 27. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019.
-

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I Pendahuluan

Berisi informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Berisi informasi tentang asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta pencapaian target kinerja APBD berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berisi informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

Berisi informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan pos-pos laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Berisi informasi tentang rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah diantaranya: rincian dan penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran, rincian dan penjelasan pos-pos laporan perubahan saldo anggaran lebih, rincian dan penjelasan pos-pos neraca, rincian dan penjelasan pos-pos laporan

operasional, rincian dan penjelasan pos-pos laporan arus kas, rincian dan penjelasan pos-pos laporan perubahan ekuitas, serta pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya. Ditambahkan juga penjelasan terkait perbedaan pengukuran antar pos pada LRA dan LAK.

BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Berisi informasi tentang penjelasan tambahan atas informasi non keuangan serta hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

BAB VII Penutup

Berisi uraian penutup yang berupa kesimpulan akhir atas penyusunan laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

*Ekonomi
Makro*

2.1. EKONOMI MAKRO

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di Kota Cilegon yang berjalan pada periode sebelumnya. Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel-variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBD. Meskipun asumsi dasar tersebut hanya prediksi dalam menghitung postur APBD, namun dalam kondisi tertentu, asumsi dasar tersebut dapat menjadi target yang harus dicapai. Terkait dengan hal tersebut, menjaga stabilitas ekonomi makro menjadi keharusan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD. APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara makro yang terjadi pada Kota Cilegon selama kurun waktu Tahun 2019.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional, kebijakan ekonomi yang diterapkan di Kota Cilegon cenderung diarahkan untuk menunjang masuknya investasi dengan tetap menjaga tingkat konsumsi. Pengendalian inflasi adalah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Pada sisi pemerintah, belanja daerah diarahkan pada kegiatan maupun sektor yang memiliki tingkat produktifitas tinggi seperti sektor infrastruktur, perdagangan, serta sektor yang berakselerasi tinggi yaitu industri.

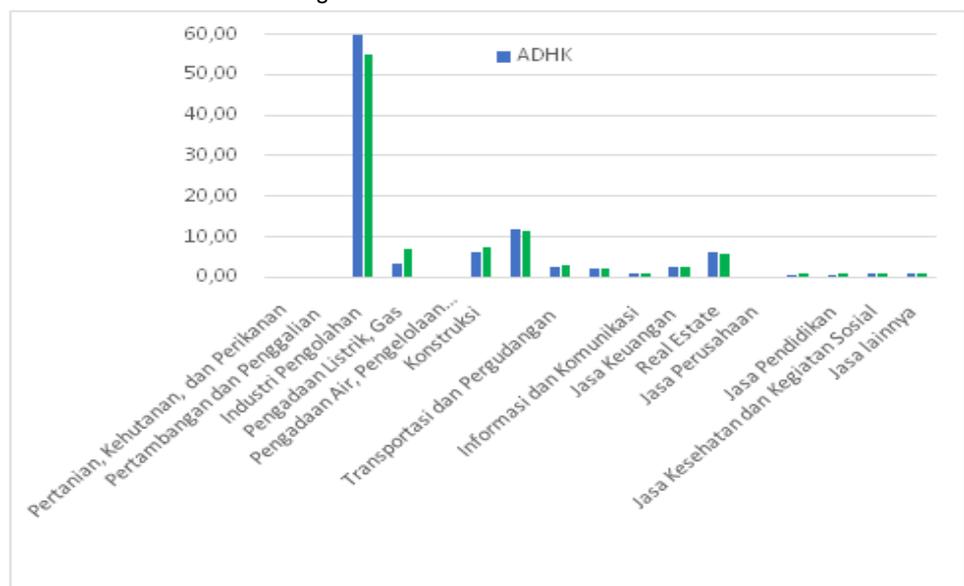
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya adalah cerminan dari kebijakan riil pemerintah dalam mengakomodir kehendak publik, dalam hal ini APBD mempunyai fungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD Kota Cilegon Tahun 2019 dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu : (1) indikator-indikator ekonomi yang ditetapkan sebagai asumsi dasar ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran; (2) langkah-langkah kebijakan (*policy mesures*) dan administratif (*administrative measure*) yang ditempuh baik dari sisi pendapatan,

belanja, maupun pembiayaan anggaran daerah; (3) berbagai peraturan dan regulasi serta keputusan hukum yang berlaku dan berbagai langkah yang menjadi arahan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Banten baik di bidang ekonomi maupun non ekonomi. Penjelasan mengenai beberapa asumsi dasar ekonomi makro di Kota Cilegon secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

2.1.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah Informasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada pendekatan produksi, Cilegon sebagai kota industri tercermin dari dominasi industri pengolahan pada struktur PDRB Kota Cilegon. Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan rata-rata dominasi sektor industri pengolahan berada diatas 61 persen, sedangkan pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 58 persen pada rentang tahun 2016-2019. Perbedaan besaran kontribusi antara ADHK dan ADHB disebabkan adanya faktor inflasi. Status Kota Cilegon sebagai daerah Industri yang relatif besar khususnya bagi petrokimia dan logam, perekonomiannya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional maupun global.

Gambar 2.1. Perbandingan Kontribusi Sektor PDRB antara ADHK dan ADHB

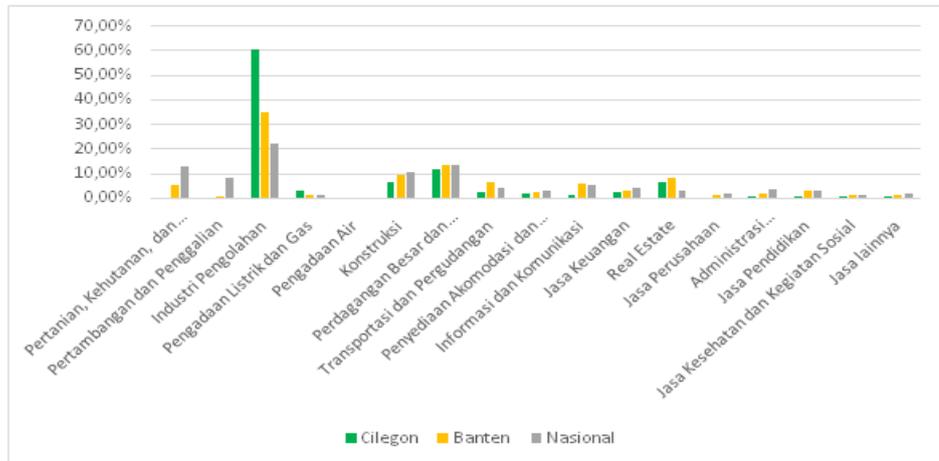


Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku dari kelompok lapangan usaha yang terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, sekunder dan kelompok lapangan usaha tersier. Kelompok lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian. Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Konstruksi.

Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

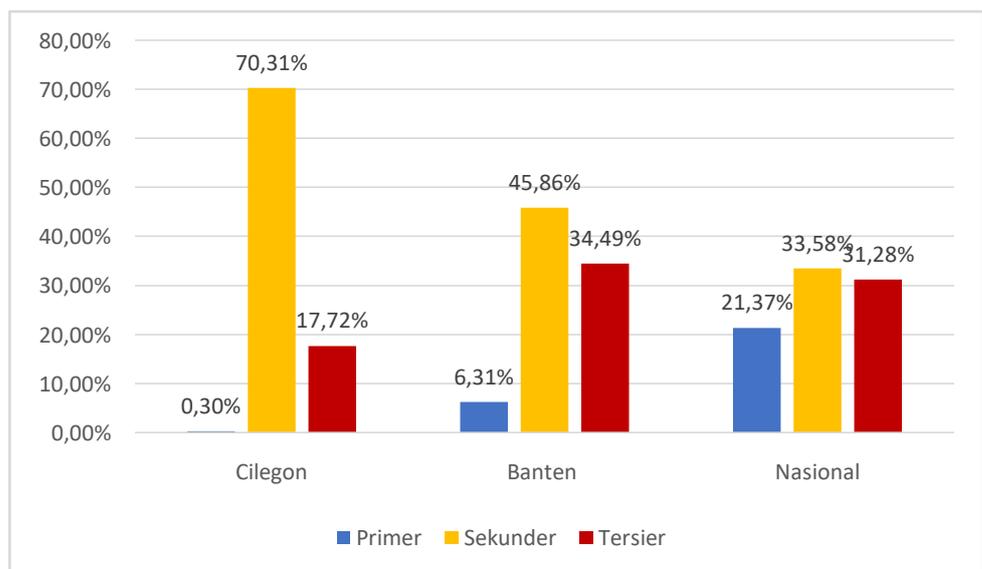
Selama periode 2014-2019, struktur ekonomi masyarakat Banten telah bergeser dari kelompok lapangan usaha sekunder kelompok lapangan usaha tersier yang terlihat dari besarnya kenaikan/penurunan. Peranan masing-masing kelompok lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Cilegon. Pada tahun 2019, kelompok lapangan usaha tersier memberikan sumbangan sebesar 30,34 persen yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 27,82 persen. Kelompok lapangan usaha primer dan sekunder memberikan sumbangan masing-masing sebesar 0,33 persen dan 69,33 persen. Kelompok lapangan usaha primer dan sekunder ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2014 yang masing-masing sebesar 0,34 persen dan 71,84 persen.

Jika dibandingkan dengan Banten dan Nasional, karakteristik PDRB Produksi Kota Cilegon relative serupa dengan Banten dan Nasional yang di dominasi sektor Industri Pengolahan, dan dominasi kedua oleh Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Namun pada skala nasional, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki nilai kontribusi yang hampir menyamai dengan sektor perdagangan dengan angka diatas 13 persen dan menempati urutan ketiga sebagai kontributor dalam PDB nasional.



Gambar 2.2. Perbandingan Kontribusi Sektor Antara Cilegon, Banten dan Nasional

Sedangkan berdasarkan kategori sektor, terlihat jelas bahwa Cilegon telah meninggalkan sektor primer. Sementara itu, Banten yang juga bertindak sebagai salah satu lumbung padi nasional pada beberapa wilayah, sektor Primer masih menguasai sekitar 6 persen. Kontribusi sektor pertanian yang semakin menurun di Banten disebabkan karena adanya alih fungsi lahan sebagai dampak dibukanya keran Investasi di Banten.



Gambar 2.3. Perbandingan Kontribusi per Kategori Sektor antara Cilegon, banten dan Nasional

Namun secara nasional, share antara sektor primer, sekunder dan tersier relative berimbang. Hal ini juga karena komoditi dan juga hasil pertambangan masih menjadi primadona dalam aktivitas perdagangan Indonesia sehingga kontribusinya relatif besar dalam PDB.

Jika melihat komponen pengeluaran, di proyeksikan pada tahun 2019 PDRB Kota Cilegon di dominasi oleh Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar 44,49 persen secara rata-rata, Konsumsi Rumah tangga sebesar 18,91 persen secara rata-rata dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah hanya sebesar 1,49 persen secara rata rata.

Tabel 2.1. Kontribusi PDRB Berdasarkan Jenis Pengeluaran Tahun 2016-2019

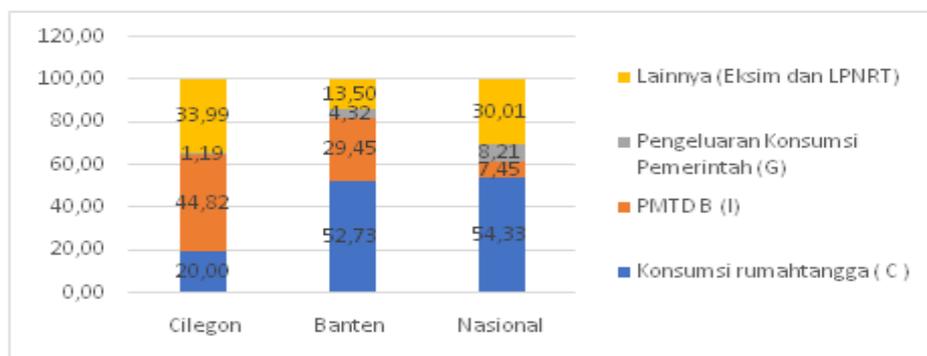
Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018*	2019**
Konsumsi Rumah tangga	19,09	18,88	18,87	18,91
Konsumsi LNPRT	0,06	0,06	0,06	0,06
Konsumsi Pemerintah	1,35	1,48	1,40	1,49
PMTB	44,65	42,07	42,82	44,49
Perubahan Inventori	0,02	0,03	0,03	-0,18
Ekspor Luar Negeri	230,68	236,79	217,75	207,91
Impor Luar Negeri	195,85	199,31	180,94	172,66
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

***) Proyeksi Bappeda Kota Cilegon

Dalam hal ini, perekonomian kota cilegon bergerak secara utama melalui komponen Investasi, yang mana situasi tersebut sesuai dengan kondisi kota cilegon sebagai kota Industri. Komponen terbesar kedua adalah terkait aktivitas ekspor impor barang dan jasa dan ketiga adalah komponen konsumsi rumah tangga. Sementara itu, pengeluaran konsumsi pemerintah (Government Expenditure) hanya berkontribusi sekitar 1,49 persen dalam perekonomian Kota Cilegon.

Karakteristik PDRB Pengeluaran Kota Cilegon sangat berbeda dengan karakteristik Banten dan Nasional, dimana kontributor utama dalam perekonomian banten dan nasional adalah komponen konsumsi rumah tangga dengan proporsi masing masing diatas 50 persen. Perbandingannya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.4. Perbandingan Kontribusi Jenis Pengeluaran antara Cilegon, Banten dan Nasional

Penciptaan iklim investasi yang baik menjadi sangat mutlak di Kota Cilegon, karena komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB - Investasi) adalah yang dominan dan konsumsi masyarakat bukan menjadi faktor utama untuk peningkatan perekonomian. Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa kontributor pertumbuhan ekonomi pada PDRB pengeluaran didominasi pada PMTDB, sementara itu Aktivitas Ekspor Impor sebagai ikutan dari aktivitas Industri menempati posisi kedua dengan sumbangsih hampir mencapai 2 persen. Artinya hampir mencapai 4 persen LPE Kota Cilegon adalah sumbangsih dari aktivitas Industri.

Tabel 2.2. Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Jenis Pengeluaran Tahun 2016-2019

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018*	2019**
Konsumsi Rumah tangga	4,81	5,27	5,61	5,44
Konsumsi LNPRT	4,42	5,31	5,51	4,73
Konsumsi Pemerintah	4,56	7,14	1,46	8,11
PMTB	3,76	-0,42	6,58	7,80
Perubahan Inventori	-38,60	-42,24	-46,21	6,53
Ekspor Luar Negeri	1,39	0,02	-1,48	4,32
Impor Luar Negeri	0,52	0,56	0,62	4,45
Total PDRB	5,00	5,47	5,83	5,65

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

**) Proyeksi Bappeda Kota Cilegon

2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Cilegon mengalami percepatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB yang mantap dan berkualitas akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, historis pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.3. Peningkatan Nilai PDRB Kota Cilegon Tahun 2016-2019

URAIAN	2016	2017	2018*	2019**
PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	81.953,57	88.871,49	96.794,98	104.248,82
PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	62.981,05	66.444,53	70.409,19	74.385.223,50
LPE	5,00%	5,47%	5,83%	5,65%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

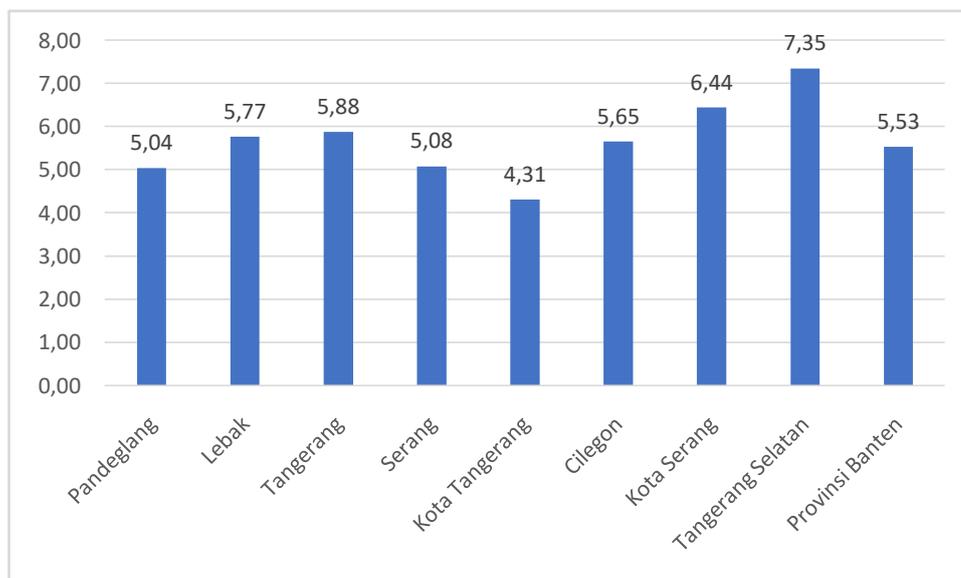
Nilai PDRB Kota Cilegon baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan setiap tahunnya mengalami peningkatan secara nilai. Namun pada tahun 2019 diproyeksikan mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Struktur ekonomi telah begeser dari kelompok lapangan usaha sekunder ke kelompok lapangan usaha tersier yang terlihat dari besarnya kenaikan/penurunan peranan masing-masing kelompok lapangan usaha.

Perekonomian provinsi banten dihasilkan dari aktivitas ekonomi di wilayah utara (Kabupaten serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota serang dan Kota Tangerang selatan) yang tertumpu pada sektor sekunder dan tersier, sedangkan kurang lebih 12,0 persen sisanya dihasilkan oleh aktivitas ekonomi di wilayah selatan (Kabupaten pandeglang dan lebak) yang bertumpu pada sektor primer.

Ketidakmerataan kondisi perekonomian wilayah, dapat diklasifikasikan dalam daerah sangat berkembang (Kabupaten Tangerang (termasuk kota tangsel), dan Kota Tangerang), daerah berkembang (kabupaten serang, dan Kota cilegon), serta daerah sedang berkembang (Kota serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang).

Secara spasial, kondisi ekonomi Banten lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang dan Kota

Cilegon. Hal ini karena share atau sumbangan keempatnya dalam struktur perekonomian Banten sangat besar. Lebih-lebih, ekspor produk industri pengolahan Banten memang banyak yang berasal dari daerah tersebut. Khusus tahun 2019, akselerasi atau percepatan pertumbuhan ekonomi yang dialami Banten, disebabkan oleh semakin cepatnya pertumbuhan ekonomi pada seluruh kabupaten/ kota. Kota Tangerang Selatan menjadi daerah tercepat pertumbuhannya sebesar 7,35 persen, sedangkan yang paling lambat adalah Kota Tangerang sebesar 4,31 persen. Sementara Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon masing-masing tumbuh mencapai 7,35 persen, 6,44 persen, 5,88 persen dan 5,65 persen.



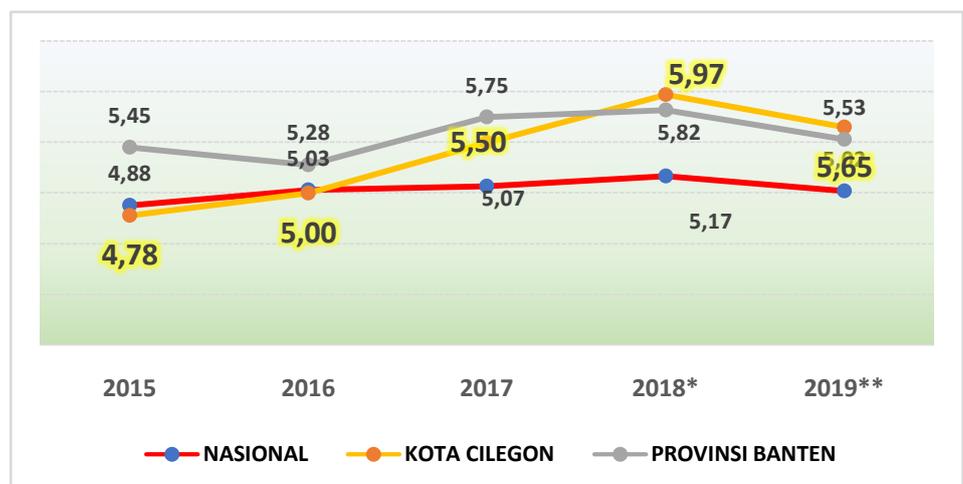
Gambar 2.6. Perbandingan LPE Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2019

Sementara itu di sisi penawaran, lapangan usaha industri pengolahan masih terus menjadi penopang utama perekonomian Provinsi Banten seiring dengan ekspektasi membaiknya kinerja penjualan dari sisi domestik dan ekspor. Telah beroperasinya pabrik synthetic rubber dan pabrik pelat baja otomotif pada tahun ini dan realisasi rencana pembangunan pabrik lainnya yang bersifat multiyears akan mendorong peningkatan kapasitas produksi industri pengolahan sehingga ke depan diharapkan semakin berkontribusi terhadap tumbuhnya perekonomian Provinsi Banten.

Perbedaan antara PDRB ADHB dan ADHK menggambarkan adanya kenaikan harga selama kurun waktu tersebut. Dengan menggunakan pendekatan PDRB deflator dapat dilihat inflasi dari seluruh aktivitas ekonomi sejak tahun dasar hingga tahun PDRB terakhir.

Sementara itu, jika melihat perekonomian Kota Cilegon dibandingkan Banten dan Nasional. Kontribusi perekonomian Cilegon secara rata-rata berkisar pada porsi 16 persen terhadap banten dan 0,66 persen terhadap nasional. Pada tahun 2019, perekonomian Kota Cilegon mampu tumbuh sebesar 5,65 persen dan banten secara umum mampu tumbuh sekitar 5,53 persen.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, terdapat 10 Proyek strategis nasional yang berada di Provinsi Banten. Tentunya hal ini adalah peluang bagi Provinsi Banten untuk mendapatkan manfaat proyek strategis nasional di dalam pembangunan Ekonomi Daerah. Dampak adanya proyek strategis nasional yang mayoritas merupakan infrastruktur, telah menunjukkan kinerja bagi perekonomian Banten, dalam hal ini turut pula mendongkrak perekonomian Kota Cilegon mengingat terdapatnya pabrik Baja dan Semen yang turut mendukung percepatan Proyek Strategis Nasional.



Gambar 2.7. Perbandingan Realisasi LPE antara Cilegon, Banten dan Nasional Tahun 2015-2019

Perekonomian Banten meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02% (yoy). Di level regional Jawa, pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan III 2019 berada di posisi keempat diantara provinsi Jawa lainnya. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dari sisi permintaan terutama didorong oleh lebih tingginya kinerja Pembentukan Modal tetap Bruto atau investasi. Sementara di sisi penawaran, pertumbuhan ditopang oleh meningkatnya kinerja lapangan usaha (LU) industri pengolahan, konstruksi, Real Estate, serta membaiknya LU Transportasi.

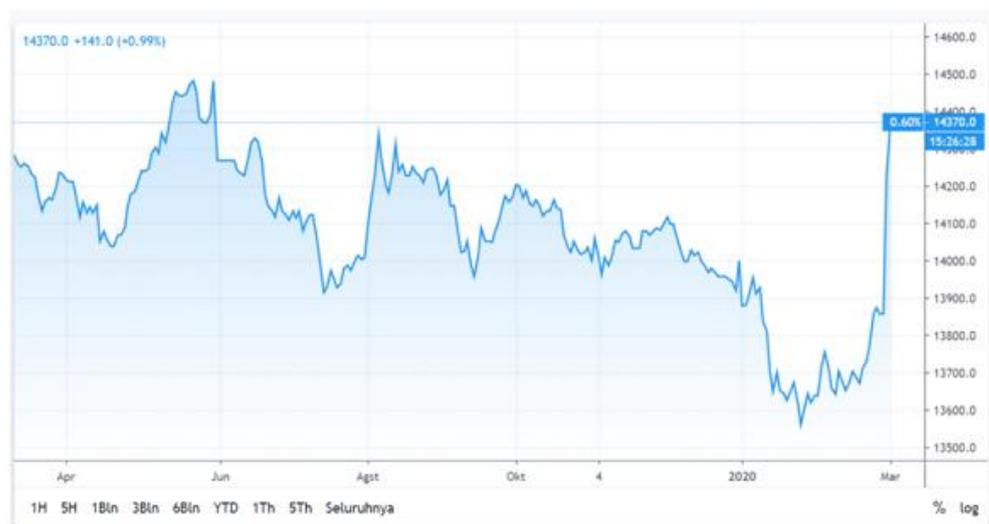
Sejalan dengan perekonomian dunia dan domestik yang tidak terlalu optimis, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tahun 2019 tumbuh melambat dibandingkan tahun 2018. Pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh kinerja konsumsi baik rumah tangga maupun Pemerintah serta investasi. Berdasarkan lapangan usaha (LU), pertumbuhan terutama didorong oleh LU utama antara lain industri pengolahan, LU konstruksi, LU perdagangan, dan LU Real Estate. Sementara itu, beberapa LU lainnya diperkirakan akan tumbuh lebih rendah.

Semakin membaiknya situasi perekonomian di tahun 2019 dapat terlihat dari laju pertumbuhan persektor pada PDRB Kota Cilegon, dimana pada tahun tersebut tidak ada sektor yang mengalami pertumbuhan negative seperti tahun sebelumnya (2015-2016).



Gambar 2.8. Perbandingan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2019

Tentunya pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan terus terjadi di Indonesia secara umum dan juga Kota Cilegon secara khusus. Karena dengan situasi banyaknya Investasi yang masuk mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, namun diharapkan juga pertumbuhan tersebut turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Cilegon. Dalam perjalanannya di tahun 2019, ada beberapa peristiwa yang dapat menekan perekonomian nasional diantaranya terdepresiasinya nilai rupiah sepanjang 2019.



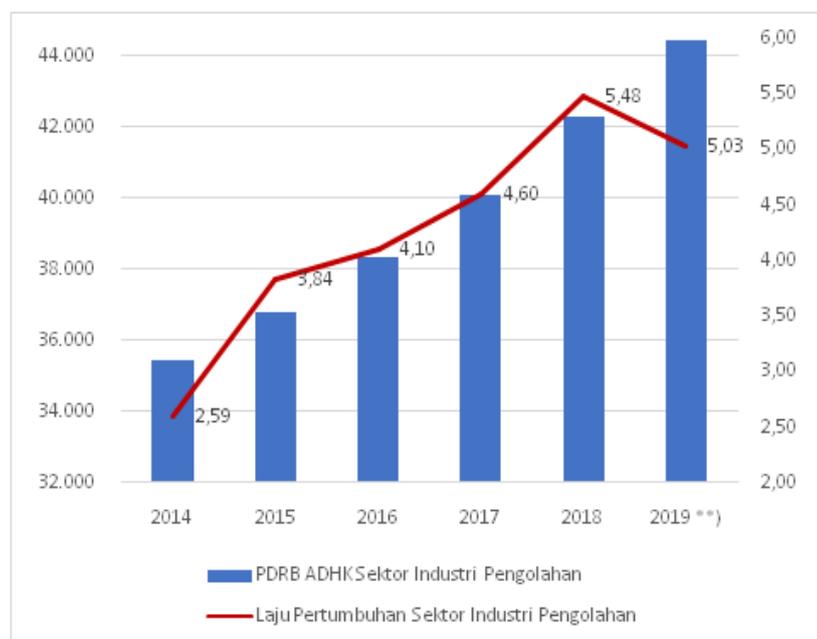
Gambar 2.9. Fluktuasi Nilai Rupiah Tahun 2019

Pelemahan Rupiah tentunya akan memberikan tekanan terhadap industri terkait aktivitas produksi maupun situasi pasar karena beberapa industri di Kota Cilegon masih mengandalkan bahan baku impor, namun disisi lain pelemahan rupiah juga secara relative akan meningkatkan kemampuan bayar dari pembeli asing terhadap produk dalam negeri sehingga dimungkinkan produktivitas industri tetap terjaga.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, perekonomian Kota Cilegon sudah memperlihatkan akselerasi yang baik seiring dengan mulai efektifnya beberapa paket kebijakan ekonomi yang terkait investasi. Disamping itu juga, beberapa proyek strategis nasional bertempat di Banten yang mana turut meningkatkan produktivitas dari industri semen dan baja.

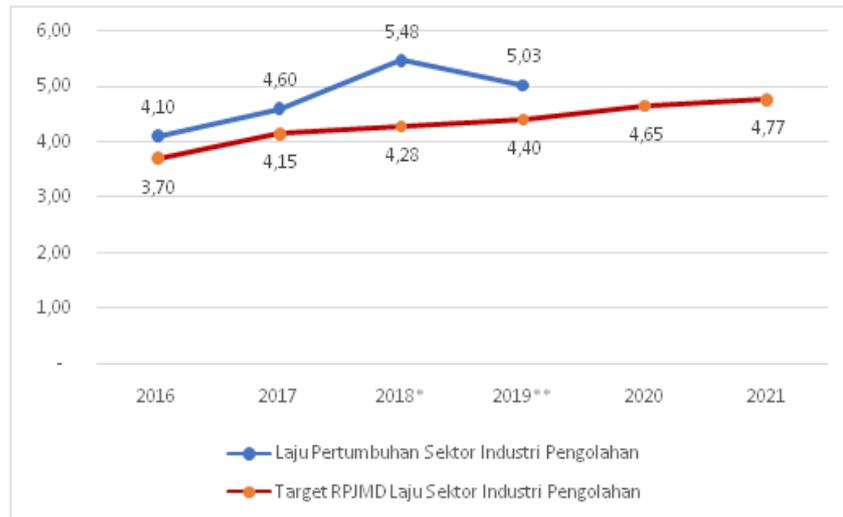
Industri Pengolahan di Cilegon memegang peranan dalam laju pertumbuhan ekonomi mencapai 60,77% secara rata-rata pada perekonomian daerah, dan memegang 27,19% terhadap perekonomian Banten dan bahkan secara sub sektor, industri logam dasar memegang peranan sebesar 90.64 persen.

Pada tahun 2019 Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan mencapai 5,03% yang mana lajunya menurun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 5,48%. Hal ini sebagai dampak dari industri baja yang mengalami penurunan serta industri kimia yang produksinya sedikit menurun di tahun 2019 karena lebih fokus kepada perluasan usaha.



Gambar 2.10. Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2014-2019

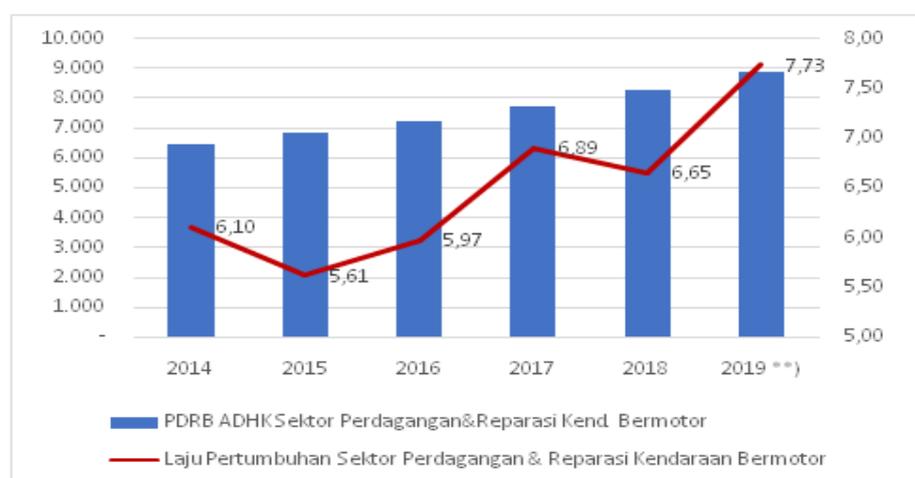
Disamping itu, melihat perkembangan laju pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan pencapaian Indikator Sasaran ini berstatus *on the track* jika dibandingkan dengan target RPJMD Kota Cilegon, sebagai berikut :



Gambar 2.11. Perbandingan Capaian Realisasi Laju PDRB Industri Pengolahan terhadap target RPJMD 2010-2021

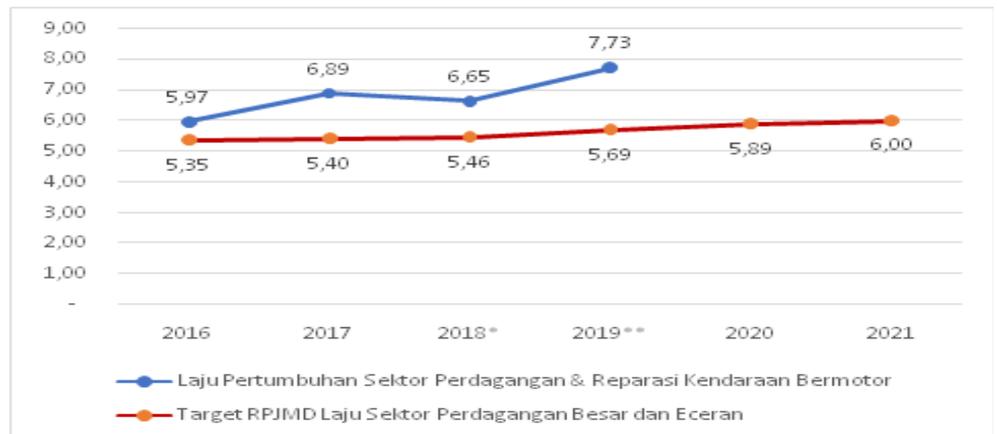
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor yang memiliki *share* tertinggi kedua dalam perekonomian Kota Cilegon. Secara rata-rata, kontribusi sektor tersebut sekitar 11 persen.

Pada tahun 2019, laju pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah sebesar 7,73% meningkat sebesar 0,08% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 6,65%.



Gambar 2.12. Perkembangan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2014-2019

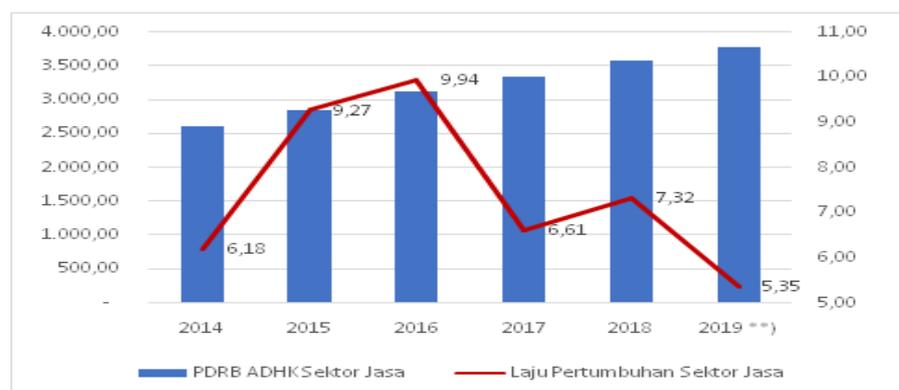
Namun demikian, pencapaian laju pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di tahun 2019 diproyeksikan melampaui target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD.



Gambar 2.13. Perbandingan Capaian Realisasi Laju PDRB Perdagangan Besar dan Eceran terhadap target RPJMD 2016-2021

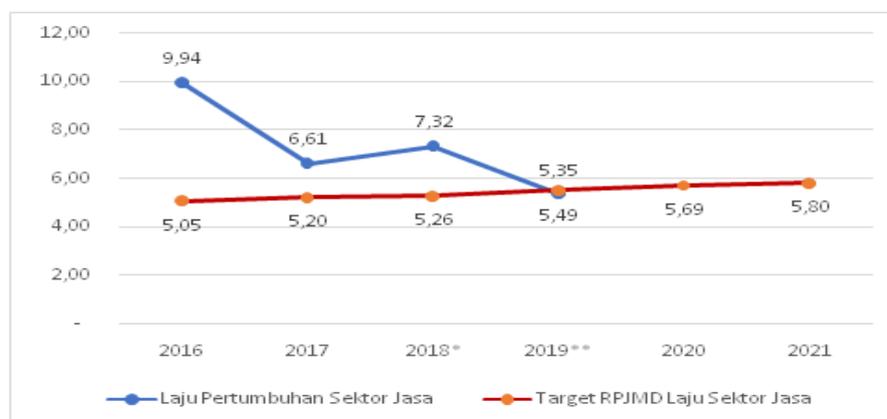
Sektor Jasa merupakan akumulasi dari 5 sektor, yaitu; Jasa Keuangan, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya. Sektor tersebut dalam konsep struktur ekonomi merupakan kategori yang digolongkan menjadi daerah yang maju karena terjadi pergeseran dari sektor sekunder ke tersier. Secara rata-rata kontribusi sektor jasa mencapai 5 persen di dalam perekonomian Kota Cilegon.

Pada tahun 2019, sektor jasa mengalami pertumbuhan yang positif, namun laju pertumbuhannya lebih rendah dari tahun 2018. Laju pertumbuhan sektor ini di tahun 2019 mencapai 5,35%, mengalami penurunan sebesar 1,97% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 7,32%.



Gambar 2.14. Perkembangan PDRB Sektor Jasa Tahun 2014-2019

Namun demikian, pencapaian laju pertumbuhan sektor jasa di tahun 2019 diproyeksikan melampaui target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD.



Gambar 2.15. Perbandingan Capaian Realisasi Laju PDRB Jasa terhadap target RPJMD 2016-2021

2.1.3 INFLASI

Inflasi adalah indikator yang menunjukkan fluktuasi harga barang dan jasa di masyarakat. Inflasi mengukur perubahan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Angka inflasi yang positif mengindikasikan kenaikan harga barang dan jasa. Tingkat inflasi yang menurun dan tetap positif menunjukkan kenaikan harga lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Tingkat inflasi biasanya diukur dari persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK memberikan informasi perubahan harga barang dan jasa yang dibeli atau dibelanjakan oleh konsumen dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 415 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2012 di Kota Serang, Tangerang dan Cilegon baik secara mingguan, dua mingguan maupun bulanan, diketahui pada bulan Desember 2019 ini sebanyak 221 komoditas mengalami perubahan harga. Rincian lengkapnya adalah 146 komoditas mengalami kenaikan harga dan sisanya sebanyak 75 komoditas mengalami penurunan harga.

Hal tersebut diatas menyebabkan inflasi pada Desember 2019 sebesar 0,45 persen, dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 146,63 pada bulan Desember. Kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi Kota Cilegon sebagai berikut: kelompok bahan makanan memberikan andil inflasi sebesar 1,27 persen, kelompok sandang sebesar 0,58 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,54 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,17 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,13 persen, kelompok Pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,01, dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,03 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi selama bulan Desember 2019 antara lain komoditas bawang merah, telur ayam ras, tomat buah, labu siam/ jipang, melon dan buncis. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga paling banyak antara lain adalah cabe rawit, VCD/DVD player, telepon seluler, kamera, cabe merah dan kentang.

Tabel 2.4. IHK, Inflasi, Laju Inflasi Tahun Kalender Kota Cilegon Menurut Kelompok Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2019

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2019	Inflasi Desember 2019 *)	Laju Inflasi Tahun 2019 **)
(1)	(4)	(5)	(6)
U M U M	146,63	0,45	3,54
1, Bahan Makanan	163,63	1,27	5,51
2, Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	152,38	0,17	2,30
3, Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	139,96	0,13	1,60
4, Sandang	131,66	0,58	5,27
5, Kesehatan	134,96	0,54	3,62
6, Pendidikan, rekreasi dan olahraga	160,74	0,01	4,43
7, Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan	126,43	-0,03	3,12

Sumber : BRS Badan Pusat Statistik Kota Cilegon

Ket:*) Persentase perubahan IHK Bulan Desember 2019 terhadap IHK bulan sebelumnya

**) Persentase perubahan IHK Bulan Desember 2019 terhadap IHK Bulan Desember 2018

Sementara itu, pada bulan Desember 2019 perkembangan harga barang dan jasa (inflasi) di tiga kota IHK di Banten adalah sebagai berikut : Kota Serang mengalami inflasi 0,41 persen, Kota Tangerang mengalami inflasi 0,13 persen dan Kota Cilegon mengalami inflasi 0,45 persen.

Tabel 2.5.Sumbangan kelompok pengeluaran inflasi kota serang, tangerang dan cilegon bulan Desember 2019 (%)

	Serang			Tangerang			Cilegon		
	IHK Desember 2019	Inflasi Desember 2019 *)	Laju Inflasi Tahun 2019 **)	IHK Desember 2019	Inflasi Desember 2019 *)	Laju Inflasi Tahun 2019 **)	IHK Desember 2019	Inflasi Desember 2019 *)	Laju Inflasi Tahun 2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
UMUM	149,63	0,41	3,06	147,82	0,13	3,31	146,63	0,45	3,54
1. Bahan Makanan	162,04	1,58	6,23	160,37	0,34	5,58	163,63	1,27	5,51
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	172,10	0,26	2,81	162,72	0,13	3,29	152,38	0,17	2,30
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	141,10	0,01	1,36	139,88	0,12	4,62	139,96	0,13	1,60
4. Sandang	125,72	-0,02	5,50	123,44	-0,05	4,30	131,66	0,58	5,27
5. Kesehatan	142,10	0,09	3,78	148,53	-0,13	0,26	134,96	0,54	3,62
6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga	139,59	0,00	2,20	142,99	-0,43	1,15	160,74	0,01	4,43
7. Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan	134,55	0,01	0,50	139,04	0,31	0,78	126,43	-0,03	3,12

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Ket:*) Persentase perubahan IHK Bulan Desember 2019 terhadap IHK bulansebelumnya

**) Persentase perubahan IHK Bulan Desember 2019 terhadap IHK Bulan Desember 2018

Tabel 2.6.Sumbangan kelompok pengeluaran terhadap inflasi Kota Serang, Tangerang dan Cilegon bulan Desember 2019 (%)

Kelompok Pengeluaran	Serang	Tangerang	Cilegon
(1)	(2)	(3)	(4)
UMUM	0,41	0,13	0,45
1. Bahan Makanan	0,34	0,07	0,34
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	0,06	0,03	0,04
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	0,00	0,03	0,02
4. Sandang	0,00	0,00	0,03
5. Kesehatan	0,01	-0,01	0,02
6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0,00	-0,04	0,00
7. Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan	0,00	0,05	0,00

Pada bulan Desember 2019, 26 Kota IHK yang ada di pulau Jawa mengalami inflasi. Tiga kota yang mengalami inflasi tertinggi terjadi di Kota Surabaya yaitu sebesar 0,60 persen disusul kemudian Kota Jember yaitu sebesar 0,54 persen dan Kota Purwokerto sebesar 0,51 persen. Jika dibandingkan dengan 26 kota inflasi di pulau Jawa, inflasi Kota Cilegon di provinsi Banten berada pada peringkat ke 10 (sepuluh). Sementara untuk Kota Serang berada pada peringkat ke 13 (tiga belas) dan Kota Tangerang berada pada peringkat ke 26 (dua puluh enam).

Laju Inflasi tahun kalender dan Inflasi year on year (YoY) tertinggi tercatat di Kota Bekasi sebesar 4,28 persen, Kota berikutnya yang menempati urutan tertinggi adalah Kota Cilegon sebesar 3,54 persen, Tangerang sebesar 3,31 persen, Kota Depok sebesar 3,29 persen dan DKI Jakarta sebesar 3,23 persen. Sedangkan tiga kota di 26 kota IHK yang ada di pulau Jawa dengan laju inflasi tahun kalender dan inflasi year on year (YoY) terendah terjadi di kota Tasikmalaya sebesar 1,72 persen, Kota Kediri sebesar 1,83 persen dan Kota Malang sebesar 1,93 persen.

Inflasi year on year (YoY) tiga kota IHK diprovinsi Banten dibandingkan dengan 26 Kota IHK dipulau Jawa adalah peringkat ke2 (dua) untuk Kota Cilegon, peringkat ke 3 (tiga) untuk Kota Tangerang dan peringkat ke 6 (enam) untuk Kota Serang.

2.2. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan daerah dan efektivitas alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut, secara tidak langsung berimplikasi terhadap pembenahan berbagai instrumen yang ada, baik mengenai struktur organisasi, sistem, prosedur maupun metode pengelolaan keuangan daerah, baik dalam pembagian kewenangan maupun penciptaan mekanisme kerja yang harmonis diantara satuan kerja pengelola keuangan daerah dan satuan kerja pengguna anggaran.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif dengan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan kemampuan potensi daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi titik sentral otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas,

nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang dapat menjamin seluruh penerimaan daerah dapat terhimpun. Pengelolaan keuangan daerah tercermin pada APBD setiap tahun yang secara rinci akan dijelaskan dalam bentuk rekapitulasi APBD Tahun 2019 yang memuat pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pengelolaan pembiayaan. Adapun Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 meliputi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2.2.1. PENDAPATAN DAERAH

Di bidang pendapatan, Pemerintah Kota Cilegon terus berupaya untuk mengoptimalkan segenap sumberdaya yang dimiliki guna peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Upaya tersebut membutuhkan sumber daya yang memadai baik dilihat dari kualitas SDM, sistem yang akuntabel dan proses legal audit terhadap wajib pajak maupun wajib retribusi.

Optimalisasi pendapatan daerah terus dilakukan, dengan tetap memperhatikan efektifitas pelaksanaan serta kondisi perkembangan perekonomian, potensi yang belum tergali dan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Potensi yang ada dalam pengumpulan pendapatan daerah diyakini masih banyak yang belum tergali. Dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam hal penyediaan anggaran maka penggalian potensi tersebut juga harus mendapatkan dukungan dari seluruh *stakeholder* terkait dan dibingkai dalam sistem dan tata kelola yang baik.

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon dalam mencapai target pendapatan daerah adalah dengan melaksanakan beberapa langkah kebijakan yang lebih konkrit melalui *law enforcement* dengan melibatkan seluruh komponen dalam pengelolaan keuangan daerah dengan tetap tidak memberatkan pada masyarakat dan dunia usaha guna menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah, sehingga mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju

inflasi daerah.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon yang tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Cilegon 5 tahun, kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah melalui perbaikan system dan prosedur serta perbaikan administrasi;
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek/subjek, peningkatan pengawasan dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Peninjauan kembali Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak sesuai.

Definisi Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Adapun jenis Pendapatan sebagai tertuang dalam Pasal 25 dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun kelompok pendapatan Dana Perimbangan dibagi menurut jenis Pendapatan terdiri dari :

- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Adapun kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibagi menurut jenis Pendapatan terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- b. Dana Insentif Daerah (DID)
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

2.2.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Asli Daerah

A. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Hasil Penerimaan Pendapatan Asli Daerah diakui belum memadai untuk menunjang kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang setiap tahun cenderung meningkat, bila dibandingkan dengan komposisi pendanaan yang teralokasikan pada struktur APBD, Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya bagi Pemerintah Kota Cilegon, sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dari Dana Perimbangan/Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Dalam banyak hal, Dana Perimbangan/Dana Transfer dari Pusatpun tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan untuk pembangunan daerah yang memerlukan dukungan dana yang besar. Oleh karena itu, pemberian kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat dijadikan rujukan sebagai dasar dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah untuk kemandairian dalam menggali pendapatan asli daerah.

Intensifikasi Pajak daerah

A.1 Intensifikasi Pajak Daerah

Pelaksanaan intensifikasi pajak daerah dilakukan terhadap objek pajak yang sudah menjadi wajib pajak daerah. dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Hotel Pelaksanaan intensifikasi dari pajak hotel dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak hotel.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak hotel.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak hotel yang menunggak.
 - Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak hotel.

- Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
2. Pajak Restoran Pelaksanaan intensifikasi dari pajak restoran dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak restoran.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak restoran.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak restoran yang menunggak.
 - Melakukan pemasangan tapping box pada beberapa restoran /rumah makan.
 - Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak restoran.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
 3. Pajak Hiburan Pelaksanaan intensifikasi dari pajak Hiburan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak hiburan.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak hiburan.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak hiburan yang menunggak.
 - Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak hiburan.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
 4. Pajak Reklame membentuk tim untuk melakukan pendataan dan konfirmasi reklame yang masih terpasang namun belum membayar pajak reklame. Tim juga melakukan pengukuran langsung terhadap media reklame yang terpasang, serta memberikan teguran kepada wajib pajak yang belum membayar pajak reklame.
 5. Pajak Penerangan Jalan Pelaksanaan intensifikasi dari pajak penerangan jalan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak penerangan jalan.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak penerangan jalan.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam
-

- melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pelaksanaan intensifikasi dari pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak mineral bukan logam dan batuan yang menunggak.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
 7. Pajak Parkir, Pelaksanaan intensifikasi dari pajak Parkir dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak parkir.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak parkir.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak parkir yang menunggak.
 - Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak parkir.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
 8. Pajak Air Tanah, Pelaksanaan intensifikasi dari pajak Air Tanah dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu:
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak Air Tanah.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak Air Tanah.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak Air Tanah yang menunggak.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
 9. BPHTB, melakukan pemeriksaan pajak BPHTB pada perusahaan-perusahaan yang berpotensi mengalami peralihan kepemilikan hak.
 10. PBB, Pelaksanaan intensifikasi dari pajak bumi dan bangunan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Melakukan penagihan aktif pada wajib-wajib pajak yang menunggak
-

- Melakukan penilaian individual objek subjek PBB di wilayah Kota Cilegon
- Melakukan pendataan dan pemutakhiran masal PBB.
- Melakukan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak secara langsung.
- Memberikan penghargaan pada wajib pajak yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo melalui kegiatan bulan panutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Melaksanakan program yang menarik, seperti program penghapusan denda pajak PBB tahun tertentu.
- Mempermudah akses/fasilitas pembayaran pajak PBB, seperti Melakukan pelayanan PBB keliling di tingkat Kelurahan, pembayaran sistem on-line, pembayaran melalui merchant- merchant yang ditunjuk dan lain sebagainya.

Intensifikasi
Retribusi
daerah

A.2 Intensifikasi Retribusi Daerah

Pelaksanaan Intensifikasi dalam penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah secara umum diantaranya :

- Terus melaksanakan sosialisasi regulasi Retribusi Daerah sehingga masyarakat dan dunia usaha dapat memahami secara baik dan terdorong untuk memenuhi kewajiban membayar kewajibannya.
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pada OPD pengelola Retribusi Daerah untuk mendorong peningkatan pelayanan dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.
- Meningkatkan koordinasi antara OPD guna mengintegrasikan semua unsur kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan Retribusi Daerah
- Mengurangi pemahaman wajib retribusi atas rendahnya kesadaran kewajiban membayar retribusi dan mengurangi keterlambatan atas pelaporan pembayaran wajib retribusi.
- Adapun rincian intensifikasi yang dilakukan per objek retribusi daerah diantaranya sebagai berikut :

Intensifikasi
Retribusi
Jasa Umum

A.2.1 Intensifikasi Retribusi Jasa Umum

Intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon khususnya pada sektor Retribusi Jasa Umum meliputi :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan khususnya pada UPTD Puskesmas sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan secara baik dan

- optimal, melakukan peningkatan SDM khususnya bagi tenaga medis UPTD Kesehatan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan seminar, sehingga mampu memberikan pelayanan sekaligus tindakan bagi pasien, dan melaksanakan akreditasi puskesmas agar pembinaan peningkatan mutu dan kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program serta penetapan manajemen resiko.
2. Pelaksanaan Intensifikasi dalam hal pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan yang telah dilaksanakan dengan mengingatkan para petugas kolektor secara rutin untuk menjemput bola dalam penagihan retribusi kepada wajib retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 3. Pelaksanaan Intensifikasi dalam hal pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Dinas Perhubungan berupaya untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana terkait pelayanan parkir, dan monitoring juru parkir dan lokasi parkir.
 4. Upaya intensifikasi terkait pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar baik yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian maupun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian meliputi :
 - a. Dalam hal pengelolaan Retribusi Pasar Hewan melaksanakan sosialisasi dan penjemputan atas pelayanan pasar hewan.
 - b. Pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Cilegon dalam pengelolaan pendapatan melakukan pembinaan kepada petugas kolektor dalam melakukan pungutan di setiap pasar, dan pembenahan manajemen pengelolaan pasar serta pemenuhan sarana dan prasarana pasar.
 5. Pelaksanaan intensifikasi dalam hal pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan berupaya meningkatkan kegiatan pelayanan PKB kepada Konsumen atau masyarakat umum, Dinas Perhubungan Kota Cilegon pada tahun 2020 melakukan perubahan dan perbaikan baik sarana dan prasarana guna mendekatkan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, beberapa perubahan sebagai berikut :
 - Pengadaan Aplikasi SIM PKB (Smart Card).
 - Pembuatan ruang tunggu atau ruangan pelayanan uji KIR.
-

- Peningkatan sarana pada ruang PKB.
- 6. Pelaksanaan intensifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam hal pemungutan Retribusi APAR diantaranya :
 - a. Menjalin koordinasi dengan Dinas terkait dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cilegon.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dukungan anggaran.
 - c. Melaksanakan pendataan bangunan gedung untuk bahan evaluasi selanjutnya.
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan BKPP tentang kebutuhan tenaga teknis.
 - e. Melaksanakan sosialisasi bahwa pentingnya pemenuhan standar keselamatan kebakaran bangunan gedung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

*Intensifikasi
Retribusi
Jasa Usaha*

A.2.2 Intensifikasi Retribusi Jasa Usaha

Intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon khususnya pada sektor Retribusi Jasa Usaha meliputi :

1. Upaya intensifikasi dalam pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dilakukan oleh OPD sebagai berikut :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan upaya menjaga alat berat yang dimiliki selalu dalam keadaan baik dengan perbaikan dan pemeliharaan secara berkala sehingga ketika ada yang menyewa alat dalam keadaan siap.
 - b. Mengoptimalkan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan upaya sebagai berikut:
 1. Menginventarisir Aset Pemerintah Daerah baik aset tetap dan lainnya.
 2. Mengoptimalkan upaya penerapan Peraturan Walikota terkait pemungutan retribusi Pemakaian kekayaan daerah.
 3. Mengembangkan Sistem Pembayaran Online, untuk mempermudah pembayaran retribusi pada Wajib Retribusi.
2. Pelaksanaan Intensifikasi dalam hal pemungutan Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan secara bertahap melakukan pembenahan peningkatan dan pengembangan pengelolaan retribusi terminal kepada wajib retribusi, dan memberikan pemahaman tentang retribusi kepada wajib retribusi.

3. Intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian khususnya pada UPT RPH (Rumah Potong Hewan) Ruminasi (sapi/kerbau) dengan upaya persuasif menjemput pengguna jasa, selama ini masih terus dilakukan guna menciptakan hubungan yang baik dengan pengguna jasa, baik itu dari pengguna jasa pelayanan pemotongan dan pelayanan pasar hewan.
4. Terkait Retribusi Kepelabuhanan masih belum dapat dilaksanakan pemungutannya mengingat objek/subjek retribusi belum dimiliki Pemerintah Kota Cilegon akan tetapi terus berupaya melakukan konsultasi, koordinasi dengan Pemerintah pusat dalam hal pembangunan Pelabuhan Daerah Kota Cilegon dan telah diresmikan oleh Menteri Perhubungan RI, dan melaksanakan penyusunan Peraturan Walikota tentang teknis pemungutan retribusi kepelabuhanan untuk meningkatkan PAD Kota Cilegon.

A.2.3 Intensifikasi Retribusi Perizinan Tertentu

*Intensifikasi
Retribusi
Perizinan
tertentu*

Intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon khususnya pada sektor Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :

1. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya membuat IMB di tingkat kecamatan dengan melakukan pemasangan papan himbuan IMB di setiap Kecamatan, Menyusun SOP rekomendasi teknis IMB guna mengefektifkan dan mengefesiensikan waktu pelaksanaan pelayanan, dan memberikan monitoring dan evaluasi terhadap bangunan industri yang telah terbangun yang belum memiliki IMB dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemohon.
2. Pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan dalam rangka pemungutan retribusi izin trayek adalah melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi secara intensif kepada para pengusaha angkutan umum. Serta melakukan koordinasi dengan aparaturnya terkait dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di jalan dan memperluas jalur pelayanan trayek.
3. Retribusi IMTA : dengan meningkatkan pelayanan kepada perusahaan pengguna TKA dari segi waktu pelayanan sehingga tercapainya kepuasan pelanggan atau perusahaan penggunaan TKA, dan penyesuaian pagu anggaran setelah ditetapkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 569/424/SJ.

A.3 Intensifikasi Perusahaan Milik Daerah

1. Langkah dan upaya yang telah dilaksanakan oleh Bank BJB Cab. Cilegon dalam rangka pencapaian Pendapatan Daerah diantaranya peningkatan layanan dan jaringan untuk melayani pembayaran Pajak Daerah dengan menyiapkan jaringan kantor yang mempermudah wajib pajak diantaranya :
 - 1 (satu) kantor cabang.
 - 2 (dua) kantor cabang pembantu.
 - 7 (tujuh) kantor kas.
 - 5 (lima) payment point di kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pajak Daerah.
 - 1 (satu) unit mobil edukasi.
 - 53 (lima puluh tiga) mesin ATM.
 - Internet Banking (Bjb Digi) dan internet banking corporate (IBC).
 - Penempatan Elektroik Data Capture (EDC) untuk peningkatan pelayanan di RSUD.
 - Pembayaran pajak melalui gerai modern (Indomaret) dan E-Commerce (Traveloka, Bukalapak dan Tokopedia)
 - Pemungutan Retribusi melalui E-Retribusi.
2. Intensifikasi yang dilakukan oleh Perusahaan Milik Daerah PT. BPRS CM meliputi meminimalisir kolektibilitas pembiayaan bermasalah, melakukan sosialisasi, kerjasama dan promosi kepada pemerintah, BUMD, swasta (usaha besar, menengah, usaha kecil), lembaga kemasyarakatan dan sekolah-sekolah di wilayah Cilegon, dan mengadakan jasa pembiayaan individu yang lebih kompetitif untuk pegawai negeri maupun pegawai swasta.
3. Perusahaan Milik Daerah PDAM Cilegon Mandiri dalam hal peningkatan pendapatan dari sektor Laba PDAM Kota Cilegon melaksanakan upaya intensifikasi berupa menjual air kepada masyarakat dengan menambah jaringan pipa dan menambah pemasangan pelanggan baru sebanyak 1500 pelanggan di tahun 2019.
4. Pemerintah Kota Cilegon dalam hal optimalisasi penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2017 tentang penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah kepada perseroan Perseroan Terbatas Pelabuhan Cilegon Mandiri.

Intensifikasi
lain-Lain
pendapatan
Asli daerah
yang sah

A.4 Intensifikasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Intensifikasi yang dilakukan oleh BPKAD dalam hal penyerapan pendapatan lelang kendaraan adalah melaksanakan inventarisir barang milik daerah pada pengguna barang.
2. Intensifikasi yang dilakukan RSUD diantaranya melakukan revisi tarif pelayanan, melakukan perbaikan mekanisme pendapatan tunai, bekerja sama dengan pihak bank untuk memfasilitasi sistem pembayaran biaya pelayanan pasien menggunakan ATM, maupun langsung ke kasir Bank.
3. Intensifikasi pada BLUD Pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil adalah meningkatkan penagihan kepada Mitra Binaan, melakukan pendampingan kepada Mitra Binaan, dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pada Pendamping Kelurahan dan meningkatkan sosialisasi kepada pihak ketiga dan meningkatkan investasi
4. Mengurangi tingkat realisasi penerimaan dari sektor pendapatan denda pajak dan retribusi dengan melaksanakan sosialisasi, himbauan atas kewajiban membayar pajak dan retribusi.
5. Intensifikasi dalam pelaksanaan pemungutan pengembalian temuan adalah meningkatkan sistem pengendalian, dan pengawasan atas serapan belanja daerah sejak tahun 2016.
6. Meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana, fasilitas pendukung pelayanan pada 8 unit UPT Puskesmas, dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait alokasi JKN tahun anggaran 2019.
7. Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan berupaya melaksanakan evaluasi dan rekonsiliasi dengan sekolah-sekolah yang penerima dana BOS di Wilayah Kota Cilegon.

A.5 Intensifikasi Dana Perimbangan

Intensifikasi
Dana
Perimbangan

Secara garis besar penerimaan Dana Perimbangan dipengaruhi dari alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kota Cilegon sesuai dengan ketentuan. Namun Pemerintah Daerah senantiasa melaksanakan upaya-upaya peningkatan yang koperhensif dan berkala dengan melaksanakan rekonsiliasi data dengan kementerian terkait, dalam penyampaian laporan sesuai jadwal yang ditentukan, melaksanakan konsultasi atas piutang capaian alokasi transfer lebih bayar maupun kurang bayar oleh Pemerintah Pusat, dan melakukan penyesuaian atas pagu anggaran target pendapatan dari sektor transfer dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk Kota Cilegon.

A.5.1 Intensifikasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

A.5.1.1 Bagi Hasil Pajak Pusat

*Bagi Hasil
Pajak pusat*

Adapun intensifikasi sesuai dengan komposisi alokasi Dana Perimbangan sebagai berikut:

- Penyesuaian atas Pagu anggaran Pendapatan sektor Dana Bagi Hasil Pajak Pusat sesuai dengan rincian alokasi TKDD tahun anggaran 2019.
- Penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 77/PMK.07/2019 tentang penyaluran kurang bayar dana bagi hasil pada tahun anggaran 2019.
- Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data pada Kantor Pengelolaan Kas Negara (KPN) dalam rangka penyesuaian penerimaan pendapatan dari sektor DBH Pajak Bumi dan Bangunan dan DBH Pph Pasal 21, 25 dan 29 Pajak Pribadi atau Orang Asing.

*Bagi Hasil
BukanPajak*

A.5.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam

Melakukan koordinasi pada Kementerian Keuangan RI dalam rangka penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, Bagi Hasil Sumber Daya Perikanan, dan Bagi Hasil Sumber Daya Pertambangan Umum (Royalti), dan melaksanakan rekonsiliasi dan koordinasi dengan Bappenda Provinsi Banten.

*Intensifikasi
dana Alokasi
Umum*

A.5.2 Intensifikasi Dana Alokasi Umum (DAU)

Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi data pada Kementerian Keuangan RI terkait Dana Alokasi Umum (DAU) secara periodik, dan melaksanakan penyerapan DAU sesuai Peraturan Menteri Keuangan.

*Intensifikasi
Dana
Alokasi
Khusus*

A.5.3 Intensifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Melaksanakan penyampaian pelaporan penyerapan DAK tepat waktu, meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait juknis/juklak penyerapan DAK periode tahun 2019, melaksanakan ketentuan Peraturan Kementerian Keuangan nomor 48/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non fisik, serta melakukan himbauan kepada OPD penerima DAK agar

melaksanakan penyerapan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

A.6 Intensifikasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Intensifikasi
Lain-lain
Pendapatan
Daerah yang
sah

Secara umum upaya intensifikasi yang dapat dilakukan pada penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah:

- Melaksanakan penyesuaian target alokasi anggaran Hibah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan
- Melaksanakan penyesuaian target alokasi anggaran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 973/Kep.105-Huk/2019 tentang Penetapan Alokasi Sementara Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi T.A 2019.
- Melaksanakan kebijakan atas pencairan/transfer yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten.

Berdasarkan Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat digambarkan sebagai berikut :

A.6.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan
Hibah

Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan berupaya melaksanakan evaluasi dan rekonsiliasi dengan sekolah-sekolah Satuan Pendidikan Dasar (Satdiknas) Negeri yang penerima dana BOS di Wilayah Kota Cilegon, dan melaksanakan penyesuaian pagu anggaran pendapatan hibah BOS kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019.

Bagi hasil
Pajak
Provinsi

A.6.2 Bagi Hasil Pajak Provinsi

upaya intensifikasi yang dapat dilakukan pada penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah:

- Melaksanakan kesesuaian target pendapatan sesuai dengan

Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.105-Huk/2019 tentang Alokasi Sementara Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

- Melaksanakan kesesuaian pagu anggaran pendapatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.143-Huk/2019 tentang Pelampauan Target Bagi Hasil PKB Tahun 2018.
- Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data dengan Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor Bagi Hasil PKB, Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, dan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok yang dilaksanakan rutin setiap periodik.

Dana
Penyesuaian
Dan
Otonomi
Khusus

A.6.3 Dana Penyesuaian

Dalam mengelola Dana Penyesuaian Pemerintah Kota Cilegon berupaya untuk senantiasa melaksanakan perbaikan atas pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun berjalan sehingga pengalokasian atas Dana Penyesuaian Pemerintah Kota Cilegon diharapkan senantiasa meningkat. Tahun 2019 Pemerintah Kota Cilegon mendapatkan Alokasi Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp33.166.816.000,00 penggunaannya tersebar di beberapa OPD untuk mendanai kegiatan bidang Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan, Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan.

Bantuan
Keuangan

A.3.3 Bantuan Keuangan Provinsi Banten

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten guna mengintegrasikan semua unsur kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan bantuan keuangan Provinsi Banten dan melaksanakan komitmen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Ekstensifikasi
Pendapatan
Daerah

B. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi merupakan upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui perluasan dan/atau penambahan obyek dan subyek sumber-sumber pendapatan, dan perubahan atas regulasi/tata cara pemungutan/ mekanisme pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon melalui ekstensifikasi

Pendapatan Asli Daerah adalah :

*Ekstensifikasi
Pajak Daerah*

B.1 Ekstensifikasi Pajak Daerah, meliputi :

- a. Ekstensifikasi dari beberapa Jenis Pajak diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah dengan melaksanakan pendataan pada objek/subjek Pajak Daerah dan melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.
- b. Pada jenis Pajak Reklame upaya ekstensifikasi dengan melakukan pendataan reklame indoor terhadap objek-objek media reklame yang berada di Kota Cilegon.
- c. Ekstensifikasi pada BPHTB Mencari informasi pada pihak lain terkait potensi peralihan hak yang terjadi di Kota Cilegon.
- d. Ekstensifikasi pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah melakukan pendataan dan pemutakhiran massal PBB pada 3 (Tiga) Kecamatan.

B.2 Ekstensifikasi Retribusi Daerah, meliputi :

B.2.1 Ekstensifikasi Retribusi Jasa Umum

*Ekstensifikasi
Retribusi
daerah*

*Ekstensifikasi
Retribusi
Jasa Umum*

1. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sebagai petunjuk untuk pelayanan kesehatan agar lebih baik.
2. Melakukan terobosan wilayah baru, pendaftaran ulang mengenai lokasi baru yang belum terdata, penetapan target secara potensial, melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dalam hal ketegasan sanksi kepada Wajib Retribusi Persampahan serta melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dalam penanganan bencana kebakaran pada TPA Bagendung.
3. Ekstensifikasi sektor Parkir Tepi Jalan Umum yang dikelola Dinas Perhubungan adalah mensurvey lokasi titik parkir baru, dan mendata para jukir baru dan menerbitkan SPTP.
4. Pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan upaya melakukan relokasi pedagang untuk masuk ke pasar yang sudah tersedia agar dapat dilakukan pungutan retribusi terhadap mereka dan dilakukan sosialisasi tentang retribusi daerah kepada para pedagang pasar.
5. Dinas Perhubungan Kota Cilegon melakukan perluasan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor guna memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2020 ini Dinas Perhubungan Kota Cilegon akan membangun ruangan tunggu atau ruangan pelayanan terpadu uji KIR kendaraan bermotor.

6. Pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan dalam pembenahan dan peningkatan capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran diantaranya :
 - a. Terlaksananya evaluasi/revisi atas Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran agar dapat diundangkan.
 - b. Melaksanakan pengajuan peningkatan fasilitas/ peralatan pemeriksaan APAR, dan penambahan personil SDM petugas pemadam kebakaran.
7. Melaksanakan perubahan atas revisi Raperwal tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

B.2.2 Ekstensifikasi Retribusi Jasa Usaha, meliputi :

Ekstensifikasi Retribusi Jasa Usaha

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan meyakinkan pihak ketiga (penyewa) bahwa alat berat yang dimiliki UPTD Perlengkapan, perbengkelan dan laboratorium tidak kalah dengan yang dimiliki swasta.
2. Dalam hal pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah melaksanakan upaya ekstensifikasi berupa :
 - a. Kajian untuk menentukan kesesuaian pemanfaatan aset Pemerintah Kota Cilegon dengan ketetapan zonasi wilayah
 - b. Promosi untuk meningkatkan daya investasi agar aset yang dimiliki Pemerintah Kota Cilegon dapat dimanfaatkan secara optimal oleh investor.
3. Ekstensifikasi pemungutan Retribusi Terminal merupakan salah satu optimalisasi adalah membangun sub terminal tipe C di wilayah Kota Cilegon dan mengaktifkan kembali Sub Terminal Angkot Pasar Kelapa.
4. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam pengelolaan retribusi pelayanan jasa usaha sektor retribusi pemotongan hewan ternak besar (sapi/kerbau) melakukan himbauan memotong hewan pada tempat yang disediakan pemerintah daerah, dan memberikan penyediaan fasilitas jasa pelayanan tambahan sesuai kebutuhan.
5. Melakukan koordinasi tentang Peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang Pelayanan Kepelabuhanan, khususnya jenis objek pelayanan kepelabuhanan.

Ekstensifikasi
Retribusi
Perizin
Tertentu

B.2.3 Ekstensifikasi Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi :

1. Terbitnya peraturan tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan, IMB sebagai salah satu syarat diterbitkannya SLF akan mendorong peningkatan pendapatan retribusi IMB.
2. Retribusi Trayek berupaya mengintegrasikan pengawasan bagi angkutan umum, upaya pemberian reward bagi angkutan umum yang taat kewajiban izin trayek.
3. Retribusi IMTA : dengan mengidentifikasi izin-izin IMTA Pusat yang baru pertama kali terbit melalui laporan keberadaan untuk di pastikan adanya TKA tersebut Job description / lingkup pekerjaannya dapat di nyatakan berlokasi di Kota Cilegon sehingga kita dapat menyakinkan Perusahaan untuk memperpanjang IMTA di Kota Cilegon, dan melaksanakan konsultasi terkait penerapan Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 569/424/SJ tentang penerimaan daerah yang bersumber dari pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja

Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah
Yang
Dipisahkan

B.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Bank BJB turut serta mendukung pembangunan di Kota Cilegon dengan program Kredit Modal Kerja Konstruksi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur serta Kredit Usaha Rakyat untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Serta Bank BJB senantiasa turut berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
2. PDAM Cilegon Mandiri melakukan ekstensifikasi dengan melakukan penambahan pelanggan SL Baru, dan Pengembangan jaringan pipa baru di beberapa wilayah di Kota Cilegon.
3. Mengadakan fasilitas jemput tabungan kepada pihak nasabah penabungan, baik setoran maupun penarikan, mengadakan pemantauan dan pembinaan yang lebih efektif terhadap nasabah Badan Usaha, melakukan kerjasama penempatan dana, kerjasama pembiayaan dengan Bank Umum Syariah. Serta mengupayakan efisiensi pengeluaran biaya pengeluaran PT. BPRS CM
4. Pemerintah Kota Cilegon dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah pada tahun 2019 telah menambah jumlah tapping box seluruhnya sebanyak 80 unit untuk menunjang proses penerimaan Pendapatan Daerah dan melaksanakan perluasan kerjasama dengan pihak lainnya dalam rangka penerimaan pendapatan daerah.

B.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain
Pendapatan
Asli Daerah
Yang Sah

- a. Melaksanakan efisiensi dalam pengelolaan Pembiayaan Daerah sehingga penerimaan atas temuan Inspektorat dapat terminimalisir.
- b. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam hal pemungutan Lain-lain PAD yang sah Cicilan Kios dengan melakukan revitalisasi pasar, meningkatkan kenyamanan, ketertiban, dan keamanan bagi pengunjung maupun pedagang, dan melakukan pendataan kembali terhadap debitur.
- c. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam hal pemungutan BLUD RSUD Cilegon adalah meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan, dan meningkatkan kapasitas ruang rawat inap di RSUD.
- d. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam hal pemungutan BLUD Pemerintah adalah melaksanakan pemungutan sesuai dengan prosedur, dan meningkatkan perluasan pemanfaatan BLUD Pemerintah Kota Cilegon.
- e. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam hal penyerapan Dana Bantuan Sekolah adalah dengan senantiasa melakukan pemantauan update atas aturan-aturan Pemerintah Pusat, dan update juknis terkait penyerapan Dana BOS.

Dana
Perimbangan

B.5 Dana Perimbangan

- a. Upaya ekstensifikasi yang dilakuakn adalah meningkatkan koordinasi, rekonsiliasi dan pertukaran data antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat Provinsi Banten dan Pemerintah RI (Kementerian terkait).
- b. Melaksanakan pemantauan pembaharuan aturan, pengendalian atas terbitnya Peraturan Pemerintah RI yang terbaru, dan melakukan permohonan kajian atas pembayaran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat RI terhadap Pemerintah Daerah.
- c. Melaksanakan mekanisme Juklak dan Juknis penyerapan DAK dan DAU sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku.

Lain-lain
pendapatan
Daerah yang
sah lainnya

B.6 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah lainnya

Upaya yang dilakukan dalam penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diantaranya melibatkan Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan Eksekutif berupa legal opinion dan kajian atas penerimaan dana bagi hasil, dan terkait Dana Bantuan

Keuangan dan Dana Otonomi Khusus senantiasa meningkatkan kualitas penyampaian pelaporan kinerja daerah.

2.2.2 BELANJA DAERAH

Pengelolaan
Belanja
Daerah

2.2.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan belanja daerah, dilakukan melalui efisiensi maksimal belanja yang tidak prioritas. Belanja diarahkan sebagai langkah “*defence mechanism*”, upaya bertahan untuk tetap menjaga keberlangsungan pelayanan publik, perlindungan sosial, pemeliharaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor prioritas strategis lainnya.

Penganggaran belanja daerah disusun berdasarkan prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Target prioritas dimaksudkan sebagai panduan dalam meraih kondisi yang diinginkan dalam jangka panjang. Namun demikian tidak semua target indikator yang akan diraih tersebut harus mendapat penyediaan anggaran dari pemerintah Kota. Hal ini dapat juga dilakukan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat serta kontribusi dari pihak swasta atau dari perbankan.

Peningkatan kualitas belanja daerah diharapkan tidak hanya penyesuaian terhadap harga satuan karena inflasi sehingga nilai harga satuan barang meningkat namun diharapkan adanya inovasi terhadap peningkatan jenis kegiatan dan volume kegiatan. Peningkatan jenis kegiatan menunjukkan adanya peningkatan daya kreatifitas dan inovasi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar belanja dan standar satuan harga. Dalam rangka mendukung prioritas nasional, APBD juga dialokasikan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Instrumen dalam perencanaan dan penentuan kebijakan keuangan daerah Kota Cilegon tahun anggaran 2019 diarahkan menuju “Kebijakan Anggaran Berimbang (Balanced Budgeting)”, berdasarkan arah kebijakan ekonomi makro daerah serta memperhatikan berbagai asumsi yang mendasari perhitungan perkiraan indikator ekonomi makro dan kapasitas keuangan daerah, serta dengan mengupayakan tidak terjadinya defisit ataupun surplus anggaran jika dilihat dari pemasukan dan pengeluaran. Oleh karena itu, penggunaan konsep balance budgeting mengharuskan pagu anggaran belanja program teknis mengacu pada ketersediaan ruang fiskal dalam tata kelola keuangan daerah Kota Cilegon.

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penyusunan APBD Tahun 2019, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan belanja daerah Kota Cilegon pada Tahun Anggaran 2019 antara lain adalah :

1. Peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan;
2. Diprioritaskan untuk urusan wajib guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
3. Diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Peningkatan efisiensi belanja untuk penyediaan alokasi anggaran kegiatan-kegiatan prioritas yang belum terlaksana;
5. Peningkatan efektifitas belanja untuk program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau secara teknis sudah dilakukan dengan pendanaan dari kegiatan lain, sehingga anggaran yang tersedia dapat termanfaatkan guna mendapatkan capaian program, output dan outcome yang optimal.

Belanja
Tidak
Langsung

2.2.2.2 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan teknis. Belanja tidak langsung yang dilaksanakan pada pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 meliputi Belanja pegawai, Belanja subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik, dan Belanja Tidak Terduga.

2.2.2.2.1 Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai

Berikut adalah beberapa hal terkait kebijakan belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2019:

1. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan yang berlaku tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
2. Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas dan keempat belas PNSD dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas PNSD, khususnya bagi PNSD yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan. Besarnya Tunjangan Umum berpedoman pada Peraturan yang berlaku tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
4. Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil
5. Dalam merencanakan belanja pegawai memperhitungkan "accres" gaji yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi;
6. Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi

- kerja dan kelangkaan profesi, yang ditetapkan;
7. Penganggaran insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani regulasi yang berlaku;

Belanja
Hibah

2.2.2.2.2 Belanja Hibah

Pengertian Hibah dalam konteks tata kelola keuangan daerah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Dana hibah diperuntukkan untuk mencapai sinergitas badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan/ maupun kelompok masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah. Hal ini berdampak kepada meningkatnya partisipasi masyarakat di Kota Cilegon untuk secara aktif ikut dalam pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Kota Cilegon yang tentunya akan tercipta situasi yang kondusif guna pelaksanaan program program pembangunan Pemerintah Kota Cilegon.

Belanja
Bantuan
Sosial

2.2.2.2.3 Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja
Bantuan
Keuangan

2.2.2.2.4 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus yang diberikan kepada pemerintah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Di Kota Cilegon, belanja bantuan keuangan diperuntukkan kepada partai politik.

Belanja
Tidak
Terduga

2.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan jenis belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial

yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

*Belanja
Langsung*

2.2.2.4 Belanja Langsung

Salah satu komponen terpenting dalam struktur APBD adalah belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja dialokasikan secara langsung untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah Kota Cilegon. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jenis dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

3) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk pengadaan lahan, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

2.3. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD PEMERINTAH KOTA CILEGON

2.3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD Kota
Cilegon

APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 dan dijabarkan melalui Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018. Sedangkan APBD Perubahan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 Tanggal 27 September 2019 dan dijabarkan melalui Peraturan Walikota Nomor 66 tahun 2019 tentang penjabaran perubahan APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 Tanggal 27 September 2019 serta beberapa perubahan atas penjabaran perubahan APBD dimaksud.

AnggaranPe
ndapatan
Rp1.881,4Mi
lyar

Anggaran pendapatan Pemerintah Kota Cilegon untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.881.449.605.475,00 yang diperoleh melalui Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan sumber-sumber Pendapatan Lainnya yang Sah.

Anggaran
Belanja
Rp2.063,3Mi
lyar

Selama periode tahun anggaran 2019, Belanja dianggarkan sebesar Rp2.063.374.989.718,00 yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan di Pemerintah Kota Cilegon yang dirinci dalam belanja operasi, barang modal dan tak terduga.

Anggaran
Transfer
Rp976,7juta

Selama periode tahun anggaran 2019, Transfer dianggarkan sebesar Rp976.730.599,00 yang digunakan untuk bantuan keuangan kepada partai politik.

Penerimaan
Pembiayaan
dan
Pngeluaran
Pebiayaan
Rp192,9
Milyar dan
Rp10 Milyar

Selain pendapatan dan belanja, Pemerintah Kota Cilegon juga menganggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp192.902.114.842,00 yang berasal dari SILPA Tahun Anggaran 2018. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan guna membiayai penyelenggaraan keperluan PILKADA tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2.3.2. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi
pendapatan
Rp1.766,90
Milyar

Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2019 mencapai Rp1.766.980.559.475,00 atau sebesar 93.92% dari anggaran. Realisasi pendapatan ini meningkat sebesar Rp136.960.534.525,00 atau sebesar 8,40% dari realisasi pendapatan tahun anggaran 2018 yang terealisasi sebesar Rp1.630.020.024.950,00

Realisasi
Belanja
Rp1.822,3Mi
lyar

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.822.331.380.543,00 atau mencapai 88.32% dari anggaran. Realisasi belanja ini meningkat Rp233.157.692.909,00 atau sebesar 14,67 % dari realisasi belanja tahun anggaran 2018 yang terealisasi sebesar Rp1.589.173.687.634,00.

Transfer
Rp976juta

Realisasi Transfer pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp976.730.599,00 atau mencapai 100% dari anggaran. Realisasi belanja ini meningkat sebesar Rp63.333.391,00 atau sebesar 6,93% dari realisasi transfer tahun anggaran 2018 yang terealisasi sebesar Rp913.397.208,00.

Defisit
Rp56,3
Milyar

Terjadi defisit pada periode tahun anggaran 2019 sebesar (Rp56.327.551.667,00) atau mencapai 30.80% dari anggaran. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami surplus sebesar Rp39.932.940.108,00

Realisasi
Penerimaan
Pembiayaan
Rp192,9
Milyar

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada periode tahun anggaran 2019 sebesar Rp192.902.114.842,00 atau mencapai 100% dari anggaran. Realisasi Penerimaan Pembiayaan ini meningkat sebesar Rp33.932.941.908,00 atau sebesar 21,34% bila dibandingkan realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2018 sebesar Rp158.969.172.934,00.

Realisasi
Pembiayaan
Pengeluarn
Rp0

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada periode tahun anggaran 2019 sebesar Rp0,00 atau mencapai 0% dari anggaran. Sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp5.999.998.200,00.

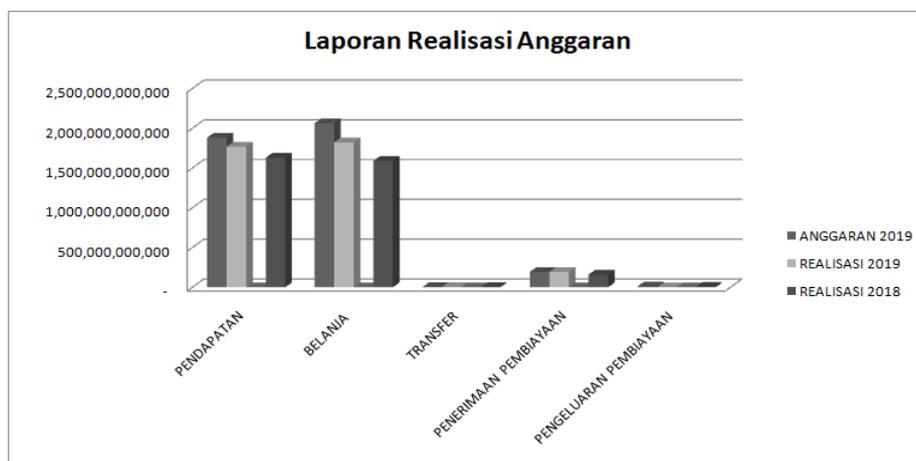
SilpaRp136,
5 Milyar

SILPA pada akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp136.574.563.175,00 terdiri dari Kas di Kas Umum Daerah sebesar Rp131.065.822.742,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp16.059.430,00, Kas di BLUD-PDB sebesar Rp1.474.720.125,00, Kas di BLUD-RSUD sebesar Rp863.040.650,00, Kas Lainnya FKTP JKN sebesar Rp1.416.230.346,00 dan Kas Lainnya Dana BOS sebesar Rp1.738.689.882,00

Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran tersebut dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

Tabel 2.3.1. Tabel Realisasi Anggaran 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
4	PENDAPATAN	1.881.449.605.475,00	1.766.980.559.475,00	93,92	1.630.020.024.950,00
5	BELANJA	2.063.374.989.718,00	1.822.331.380.543,00	88,32	1.589.173.687.634,00
6	TRANSFER	976.730.599,00	976.730.599,00	100,00	913.397.208,00
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	192.902.114.842,00	192.902.114.842,00	100,00	158.969.172.934,00
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	-	-	5.999.998.200,00



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3.1.1. Target Kinerja Keuangan dan Perubahannya

Target
kinerja keu
dan
perubahann
ya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah untuk satu tahun anggaran. APBD memuat rencana pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah dalam rangka menjalankan tugas-tugas desentralisasi. APBD disusun untuk membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal, meningkatkan koordinasi kerja antar organisasi sehingga tidak menghasilkan kerja yang tumpang tindih, dan menjadi pedoman pemerintah untuk menentukan prioritas kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jika dalam pelaksanaan pemerintahan yang berpedoman pada APBD ditemukan hal-hal yang perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi, maka harus dilakukan perubahan atas APBD yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat disebabkan: 1) terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya; 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 4) keadaan darurat; serta 5) keadaan luar biasa.

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada tahun 2019, Pemerintah Kota Cilegon melakukan perubahan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019. Perubahan APBD Kota Cilegon tahun 2019 ditetapkan sebagai upaya pembangunan daerah secara berkesinambungan dan terencana dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia.

Perubahan APBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung perubahan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan makro ekonomi maupun untuk tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD kota Cilegon tahun anggaran 2019.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan perubahan target pendapatan daerah pada perubahan APBD Kota Cilegon tahun anggaran 2019 antara lain:

- 1) Optimalisasi penerimaan pajak daerah;
- 2) Optimalisasi penerimaan retribusi daerah;
- 3) Proyeksi peningkatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bersumber dari penerimaan jasa giro, bunga deposito, pendapatan bunga atas pinjaman bergulir, pendapatan layanan umum yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah serta PAD lainnya;
- 4) Proyeksi peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Perubahan proyeksi pendapatan juga berimbas pada perubahan alokasi belanja. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan anggaran belanja daerah antara lain:

- 1) Pergeseran alokasi anggaran pada sebagian besar SKPD sebagai upaya peningkatan efisiensi belanja dan penghematan atas penganggaran belanja yang dianggap kurang produktif;
- 2) Perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program-program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah;
- 3) Peningkatan alokasi anggaran pada beberapa komponen belanja, baik kebutuhan mendesak maupun prioritas untuk mengakomodasi serta menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Cilegon Tahun 2019.

Pemerintah Kota Cilegon melakukan perubahan APBD tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun 2019 adalah sebesar Rp47.057.238.585,00 atau meningkat sebesar 2,57% jika dibandingkan dengan pendapatan daerah dalam APBD reguler. Rincian anggaran pendapatan daerah sebelum dan sesudah perubahan APBD tahun 2019, yaitu:

Pendapatan daerah

Tabel 3.1 Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	701.366.326.658,00	688.080.294.550,00	(13.286.032.108,00)	(1.89)
	- Hasil Pajak Daerah	532.548.000.000,00	540.425.611.122,00	7.877.611.122,00	0,08
	- Hasil Retribusi Daerah	12.776.697.636,00	17.557.451.636,00	4.780.754.000,00	1,57
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.782.317.060,00	17.127.092.370,00	344.775.310,00	0,09
	- Lain-lain PAD yang Sah	139.259.311.962,00	112.970.139.422,00	(26.289.172.540,00)	(18.88)
2	Dana Perimbangan	912.378.533.000,00	912.378.533.000,00	-	-
	- Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	131.420.440.000,00	131.420.440.000,00	-	-
	- Dana Alokasi Umum	643.891.037.000,00	643.891.037.000,00	-	-
	- Dana Alokasi Khusus	137.067.056.000,00	137.067.056.000,00	-	-
3	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	220.647.507.232,00	280.990.777.925,00	59.300.270.693,00	26,88
	- Pendapatan Hibah	38.731.000.000,00	39.774.000.000,00	1.043.000.000,00	2,69
	- Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	148.749.691.232,00	168.049.961.925,00	19.300.270.693,00	12,97
	- Dana penyesuaian dan otonomi khusus	33.166.816.000,00	33.166.816.000,00	-	-
	- Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya	-	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.834.392.366.890,00	1.881.449.605.475,00	47.057.238.585,00	2,57

Belanja daerah

- 2) Belanja daerah Kota Cilegon dalam perubahan APBD tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,32% atau sebesar Rp66.321.132.533,00 jika dibandingkan dengan belanja daerah dalam APBD reguler tahun 2019 sebesar Rp1.998.030.587.784,00. Rincian anggaran belanja daerah sebelum dan sesudah perubahan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	813.606.475.984,00	814.644.996.297,00	1.038.520.313,00	0,13
	Belanja Pegawai	751.801.915.984,00	750.625.913.914,00	(1.176.002.070,00)	(0,15)
	Belanja Hibah	48.374.824.000,00	53.371.238.000,00	4.996.414.000,00	10,32
	Belanja bantuan sosial	8.016.338.784,00	5.171.113.784,00	(2.845.225.000,00)	(0,15)
	- Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan	913.397.216,00	976.730.599,00	63.333.383,00	6,93
	- Belanja tidak terduga	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-	0,00
2	Belanja Langsung	1.184.424.111.800,00	1.249.706.724.020,00	64.239.612.220,00	5,43
	- Belanja pegawai	118.664.547.828,00	123.017.067.778,00	4.352.519.950,00	3,66
	- Belanja barang dan Jasa	621.307.861.959,00	621.808.344.063,00	500.482.104,00	0,08
	- Belanja modal	444.451.702.013,00	504.881.312.179,00	60.429.610.166,00	13,59
	Jumlah Belanja Daerah	1.998.030.587.784,00	2.064.351.720.317,00	66.321.132.533,00	3,32

Informasi :

- Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Cilegon Nilai penetapan pagu Perubahan Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan 2019 sebesar Rp1.880.406.605.475,00. Dan Nilai penetapan pagu Perubahan Belanja Daerah pada APBD Perubahan 2019 sebesar Rp2.063.308.720.317,00, dengan demikian pagu pendapatan dan pagu belanja tersebut terdapat selisih sebesar Rp1.043.000.000,00 yang mana selisih tersebut merupakan tambahan pagu anggaran alokasi Pendapatan Hibah yang bersumber dari alokasi Dana BOS Kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN T.A 2019 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/5426/Keuda

perihal pengelolaan Dana BOS Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) Negeri pada APBD Kabupaten/Kota. Mengingat APBD Perubahan 2019 sudah ditetapkan, maka untuk mengakomodir dan mengalokasikan pendapatan Hibah Dana BOS tersebut dalam APBD Tahun 2019 telah diterbitkan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 dengan menambah nilai pagu pendapatan setelah perubahan APBD Tahun 2019 sebesar Rp1.043.000.000,00 dan menambah pagu belanja sebesar Rp1.043.000.000,00 yang dialokasikan pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp31.500.000,00 dan Alokasi pada Belanja Modal sebesar Rp1.011.500.000,00.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan dan dicatat secara definitif berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Cilegon tahun anggaran 2018. Besarnya SiLPA tahun anggaran 2018 berdasarkan hasil audit BPK adalah sebesar Rp192.902.114.842,00

Selisih lebih atas proyeksi SiLPA tersebut sebagian besar merupakan anggaran yang harus dijadwalkan kembali untuk dipergunakan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik *grant*, wajib, dan mengikat seperti anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Cilegon, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Dana Bergulir, yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan. Anggaran sesuai alokasi yang terdapat dalam SiLPA sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku harus dianggarkan kembali dengan menggunakan petunjuk teknis yang berlaku pada tahun berkenaan.

Tabel 3.3 Anggaran Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Kota Cilegon Tahun 2019

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
Penerimaan Pembiayaan Daerah	173.638.220.894,00	192.902.114.842,00	19.263.893.948,00	11,09
- Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	173.638.220.894,00	192.902.113.042,00	19.263.892.148,00	11,09
- Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	-	1.800,00	1.800,00	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	0,00
- Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	0,00

Informasi:

- Pagu anggaran pembentukan dana cadangan sebesar Rp10.000.000.000,00 dianggarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2020.

3.1.2 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan Pemerintah Kota Cilegon tahun 2019 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.766.980.559.475,00 atau sebesar 93,92% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian realisasi pendapatan daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

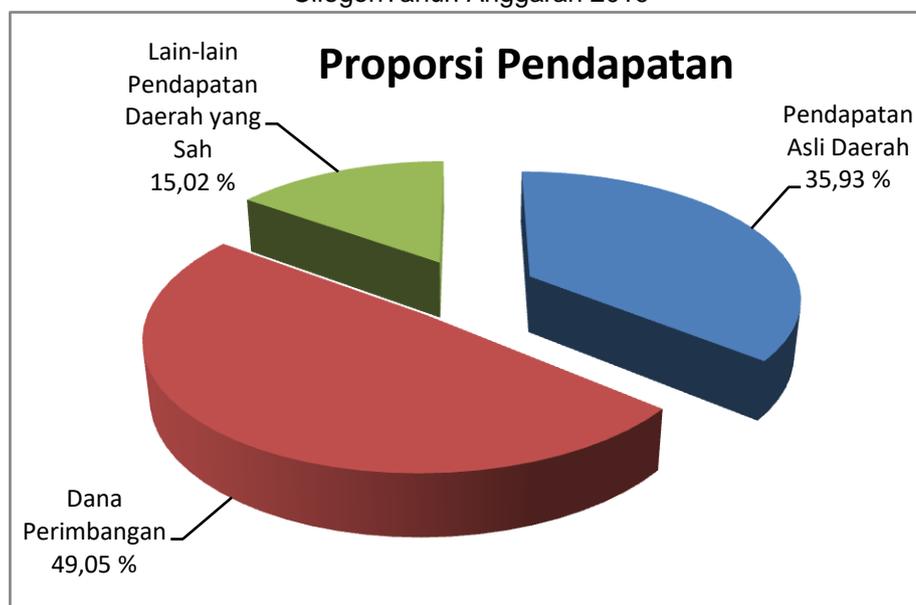
Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	688.080.294.550,00	634.798.056.162,00	92,26
DANA PERIMBANGAN	912.378.533.000,00	866.731.464.020,00	95,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	280.990.777.925,00	265.451.039.293,00	94,47
JUMLAH	1.881.449.605.475,00	1.766.980.559.475,00	93,92

Dari total pendapatan daerah Pemerintah Kota Cilegon, Pendapatan asli daerah memberikan kontribusi sebesar Rp634.798.056.162,00 atau sebesar 35,93% dari total pendapatan, dana perimbangan memberikan kontribusi sebesar Rp866.731.464.020,00 atau sebesar 49,05% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar

Rp265.451.039.293,00 atau sebesar 15,02%. Proporsi sumber-sumber pendapatan daerah Pemerintah Kota Cilegon tahun 2019 disajikan dalam grafik berikut:

Gambar 3.1 Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019



2. Belanja Daerah

Pemerintah Kota Cilegon menganggarkan belanja daerah sebesar Rp2.064.351.720.317,00 di tahun 2019 dan terealisasi sebesar Rp1.823.308.111.142,00 atau sebesar 88,32%. Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
BELANJA DAERAH			
- Belanja Tidak Langsung	814.644.996.297,00	736.923.192.929,00	90,46%
- Belanja Langsung	1.249.706.724.020,00	1.086.384.918.213,00	86,93%
JUMLAH	2.064.351.720.317,00	1.823.308.111.142,00	88,32%

Dari total belanja daerah Pemerintah Kota Cilegon, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar Rp736.923.192.929,00 atau sebesar 40,42% dari total belanja daerah, sedangkan belanja langsung memberikan kontribusi sebesar Rp1.086.384.918.213,00 atau sebesar 59,58%.

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pendapatan dan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur yang dapat dicapai untuk setiap pos pendapatan dan belanja daerah, namun dalam pengelolaannya ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan realisasi pendapatan maupun belanja daerah pada tahun 2019 tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan.

3.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan asli daerah yang bersumber dari penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar 93,92%. Kondisi tersebut disebabkan:

- a. Pada sektor Pajak mineral bukan logam dan batuan dikarenakan proses perluasan salah satu perusahaan yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2019 namun mengalami kemunduran penyelesaian di tahun berikutnya.
- b. Pada sektor BPHTB, dikarenakan transaksi yang potensial/besar yang diperkirakan akan terjadi di Tahun 2019, namun hingga akhir tahun 2019 belum terjadi.
- c. Pada sektor retribusi pelayanan persampahan di tahun 2019 terdapat permasalahan TPA (tempat pembuangan akhir) Bagendung mengalami kebakaran panjang.
- d. Pada sektor Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terdapat permasalahan diantaranya :
 - Keterbatasan anggaran
 - Tidak adanya SPTP
 - Belum adanya data jukir
 - Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
- e. Pada sektor Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola BPKAD Kota Cilegon Terkendala terbenturnya peraturan yang dibuat pada OPD baik Perda dan Perwal yang berlaku pada pengguna BMD terhadap larangan Objek pemanfaatan pada trotoar dan lain-lainnya.
- f. Pada sektor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor permasalahan yang dihadapi diantaranya tingkat kesadaran pemilik kendaraan angkutan umum masih rendah, kendaraan wajib uji perusahaan belum bisa hadir langsung, dan banyaknya kendaraan wajib uji yang melaksanakan mutasi ke luar daerah.

- g. Pada sektor Retribusi Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran (APAR) terdapat permasalahan diantaranya :
- Masih minimnya alat kelengkapan / penunjang tim pemeriksa.
 - Masih adanya keluhan pengelola/objek pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang terjadi tumpang tindih (pemeriksaan 2 (dua) Instansi pada satu alat yang sama) termasuk asumsi keberadaan Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2014 terjadi kontradiksi dengan Undang-undang Bangunan Gedung Nomor 28 tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009.
 - Masih minimnya tenaga teknis (SDM) hanya memiliki 3 orang staf pelaksana, sehingga mengakibatkan kurangnya optimal dalam pelaksanaan pemeriksaan.
 - Beberapa anggota tim teknis belum mendapatkan pembekalan bimten inspeksi (tata cara pelaksanaan inspeksi/audite pemeriksaan bangunan gedung).
 - Kendaraan operasional untuk personil dan peralatan tidak layak (dibutuhkan minibus).
- h. Dalam melaksanakan pengelolaan retribusi terminal guna mencapai target retribusi, banyak dijumpai kendala-kendala, baik dari aspek petugas, pedagang, peraturan, fasilitas, dan karakteristik tertentu yang ada di terminal tersebut, adapun kendala-kendala sebagai berikut :
1. Sistem jaringan trayek angkutan kota belum terintegrasi dengan terminal seruni.
 2. Belum tersedianya fasilitas penunjang terminal yang memadai.
 3. Pedagang (wajib retribusi sewa lahan) sering tidak berjualan (tutup).
 4. Berkurangnya kendaraan angkutan umum (angkot), karena banyaknya kendaraan online.
- i. Pada Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian per 2019 memiliki permasalahan diantaranya kurangnya kesadaran pengguna jasa RPH dan pasar hewan dalam membayar retribusi dan tarif retribusi rumah potong hewan dan pasar hewan perlu melakukan penyesuaian tarif mengingat sudah 8 tahun berjalan belum ada penyesuaian.
-

- j. Pada Retribusi Izin Trayek permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran angkutan umum untuk membayar retribusi izin trayek.
- k. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah
- Permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Milik Daerah PT. BPRS CM adalah Pemahaman masyarakat atas sistem syariah secara umum masih rendah, dan tingkat penabung (nasabah) pada Bank BPRS masih rendah, cakupan pelayanan belum mencakup seluruh wilayah di Kota Cilegon bahkan di Luar Kota Cilegon dan fasilitas PT. BPRS CM masih minim.
 - Permasalahan yang dihadapi oleh BJB diantaranya Pembayaran SP2D kepada rekanan Pemerintah Kota Cilegon sebagian masih disalurkan melalui Bank Lain, belum optimalnya penggunaan garansi bank untuk mengcover pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, serta Wajib Pajak khususnya penggunaan Tapping Box belum seluruhnya menggunakan rekening Bank Bjb untuk mempermudah transaksi keuangan.
 - Permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Milik Daerah PDAM Cilegon Mandiri adalah kebiasaan pelanggan untuk melunasi tagihan air dilakukan pada bulan berikutnya setelah mendapatkan surat peringatan penutupan sementara.
- l. Pada komponen lain-lain PAD yang Sah Cicilan Kios terdapat permasalahan tingkat kesadaran masyarakat pedagang dalam membayar angsuran masih kurang, akibatnya mereka mengosongkan lapaknya dan memilih untuk berdagang di luar.
- m. Permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan BLUD Pemerintah diantaranya rendahnya kesadaran mitra binaan dalam memenuhi kewajiban untuk pengembalian pinjaman tepat waktu, adanya anggapan di masyarakat bahwa dana yang dikeluarkan dari pemerintah dianggap sebagai Hibah, dan kurang optimalnya pelaksana Pengelola Dana Bergulir (pendamping kelurahan) dalam melakukan penagihan kepada Mitra Binaan.
- n. Pada komponen lain-lain PAD yang Sah BLUD-RSUD terealisasi mencapai 94,63% dikarenakan masih adanya pihak perusahaan/ instansi / lembaga yang melakukan kerjasama dengan BLUD-RSUD yang belum memenuhi kewajibannya sehingga
-

menimbulkan piutang.

3.2.2 Belanja Daerah

Beberapa permasalahan terkait pengelolaan belanja daerah selama tahun 2019 antara lain:

- a. Persentase serapan belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada Partai Politik dan belanja tidak terduga mencapai 90,46%. Serapan belanja bantuan sosial hanya mencapai 43,17% dalam hal ini tidak seluruh anggaran belanja bantuan sosial direalisasikan karena berpedoman kepada hasil verifikasi lapangan; Selain itu, beberapa sasaran/penerima program telah tercakup sebagai sasaran program Bantuan Sosial yang bersumber dana dari APBN
- b. Persentase serapan keseluruhan belanja langsung yang merupakan akumulasi belanja dari seluruh program maupun kegiatan yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon adalah sebesar 86,93%. Beberapa kegiatan masih belum optimal penyerapannya dikarenakan adanya ketidaktepatan dalam perencanaan kegiatan antara lain terkait cash budget, kendala pada saat proses pelelangan, kelengkapan administrasi khususnya terkait pengadaan lahan, serta adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan IV 2019, yang ketika mengalami gagal lelang tidak memungkinkan lagi dilakukan lelang ulang.

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif yang perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang antara lain:

- 1) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan objek dan subjek pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi;
 - 2) Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan retribusi yang melanggar aturan maupun yang terlambat atau tidak membayar kewajibannya;
 - 3) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan mengimplementasikan sistem informasi *online* dan program *tax monitoring*;
 - 4) Melakukan penataan sistem dan prosedur pemungutan
-

pendapatan asli daerah, termasuk di dalamnya melakukan penyesuaian kerangka regulasi;

- 5) Melakukan *monitoring*, evaluasi, dan peningkatan atas kinerja perangkat daerah bidang pendapatan;
- 6) terhadap permasalahan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah melakukan koordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Banten dan Distamben Provinsi Banten terkait wajib pajak baru;
- 7) terhadap permasalahan PBB BPKAD Kota Cilegon melakukan penagihan langsung pada wajib pajak daerah yang hingga tanggal jatuh tempo belum melakukan pembayaran PBB, baik terhadap piutang yang lalu maupun yang regular tahun berjalan, serta melakukan program penghapusan denda
- 8) Melakukan pendataan Wajib Pajak sesuai alamat dan bukti kepemilikan;
- 9) Meningkatkan kualitas perencanaan belanja tidak langsung khususnya terkait belanja bantuan sosial, melalui peningkatan kualitas verifikasi serta peningkatan pemahaman terkait mekanisme dan alokasi bantuan sosial bagi pengusul dan penerima program.
- 10) Meningkatkan kinerja serapan belanja langsung melalui peningkatan pengendalian sejak tahap perencanaan kegiatan, hingga pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, yang dalam hal ini didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi, serta sistem reward dan punishment berbasis kinerja.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2019 sepenuhnya mengacu kepada kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Cilegon melalui Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Cilegon yang telah direvisi beberapa kali terakhir melalui Peraturan Walikota Cilegon Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Cilegon. Kebijakan Akuntansi tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menganut basis akrual secara penuh, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Dalam rangka penyusutan, amortisasi dan batas minimal kapitalisasi, Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Kota Cilegon tersebut dilengkapi dengan terbitnya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi, dan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon.

4.1. Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumberdaya ekonomi;
- Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap

anggarannya

- Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayaipenyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuanentitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Ekuitas;
- 4) Pendapatan-LRA;
- 5) Belanja;
- 6) Transfer;
- 7) Pembiayaan;
- 8) Saldo anggaran lebih
- 9) Pendapatan-LO;
- 10) Beban; dan
- 11) Arus kas.

*Komponen
Laporan
Keuangan*

4.2. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pokok terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi pemerintah.

Basis
akuntansi

4.3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.

Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

4.3.1. Pendapatan

Pendapatan

Pengakuan Pendapatan dipilah menjadi 2 (dua) yaitu Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO.

4.3.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-
LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- 2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- 3) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- 4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.

- 5) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

4.3.1.2 Pendapatan-LO

Pendapatan-
LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan;
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi 2 (dua) yaitu :

- 1) **Pendapatan LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pendapatan Non Operasional.**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

PAD Melalui Penetapan antara lain Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

PAD Tanpa Penetapan antara lain Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pendapatan Transfer, Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-

persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

2) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD berupa PAD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.

Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Alternatif pertama yaitu kelompok pendapatan yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak/retribusi yang bersangkutan. Pendapatan ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

- b. Alternatif kedua yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- c. Alternatif ketiga yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

Pengakuan
Belanja

4.3.2. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

4.3.2.1 Beban

Pengakuan
Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban;
- 2) Terjadinya konsumsi aset;
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pembiayaan

4.3.3. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

4.3.4. Aset

Komposisi
Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

<i>Aset Lancar</i>	4.3.4.1. Aset Lancar	<p>Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Semua aset selain diatas, diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek piutang, dan persediaan.</p>
<i>Kas</i>		<p>Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD). Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.</p>
<i>Piutang</i>		<p>Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang diakui saat diterbitkan surat ketetapan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang dicatat dan diukur sebesar Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).</p>
<i>Penyisihan Piutang</i>		<p>Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan. Penyisihan piutang digunakan untuk mencatat penyisihan piutang yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Penyisihan Piutang mencakup antara lain Penyisihan Piutang Pendapatan dan Penyisihan Piutang Lainnya</p> <p>Perhitungan Penyisihan Piutang dan besarnya persentase penyisihan piutang tak tertagih untuk Pajak Daerah sebagai berikut:</p>

Tabel 4.1. Umur Piutang Pajak Daerah dan Persentase Penyisihan

NO	Jenis Piutang	Umur Piutang				Jumlah
		< 1 Tahun	1 s/d < 3 Tahun	3 s/d < 5 Tahun	≥ 5 Tahun	
1	Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx	Xxx
	% Penyisihan	0,5 %	10 %	50 %	100%	Xxx
	Besar Penyisihan Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx	Xxx

Perhitungan Penyisihan Piutang dan besarnya persentase penyisihan piutang tak tertagih untuk Retribusi Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Umur Piutang Retribusi Daerah dan Persentase Penyisihan

NO	Jenis Piutang	Umur Piutang				Jumlah
		< 1 Tahun	1 s/d < 2 Tahun	2 s/d < 3 Tahun	≥ 3 Tahun	
1	Piutang Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx	Xxx
	% Penyisihan	0,5 %	10 %	50 %	100%	Xxx
	Besar Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- 2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

Metode Periodik. Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Penilaian Persediaan menggunakan harga pembelian terakhir.

4.3.5. Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- ❖ Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasapontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- ❖ Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

❖ Metode Biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

❖ Metode Ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode
Penilaian
Investasi

- ❖ Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktudekat.

Penggunaan metode pada penilaian investasi tersebut diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- ❖ Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- ❖ Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- ❖ Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- ❖ Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Kriteria
Penilaian
Investasi

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- ❖ Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- ❖ Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- ❖ Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- ❖ Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

4.3.6. Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Kriteria dan
metode
penyusutan
Aset Tetap

Metode penyusutan aset tetap yang digunakan Pemerintah Kota Cilegon adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari anggaran sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Tabel Masa Manfaat Aset Tetap terdapat dalam Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi Dan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi Dan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kota Cilegon.

Dana
Cadangan

4.3.7. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain dan dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan.

Aset lainnya

4.3.8. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Lainnya merupakan klasifikasi dari aset nonlancar lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), aset tak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan aset lain-lain yang berasal dari penghentian penggunaan aktif aset tetap Pemerintah Kota Cilegon.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi. Aset Tidak Berwujud diamortisasi atau disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) selama 4 tahun masa manfaat. Amortisasi Aset Tidak Berwujud terdapat pada Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi Dan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kota Cilegon.

Kewajiban

4.3.9. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang dari kewajiban penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi jangka pendek dan pemerintah.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah juga terjadi karena berkaitan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah dapat diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu/saat jatuh temponya dan berdasarkan sumber dana.

1. Kewajiban Berdasarkan jatuh tempo

*Klasifikasi
kewajiban*

Berdasarkan jatuh temponya, kewajiban dapat diklasifikasikan, menjadi, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Berdasarkan paragraf 11 PSAP 09, kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (Dua Belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (Dua Belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

a. Utang Dalam Negeri - Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua) belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), Utang Muka dari Kas Umum Negara/Daerah dan Pendapatan diterima dimuka.

Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua) belas bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

2. Kewajiban Berdasarkan sumber pinjaman

Kewajiban juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber dana atau pemberi pinjaman. Sumber dana atau pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri, dan pinjaman dari dalam negeri akan disajikan dalam kelompok

utang dalam negeri.

Ekuitas

4.3.10. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun aset dan kewajiban.

BAB V PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp1.766
Milyar

Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 mencapai Rp1.766.980.559.475,00 atau sebesar 93,92% dari anggaran. Realisasi pendapatan ini jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp136.960.534.525,00 atau naik 8,40% dari realisasi pendapatan 2018 sebesar Rp1.630.020.024.950,00.

Pendapatan Pemerintah Kota Cilegon pada tahun 2019 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp634.781.996.732,00 pendapatan Transfer sebesar Rp1.093.318.737.900,00 dan Pendapatan Hibah sebesar Rp38.863.765.413,00.

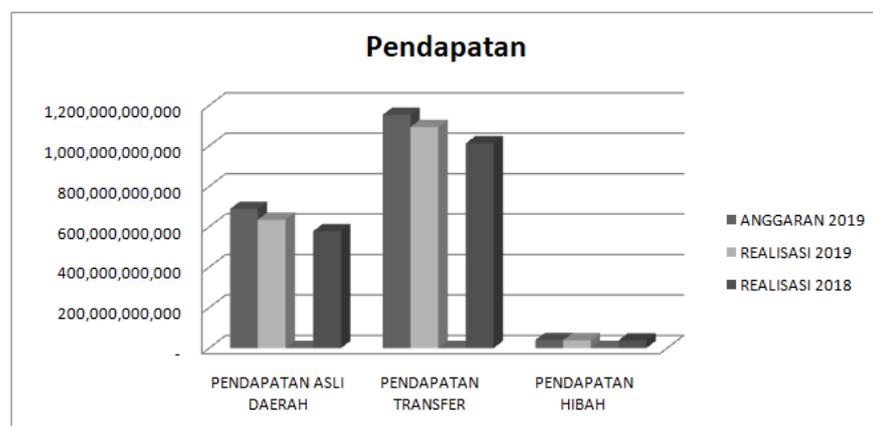
Perbandingan komposisi realisasi pendapatan pada tahun 2019 terhadap anggaran dan komparasinya dengan tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 5.1. Perbandingan komposisi realisasi pendapatan pada tahun 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	(Dalam Rupiah)
					REALISASI 2018
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	688.080.294.550,00	634.798.056.162,00	92,26	578.335.346.296,00
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.153.595.310.925,00	1.093.318.737.900,00	94,77	1.013.335.086.813,00
43	PENDAPATAN HIBAH	39.774.000.000,00	38.863.765.413,00	97,71	38.349.591.841,00

Komposisi
Pendapatan
n

Grafik 5.1. Perbandingan komposisi realisasi pendapatan pada tahun 2019



5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 mencapai Rp634.798.056.162,00 atau sebesar 92,26% dari anggaran. Realisasi PAD ini meningkat dari realisasi PAD tahun anggaran 2018 yang sebesar Rp578.335.346.296,00.

Realisasi
PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp488.733.692.539,00 Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp18.727.531.650,00 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp17.127.057.370,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp110.209.774.603,00.

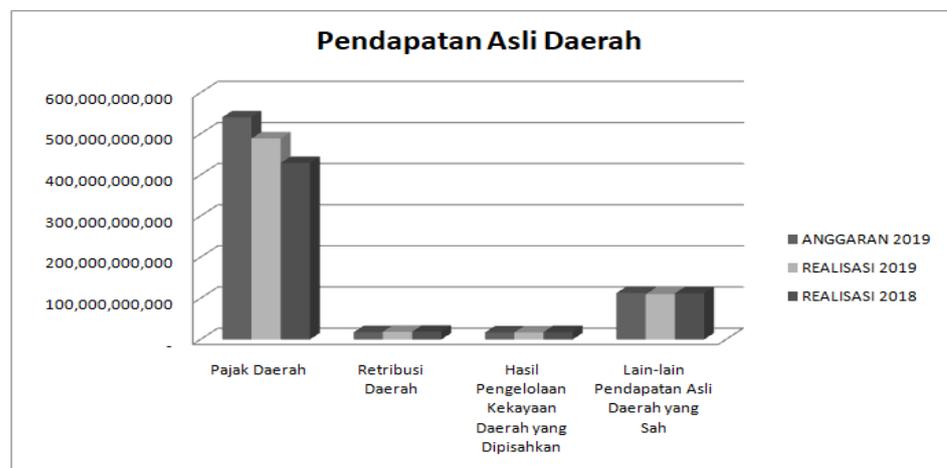
Perbandingan komposisi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran dan komparasinya dengan tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Komposisi
PAD

Tabel 5.3 Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah

					<i>(Dalam Rupiah)</i>
NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
411	Pajak Daerah	540.425.611.122,00	488.733.692.539,00	90,43	429.234.596.141,00
412	Retribusi Daerah	17.557.451.636,00	18.727.531.650,00	106,66	18.827.127.530,00
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.127.092.370,00	17.127.057.370,00	100,00	18.027.533.084,00
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	112.970.139.422,00	110.209.774.603,00	97,56	112.246.089.541,00
JUMLAH		688.080.294.550,00	634.798.056.162,00	92,26	578.335.346.296,00

Grafik 5.2. Perbandingan komposisi realisasi Pendapatan Asli Daerah



5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 mencapai Rp488.733.692.539,00 atau sebesar 90,43% dari anggaran meningkat sebesar Rp59.499.096.398,00 dari realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp429.234.596.141,00 Rincian lebih lanjut pendapatan Pajak Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Realisasi
Pajak
Daerah

Tabel 5.4. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019
(Dalam Rupiah)

OPD	NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
BPKAD	41106	Pajak Hotel	10.425.000.000,00	11.251.118.434,00	107,92	10.876.293.966,00
	41107	Pajak Restoran	24.876.000.000,00	32.119.241.400,00	129,12	23.883.033.469,00
	41108	Pajak Hiburan	5.423.000.000,00	6.395.835.058,00	117,94	5.851.872.506,00
	41109	Pajak Reklame	1.260.000.000,00	1.891.936.109,00	150,15	1.829.458.581,00
	41110	Pajak Penerangan Jalan	209.000.000.000,00	209.190.428.545,00	100,09	222.826.606.981,00
	41111	Pajak Parkir	1.700.000.000,00	2.222.628.156,00	130,74	751.451.601,00
	41112	Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00	1.575.066.769,00	105,00	1.839.638.931,00
	41114	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.300.000.000,00	8.144.706.900,00	87,58	1.299.030.000,00
	41115	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	88.072.000.000,00	86.469.012.742,00	98,18	81.919.131.240,00
	41116	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	188.869.611.122,00	129.473.718.426,00	68,55	78.158.078.866,00
			JUMLAH	540.425.611.122,00	488.733.692.539,00	90,43

Grafik 5.4. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019



Kenaikan dan penurunan realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Kenaikan realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2019 antara lain adalah pada Pendapatan Pajak Restoran mencapai Rp32.119.241.400,00 atau sebesar 129,12% dari anggaran meningkat sebesar Rp8.236.207.931,00 dari realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp23.883.033.469,00 Pajak Parkir mencapai Rp2.222.628.156,00 atau sebesar 130,74% dari anggaran meningkat sebesar Rp1.471.176.555,00 dari realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp751.451.601,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mencapai Rp8.144.706.900,00 atau sebesar 526,98% dari anggaran meningkat sebesar Rp6.845.676.900,00 dari realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.299.030.000,00.

Penurunan realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2019 antara lain adalah pada Pendapatan Pajak Penerangan Jalan mencapai Rp209.190.428.545,00 atau sebesar 100,09% dari anggaran menurun sebesar Rp13.636.178.436,00 dari realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp222.826.606.981,00 Pendapatan Pajak Air Tanah mencapai Rp1.575.066.769,00 atau sebesar 105% dari anggaran menurun sebesar Rp264.572.162,00 dari realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.839.638.931,00.

Kenaikan dan penurunan Pendapatan Pajak Daerah dirinci pada tabel berikut:

OPD	NO	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2018	<i>(Dalam Rupiah)</i>	
					NAIK/(TURUN)	%
BPKAD	41106	Pajak Hotel	11.251.118.434,00	10.876.293.966,00	374.824.468,00	3,45
	41107	Pajak Restoran	32.119.241.400,00	23.883.033.469,00	8.236.207.931,00	34,49
	41108	Pajak Hiburan	6.395.835.058,00	5.851.872.506,00	543.962.552,00	9,30
	41109	Pajak Reklame	1.891.936.109,00	1.829.458.581,00	62.477.528,00	3,42
	41110	Pajak Penerangan Jalan	209.190.428.545,00	222.826.606.981,00	(13.636.178.436,00)	(6,12)
	41111	Pajak Parkir	2.222.628.156,00	751.451.601,00	1.471.176.555,00	195,78
	41112	Pajak Air Tanah	1.575.066.769,00	1.839.638.931,00	(264.572.162,00)	(14,38)
	41114	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.144.706.900,00	1.299.030.000,00	6.845.676.900,00	526,98
	41115	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	86.469.012.742,00	81.919.131.240,00	4.549.881.502,00	5,55
	41116	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	129.473.718.426,00	78.158.078.866,00	51.315.639.560,00	65,66
	JUMLAH			488.733.692.539,00	429.234.596.141,00	59.499.096.398,00

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 mencapai Rp18.727.531.650,00 atau sebesar 106,66% dari anggaran menurun sebesar Rp99.595.880,00 dari realisasi tahun

anggaran 2018 sebesar Rp18.827.127.530,00

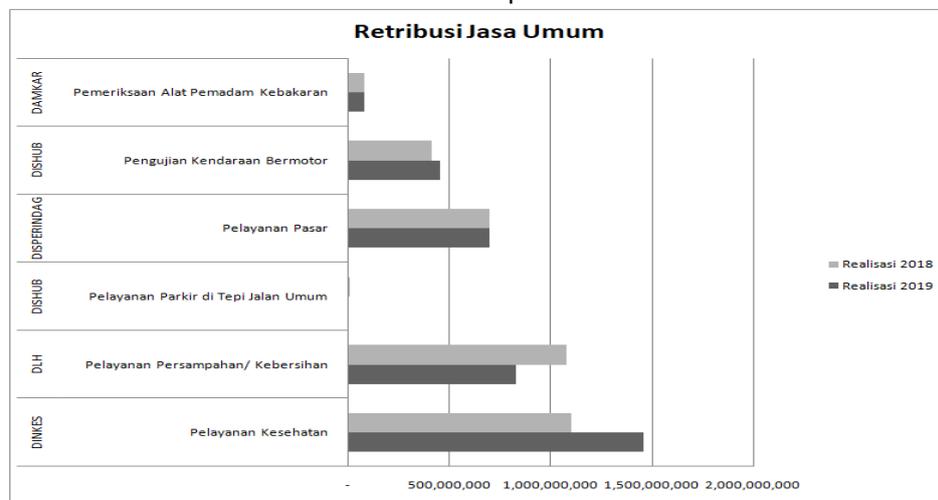
Rincian lebih lanjut pendapatan Retribusi Kota Cilegon dapat dilihat dalam Tabel dan Grafik sebagai berikut:

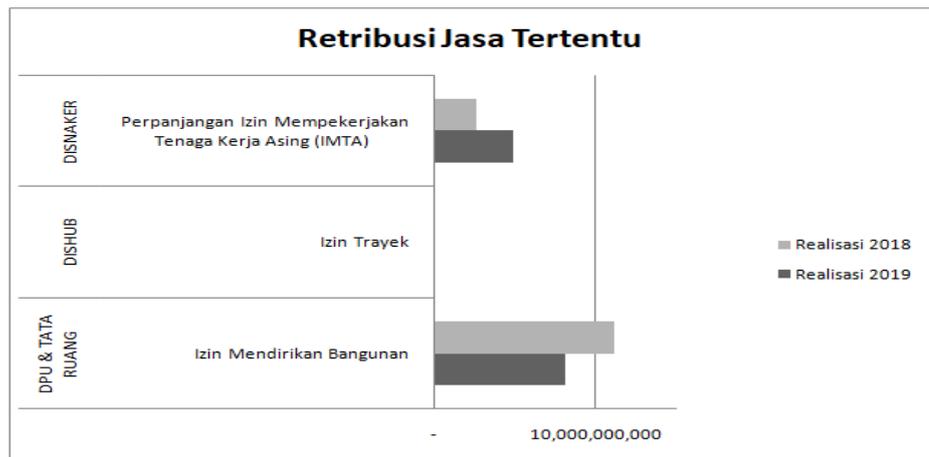
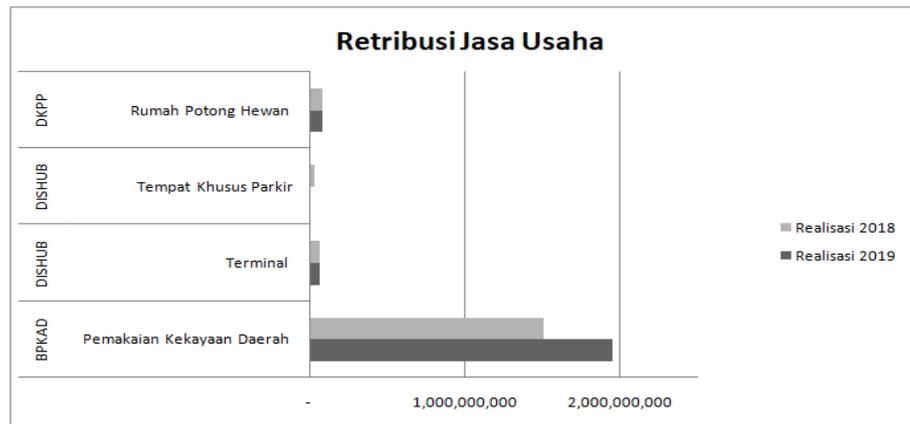
Rincian
Retribusi

Tabel 5.6. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

NO	OPD	NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	(Dalam Rupiah)
							REALISASI 2018
RETRIBUSI JASA UMUM							
1	DINAS KESEHATAN	41201	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.200.000.000,00	1.455.871.000,00	121,32	1.100.845.500,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	41202	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	972.577.582,00	825.520.000,00	84,88	1.079.770.500,00
3	DINAS PERHUBUNGAN	41205	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000,00	0,00	-	8.590.000,00
4		41206	Retribusi Pelayanan Pasar	581.890.000,00	696.944.000,00	119,77	694.845.000,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	41206	Retribusi Pelayanan Pasar	6.600.000,00	7.002.000,00	106,09	3.890.500,00
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	41206	Retribusi Pelayanan Pasar	575.290.000,00	689.942.000,00	119,93	690.954.500,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	41207	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	460.284.054,00	453.473.000,00	98,52	408.017.500,00
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	41208	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	70.000.000,00	80.082.000,00	114,40	79.840.500,00
RETRIBUSI JASA USAHA							
7		41215	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.677.200.000,00	1.952.502.600,00	116,41	1.504.356.900,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	41215	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000,00	157.990.000,00	105,33	193.960.000,00
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	41215	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	427.200.000,00	368.950.200,00	86,36	355.854.500,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	41215	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.100.000.000,00	1.425.562.400,00	129,60	954.542.400,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	41218	Retribusi Terminal	66.700.000,00	60.282.000,00	90,38	59.745.000,00
9	DINAS PERHUBUNGAN	41219	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	-	29.726.000,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	41221	Retribusi Rumah Potong Hewan	75.800.000,00	75.860.000,00	100,08	75.660.000,00
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU							
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	41226	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.000.000.000,00	8.155.919.450,00	101,95	11.144.752.025,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	41229	Retribusi Izin Trayek	53.000.000,00	32.462.000,00	61,25	22.563.380,00
13	DINAS TENAGA KERJA	41232	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	4.000.000.000,00	4.938.615.600,00	123,47	2.618.415.225,00
JUMLAH				17.557.451.636,00	18.727.531.650,00	106,66	18.827.127.530,00

Grafik 5.5. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah





*Kenaikan
Pendapatan
Retribusi
Daerah*

Kenaikan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2019 antara lain adalah pada Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) mencapai Rp4.938.615.600,00 atau sebesar 123,46% dari anggaran meningkat sebesar Rp2.320.200.375,00 dari realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.618.415.225,00 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan mencapai Rp1.455.871.000,00 atau sebesar 121,32% dari anggaran meningkat sebesar Rp355.025.500,00 dari realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.100.845.500,00, Pendapatan Retribusi Izin Trayek mencapai Rp32.462.000,00 atau sebesar 61,25% dari anggaran meningkat sebesar Rp9.898.620,00 dari realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp22.563.380,00.

Penurunan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2019 diantaranya pada Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2019 sebesar Rp8.155.919.450,00 atau sebesar 101,94% dari anggaran menurun sebesar (Rp2.988.832.575,00) atau (26,82%) dari realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp11.144.752.025,00.

Kenaikan dan penurunan Pendapatan Retribusi Daerah dirinci pada Tabel berikut:

Penurunan
Pendapatan
Retribusi
Daerah

NO	OPD	NO	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2018	(Dalam Rupiah)	
						NAIK(TURUN)	%
RETRIBUSI JASA UMUM							
1	DINAS KESEHATAN	41201	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.455.871.000,00	1.100.845.500,00	355.025.500,00	32,25
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	41202	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	825.520.000,00	1.079.770.500,00	(254.250.500,00)	(23,55)
3	DINAS PERHUBUNGAN	41205	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	8.590.000,00	(8.590.000,00)	(100,00)
4		41206	Retribusi Pelayanan Pasar	696.944.000,00	694.845.000,00	2.099.000,00	0,30
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	41206	Retribusi Pelayanan Pasar	7.002.000,00	3.890.500,00	3.111.500,00	79,98
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	41206	Retribusi Pelayanan Pasar	689.942.000,00	690.954.500,00	(1.012.500,00)	(0,15)
5	DINAS PERHUBUNGAN	41207	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	453.473.000,00	408.017.500,00	45.455.500,00	11,14
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	41208	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	80.082.000,00	79.840.500,00	241.500,00	0,30
RETRIBUSI JASA USAHA							
7		41215	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.952.502.600,00	1.504.356.900,00	448.145.700,00	29,79
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	41215	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	157.990.000,00	193.960.000,00	(35.970.000,00)	(18,55)
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	41215	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	368.950.200,00	355.854.500,00	13.095.700,00	3,68
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	41215	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.425.562.400,00	954.542.400,00	471.020.000,00	49,35
8	DINAS PERHUBUNGAN	41218	Retribusi Terminal	60.282.000,00	59.745.000,00	537.000,00	0,90
9	DINAS PERHUBUNGAN	41219	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	29.726.000,00	(29.726.000,00)	(100,00)
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	41221	Retribusi Rumah Potong Hewan	75.860.000,00	75.660.000,00	200.000,00	0,26
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU							
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	41226	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.155.919.450,00	11.144.752.025,00	(2.988.832.575,00)	(26,82)
12	DINAS PERHUBUNGAN	41229	Retribusi Izin Trayek	32.462.000,00	22.563.380,00	9.898.620,00	43,87
13	DINAS TENAGA KERJA	41232	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	4.938.615.600,00	2.618.415.225,00	2.320.200.375,00	88,61
JUMLAH				18.727.531.650,00	18.827.127.530,00	(99.595.880,00)	(0,53)

5.1.1.1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Cilegon di BUMD dan PT. Bank Jabar Cab.Cilegon pada tahun anggaran 2019 mencapai Rp17.127.057.370,00 atau sebesar 100% dari anggaran. Rincian lebih lanjut pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Cilegon dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Rincian Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	(Dalam Rupiah)
					REALISASI 2018
41301	Bagian Laba atas Penyertaan Modal	17.127.092.370	17.127.057.370	100,00	18.027.533.084
4130101	Laba PDAM	3.574.069.375	3.574.069.375	100,00	3.080.089.779
4130102	Laba PT.PCM	7.510.816.736	7.510.781.736	100,00	7.204.877.756
4130103	Laba PT.BPRS	621.743.186	621.743.186	100,00	2.505.165.549
4130104	Laba Bank Jabar Cabang Cilegon	5.420.463.073	5.420.463.073	100,00	5.237.400.000
JUMLAH		17.127.092.370,00	17.127.057.370,00	100,00	18.027.533.084,00

5.1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 mencapai Rp.110.208.991.503,00 atau sebesar 97,56% dari anggaran menurun sebesar Rp112.970.139.422,00 dari realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp112.246.089.541,00. Rincian lebih lanjut Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kota Cilegon dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Rincian
Lain-Lain
Pendapatan
Asli
Daerah

Tabel 5.9. Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah					
NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	(Dalam Rupiah)
					REALISASI 2018
41401	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	826.967.520,00	-	592.527.000,00
4140102	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin	0,00	785.967.520	-	592.527.000,00
4140105	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	41.000.000	-	0,00
41403	Penerimaan Jasa Giro	2.191.118.256,00	1.718.027.842,00	78,41	1.099.244.631,00
4140301	Jasa Giro Kas Daerah	2.191.118.256	1.718.027.842	78,41	1.099.244.631,00
41404	Pendapatan Bunga	12.250.000.000,00	13.052.573.226,00	106,55	14.450.578.610,00
4140401	Pendapatan Bunga Deposito Bank BJB	12.250.000.000	13.052.573.226	106,55	14.450.578.610,00
41405	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	207.500.000,00	221.700.000,00	106,84	42.929.757,00
4140502	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan	207.500.000	221.700.000	106,84	42.929.757,00
41407	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	17.340.372,00	197.356.422,00	1.138,13	0,00
4140701	Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang Pendidikan	0,00	121.533.375	-	0,00
4140702	Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang Kesehatan	0,00	35.161.492	-	0,00
4140703	Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum	6.812.622	10.354.677	151,99	0,00
4140704	Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat	10.527.750	21.383.210	203,11	0,00
4140708	Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup	0,00	8.923.668	-	0,00
41408	Pendapatan Denda Pajak	770.500.000,00	1.781.378.336,00	231,20	1.288.929.675,00
4140806	Pendapatan Denda Pajak Hotel	40.000.000	56.032.805	140,08	10.207.826,00
4140807	Pendapatan Denda Pajak Restoran	40.000.000	89.451.406	223,63	73.698.016,00
4140808	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	3.000.000	2.703.337	90,11	16.496.461,00
4140809	Pendapatan Denda Pajak Reklame	75.000.000	108.798.930	145,07	123.821.710,00
4140810	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	300.000	4.604	1,53	57.118.261,00
4140811	Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.000.000	6.643.129	132,86	10.271.670,00
4140812	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2.200.000	909.179	41,33	2.551.670,00
4140814	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000	48.370.724	967,41	148.449.763,00
4140815	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	600.000.000	1.468.464.222	244,74	846.314.298,00
41409	Pendapatan Denda Retribusi	6.500.000,00	19.999.881,00	307,69	27.180.688,00
4140908	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	-	317.270,00
4140915	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.500.000	6.279.688	139,55	20.171.008,00
4140926	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000	12.937.093	646,85	6.495.300,00
4140929	Pendapatan Denda Retribusi Ijin Trayek	0,00	783.100,00	#DIV/0!	-
4140932	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan IMTA	0,00	0,00	#DIV/0!	197.110,00
41413	Pendapatan dari Pengembalian	1.300.000.000,00	1.022.944.966,00	78,69	2.610.208.216,00
4141306	Pendapatan Dari Pengembalian Temuan	1.300.000.000	1.022.944.966	78,69	2.610.208.216,00
41416	Pendapatan Sewa	1.071.733.212,00	141.561.416,00	13,21	154.603.115,00
4141601	Cicilan Kios	1.047.733.212	105.412.878	10,06	125.374.579,00
4141602	MCK Umum	24.000.000	36.148.538	150,62	29.228.536,00
41418	Pendapatan BLUD	81.192.139.500,00	77.025.673.660,00	94,87	80.534.706.619,00
4141801	Pendapatan BLUD - RSUD	78.000.000.000	73.815.024.258	94,63	77.163.643.572,00
4141802	Pendapatan BLUD - PDB	3.192.139.500	3.210.649.402	100,58	3.371.063.047,00
41419	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	2.000.000.000,00	1.569.708.526,00	78,49	2.331.375.543,00
41423	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	11.963.308.082,00	12.631.882.808,00	105,59	9.113.805.687,00
JUMLAH		112.970.139.422,00	110.209.774.603,00	97,56	112.246.089.541,00

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 mencapai Rp1.093.318.737.900,00 atau sebesar 94,77% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Transfer ini meningkat sebesar Rp79.983.651.087,00 dari realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2018 sebesar Rp1.013.335.086.813,00.

Realisasi
Pendapatan
Transfer

Perbandingan komposisi realisasi Pendapatan Transfer terhadap anggaran dan komparasinya dengan tahun anggaran 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Komposisi
Pendapatan
Transfer

Tabel 5.10. Realisasi Pendapatan Transfer

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
421	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	912.378.533.000,00	866.731.464.020,00	95,00	841.804.102.872,00
42101	Bagi Hasil Pajak	129.306.337.000,00	96.543.890.961,00	74,66	118.352.788.466,00
42102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.114.103.000,00	1.582.740.490,00	74,87	1.593.297.207,00
42103	Dana Alokasi Umum (DAU)	643.891.037.000,00	643.891.037.000,00	100,00	597.861.841.963,00
42104	Dana Alokasi Khusus (DAK)	137.067.056.000,00	124.713.795.569,00	90,99	123.996.175.236,00
422	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	33.166.816.000,00	33.166.816.000,00	100,00	0,00
423	Transfer Pemerintah Provinsi	168.049.961.925,00	153.420.457.880,00	91,29	141.530.983.941,00
424	Bantuan Keuangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	30.000.000.000,00
JUMLAH		1.153.595.310.925,00	1.093.318.737.900,00	94,77	1.013.335.086.813,00

naikan
Pendapatan
Transfer

Kenaikan realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2019 antara lain adalah pada Bantuan Keuangan mencapai Rp40.000.000.000,00 atau meningkat sebesar 33,33% dari realisasi pendapatan Bantuan Keuangan tahun 2018 sebesar Rp30.000.000.000,00, Realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp643.891.037.000,00 meningkat sebesar Rp46.029.195.037,00 atau 7,70% dari realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum tahun 2018 sebesar Rp597.861.841.963,00

Penurunan
Pendapatan
Transfer

Penurunan realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2019 antara lain adalah pada pendapatan Bagi Hasil Pajak mencapai Rp96.543.890.961,00 atau sebesar 74,66% dari anggaran, menurun sebesar (Rp21.808.897.505,00) atau sebesar (18,43%) dari realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2018 sebesar Rp118.352.788.466,00.

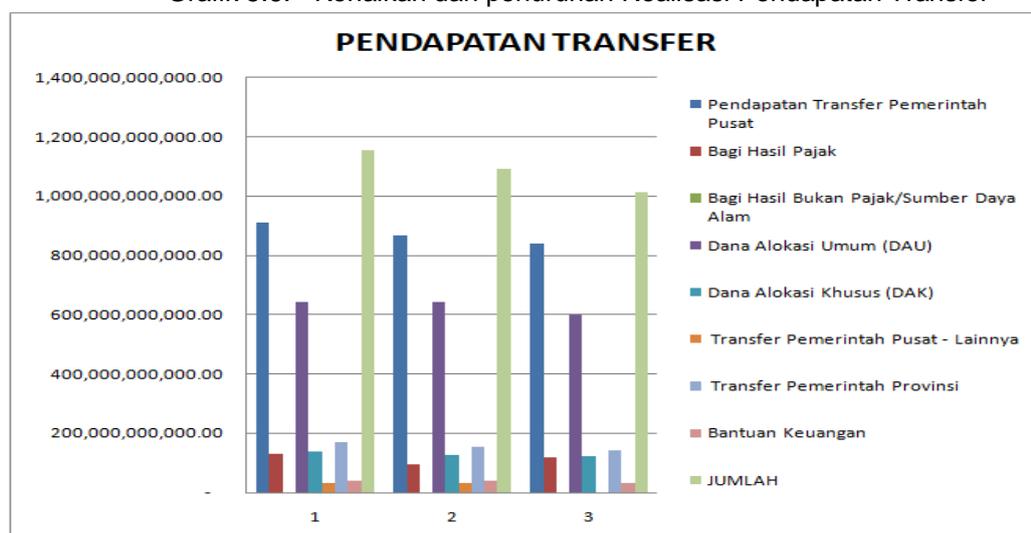
Kenaikan dan penurunan Pendapatan Transfer tahun 2019 dirinci pada Tabel berikut:

Tabel 5.11. Kenaikan dan Penurunan Realisasi Pendapatan Transfer

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2018	NAIK(TURUN)	%
421	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	866.731.464.020,00	841.804.102.872,00	24.927.361.148,00	2,96
42101	Bagi Hasil Pajak	96.543.890.961,00	118.352.788.466,00	(21.808.897.505,00)	(18,43)
42102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.582.740.490,00	1.593.297.207,00	(10.556.717,00)	(0,66)
42103	Dana Alokasi Umum (DAU)	643.891.037.000,00	597.861.841.963,00	46.029.195.037,00	7,70
42104	Dana Alokasi Khusus (DAK)	124.713.795.569,00	123.996.175.236,00	717.620.333,00	0,58
422	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	33.166.816.000,00	0,00	33.166.816.000,00	-
423	Transfer Pemerintah Provinsi	153.420.457.880,00	141.530.983.941,00	11.889.473.939,00	8,40
424	Bantuan Keuangan	40.000.000.000,00	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	33,33
	JUMLAH	1.093.318.737.900,00	1.013.335.086.813,00	79.983.651.087,00	7,89

Grafik 5.6. Kenaikan dan penurunan Realisasi Pendapatan Transfer



5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Rincian
Bagi Hasil
Pajak

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 mencapai Rp96.543.890.961,00 atau sebesar 74,66% dari anggaran. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak menurun sebesar (Rp21.808.897.505,00) atau 18,43% dari realisasi Tahun 2018 sebesar Rp118.352.788.466,00.

Rincian lebih lanjut Dana Bagi Hasil Pajak Kota Cilegon dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.12. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak

(Dalam Rupiah)					
NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
42101	Bagi Hasil Pajak				
4210101	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	5.005.059.000,00	4.714.100.263,00	94,19	4.589.012.440,00
4210103	Bagi Hasil dari PPh Ps1 25 ,Ps129 ,PPH Ps1 21	124.301.278.000,00	91.829.790.698,00	73,88	113.763.776.026,00
JUMLAH		129.306.337.000,00	96.543.890.961,00	74,66	118.352.788.466,00

Rincian
Bagi Hasil
Bukan
Pajak

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

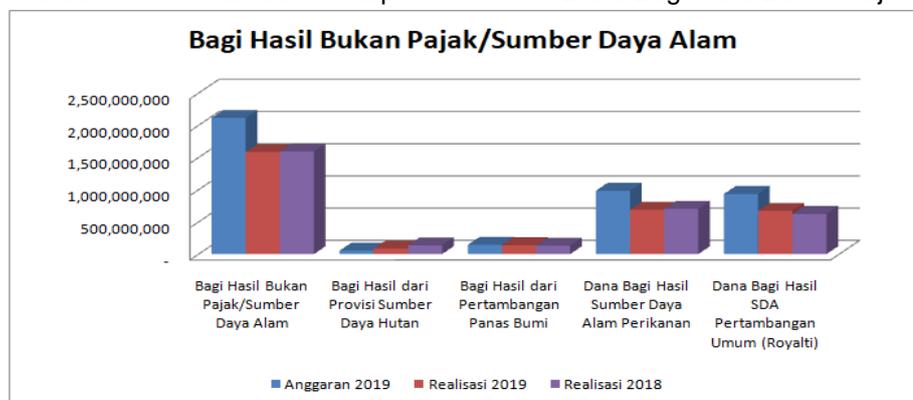
Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 mencapai Rp1.582.740.490,00 atau sebesar 74,87% dari anggaran. Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak menurun sebesar (Rp10.556.717,00) atau (0,66%) dari realisasi Tahun 2018 sebesar Rp1.593.297.207,00.

Rincian lebih lanjut Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Cilegon dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 5.13. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

(Dalam Rupiah)					
NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
42102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam				
4210202	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	53.924.000,00	85.255.299,00	158,10	136.989.141,00
4210210	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	142.903.000,00	137.453.515,00	96,19	131.675.630,00
4210211	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	983.593.000,00	689.340.471,00	70,08	701.234.591,00
4210212	Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum (Royalti)	933.683.000,00	670.691.205,00	71,83	623.397.845,00
JUMLAH		2.114.103.000,00	1.582.740.490,00	74,87	1.593.297.207,00

Grafik 5.7. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Bukan Pajak



Rincian
Dana
Alokasi
Umum

5.1.1.2.2. Dana Alokasi Umum

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 mencapai Rp643.891.037.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran. Realisasi Dana Alokasi Umum meningkat sebesar Rp46.029.195.037,00 atau 7,70% dari realisasi Tahun 2018 sebesar Rp597.861.841.963,00.

Rincian lebih lanjut Dana Alokasi Umum Kota Cilegon dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 5.14. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
42103	Dana Alokasi Umum	643.891.037.000,00	643.891.037.000,00	100,00	597.861.841.963,00
	JUMLAH	643.891.037.000,00	643.891.037.000,00	100,00	597.861.841.963,00

Dasar Hukum Dana Alokasi Umum Kota Cilegon Tahun 2019 yaitu Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018.

5.1.1.2.3. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 mencapai Rp124.713.795.569,00 atau sebesar 90,99% dari anggaran.

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp124.713.795.569 dan Rp123.996.175.236,00, Naik sebesar Rp717.620.333 atau 0.58% dibandingkan dengan tahun 2018.

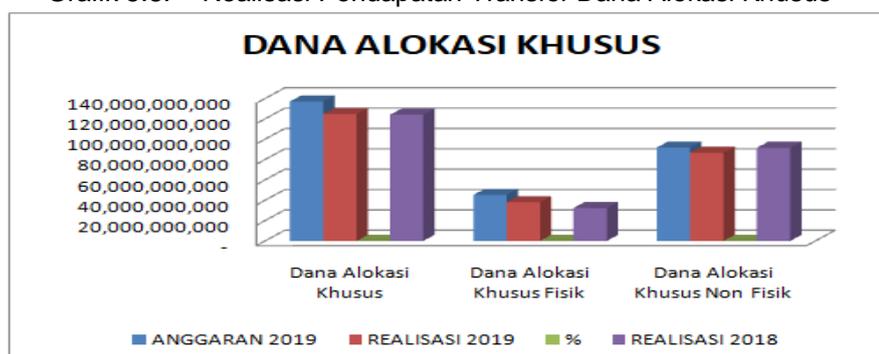
Rincian lebih lanjut Dana Alokasi Khusus Kota Cilegon dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 5.15. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus
(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
42104 Dana Alokasi Khusus	137.067.056.000,00	124.713.795.569,00	90,99%	123.996.175.236,00
4210401 Dana Alokasi Khusus Fisik	45.244.379.000,00	38.118.266.482,00	84,25%	32.413.013.220,00
4210402 Dana Alokasi Khusus Non Fisik	91.822.677.000,00	86.595.529.087,00	94,31%	91.583.162.016,00
JUMLAH	137.067.056.000,00	124.713.795.569,00	90,99%	123.996.175.236,00

Rincian
Dana
Alokasi
Khusus

Grafik 5.8. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus



5.1.1.2.4. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

5.1.1.2.4.1. Dana Penyesuaian

Dana
Penyesuaian

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Insentif Daerah Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 Rp33.166.816.000,00, sedangkan pada tahun anggaran 2018 terealisasi NIHIL dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.16. Realisasi Pendapatan Transfer DID

					(Dalam Rupiah)
URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	
42203 Dana Penyesuaian	33.166.816.000,00	33.166.816.000,0	100%	0	
4220303 Dana Insentif Daerah	33.166.816.000,00	33.166.816.000,0	100%	0	
JUMLAH	33.166.816.000,00	33.166.816.000,00	100%	0	

5.1.1.2.5. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

5.1.1.2.5.1 Dana Bagi Hasil Propinsi

Dana Bagi
Hasil
Propinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Propinsi kepada Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 mencapai Rp153.420.457.880,00 atau sebesar 91,29% dari anggaran. Realisasi Tahun ini meningkat sebesar Rp11.889.473.939,00 dari realisasi Tahun 2018 sebesar Rp141.530.983.941,00 Rincian lebih lanjut Dana Bagi Hasil Propinsi dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 5.17. Realisasi Pendapatan Transfer BHB Provinsi 2019

					<i>(Dalam Rupiah)</i>
URAIAN		ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
42301	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	168.049.961.925,00	153.420.457.880,00	91,29%	141.530.983.941,00
4230101	Pendapatan Bagi Hasil PKB	40.036.188.506,00	37.006.460.834,00	92,43%	31.987.300.749,00
4330103	Pendapatan Bagi Hasil BBNKB	39.307.116.000,00	30.270.356.749,00	77,01%	27.707.890.338,00
4330105	Pendapatan Bagi Hasil PBBKB	60.335.261.000,00	58.788.889.729,00	97,44%	61.296.501.677,00
4330108	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	28.371.396.419,00	27.354.750.568,00	96,42%	20.539.291.177,00
JUMLAH		168.049.961.925,00	153.420.457.880,00	91,29%	141.530.983.941,00

Bantuan
Keuangan
Dari
Propinsi

5.1.1.2.6. Bantuan Keuangan

5.1.1.2.6.1. Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Propinsi

Realisasi Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp40.000.000.000 dan Rp30.000.000.000,00 Naik sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 33,33% dibandingkan dengan tahun 2018.

Perbandingan komposisi realisasi Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Propinsi terhadap anggaran dan komparasinya dengan tahun anggaran 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.18. Realisasi Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Provinsi 2019

					<i>(Dalam Rupiah)</i>
URAIAN		ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
424	Bantuan Keuangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100%	30.000.000.000,00
42401	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100%	30.000.000.000,00
JUMLAH		40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100%	30.000.000.000,00

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan
Hibah

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 mencapai sebesar Rp38.863.765.413,00 atau sebesar 97,71% dari anggaran.

Perbandingan komposisi realisasi Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Propinsi terhadap anggaran dan komparasinya dengan tahun anggaran 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.19 Realisasi Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Provinsi 2019

Tabel 5.19 Realisasi Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Provinsi 2019				
<i>(Dalam Rupiah)</i>				
URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
431 Pendapatan Hibah	39.774.000.000,00	38.863.534.327,00	97,71%	38.349.591.841,00
43106 Pendapatan Hibah Dana BOS	39.774.000.000,00	38.863.534.327,00	97,71%	38.349.591.841,00
Hibah Dana BOS SMPN	8.917.000.000,00	8.319.479.009,00	93,30%	7.910.307.622,00
Hibah Dana BOS SDN	30.857.000.000,00	30.544.055.318,00	98,99%	30.439.284.219,00
JUMLAH	39.774.000.000,00	38.863.534.327,00	97,71%	38.349.591.841,00

Pendapatan Hibah BOS SMPN Pada tahun 2019 dan tahun 2018 adalah Rp8.319.479.009,00 dan Rp7.910.307.622,00 naik sebesar Rp409.171.387,00 atau naik 5,17% dari tahun 2018.

Pendapatan Hibah BOS SDN Pada tahun 2019 dan tahun 2018 adalah Rp30.544.055.318,00 dan Rp30.439.284.219,00 naik sebesar Rp104.771.099,00 atau naik 0,34% dari tahun 2018.

Alokasi Anggaran BOS Kinerja yang diterima Kota Cilegon tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Alokasi
BOS
Kinerja
2019

Tabel 5.19 .1 ALOKASI BOS KINERJA DINDIK 2019		
KOTA CILEGON		
NO	UNIT	JUMLAH (Rp)
I	SDN:	380.000.000
1	SDN CIPAOT CILEGON	127.000.000
2	SDN KARANG SETRA	79.000.000
3	SDN KOTA SARI	113.000.000
4	SDN TEMBULUN II	61.000.000
II	SMPN :	663.000.000
1	SMPN 2 CILEGON	663.000.000
	JUMLAH I + II	1.043.000.000

5.1.2. Belanja

Realisasi Belanja Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 mencapai Rp1.822.331.380.543,00 atau sebesar 88,32 % dari anggaran. Realisasi belanja ini meningkat dari realisasi belanja tahun anggaran 2018 yaitu sebesar Rp1.589.173.687.634,00. Dengan demikian, terdapat kenaikan realisasi belanja sebesar Rp233.157.692.909,00 atau 14,67% dari tahun 2018.

Realisasi
Belanja
Rp1.822
Milyar

Realisasi Belanja Operasi pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.409.106.464.098,00 dan Rp1.284.537.068.032,00. Naik sebesar Rp124.569.396.066,00 atau 9,70% dibandingkan dengan tahun 2018.

Komposisi
Belanja

Realisasi Belanja Modal pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp413.224.916.445,00 dan Rp304.636.619.602,00 Naik sebesar Rp108.588.296.843,00 atau 35,65% dibandingkan dengan tahun 2018.

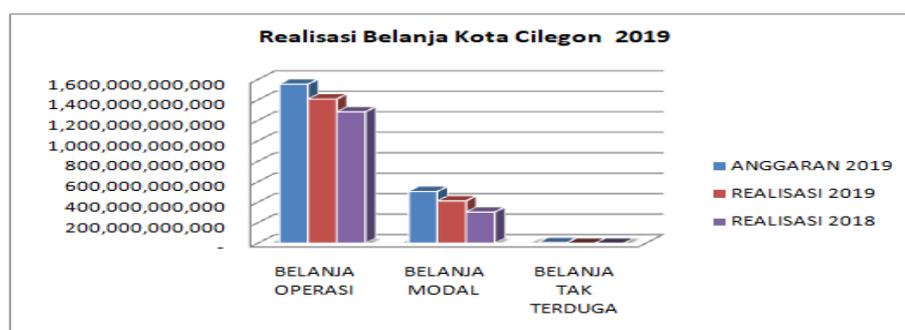
Perbandingan komposisi realisasi belanja terhadap anggaran dan komparasinya dengan tahun anggaran 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.20. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

BELANJA	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
51 BELANJA OPERASI	1.553.993.677.539,00	1.408.997.194.098,00	90,67%	1.284.537.068.032,00
52 BELANJA MODAL	504.881.312.179,00	413.334.186.445,00	81,87%	304.636.619.602,00
53 BELANJA TAK TERDUGA	4.500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
JUMLAH	2.063.374.989.718,00	1.822.331.380.543,00	88,32%	1.589.173.687.634,00

Grafik 5.9. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019



5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Cilegon tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.409.106.464.098,00 atau 90,68% dari anggaran.

Realisasi
Belanja
Operasi

Realisasi Belanja Pegawai pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp681.225.108.290,00 dan Rp597.044.773.746,00. Naik sebesar Rp84.180.334.544,00 atau 14,10% dibandingkan dengan tahun 2018.

Realisasi Belanja Barang pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp673.160.001.768,00 dan Rp638.168.701.242,00 Naik sebesar Rp34.991.300.526,00 atau 5,48% dibandingkan dengan tahun 2018.

Realisasi Belanja Hibah pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp52.488.994.040,00 dan Rp43.287.073.044,00 Naik sebesar Rp9.201.920.996,00 atau 21,26% dibandingkan dengan tahun 2018.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.232.360.000,00 dan Rp6.036.520.000,00 turun sebesar (Rp3.804.160.000,00) atau turun (63,02%) dibandingkan dengan tahun 2018.

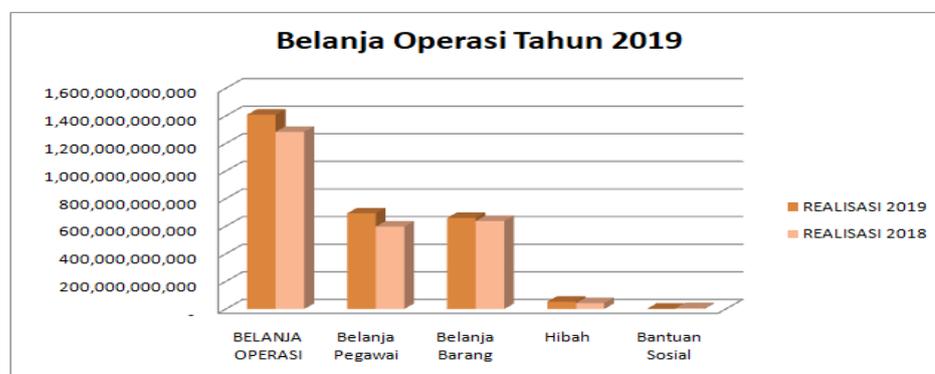
Komposisi
Belanja
Operasi

Perbandingan komposisi realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 terhadap anggaran dan komparasinya dengan tahun anggaran 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.21. Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Terhadap Anggaran
(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
51 BELANJA OPERASI	1.553.993.677.539,00	1.409.106.464.098,00	90,68%	1.284.537.068.032,00
511 Belanja Pegawai	765.100.796.914,00	681.225.108.290,00	89,04%	597.044.773.746,00
512 Belanja Barang	730.350.528.841,00	673.160.001.768,00	92,17%	638.168.701.242,00
515 Hibah	53.371.238.000,00	52.488.994.040,00	98,35%	43.287.073.044,00
516 Bantuan Sosial	5.171.113.784,00	2.232.360.000,00	43,17%	6.036.520.000,00
JUMLAH	1.553.993.677.539,00	1.409.106.464.098,00	90,68%	1.284.537.068.032,00

Grafik 5.10. Realisasi Belanja Operasi



5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Rincian lebih lanjut Belanja Pegawai Kota Cilegon dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Rincian
Pegawai

Tabel 5.22 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019					
(Dalam Rupiah)					
	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%Realisasi	REALISASI 2018
511	Belanja Pegawai	750.625.913.914,00	681.225.108.290,00	90,75%	597.044.773.746,00
51101	Belanja Gaji dan Tunjangan	428.880.780.925,00	408.481.817.203,00	95,24%	390.724.279.684,00
5110101	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	255.429.602.336,00	244.296.808.013,00	95,64%	230.574.837.250,00
5110102	Tunjangan Keluarga	26.563.445.051,00	25.264.486.923,00	95,11%	24.057.071.366,00
5110103	Tunjangan Jabatan 1)	9.947.184.750,00	8.891.967.613,00	89,39%	9.124.183.000,00
5110104	Tunjangan Fungsional	16.133.549.320,00	15.151.617.000,00	93,91%	14.743.853.000,00
5110105	Tunjangan Fungsional Ummum	4.392.625.867,00	3.633.675.000,00	82,72%	3.487.340.000,00
5110106	Tunjangan Beras 1)	15.364.602.524,00	13.231.290.112,00	86,12%	13.322.407.740,00
5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	655.424.630,00	434.004.227,00	66,22%	345.396.540,00
5110108	Pembulatan Gaji	10.557.505,00	3.896.940,00	36,91%	3.254.309,00
5110109	Iuran Asuransi Kesehatan	7.681.862.235,00	6.951.675.187,00	90,49%	6.577.009.357,00
5110110	Uang Paket 1)	82.981.500,00	68.607.000,00	82,68%	67.032.000,00
5110111	Tunjangan Badan Musyawarah 2)	32.261.775,00	22.304.625,00	69,14%	23.842.350,00
5110112	Tunjangan Komisi 2)	56.408.625,00	40.300.575,00	71,44%	43.208.550,00
5110113	Tunjangan Badan Anggaran 2)	32.261.775,00	22.030.575,00	68,29%	23.933.700,00
5110114	Tunjangan Badan Kehormatan 2)	13.656.825,00	6.059.550,00	44,37%	7.856.100,00
5110115	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	152.097.750,00	17.584.875,00	11,56%	17.950.275,00
5110116	Tunjangan Perumahan 2)	6.430.000.000,00	6.140.000.000,00	95,49%	6.000.000.000,00
5110118	Uang Jasa Pengabdian 2)	335.160.000,00	309.960.000,00	92,48%	12.600.000,00
5110121	Tunjangan Badan Legislasi Daerah	21.969.675,00	12.225.675,00	55,65%	14.159.250,00
5110122	Premi Asuransi JKK 1)	849.148.408,00	500.815.822,00	58,98%	472.842.204,00
5110123	Premi Asuransi JKM 1)	1.943.211.374,00	1.502.441.741,00	77,32%	1.834.799.893,00
5110124	Tunjangan Khusus Guru PNSD	75.967.257.000,00	75.944.440.750,00	99,97%	73.139.202.800,00
5110125	Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	260.512.000,00	219.825.000,00	84,38%	552.000.000,00
5110126	Tunjangan Reses	1.617.000.000,00	1.087.800.000,00	67,27%	1.543.500.000,00
5110127	Tunjangan Transportasi	4.908.000.000,00	4.728.000.000,00	96,33%	4.736.000.000,00
51102	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	285.933.005.876,00	247.537.970.227,00	86,57%	184.084.534.195,00
5110201	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	285.216.245.876,00	246.987.215.227,00	86,60%	183.350.039.194,00
5110202	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	716.760.000,00	550.755.000,00	76,84%	734.495.001,00
51103	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.912.973.976,00	7.423.482.708,00	93,81%	6.845.367.888,00
5110301	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	6.541.500.000,00	6.321.000.000,00	96,63%	6.174.000.000,00
5110302	Biaya Pemungutan Operasional KDH/WKDH	1.025.393.976,00	816.042.708,00	79,58%	358.887.888,00
5110303	Dana Operasional Pimpinan DPRD	346.080.000,00	286.440.000,00	82,77%	312.480.000,00
51105	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	27.021.280.556,00	17.043.410.070,00	63,07%	14.916.367.500,00
51106	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	877.872.581,00	738.428.082,00	84,12%	474.224.479,00
	JUMLAH	750.625.913.914,00	681.225.108.290,00	90,75%	597.044.773.746,00

INFORMASI:

- Realisasi belanja langsung pegawai berupa Honor PNS, Honor Non PNS dan Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat disajikan sebagai komponen belanja barang jasa. Hal ini berpedoman pada kode rekening Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

5.1.2.1.2. Belanja Barang Jasa

Rincian lebih lanjut Belanja Barang Jasa Kota Cilegon dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Rincian
Belanja
Barang
Jasa

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
512 Belanja Barang	744.825.411.841,00	673.160.001.768,00	90,38%	638.168.701.242,00
51201 Belanja Bahan Pakai Habis	18.902.814.397,00	17.313.788.072,00	91,59%	15.210.602.688,00
5120101 Belanja Alat Tulis Kantor	11.446.682.403,00	10.645.740.454,00	93,00%	9.674.859.200,00
5120102 Belanja Dokumen/Administrasi Tender	8.020.000,00	2.140.000,00	26,68%	11.000.000,00
5120103 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pi	2.070.703.058,00	1.929.809.684,00	93,20%	1.504.116.346,00
5120104 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lai	530.630.606,00	490.216.000,00	92,38%	494.927.000,00
5120105 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pemf	1.893.082.130,00	1.846.681.935,00	97,55%	1.558.603.905,00
5120106 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	188.159.000,00	172.944.000,00	91,91%	88.020.800,00
5120107 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakara	181.490.000,00	133.490.000,00	73,55%	121.786.300,00
5120108 Belanja Pengisian Tabung Gas	33.440.000,00	23.429.999,00	70,07%	25.285.000,00
5120110 Belanja Suku Cadang Peralatan Kantor	752.102.000,00	530.946.100,00	70,59%	518.474.800,00
5120111 Belanja Suku Cadang Komputer	945.105.400,00	806.354.300,00	85,32%	541.844.887,00
5120112 Belanja Suku Cadang Alat Studio	81.500.000,00	40.820.000,00	50,09%	29.695.000,00
5120113 Belanja Suku Cadang Alat Komunikasi	63.550.000,00	18.450.000,00	29,03%	9.946.750,00
5120114 Belanja Suku Cadang Alat Musik	64.335.000,00	63.327.000,00	98,43%	-
5120116 Belanja Suku Cadang Alat Bengkel	174.541.500,00	171.599.000,00	98,31%	156.496.500,00
5120117 Belanja Suku Cadang Perlengkapan Kantor	280.095.500,00	250.113.000,00	89,30%	107.137.000,00
5120118 Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	0	0	0	25.100.000,00
5120120 Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	37.475.500,00	37.475.000,00	100,00%	36.445.000,00
5120121 Belanja Suku Cadang Alat Laboratorium	54.300.000,00	54.175.000,00	99,77%	64.900.000,00
5120124 Belanja Suku Cadang Alat Rumah Tangga	59.583.000,00	59.120.000,00	99,22%	5.679.500,00
5120125 Belanja Suku Cadang Survey	4.019.300,00	4.019.300,00	100,00%	-
5120126 Belanja Suku Cadang Lainnya	34.000.000,00	32.937.300,00	96,87%	236.284.700,00
51202 Belanja Bahan/Material	39.945.753.994,25	36.679.163.373,00	91,82%	34.259.207.846,00
5120201 Belanja Bahan Baku Bangunan	10.244.265.084,25	8.774.559.118,00	85,65%	8.045.162.250,00
5120202 Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.148.572.750,00	1.895.015.185,00	88,20%	3.929.996.800,00
5120203 Belanja Bahan Obat-Obatan	7.157.909.000,00	6.847.913.179,00	95,67%	3.355.769.282,00
5120204 Belanja Bahan Kesehatan	146.771.000,00	140.286.250,00	95,58%	249.162.100,00
5120205 Belanja Bahan Pakaian	205.200.000,00	204.410.400,00	99,62%	83.375.000,00
5120206 Belanja Persediaan Bahan Kimia	28.050.000,00	28.050.000,00	100,00%	25.200.000,00
5120208 Belanja bahan percontohan	644.954.203,00	614.862.000,00	95,33%	63.244.900,00
5120209 Belanja temak/bibit temak	29.100.000,00	28.715.000,00	98,68%	71.800.000,00
5120210 Belanja pandel, plakat dan umbul-umbul	615.394.000,00	605.929.450,00	98,46%	373.076.500,00
5120211 Belanja bahan laboratorium/reagent	909.967.200,00	835.573.500,00	91,82%	675.896.900,00
5120212 Belanja bahan alat habis pakai rumah sakit	1.379.845.000,00	1.358.959.296,00	98,49%	174.792.300,00
5120213 Belanja Bahan Makanan	2.001.180.400,00	1.844.470.780,00	92,17%	1.229.064.750,00
5120214 Belanja Bahan Alat perlengkapan pendidikan/	7.632.422.697,00	7.218.748.515,00	94,58%	5.058.292.320,00
5120215 Belanja peralatan dapur	282.979.260,00	259.242.310,00	91,61%	129.020.190,00
5120216 Belanja Bahan/Barang Hadiah	6.281.422.400,00	5.801.525.450,00	92,36%	7.455.453.784,00
5120217 Belanja Bahan Alat Bangunan	237.721.000,00	220.902.940,00	92,93%	3.339.900.770,00
51203 Belanja Jasa Kantor	185.591.601.382,00	167.675.405.902,00	90,35%	148.342.554.705,00
5120301 Belanja Telepon	950.575.833,00	500.376.811,00	52,64%	437.483.313,00
5120302 Belanja Air	933.085.513,00	661.790.400,00	70,92%	623.032.010,00
5120303 Belanja Listrik	26.035.439.473,00	21.575.369.132,00	82,87%	23.267.710.637,00
5120305 Belanja Surat Kabar/Majalah	1.774.004.900,00	1.615.629.456,00	91,07%	1.539.456.024,00
5120306 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV	3.191.675.000,00	2.367.246.974,00	74,17%	1.881.216.811,00
5120307 Belanja Paket/Pengiriman	120.000,00	0	0,00%	19.000,00
5120308 Belanja Sertifikasi	638.017.500,00	412.613.196,00	64,67%	54.500.000,00
5120309 Belanja Jasa Transaksi Keuangan	30.255.000,00	3.604.000,00	11,91%	10.517.500,00
5120312 Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	53.819.446.758,00	50.428.334.447,00	93,70%	47.859.644.351,00
5120313 Belanja Jasa Keanggotaan	956.000.000,00	918.000.000,00	96,03%	926.000.000,00
5120314 Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.082.498.598,00	28.268.971.750,00	90,95%	26.475.735.063,00
5120315 Belanja Dokumentasi	544.165.641,00	446.062.720,00	81,97%	235.778.050,00
5120316 Belanja Dekorasi	1.041.018.049,00	978.296.849,00	93,98%	740.814.650,00
5120317 Belanja Pemberitaan	5.081.174.446,00	4.793.018.200,00	94,33%	4.196.683.100,00
5120318 Belanja Promosi dan Propaganda	2.372.305.191,00	2.268.014.982,00	95,60%	2.453.391.800,00
5120319 Belanja Jasa Laboratorium	1.392.828.000,00	1.200.970.900,00	86,23%	883.192.000,00
5120320 Belanja Jasa Kesehatan	10.958.898.883,00	9.889.621.938,00	90,24%	6.479.206.721,00
5120321 Belanja Jasa tenaga ahli/narasumber/pakar/pr	16.401.411.747,00	14.504.076.897,00	88,43%	15.033.862.500,00
5120322 Belanja Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kar	25.952.550.850,00	24.717.373.850,00	95,24%	12.060.505.250,00
9120323 Belanja Jasa Kantor Lainnya	2.436.130.000,00	2.126.033.400,00	87,27%	3.183.805.925,00

Lanjutan...

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
51204 Belanja Premi Asuransi	17.070.162.146,00	13.111.214.191,00	76,81%	9.266.051.826,00
5120401 Belanja Premi Asuransi Kesehatan	14.700.127.066,00	11.233.204.486,00	76,42%	7.138.661.804,00
5120402 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.980.450.000,00	1.585.820.246,00	80,07%	1.895.315.706,00
5120404 Belanja Premi Asuransi Lainnya	389.585.080,00	292.189.459,00	75,00%	232.074.316,00
51205 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.503.461.369,00	22.873.837.395,00	83,17%	22.087.108.049,00
5120501 Belanja Jasa Service	1.965.140.000,00	1.416.063.676,00	72,06%	1.411.495.966,00
5120502 Belanja Penggantian Suku Cadang	5.059.799.203,00	4.451.747.407,00	87,98%	4.133.909.239,00
5120503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	16.424.473.021,00	14.066.802.263,00	85,65%	13.819.394.100,00
5120504 Belanja Jasa KIR	29.600.000,00	13.850.000,00	46,79%	7.100.000,00
5120505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.706.946.145,00	1.267.331.600,00	74,25%	1.223.176.700,00
5120506 Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	500.000,00	286.000,00	57,20%	4.903.600,00
5120507 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor lainnya	2.317.003.000,00	1.657.756.449,00	71,55%	1.487.128.444,00
51206 Belanja Cetak dan Penggandaan	19.931.227.481,00	17.717.992.217,00	88,90%	15.723.317.144,00
5120601 Belanja Cetak	16.138.987.951,00	14.540.859.690,00	90,10%	13.120.563.509,00
5120602 Belanja Penggandaan	1.879.706.530,00	1.600.492.677,00	85,15%	1.374.344.950,00
5120603 Belanja Cetak Spanduk	1.912.533.000,00	1.576.639.850,00	82,44%	1.228.408.685,00
51207 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.384.629.392,00	9.303.550.601,00	89,59%	7.769.015.932,00
5120701 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	200.000.000,00	-	0,00%	-
5120702 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	4.799.565.000,00	4.343.447.500,00	90,50%	4.156.742.700,00
5120703 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.292.534.392,00	1.156.965.625,00	89,51%	924.820.000,00
5120704 Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Saran	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%	-
5120705 Belanja Sewa lainnya	4.083.530.000,00	3.794.137.476,00	92,91%	2.687.453.232,00
51208 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.536.881.000,00	1.320.966.000,00	85,95%	939.519.000,00
5120801 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.451.831.000,00	1.240.366.000,00	85,43%	911.919.000,00
5120802 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	85.050.000,00	80.600.000,00	94,77%	27.600.000,00
51209 Belanja Sewa Alat Berat	2.960.000,00	0	0,00%	249.781.000,00
5120901 Belanja sewa eskavator	0	0	0,00%	128.396.400,00
5120902 Belanja sewa buldozer	0	0	0,00%	22.000.000,00
5120903 Belanja Sewa Alat Berat Lainnya	2.960.000,00	0	0,00%	89.020.000,00
51210 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.027.446.297,00	6.879.210.410,00	85,70%	4.699.147.909,00
5121001 Belanja Sewa Meja Kursi	1.290.590.000,00	996.739.900,00	77,23%	826.531.100,00
5121002 Belanja Sewa Komputer dan Printer	212.000.000,00	29.865.000,00	14,09%	-
5121004 Belanja Sewa Generator	273.100.000,00	166.262.470,00	60,88%	58.040.000,00
5121005 Belanja Sewa Tenda	2.050.403.500,00	1.996.997.940,00	97,40%	1.370.158.059,00
5121007 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	4.201.352.797,00	3.689.345.100,00	87,81%	2.444.418.750,00
51211 Belanja Makanan dan Minuman	53.833.619.034,00	47.656.221.486,00	88,53%	39.869.616.581,00
5121101 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.695.879.041,00	3.464.105.300,00	93,73%	3.770.855.651,00
5121102 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.925.333.580,00	7.984.575.296,00	89,46%	6.329.684.450,00
5121103 Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.686.826.000,00	3.618.492.500,00	98,15%	2.566.377.200,00
5121104 Belanja makanan dan minuman Pelaksanaan Kegiatan	37.525.580.413,00	32.589.048.390,00	86,84%	27.202.699.280,00
51212 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.119.498.050,00	1.086.439.000,00	97,05%	976.395.300,00
5121201 Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	150.000.000,00	146.960.000,00	97,97%	92.664.000,00
5121202 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	250.900.000,00	233.966.000,00	93,25%	133.450.000,00
5121203 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	238.074.650,00	233.315.000,00	98,00%	-
5121204 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	480.523.400,00	472.198.000,00	98,27%	99.050.000,00
5121205 Belanja Pakaian Dinas Upacara	0	0	0,00%	276.173.300,00
5121206 Belanja Pakaian Dinas Lainnya	0	0	0,00%	375.058.000,00
51213 Belanja Pakaian Kerja	3.458.335.560,00	3.241.230.150,00	93,72%	1.580.563.800,00
5121301 Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.153.575.560,00	1.981.126.500,00	91,99%	775.178.100,00
5121302 Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan	1.304.760.000,00	1.260.103.650,00	96,58%	805.385.700,00
51214 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	5.162.169.983,00	4.922.662.150,00	95,36%	5.265.530.609,00
5121402 Belanja Pakaian adat daerah	310.150.000,00	245.292.600,00	79,09%	-
5121403 Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.514.030.000,00	1.431.003.300,00	94,52%	60.830.000,00
5121404 Belanja Pakaian Olahraga	3.163.289.983,00	3.074.065.250,00	97,18%	576.917.184,00
5121405 Belanja Pakaian Korps Musik	156.180.000,00	153.781.000,00	98,46%	2.192.869.025,00
5121406 Belanja Pakaian Lainnya	18.520.000,00	18.520.000,00	100,00%	2.434.914.400,00

Lanjutan..

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
51215 Belanja Perjalanan Dinas	54.518.925.879,00	47.161.299.684,00	86,50%	42.233.796.866,00
5121501 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	783.016.000,00	320.125.000,00	40,88%	398.190.000,00
5121502 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.735.909.879,00	46.841.174.684,00	87,17%	41.835.606.866,00
51216 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	150.895.700,00	90.143.400,00	59,74%	91.511.500,00
5121602 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	11.375.000,00	11.375.000,00	100,00%	9.750.000,00
5121603 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	139.520.700,00	78.768.400,00	56,46%	81.761.500,00
51217 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan B	7.575.343.500,00	5.821.763.250,00	76,85%	4.289.899.600,00
5121701 Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	1.038.005.000,00	600.245.000,00	57,83%	228.908.600,00
5121702 Belanja Sosialisasi	67.375.000,00	66.577.250,00	98,82%	3.750.000,00
5121703 Belanja Bimbingan Teknis	2.162.620.000,00	1.116.800.000,00	51,64%	28.200.000,00
5121704 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan/Bint	1.348.430.500,00	1.311.525.000,00	97,26%	1.578.387.000,00
5121705 Belanja Pengiriman DIKLATPIM	820.833.000,00	819.678.000,00	99,86%	49.324.000,00
5121706 Belanja Pengiriman PRAJABATAN	2.138.080.000,00	1.906.938.000,00	89,19%	2.401.330.000,00
51220 Belanja Pemeliharaan	7.089.714.458,75	6.391.991.662,00	90,16%	5.733.992.334,00
5122001 Belanja Pemeliharaan Tanah	14.910.000,00	14.910.000,00	100,00%	0,00
5122002 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.668.964.100,00	1.480.961.358,00	88,74%	564.374.590,00
5122003 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.216.702.275,00	3.741.860.020,00	88,74%	2.841.371.244,00
5122004 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	186.988.083,75	185.679.684,00	99,30%	0,00
5122005 Belanja Pemeliharaan Lainnya	1.002.150.000,00	968.580.600,00	96,65%	2.328.246.500,00
51221 Belanja Jasa Konsultansi	17.985.192.388,00	15.356.735.070,00	85,39%	13.816.954.505,00
5122101 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	7.360.969.900,00	6.492.142.620,00	88,20%	0,00
5122102 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.369.745.800,00	8.224.779.700,00	87,78%	6.132.079.630,00
5122103 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	291.886.688,00	243.101.500,00	83,29%	132.719.000,00
5122104 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya	962.590.000,00	396.711.250,00	41,21%	7.552.155.875,00
51222 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada	36.339.840.300,00	34.993.274.370,00	96,29%	41.561.728.783,00
5122201 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada	36.115.840.300,00	34.783.062.170,00	96,31%	41.231.804.783,00
5122202 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada	224.000.000,00	210.212.200,00	93,84%	329.924.000,00
51226 Belanja Honorarium PNS	15.528.582.428,00	14.093.846.500,00	90,76%	46.619.277.305,00
5122601 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.289.278.800,00	5.813.020.000,00	92,43%	22.716.819.000,00
5122602 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan	545.375.000,00	398.825.000,00	73,13%	483.250.000,00
5122603 Belanja Honorarium Tim Penerima Hasil Pekar	722.956.700,00	557.406.500,00	77,10%	551.690.000,00
5122604 Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	790.061.928,00	638.105.000,00	80,77%	0,00
5122605 Belanja Honorarium/Upah Bulanan	3.582.830.000,00	3.366.740.000,00	93,97%	6.974.555.000,00
5122606 Belanja Honorarium/Upah Harian	1.272.080.000,00	1.235.550.000,00	97,13%	5.622.879.805,00
5122607 Belanja Honorarium PNS Lainnya	2.326.000.000,00	2.084.200.000,00	89,60%	10.270.083.500,00
51227 Belanja Honorarium Non PNS	93.013.602.350,00	87.250.855.914,00	93,80%	67.831.005.006,00
5122701 Belanja Honorarium Pegawai Honorers/TKK	23.959.520.050,00	20.872.277.650,00	87,11%	17.760.054.870,00
5122702 Belanja Tenaga Harian Lepas (THL)/Tidak ter	55.936.522.300,00	54.189.329.266,00	96,88%	38.920.441.636,00
5122703 Belanja Honorarium Non PNS Panitia Pelaksa	2.004.030.000,00	1.678.905.000,00	83,78%	3.847.580.000,00
5122704 Belanja Honorarium Non PNS Upah Harian	738.130.000,00	697.280.000,00	94,47%	3.220.945.000,00
5122705 Belanja Honorarium Non PNS Lainnya	10.375.400.000,00	9.813.063.998,00	94,58%	4.081.983.500,00
51228 Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak	867.513.000,00	805.200.000,00	92,82%	1.398.160.000,00
5122801 Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ke	781.200.000,00	24000000	3,07%	16.500.000,00
5122802 Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	24.000.000,00	781.200.000,00	#####	1.381.660.000,00
51229 Belanja Pegawai BLUD/BOS	14.474.883.000,00	12.438.749.999,00	85,93%	9.983.085.000,00
5122901 Belanja Pegawai BLUD/BOS	14.474.883.000,00	12.438.749.999,00	85,93%	9.983.085.000,00
51230 Belanja Barang BLUD/BOS	104.810.358.752,00	98.974.460.972,00	94,43%	98.370.877.954,00
5123001 Belanja Barang BLUD	104.778.858.752,00	98.974.460.972,00	94,46%	98.370.877.954,00
5123002 Belanja Barang BOS	31.500.000,00	0	0,00%	0,00
JUMLAH	744.825.411.841,00	673.160.001.768,00	90,38%	638.168.701.242,00

INFORMASI:

- Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Keputusan Walikota Cilegon Nomor 466/Kep.335-BPKAD/2019 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Hibah Uang dan Barang/Jasa Kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Individu Dan Anggota/Kelompok Masyarakat Se-Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 dan perubahannya Nomor 466/Kep.595-BPKAD/2019, Keputusan Walikota Cilegon Nomor 466/Kep.04-BPKAD/2019 tentang Pemberian Hibah Uang Dan Barang/Jasa Kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kemasyarakatan dan Anggota/Kelompok Masyarakat Se-Kota Cilegon Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dan Keputusan Walikota Cilegon Nomor 466/Kep.588-BPKAD/2019 tentang Pemberian Hibah Uang Dan Barang/Jasa Kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kemasyarakatan dan Anggota/Kelompok Masyarakat Se-Kota Cilegon Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kota Cilegon tahun anggaran 2019 sebesar Rp52.488.994.040,00 atau 98,35% dari anggaran.

Rincian
Belanja
Hibah

Realisasi Belanja Hibah pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp52.488.994.040,00 dan Rp43.287.073.044,00 Naik sebesar Rp9.201.920.996,00 atau 21,26% dibandingkan dengan tahun 2018.

Rincian lebih lanjut Belanja Hibah Kota Cilegon dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 5.24. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019

		(Dalam Rupiah)			
URAIAN		ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
515	Belanja Hibah	53.371.238.000	52.488.994.040	98,35%	43.287.073.044
51501	Belanja Hibah kepada Pemerintah	22.388.689.000	22.290.889.000	99,56%	0,00
5150101	Belanja Hibah kepada Pemerintah	22.388.689.000	22.290.889.000	99,56%	0,00
	1. KPU	4.628.460.000	4.628.460.000	100,00%	0,00
	2. Guru Madrasah/Guru Ngaji Masjid dan Guru TKA/TPA di Lingkungan Kantor Kementerian Agama	15.876.000.000	15.876.000.000	100,00%	0,00
	3. BAWASLU	1.786.429.000	1.786.429.000	100,00%	0,00
	4. BNN	97.800.000	0,00	0,00%	0,00
51505	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	27.404.325.000	27.046.725.000	98,70%	25.934.400.000
5150501	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	81.525.000	81.525.000	100,00%	1.800.000.000
	1. SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI	81.525.000	81.525.000	100,00%	0,00
	2. KPA (Komisi Penanggulangan Aids)	0,00	0,00	0,00	300.000.000
	3. KPU Kota Cilegon	0,00	0,00	0,00	250.000.000
	4. PMI Kota Cilegon	0,00	0,00	0,00	500.000.000
	5. Forum Kota Sehat	0,00	0,00	0,00	400.000.000
	6. FKUB Kota Cilegon	0,00	0,00	0,00	100.000.000
	7. Kadin Kota Cilegon	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. BNN Kota Cilegon	0,00	0,00	0,00	250.000.000
	9. DEKRANASDA Kota Cilegon	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. FKPPi Kota Cilegon	0,00	0,00	0,00	0,00
5150503	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pendidikan	7.312.800.000	6.955.200.000	95,11%	5.954.400.000
	1. PAUD	5.791.200.000	5.433.600.000	93,83%	5.954.400.000
	2. BOP Kesetaraan PaketA,B,C	1.521.600.000	1.521.600.000	100,00%	0,00
5150504	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemuda dan Olahraga	18.680.000.000	18.680.000.000	100,00%	15.875.000.000
	1. KONI	17.500.000.000	17.500.000.000	100,00%	15.000.000.000
	2. NPC(National Paralympic committee indonesia)	300.000.000	300.000.000	100,00%	175.000.000
	3. KNPI	350.000.000	350.000.000	100,00%	100.000.000
	4. PRAMUKA	250.000.000	250.000.000	100,00%	150.000.000
	5. FORMI	280.000.000	280.000.000	100,00%	250.000.000
	6. ICMI	0,00	0,00	0,00	200.000.000
	7. KAHMI	0,00	0,00	0,00	0,00
5150505	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi keagamaan	1.330.000.000	1.330.000.000	100,00%	2.305.000.000
	1. BAZNAS	500.000.000	500.000.000	100,00%	500.000.000
	2. YAYASAN MDTA BANY JAHAR AL-JAUHAROTUNNAQIYAH KOTA CILEGON	50.000.000	50.000.000	100,00%	0,00
	3. Yayasan Irsyadul Anan	10.000.000	10.000.000	100,00%	0,00
	4. DKM BANY SYBLI CIBERKO	20.000.000	20.000.000	100,00%	0,00
	5. MUI	500.000.000	500.000.000	100,00%	400.000.000
	6. PD Muhammadiyah Cilegon	250.000.000	250.000.000	100,00%	0,00
	7. NU	0,00	0,00	0,00	500.000.000
	8. YAYASAN SYARIFUS SHIDQIE	0,00	0,00	0,00	20.000.000
	9. YAYASAN PENDIDIKAN ISMAIL AL MUHAJIRIN	0,00	0,00	0,00	25.000.000
	10. DKM AR- RAUDATUL JANNAH	0,00	0,00	0,00	25.000.000
	11. YAYASAN PENDIDIKAN AKLHAIRIYAH KRACAK	0,00	0,00	0,00	30.000.000
	11. IKATAN GURU RAUDATUL ATHFAL (IGRA)	0,00	0,00	0,00	75.000.000
	12.YAYASAN NASSYRUL ULUM CILEGON	0,00	0,00	0,00	20.000.000
	14. DKM NURUL IMAM	0,00	0,00	0,00	25.000.000
	15. DKM MIFTAHUL FALLAH	0,00	0,00	0,00	20.000.000
	16. YAYASAN ISLAM NURUL A"LA CILEGON	0,00	0,00	0,00	20.000.000
	17. YAYASAN PENDIDIKAN AL-QOYYINAH	0,00	0,00	0,00	25.000.000
	18. YAYASAN PENDIDIKAN NURUL ISTIQOMAH	0,00	0,00	0,00	25.000.000
	19. DKM AL HIDAYAH	0,00	0,00	0,00	20.000.000
	20. DKM MUSHOLLA AL-KAUTSAR	0,00	0,00	0,00	25.000.000

Lanjutan:

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
21. DKM/TAKMIR MASJID NURUL IKHLAS	0,00	0,00	0,00	200.000.000
22. MUSHOLA NURUL JADID	0,00	0,00	0,00	25.000.000
23. YAYASAN UMAH PEKALONGAN BANYUWANGI	0,00	0,00	0,00	0,00
24. MUSHOLA BAITURROHMAN	0,00	0,00	0,00	10.000.000
25. DKM MASJID BAITUL MUMININ	0,00	0,00	0,00	20.000.000
26. DKM MASJID AL-MUHAJIRIN	0,00	0,00	0,00	25.000.000
27. DKM BNURUL IMAN	0,00	0,00	0,00	100.000.000
28. DKM AL-MUHAJIRIN LINK PABUARAN	0,00	0,00	0,00	30.000.000
29. YAYASAN THOLABAH AL-MUBTADIIN	0,00	0,00	0,00	20.000.000
30. DKM AT-TAQWA	0,00	0,00	0,00	20.000.000
31. DKM AL-AZZAM	0,00	0,00	0,00	-
32. DKM BAITURRAHMAN	0,00	0,00	0,00	20.000.000
33. DKM JAMI AL-FURQON PALAS	0,00	0,00	0,00	20.000.000
34. DKM RAUDATUL JANNAH	0,00	0,00	0,00	20.000.000
35. YAYASAN AL-INSAN	0,00	0,00	0,00	20.000.000
36. YAYASAN AL-MUHAJIRIN KAVLING CILEGON	0,00	0,00	0,00	20.000.000
51506 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	3.578.224.000	3.151.380.040	88,07%	17.352.673.044
5150601 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	935.656.950	935.656.950	100,00%	0,00
1. FKUB	288.224.000	288.224.000	100,00%	0,00
2. PMI	225.000.000	225.000.000	100,00%	0,00
3. KPA (Komisi Penanggulangan AIDS)	137.432.950	137.432.950	100,00%	0,00
4. Forum Kota Sehat	285.000.000	285.000.000	100,00%	0,00
5150602 Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	2.642.567.050	2.215.723.090	381,03%	17.352.673.044
1. LPTQ	2.250.000.000	1.823.156.040	81,03%	1.478.653.044
2. DPD Bakomubin	30.000.000	30.000.000	100,00%	0,00
3. PMI	200.000.000	200.000.000	100,00%	0,00
4. KPA (Komisi Penanggulangan AIDS)	162.567.050	162.567.050	100,00%	0,00
5. Guru Madrasah, Guru Ngaji Masjid dan Guru TKA/TPA Kemenag Kota Cilegon	0,00	0,00	0,00	15874020000,00
JUMLAH	53.371.238.000	52.488.994.040	98,35%	43.287.073.044

INFORMASI:

- Pada tahun 2019, realisasi belanja hibah dianggarkan pada BPKAD. Hal ini berpedoman pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah.

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Sosial Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 mencapai Rp2.232.360.000,00 atau sebesar 43,17% dari anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Sosial tahun anggaran 2018 sebesar Rp6.036.520.000,00 terdapat penurunan realisasi sebesar (Rp3.804.160.000,00) atau (63,02%) dari tahun 2018.

Rincian lebih lanjut Belanja Bantuan Sosial Kota Cilegon dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 5.25. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019

Tabel 5.25. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019					
(Dalam Rupiah)					
	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
516	BANTUAN SOSIAL	5.171.113.784	2.232.360.000	43,17%	6.036.520.000
51602	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga/Anggota/Kelompok Masyarakat yang Direncanakan	1.474.380.000	843.000.000	57,18%	3.465.000.000
5160202	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	1.474.380.000	843.000.000	57,18%	3.465.000.000
	1. JAMINAN SOSIAL CILEGON MANDIRI (JSCM)	924.500.000	843.000.000	91,18%	1.709.000.000
	2. BANTUAN SOSIAL BAGI NAK MISKIN	45.800.000	0	0,00%	-
	3. BANTUAN PERMAKINAN DAN OPERASIONAL PANTI	395.080.000	0	0,00%	901.000.000
	4. BANTUAN MEUBELAIR RUANG KELAS DAN RUANG KOMPUTER	109.000.000	0	0,00%	0
	5. PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)	0	0	0,00%	855.000.000
51603	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga/Anggota/Kelompok Masyarakat yang tidak Direncanakan	2.407.413.784	540.000.000	22,43%	832.000.000
5160301	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga/Anggota/Kelompok Masyarakat Yang Tidak Direncanakan	2.407.413.784	540.000.000	22,43%	832.000.000
	1. SANTUNAN KEMATIAN	2.407.413.784	540.000.000	22,43%	832.000.000
51604	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	1.289.320.000	849.360.000	65,88%	1.739.520.000
5160401	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.289.320.000	849.360.000	65,88%	1.739.520.000
	1. BANTUAN BEASISWA ANAK MISKIN	1.289.320.000	849.360.000	65,88%	1.739.520.000

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 mencapai Rp413.224.916.445,00 atau sebesar 81,85% dari anggaran. Realisasi belanja ini naik sebesar Rp108.588.296.843,00 atau naik 35,64% dari realisasi belanja modal tahun anggaran 2018 yaitu sebesar Rp304.636.619.602,00.

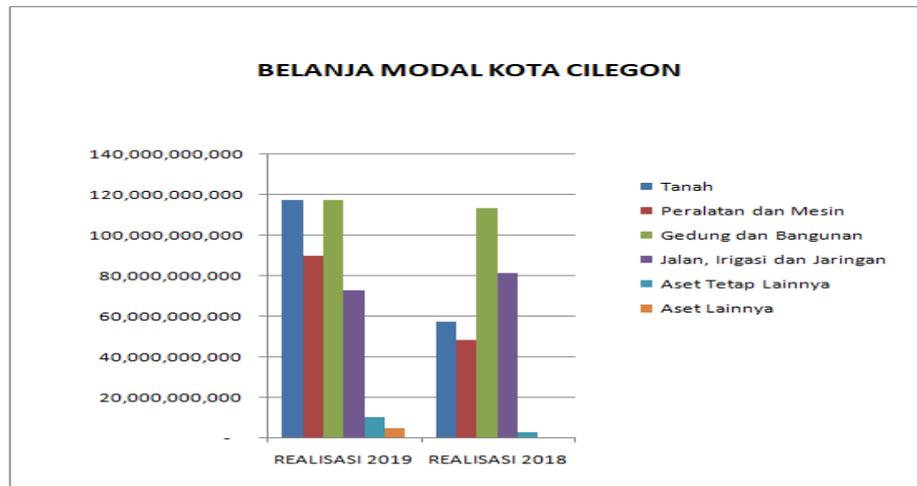
Komposisi
Belanja
Modal

Perbandingan komposisi realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 terhadap anggaran dan komparasinya dengan tahun anggaran 2018 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 5.26. Realisasi Belanja Modal Tahun 2019

Tabel 5.26. Realisasi Belanja Modal Tahun 2019					
(Dalam Rupiah)					
	BELANJA MODAL	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
521	Belanja Modal Tanah	140.111.739.784,00	117.515.997.654,00	83,87%	57.333.558.721,00
522	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.942.388.855,00	89.775.337.181,00	88,06%	48.497.428.363,00
523	Belanja Modal gedung dan Bangunan	134.177.315.042,00	117.471.215.752,00	87,55%	113.648.316.910,00
524	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	111.839.663.727,00	72.802.132.456,00	65,10%	81.626.705.244,00
525	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.406.595.271,00	10.630.570.252,00	93,20%	3.026.360.364,00
526	Belanja Modal Aset Lainnya	5.403.609.500,00	5.029.663.150,00	93,08%	504.250.000,00
	JUMLAH	504.881.312.179,00	413.224.916.445,00	81,85%	304.636.619.602,00

Grafik 5.11. Realisasi Belanja Modal Tahun 2019



Realisasi Belanja Tanah pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp117.515.997.654,00 dan Rp57.333.558.721,00 Naik sebesar Rp60.182.438.933,00 atau 104,97% dibandingkan dengan tahun 2018.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp89.775.337.181,00 dan Rp48.497.428.363,00. Naik sebesar Rp41.277.908.818,00 atau 85,11% dibandingkan dengan tahun 2018.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp72.802.132.456,00 dan Rp81.626.705.244,00. Turun sebesar (Rp8.824.572.788,00) atau (10,81%) dibandingkan dengan tahun 2018.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp10.630.570.252,00 dan Rp3.026.360.364,00. Naik sebesar Rp7.604.209.888 atau 251,27% dibandingkan dengan tahun 2018.

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp5.029.663.150,00 dan Rp4.525.413.150,00. Naik sebesar Rp4.525.413.150,00 atau 897,45% dibandingkan dengan tahun 2018.

Naik (turun) realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.26.1. Kenaikan/Penurunan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019

(Dalam Rupiah)				
BELANJA MODAL	REALISASI 2019	REALISASI 2018	NAIK(TURUN)	%
521 Belanja Modal Tanah	117.515.997.654,00	57.333.558.721,00	60.182.438.933,00	104,97%
522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.775.337.181,00	48.497.428.363,00	41.277.908.818,00	85,11%
523 Belanja Modal gedung dan Bangunan	117.471.215.752,00	113.648.316.910,00	3.822.898.842,00	3,36%
524 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.802.132.456,00	81.626.705.244,00	(8.824.572.788,00)	-10,81%
525 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.630.570.252,00	3.026.360.364,00	7.604.209.888,00	251,27%
526 Belanja Modal Aset Lainnya	5.029.663.150,00	504.250.000,00	4.525.413.150,00	897,45%
JUMLAH	413.224.916.445,00	304.636.619.602,00	108.588.296.843,00	35,65%

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp0,00.

Perbandingan komposisi realisasi Belanja Tak Terduga tahun anggaran 2019 terhadap anggaran dan komparasinya dengan tahun anggaran 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.27. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2019

(Dalam Rupiah)					
URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	
531 Belanja Tak Terduga	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

5.1.3. Transfer

Pada tahun anggaran 2019 terdapat pengeluaran transfer sebesar Rp976.730.599,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran. Transfer ini digunakan untuk Bantuan Keuangan Partai Politik dapat dilihat dalam tabel berikut :

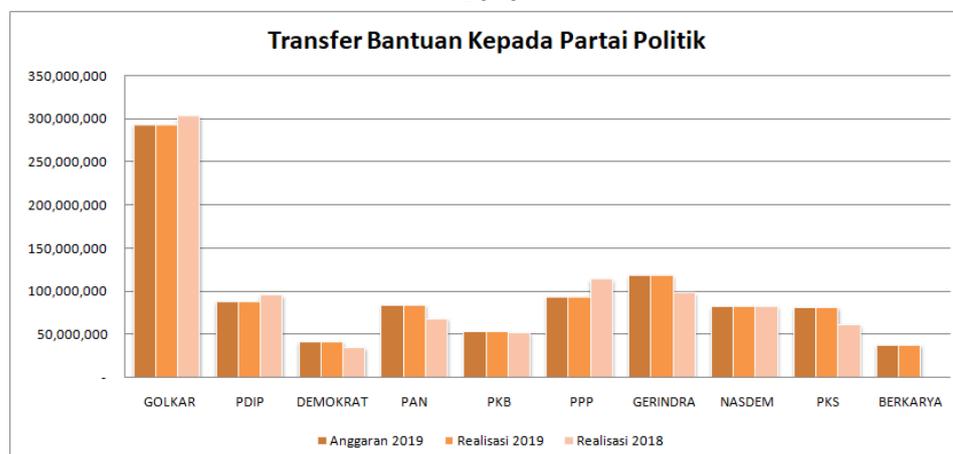
Realisasi
Belanja
Tak
Terduga

Transfer

Tabel 5.28. Realisasi Pengeluaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2019

(Dalam Rupiah)					
No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
6	TRANSFER				
62	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	976.730.599,00	976.730.599,00	100%	913.397.208,00
623	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	976.730.599,00	976.730.599,00	100%	913.397.208,00
62301	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	976.730.599,00	976.730.599,00	100%	913.397.208,00
6230101	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik GOLKAR	292.586.683,00	292.586.683,00	100%	302.978.352,00
6230102	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik PDIP	88.472.533,00	88.472.533,00	100%	95.832.400,00
6230103	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik DEMOKRAT	41.853.365,00	41.853.365,00	100%	35.313.488,00
6230104	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik PAN	84.925.924,00	84.925.924,00	100%	68.823.616,00
6230105	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik PKB	53.550.543,00	53.550.543,00	100%	52.320.560,00
6230106	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik PPP	93.905.733,00	93.905.733,00	100%	114.175.800,00
6230107	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik GERINDRA	118.916.949,00	118.916.949,00	100%	98.611.424,00
6230108	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik NASDEM	82.407.386,00	82.407.386,00	100%	83.190.384,00
6230109	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik PKS	81.713.787,00	81.713.787,00	100%	62.151.184,00
6230110	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik BERKARYA	38.397.696,00	38.397.696,00	100%	-
	JUMLAH	976.730.599,00	976.730.599,00	100%	913.397.208,00

Grafik 5.12. Realisasi Pengeluaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2019



Belanja bantuan keuangan tidak disajikan sebagai sebagai Belanja Operasi, namun disajikan sebagai Transfer. Hal ini berpedoman pada kode rekening Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Pemberian Bantuan Keuangan Parpol tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 213/Kep.99-Kesbanglinmas/2010 tentang Alokasi Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

5.1.4. Surplus/(Defisit)

Surplus/
(Defisit)

Berdasarkan Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.766.980.559.475,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp1.822.331.380.543,00 ditambah Realisasi Transfer sebesar Rp976.730.599,00 dikarenakan Pendapatan lebih kecil daripada Belanja ditambah dengan Transfer maka terjadi defisit pada tahun anggaran 2019 sebesar (Rp56.327.551.667,00) atau defisit sebesar 30,80% pada tahun anggaran 2019. Sedangkan tahun anggaran 2018 mengalami surplus sebesar Rp39.932.940.108,00.

Tabel 5.29. Surplus (Defisit) Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	(Dalam Rupiah)
				Realisasi 2018
Pendapatan	1.881.449.605.475,00	1.766.980.559.475,00	93,92%	1.630.020.024.950,00
Belanja dan Transfer	2.064.351.720.317,00	1.823.308.111.142,00	88,32%	1.590.087.084.842,00
Surplus (Defisit)	(182.902.114.842,00)	(56.327.551.667,00)	30,80%	39.932.940.108,00

5.1.5. Pembiayaan Netto

Pembiayaan
Netto

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2019, Realisasi Pembiayaan adalah sebesar Rp192.902.114.842,00 dan Realisasi Pengeluaran sebesar Rp0,00 sehingga jumlah Realisasi Pembiayaan (Netto) tahun 2019 sebesar Rp192.902.114.842,00 dari jumlah anggaran Pembiayaan (Netto) sebesar Rp182.902.114.842,00 atau mencapai 105,47%.

Tabel 5.30. Pembiayaan (Netto) Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	(Dalam Rupiah)
					Realisasi 2018
71	Penerimaan Pembiayaan	192.902.114.842,00	192.902.114.842,00	100,00	158.969.172.934,00
72	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	0,00	-	5.999.998.200,00
Jumlah		182.902.114.842,00	192.902.114.842,00	105,47	152.969.174.734,00

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi
Penerimaan
Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 mencapai Rp192.902.114.842,00 atau sebesar 100 % dari anggaran. Realisasi Penerimaan Pembiayaan ini meningkat dari realisasi tahun anggaran 2018 yang sebesar Rp158.969.172.934,00.

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Cilegon terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2018 sebesar Rp158.969.172.934,00.

Perbandingan komposisi realisasi Penerimaan Pembiayaan terhadap anggaran dan komparasinya dengan tahun anggaran 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.31. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
71	Penerimaan Pembiayaan	192.902.114.842,00	192.902.114.842,00	100,00	158.969.172.934,00
711	- Penggunaan SiLPA	192.902.113.042,00	192.902.114.842,00	100,00	158.969.172.934,00
716	- Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	1.800,00	0,00	0,00	-

5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 Pemerintah Kota Cilegon sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan ini menurun dari realisasi tahun anggaran 2018 yang sebesar Rp5.999.998.200,00.

Penganggaran pembentukan cadangan melalui peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tanggal 17 Desember 2018 dikarenakan Pemerintah Kota Cilegon merencanakan akan melakukan Penempatan dana cadangan sebesar Rp10.000.000.000,00 yang dimaksudkan untuk menyediakan dana dengan tujuan membiayai penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Cilegon Tahun 2020, namun sampai pada akhir tahun 2019 tidak terealisasi.

Tabel 5.32. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
72 Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	0,00	0,00	5.999.998.200,000
721 Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
722 Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	5.999.998.200,000
PT. BPRS	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,000
PT. PCM	0,00	0,00	0,00	0,00
PDAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Bank Jabar Banten	0,00	0,00	0,00	4.999.998.200,000
JUMLAH	10.000.000.000,00	0,00	0,00	5.999.998.200,00

Realisasi
Pembiayaan
Pengeluaran

5.1.5.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Silpa

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah Selisih Lebih/Kurang antara Realisasi Pendapatan dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp136.574.563.175,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi SiLPA tahun anggaran 2018 sebesar Rp192.902.114.842,00 maka terjadi penurunan sebesar (Rp56.327.550.667,00) atau 29,2%.

SILPA LRA tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp136.574.563.175,00 terdiri dari Kas di Kas Umum Daerah sebesar Rp131.065.822.742,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp16.059.430,00, Kas di BLUD PDB sebesar Rp1.474.720.125,00, Kas di BLUD RSUD sebesar Rp863.040.650,00, Kas Lainnya FKTP JKN sebesar Rp1.416.230.346,00 dan Kas Lainnya Dana BOS sebesar Rp1.738.689.882,00.

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan SAL yang berakhir 31 Desember 2019 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2019.

Laporan
Perubahan
SAL

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp192.902.114.842,00.

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2018 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp192.902.114.842,00.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Cilegon pada Tahun Anggaran 2019 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp136.574.563.175,00.

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp136.574.563.175,00.

Rincian SILPA Tahun Anggaran 2019			
Rincian SILPA	Kas (Rp)	Utang PFK (Rp)	SILPA (Rp)
1	2	3	4 = 2-3
Kas di Kas Umum Daerah	131.065.822.742,00	0,00	131.065.822.742,00
Kas di Bendahara Penerimaan	16.059.430,00	0,00	16.059.430,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.000,00	1.000,00	0,00
Kas di BLUD-PDB	1.474.720.125,00	0,00	1.474.720.125,00
Kas di BLUD-RSUD	863.040.650,00	0,00	863.040.650,00
Kas Lainnya FKTP - JKN	1.416.230.346,00	0,00	1.416.230.346,00
Kas Lainnya BOS	1.738.689.882,00	0,00	1.738.689.882,00
Jumlah	136.574.564.175,00	1.000,00	136.574.563.175,00

5.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Laporan Operasional Pemerintah Kota Cilegon yang disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL LO 1

Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Kota Cilegon 2019	
	(Dalam Rupiah)
URAIAN	SALDO 2019
PENDAPATAN - LO	1,828,657,796,101.00
BEBAN	1.633.053.737.276,93
SURPLUS / (DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL	195,604,058,824.28
SURPLUS / (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL	(165,144,916.00)
SURPLUS / (DEFISIT) POS LUAR BIASA	-
SURPLUS / (DEFISIT) LO	195,438,913,908.07

Laporan
Operasional

Unsur
Laporan
Operasional

5.3.1. PENDAPATAN LO

Pendapatan-LO

Pendapatan-LO Pemerintah Kota Cilegon TA 2019 senilai Rp1.828.657.796.101,00 turun senilai (Rp 893.504.891.858) atau (33,16%) dibanding realisasi TA 2018 senilai Rp2.722.162.687.959,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan. Rincian Pendapatan-LO TA 2019 dan 2018 sebagai berikut:

TABEL LO 2

Rincian Pendapatan-LO				
(Dalam Rupiah)				
URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK(TURUN)	%
8 PENDAPATAN - LO	1,828,657,796,101.00	2,722,162,687,959.00	(893,504,891,858.00)	-32.82%
81 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-L	644,496,395,684.00	639,224,803,527.00	5,271,592,157.00	0.82%
82 PENDAPATAN TRANSFER-LO	1,102,432,189,871.00	1,008,587,281,028.00	93,844,908,843.00	9.30%
83 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	81,729,210,546.00	1,074,350,603,404.00	(992,621,392,858.00)	-92.39%

Pendapatan PAD-LO

Dokumen sumber untuk pengakuan Pendapatan-LO adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Peraturan Presiden tentang Alokasi Dana Perimbangan, Dokumen sumber lainnya yang dipersamakan untuk pengakuan Pendapatan-LO

5.3.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 di rinci sebagai berikut:

TABEL LO 3

Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO				
(Dalam Rupiah)				
URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK(TURUN)	%
81 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	644,496,395,684.00	639,224,803,527.00	5,271,592,157.00	0.82%
811 Pendapatan Pajak Daerah-LO	496,917,517,419.00	488,865,098,513.00	8,052,418,906.00	1.65%
812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO	18,404,304,701.00	19,090,325,962.00	(686,021,261.00)	-3.59%
813 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	17,127,057,370.00	18,027,533,084.00	(900,475,714.00)	-5.00%
814 Lain-lain PAD Yang Sah-LO	112,047,516,194.00	113,241,845,968.00	(1,194,329,774.00)	-1.05%

Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2019 senilai Rp644.496.395.684,00 naik senilai Rp5.271.592.157,00 atau 0,82% dibandingkan dengan TA 2018 senilai Rp639.224.803.527,00 Pendapatan Asli Daerah memiliki proporsi 35,42% dari keseluruhan Pendapatan Operasional-LO. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.1.1. PAJAK DAERAH-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2019 senilai Rp496.917.517.419,00 naik senilai Rp8.160.883.247,00 atau 1,67% dibanding dengan TA 2018 senilai Rp488.865.098.513,00 dengan rincian sebagai berikut :

TABEL LO 4.1

Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO				
(Dalam Rupiah)				
URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK(TURUN)	%
811 Pendapatan Pajak Daerah - LO	496,917,517,419.00	488,865,098,513.00	8,052,418,906.00	1.65%
81106 Pajak Hotel - LO	11,187,319,996.00	11,092,898,795.00	94,421,201.00	0.85%
8110601 Hotel - LO	11,082,285,168.00	10,987,931,575.00	94,353,593.00	0.86%
8110603 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos - LO	105,034,828.00	104,967,220.00	67,608.00	0.06%
81107 Pajak Restoran - LO	32,899,935,816.00	24,339,367,944.00	8,560,567,872.00	35.17%
8110701 Restoran - LO	20,823,387,648.00	12,914,414,325.00	7,908,973,323.00	61.24%
8110702 Rumah Makan - LO	766,668,443.00	857,292,012.00	(90,623,569.00)	-10.57%
8110703 Kafetaria - LO	2,563,121,168.00	1,918,548,650.00	644,572,518.00	33.60%
8110704 Kantin - LO	644,162,131.00	907,761,154.00	(263,599,023.00)	-29.04%
8110705 Katering - LO	8,102,596,426.00	7,741,351,803.00	361,244,623.00	4.67%
81108 Pajak Hiburan - LO	6,441,858,130.00	5,844,037,876.00	597,820,254.00	10.23%
8110801 Tontonan Film/Bioskop - LO	3,258,955,910.00	2,753,568,192.00	505,387,718.00	18.35%
8110802 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	47,607,692.00	-	47,607,692.00	-
8110806 Sirkus/Akrobat/Sulap - LO	4,336,364.00	-	4,336,364.00	-
8110807 Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO	100,378,467.00	102,532,345.00	(2,153,878.00)	-2.10%
8110808 Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO	2,922,321,403.00	2,821,778,266.00	100,543,137.00	3.56%
8110809 Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes)	47,668,475.00	85,617,443.00	(37,948,968.00)	-44.32%
8110810 Pertandingan Olahraga - LO	60,589,819.00	80,541,630.00	(19,951,811.00)	-24.77%
81109 Pajak Reklame - LO	1,856,811,809.00	1,303,808,135.00	553,003,674.00	42.41%
8110901 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	1,479,316,170.00	975,680,325.00	503,635,845.00	51.62%
8110902 Pajak Reklame Kain - LO	155,616,940.00	172,782,209.00	(17,165,269.00)	-9.93%
8110903 Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO	5,629,098.00	1,875,000.00	3,754,098.00	200.22%
8110905 Pajak Reklame Berjalan - LO	2,136,824.00	1,535,519.00	601,305.00	39.16%
8110906 Pajak Reklame Udara - LO	704,918.00	3,295,082.00	(2,590,164.00)	-78.61%
8110909 Pajak Reklame Film/Slide - LO	213,407,859.00	148,640,000.00	64,767,859.00	43.57%
81110 Pajak Penerangan Jalan - LO	209,206,565,337.00	222,829,927,358.00	(13,623,362,021.00)	-6.11%
8111001 Pajak Penerangan Jalan PLN - LO	134,237,148,294.00	152,840,462,678.00	(18,603,314,384.00)	-12.17%
8111002 Pajak Penerangan Jalan Non PLN - LO	74,969,417,043.00	69,989,464,680.00	4,979,952,363.00	7.12%
81111 Pajak Parkir - LO	2,231,696,156.00	935,213,201.00	1,296,482,955.00	138.63%
8111101 Pajak Parkir - LO	2,231,696,156.00	935,213,201.00	1,296,482,955.00	138.63%
81112 Pajak Air Tanah - LO	1,587,816,172.00	1,839,622,026.00	(251,805,854.00)	-13.69%
8111201 Pajak Air Tanah - LO	1,587,816,172.00	1,839,622,026.00	(251,805,854.00)	-13.69%
81114 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	8,207,266,300.00	1,456,960,800.00	6,750,305,500.00	463.31%
8111406 Batu Gunung/Batu Belah/Andesit - LO	719,497,000.00	685,322,600.00	34,174,400.00	4.99%
8111407 Makadam - LO	385,164,000.00	305,520,000.00	79,644,000.00	26.07%
8111412 Pasir/Pasir Kuarsa/Pasir Teras - LO	7,102,605,300.00	466,118,200.00	6,636,487,100.00	1423.78%
81115 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	93,824,529,277.00	91,565,183,512.00	2,259,345,765.00	2.47%
8111501 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	93,824,529,277.00	91,565,183,512.00	2,259,345,765.00	2.47%
81116 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	129,473,718,426.00	127,658,078,866.00	1,815,639,560.00	1.42%
8111601 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	129,473,718,426.00	127,658,078,866.00	1,815,639,560.00	1.42%

Pajak
Daerah-LO

Komparasi Pendapatan Pajak Daerah-LO terhadap Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA pada tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel LO 4.2

Komparasi Pendapatan Pajak Daerah-LO			
dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA			
(Dalam Rupiah)			
Uraian	Realisasi Pendapatan-LRA 2019	Penyesuaian Pendapatan 2019	Pendapatan-LO 2019
Pendapatan Pajak Daerah - LO	488,733,692,539.00	8,183,824,880.00	496,917,517,419.00
Pajak Hotel - LO	11,251,118,434.00	(63,798,438.00)	11,187,319,996.00
Hotel - LO	11,145,741,606.00	(63,456,438.00)	11,082,285,168.00
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos - LO	105,376,828.00	(342,000.00)	105,034,828.00
Pajak Restoran - LO	32,119,241,400.00	780,694,416.00	32,899,935,816.00
Restoran - LO	20,647,917,671.00	175,469,977.00	20,823,387,648.00
Rumah Makan - LO	763,994,173.00	2,674,270.00	766,668,443.00
Kafetaria - LO	2,563,121,168.00	-	2,563,121,168.00
Kantin - LO	644,162,131.00	-	644,162,131.00
Katering - LO	7,500,046,257.00	602,550,169.00	8,102,596,426.00
Pajak Hiburan - LO	6,395,835,058.00	46,023,072.00	6,441,858,130.00
Tontonan Film/Bioskop - LO	3,258,955,910.00	-	3,258,955,910.00
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	-	47,607,692.00	47,607,692.00
Sirkus/Akrobat/Sulap - LO	4,336,364.00	-	4,336,364.00
Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO	100,378,467.00	-	100,378,467.00
Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO	2,922,321,403.00	-	2,922,321,403.00
Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitness center) -	49,253,095.00	(1,584,620.00)	47,668,475.00
Pertandingan Olahraga - LO	60,589,819.00	-	60,589,819.00
Pajak Reklame - LO	1,891,936,109.00	(35,124,300.00)	1,856,811,809.00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	1,512,692,329.00	(33,376,159.00)	1,479,316,170.00
Pajak Reklame Kain - LO	155,658,780.00	(41,840.00)	155,616,940.00
Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO	6,725,000.00	(1,095,902.00)	5,629,098.00
Pajak Reklame Berjalan - LO	1,500,000.00	636,824.00	2,136,824.00
Pajak Reklame Udara - LO	-	704,918.00	704,918.00
Pajak Reklame Film/Slide - LO	215,360,000.00	(1,952,141.00)	213,407,859.00
Pajak Penerangan Jalan - LO	209,190,428,545.00	16,136,792.00	209,206,565,337.00
Pajak Penerangan Jalan PLN - LO	134,237,148,294.00	-	134,237,148,294.00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN - LO	74,953,280,251.00	16,136,792.00	74,969,417,043.00
Pajak Parkir - LO	2,222,628,156.00	9,068,000.00	2,231,696,156.00
Pajak Parkir - LO	2,222,628,156.00	9,068,000.00	2,231,696,156.00
Pajak Air Tanah - LO	1,575,066,769.00	12,749,403.00	1,587,816,172.00
Pajak Air Tanah - LO	1,575,066,769.00	12,749,403.00	1,587,816,172.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	8,144,706,900.00	62,559,400.00	8,207,266,300.00
Batu Gunung/Batu Belah/Andesit - LO	659,212,600.00	60,284,400.00	719,497,000.00
Makadam - LO	385,164,000.00	-	385,164,000.00
Pasir/Pasir Kuarsa/Pasir Teras - LO	7,100,330,300.00	2,275,000.00	7,102,605,300.00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	86,469,012,742.00	7,355,516,535.00	93,824,529,277.00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	86,469,012,742.00	7,355,516,535.00	93,824,529,277.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	129,473,718,426.00	-	129,473,718,426.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	129,473,718,426.00	-	129,473,718,426.00

Penyesuaian pendapatan pajak daerah tahun 2019 berasal dari mutasi penambahan dan pengurangan piutang Pajak Hotel, piutang Pajak Restoran, piutang Pajak Hiburan, piutang Pajak Reklame, piutang Pajak Penerangan Jalan, piutang Pajak Parkir, piutang Pajak Air Tanah, piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, piutang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

5.3.1.1.2. RETRIBUSI DAERAH-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2019 senilai Rp18.404.304.701,00 meningkat senilai Rp686.021.261,00 atau 3,59% dibanding dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2018 senilai Rp19.090.325.962,00 dijelaskan sebagai berikut:

TABEL LO 5.1

Retribusi
Daerah-LO

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO		(Dalam Rupiah)			
URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK (TURUN)	%	
812	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	18,404,304,701.00	19,090,325,962.00	686,021,261.00	3.59%
81201	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	1,405,396,000.00	1,219,080,500.00	(186,315,500.00)	-15.28%
8120101	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	1,405,396,000.00	1,219,080,500.00	(186,315,500.00)	-15.28%
81202	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	811,780,000.00	1,103,250,500.00	291,470,500.00	26.42%
8120201	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	811,780,000.00	1,103,250,500.00	291,470,500.00	26.42%
81205	Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum	0.00	8,590,000.00	8,590,000.00	100.00%
8120501	Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum	0.00	8,590,000.00	8,590,000.00	100.00%
81206	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	696,944,000.00	694,845,000.00	(2,099,000.00)	-0.30%
8120601	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	696,944,000.00	694,845,000.00	(2,099,000.00)	-0.30%
81207	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	453,473,000.00	408,017,500.00	(45,455,500.00)	-11.14%
8120701	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	453,473,000.00	408,017,500.00	(45,455,500.00)	-11.14%
81208	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	80,082,000.00	79,433,000.00	(649,000.00)	-0.82%
8120801	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	80,082,000.00	79,433,000.00	(649,000.00)	-0.82%
81215	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1,833,585,651.00	1,452,841,357.00	(380,744,294.00)	-26.21%
8121501	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1,833,585,651.00	1,452,841,357.00	(380,744,294.00)	-26.21%
81218	Retribusi Terminal - LO	60,282,000.00	59,745,000.00	(537,000.00)	-0.90%
8121801	Retribusi Terminal - LO	60,282,000.00	59,745,000.00	(537,000.00)	-0.90%
81219	Retribusi Tempat Khusus parkir	0.00	29,726,000.00	29,726,000.00	100.00%
8121901	Retribusi Tempat Khusus parkir	0.00	29,726,000.00	29,726,000.00	100.00%
81221	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	75,860,000.00	75,660,000.00	(200,000.00)	-0.26%
8122101	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	75,860,000.00	75,660,000.00	(200,000.00)	-0.26%
81226	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	8,015,824,450.00	11,210,516,025.00	3,194,691,575.00	28.50%
8122601	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	8,015,824,450.00	11,210,516,025.00	3,194,691,575.00	28.50%
81229	Retribusi Izin Trayek - LO	33,245,100.00	22,563,380.00	(10,681,720.00)	-47.34%
8122901	Retribusi Izin Trayek - LO	33,245,100.00	22,563,380.00	(10,681,720.00)	-47.34%
81232	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	4,938,615,600.00	2,726,057,700.00	(2,212,557,900.00)	-81.16%
8123201	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pembeni Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	4,938,615,600.00	2,726,057,700.00	(2,212,557,900.00)	-81.16%

Komparasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO terhadap Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA pada tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel LO 5.2

Komparasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA (Dalam Rupiah)			
Uraian	Realisasi Pendapatan- LRA 2019	Penyesuaian Pendapatan 2019	Pendapatan-LO 2019
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	18,728,314,750.00	(324,010,049.00)	18,404,304,701.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	1,455,871,000.00	(50,475,000.00)	1,405,396,000.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	1,455,871,000.00	(50,475,000.00)	1,405,396,000.00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	825,520,000.00	(13,740,000.00)	811,780,000.00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	825,520,000.00	(13,740,000.00)	811,780,000.00
Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	0.00
Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	0.00
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	696,944,000.00	-	696,944,000.00
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	696,944,000.00	-	696,944,000.00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	453,473,000.00	-	453,473,000.00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	453,473,000.00	-	453,473,000.00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	80,082,000.00	-	80,082,000.00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	80,082,000.00	-	80,082,000.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1,952,502,600.00	(118,916,949.00)	1,833,585,651.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1,952,502,600.00	(118,916,949.00)	1,833,585,651.00
Retribusi Terminal - LO	60,282,000.00	-	60,282,000.00
Retribusi Terminal - LO	60,282,000.00	-	60,282,000.00
Retribusi Tempat Khusus parkir	-	-	0.00
Retribusi Tempat Khusus parkir	-	-	0.00
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	75,860,000.00	-	75,860,000.00
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	75,860,000.00	-	75,860,000.00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	8,155,919,450.00	(140,095,000.00)	8,015,824,450.00
Pembenan Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	8,155,919,450.00	(140,095,000.00)	8,015,824,450.00
Retribusi Izin Trayek - LO	33,245,100.00	-	33,245,100.00
Retribusi Izin Trayek - LO	33,245,100.00	-	33,245,100.00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	4,938,615,600.00	-	4,938,615,600.00
Pembenan Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	4,938,615,600.00	-	4,938,615,600.00

Penyesuaian pendapatan Retribusi Daerah tahun 2019 berasal dari mutasi penambahan dan pengurangan piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan, piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

5.3.1.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN- LO

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD) dan Lembaga Keuangan – Bank, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2019 senilai Rp17.127.057.370,00 menurun senilai (Rp900.475.714,00) atau (5%) dibanding dengan tahun 2018 senilai Rp1.8.027.533.084,00 dijelaskan sebagai berikut:

TABEL LO 6

Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO				
<i>(Dalam Rupiah)</i>				
URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK (TURUN)	%
813 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	17.127.057.370,00	18.027.533.084,00	(900.475.714,00)	-5,00%
81301 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	17.127.057.370,00	18.027.533.084,00	(900.475.714,00)	-5,00%
8130101 Bagian Laba PDAM - LO	3.574.069.375,00	3.080.089.779,00	493.979.596,00	16,04%
8130102 Bagian Laba PT PCM - LO	7.510.781.736,00	7.204.877.756,00	305.903.980,00	4,25%
8130103 Bagian Laba PT BPRS - LO	621.743.186,00	2.505.165.549,00	(1.883.422.363,00)	-75,18%
8130104 Bagian Laba Bank Jabar Banten - LO	5.420.463.073,00	5.237.400.000,00	183.063.073,00	3,50%

a. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PDAM Kota Cilegon

Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah pada PDAM Kota Cilegon realisasi untuk Tahun 2019 senilai Rp3.574.069.375,00 meningkat senilai Rp493.979.596,00 atau 16,04% dibanding dengan Tahun 2018 senilai Rp3.080.089.779,00.

b. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT Pelabuhan Cilegon Mandiri

Bagian laba atas penyertaan modal pada PT PCM dimana realisasi untuk Tahun 2019 senilai Rp7.510.781.736,00 meningkat senilai Rp305.903.980,00 atau 4,25% dibanding dengan Tahun 2018 senilai Rp7.204.877.756,00.

c. Bagian Laba atas PT BPRS Cilegon Mandiri

Bagian laba Penyertaan Modal pada PT BPRS Cilegon Mandiri, dimana realisasi untuk Tahun 2019 senilai Rp621.743.186,00 turun senilai (Rp1.883.422.363,00) atau (75,18%) dibanding dengan Tahun 2018 senilai Rp2.505.165.549,00.

d. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jabar Banten

Bagian laba Penyertaan Modal pada Bank Jabar Banten, dimana realisasi untuk Tahun 2019 senilai Rp5.420.463.073,00 meningkat senilai Rp183.063.073,00 atau 3,50% dibanding dengan Tahun 2018 senilai Rp5.237.400.000,00.

5.3.1.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH - LO

Lain Lain
PAD yang
Sah-LO

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2019 senilai Rp112.046.732.469,00 menurun senilai (Rp1.195.113.499,00) atau (1,06%) dibanding dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2018 senilai Rp113.241.845.968,00, dengan rincian dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL LO 7.1

Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO				
(Dalam Rupiah)				
URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK (TURUN)	%
814 Lain-lain PAD Yang Sah - LO	112,047,516,194.00	113,241,845,968.00	(1,194,329,774.00)	-1.05%
81401 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	826,967,520.00	592,527,000.00	234,440,520.00	39.57%
8140102 Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO	785,967,520.00	592,527,000.00	193,440,520.00	32.65%
8140105 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	
81403 Penerimaan Jasa Giro - LO	1,718,027,842.00	1,099,244,631.00	618,783,211.00	56.29%
8140301 Jasa Giro Kas Daerah - LO	1,718,027,842.00	1,099,244,631.00	618,783,211.00	56.29%
81404 Pendapatan Bunga - LO	13,052,573,226.00	14,450,578,610.00	(1,398,005,384.00)	-9.67%
8140401 Pendapatan Bunga Deposito BJB - LO	13,052,573,226.00	14,450,578,610.00	(1,398,005,384.00)	-9.67%
81405 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	14,200,000.00	247,546,429.00	(233,346,429.00)	-94.26%
8140502 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO	14,200,000.00	247,546,429.00	(233,346,429.00)	-94.26%
81407 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	197,356,422.00	0.00	197,356,422.00	
8140701 Pendapatan Denda Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO	121,533,375.00	0.00	121,533,375.00	
8140702 Pendapatan Denda Pekerjaan Bidang Kesehatan - LO	35,161,492.00	0.00	35,161,492.00	
8140703 Pendapatan Denda Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO	10,354,677.00	0.00	10,354,677.00	
8140704 Pendapatan Denda Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LO	21,383,210.00	0.00	21,383,210.00	
8140708 Pendapatan Denda Bidang Lingkungan Hidup - LO	8,923,668.00	0.00	8,923,668.00	
81408 Pendapatan Denda Pajak - LO	1,781,377,711.00	1,288,929,675.00	492,448,036.00	38.21%
8140806 Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	56,032,805.00	10,207,826.00	45,824,979.00	448.92%
8140807 Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	89,451,406.00	73,698,016.00	15,753,390.00	21.38%
8140808 Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	2,703,337.00	16,496,461.00	(13,793,124.00)	-83.61%
8140809 Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	108,798,930.00	123,821,710.00	(15,022,780.00)	-12.13%
8140810 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO	4,604.00	57,118,261.00	(57,113,657.00)	-99.99%
8140811 Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	6,643,129.00	10,271,670.00	(3,628,541.00)	-35.33%
8140812 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	909,179.00	2,551,670.00	(1,642,491.00)	-64.37%
8140814 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	48,370,724.00	148,449,763.00	(100,079,039.00)	-67.42%
8140815 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	1,468,463,597.00	846,314,298.00	622,149,299.00	73.51%
81409 Pendapatan Denda Retribusi - LO	30,055,041.00	45,315,148.00	(15,260,107.00)	-33.68%
8140908 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian alat Pemadam	0.00	317,270.00	(317,270.00)	-100.00%
8140915 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	16,334,848.00	38,305,468.00	(21,970,620.00)	-57.36%
8140926 Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	12,937,093.00	6,495,300.00	6,441,793.00	99.18%
8140932 Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Trayek - LO	783,100.00	197,110.00	585,990.00	297.29%
81413 Pendapatan dari Pengembalian - LO	1,022,944,966.00	2,610,208,216.00	(1,587,263,250.00)	-60.81%
8141306 Pendapatan Dari Pengembalian Temuan - LO	1,022,944,966.00	2,610,208,216.00	(1,587,263,250.00)	-60.81%
81416 Pendapatan Sewa - LO	41,104,924.00	28,171,305.00	12,933,619.00	45.91%
8141601 Cicitan Kios - LO	4,956,386.00	(1,057,231.00)	6,013,617.00	568.81%
8141602 MCK Umum - LO	36,148,538.00	29,228,536.00	6,920,002.00	23.68%
81418 Pendapatan BLUD - LO	78,950,564,583.00	81,434,252,188.00	(2,483,687,605.00)	-3.05%
8141801 Pendapatan BLUD - RSUD - LO	75,647,616,128.00	78,140,304,852.00	(2,492,688,724.00)	-3.19%
8141802 Pendapatan BLUD - PDB - LO	3,302,948,455.00	3,293,947,336.00	9,001,119.00	0.27%
81419 Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	1,780,460,526.00	2,331,267,079.00	(550,806,553.00)	-23.63%
8141910 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	1,780,460,526.00	2,331,267,079.00	(550,806,553.00)	-23.63%
81423 Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	12,631,882,808.00	9,113,805,687.00	3,518,077,121.00	38.60%
8142301 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Cilegon - LO	1,295,524,715.00	867,023,562.00	428,501,153.00	49.42%
8142302 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Cilegon - LO	2,097,174,900.00	1,684,342,326.00	412,832,574.00	24.51%
8142303 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Cibebur - LO	1,796,076,883.00	1,175,346,012.00	620,730,871.00	52.81%
8142304 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Grogol - LO	992,506,948.00	731,252,350.00	261,254,598.00	35.73%
8142305 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Pulomerak - LO	1,828,655,301.00	1,344,670,047.00	483,985,254.00	35.99%
8142306 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Purwakarta - LO	1,119,188,906.00	869,182,983.00	250,005,923.00	28.76%
8142307 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Jombang - LO	1,468,224,586.00	1,109,135,458.00	359,089,128.00	32.38%
8142308 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Citangkil - LO	2,034,530,569.00	1,332,852,949.00	701,677,620.00	52.64%

Komparasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah -LO dan Realisasi Pendapatan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah -LRA pada tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel LO 7.2

Komparasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LO dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah -LRA			
(Dalam Rupiah)			
Uraian	Realisasi Pendapatan- LRA 2019	Penyesuaian Pendapatan 2019	Pendapatan-LO 2019
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	110,208,991,503.00	1,838,524,691.00	112,047,516,194.00
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	826,967,520.00	-	826,967,520.00
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO	785,967,520.00	-	785,967,520.00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO	41,000,000.00	-	41,000,000.00
Penerimaan Jasa Giro - LO	1,718,027,842.00	-	1,718,027,842.00
Jasa Giro Kas Daerah - LO	1,718,027,842.00	-	1,718,027,842.00
Pendapatan Bunga - LO	13,052,573,226.00	-	13,052,573,226.00
Pendapatan Bunga Deposito BJB - LO	13,052,573,226.00	-	13,052,573,226.00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	221,700,000.00	(207,500,000.00)	14,200,000.00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO	221,700,000.00	(207,500,000.00)	14,200,000.00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - L	197,356,422.00	-	197,356,422.00
Pendapatan Denda Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO	121,533,375.00	-	121,533,375.00
Pendapatan Denda Pekerjaan Bidang Kesehatan - LO	35,161,492.00	-	35,161,492.00
Pendapatan Denda Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO	10,354,677.00	-	10,354,677.00
Pendapatan Denda Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LO	21,383,210.00	-	21,383,210.00
Pendapatan Denda Bidang Lingkungan Hidup - LO	8,923,668.00	-	8,923,668.00
Pendapatan Denda Pajak - LO	1,781,378,336.00	(625.00)	1,781,377,711.00
Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	56,032,805.00	-	56,032,805.00
Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	89,451,406.00	-	89,451,406.00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	2,703,337.00	-	2,703,337.00
Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	108,798,930.00	-	108,798,930.00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO	4,604.00	-	4,604.00
Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	6,643,129.00	-	6,643,129.00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	909,179.00	-	909,179.00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	48,370,724.00	-	48,370,724.00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perko	1,468,464,222.00	(625.00)	1,468,463,597.00
Pendapatan Denda Retribusi - LO	19,216,781.00	10,838,260.00	30,055,041.00
Pendapatan Denda Retribusi Pemaksa alat Pemadam	-	-	0.00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	6,279,688.00	10,055,160.00	16,334,848.00
Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	12,937,093.00	-	12,937,093.00
Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin	-	783,100.00	783,100.00
Pendapatan dari Pengembalian -LO	1,022,944,966.00	-	1,022,944,966.00
Pendapatan Dari Pengembalian Temuan - LO	1,022,944,966.00	-	1,022,944,966.00
Pendapatan Sewa - LO	141,561,416.00	(100,456,492.00)	41,104,924.00
Cicilan Kios - LO	105,412,878.00	(100,456,492.00)	4,956,386.00
MCK Umum - LO	36,148,538.00	-	36,148,538.00
Pendapatan BLUD - LO	77,025,673,660.00	1,924,890,923.00	78,950,564,583.00
Pendapatan BLUD - RSUD - LO	73,815,024,258.00	1,832,591,870.00	75,647,616,128.00
Pendapatan BLUD - PDB - LO	3,210,649,402.00	92,299,053.00	3,302,948,455.00
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	1,569,708,526.00	210,752,000.00	1,780,460,526.00
Lain-Lain PAD yang Sah Lain-lainnya - LO	1,569,708,526.00	210,752,000.00	1,780,460,526.00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	12,631,882,808.00	-	12,631,882,808.00
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Cilegon - LO	1,295,524,715.00	-	1,295,524,715.00
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Ciwandan - LO	2,097,174,900.00	-	2,097,174,900.00
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Cibeber - LO	1,796,076,883.00	-	1,796,076,883.00
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Grogol - LO	992,506,948.00	-	992,506,948.00
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Pulomerak - LO	1,828,655,301.00	-	1,828,655,301.00
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Purwakarta - LO	1,119,188,906.00	-	1,119,188,906.00
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Jombang - LO	1,468,224,586.00	-	1,468,224,586.00
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Citangkil - LO	2,034,530,569.00	-	2,034,530,569.00

5.3.2. PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai

penetapan alokasi, dalam hal dengan kurang salur.

Pendapatan Transfer-LO pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.102.432.189.871,00. Pendapatan Transfer-LO terdiri dari:

Pendapatan
Transfer-
LO

TABEL LO 8

Rincian Pendapatan Transfer-LO					
(Dalam Rupiah)					
	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK(TURUN)	%
82	PENDAPATAN TRANSFER - LO	1.102.432.189.871,00	1.008.587.281.028,00	93.844.908.843,00	9,30%
821	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	866.731.464.020,00	841.804.102.872,00	24.927.361.148,00	2,96%
822	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	33.166.816.000,00	-	33.166.816.000,00	0,00
823	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	162.533.909.851,00	136.783.178.156,00	25.750.731.695,00	18,83%
824	Bantuan Keuangan - LO	40.000.000.000,00	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	33,33%

5.3.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO pada Tahun 2019 senilai Rp866.731.464.020,00 meningkat senilai Rp24.927.361.148,00 atau 2,96 % dibanding dengan Tahun 2018 senilai Rp841.804.102.872,00 yang dapat dijelaskan dengan berikut:

TABEL LO 9

Pendapatan
Transfer
Pemerintah
Pusat-LO

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO					
(Dalam Rupiah)					
	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK (TURUN)	%
821	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	866.731.464.020,00	841.804.102.872,00	24.927.361.148,00	2,96%
82101	Bagi Hasil Pajak - LO	96.543.890.961,00	118.352.788.466,00	(21.808.897.505,00)	-18,43%
8210101	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO	4.714.100.263,00	4.589.012.440,00	125.087.823,00	2,73%
8210103	Bagi Hasil dari Penghasilan(PPH) Psl 25 dan Psl 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Psl 21 - LO	91.829.790.698,00	113.763.776.026,00	(21.933.985.328,00)	-19,28%
82102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	1.582.740.490,00	1.593.297.207,00	(10.556.717,00)	-0,66%
8210202	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	85.255.299,00	136.989.141,00	(51.733.842,00)	-37,76%
8210210	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	137.453.515,00	131.675.630,00	5.777.885,00	4,39%
8210211	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan - LO	689.340.471,00	701.234.591,00	(11.894.120,00)	-1,70%
8210212	Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum (Royalti) - LO	670.691.205,00	623.397.845,00	47.293.360,00	7,59%
82103	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	643.891.037.000,00	597.861.841.963,00	46.029.195.037,00	7,70%
8210301	Dana Alokasi Umum - LO	643.891.037.000,00	597.861.841.963,00	46.029.195.037,00	7,70%
82104	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	124.713.795.569,00	123.996.175.236,00	717.620.333,00	0,58%
8210401	Dana Alokasi Khusus Fisik - LO	38.118.266.482,00	32.413.013.220,00	5.705.253.262,00	17,60%
8210402	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO	86.595.529.087,00	91.583.162.016,00	(4.987.632.929,00)	-5,45%

5.3.2.2 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Kota Cilegon pada tahun 2019 Rp33.166.816.000,00, Pemerintah Kota Cilegon untuk Tahun Anggaran 2019 menerima Dana Insentif Daerah. Sedangkan Tahun 2018 Pemerintah Kota Cilegon tidak mendapatkan alokasi transfer Dana Insentif Daerah atau Nihil. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO dapat dilihat dalam Tabel berikut

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Tabel LO 10

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO					
(Dalam Rupiah)					
URAIAN		SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK (TURUN)	%
822	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	33.166.816.000,00	0,00	33.166.816.000,00	0,00
82203	Dana Penyesuaian - LO	33.166.816.000,00	0,00	33.166.816.000,00	0,00
8220303	Dana Insentif Daerah - LO	33.166.816.000,00	0,00	33.166.816.000,00	0,00

5.3.2.3 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA -LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Kota Cilegon dirinci dalam Tabel berikut :

Tabel LO 11.1

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO					
(Dalam Rupiah)					
URAIAN		SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK (TURUN)	%
823	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	162.533.909.851,00	136.783.178.156,00	25.750.731.695,00	18,83%
82301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	162.533.909.851,00	136.783.178.156,00	25.750.731.695,00	18,83%
8230101	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	162.533.909.851,00	136.783.178.156,00	25.750.731.695,00	18,83%

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Tabel LO 11.2

Komparasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO dan Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA			
(Dalam Rupiah)			
Uraian	Realisasi Pendapatan-LRA 2019	Penyesuaian Pendapatan 2019	Pendapatan-LO 2019
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	153.420.457.880,00	9.113.451.971,00	162.533.909.851,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	153.420.457.880,00	9.113.451.971,00	162.533.909.851,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	153.420.457.880,00	9.113.451.971,00	162.533.909.851,00

5.3.2.4 PENDAPATAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN -LO

Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan-LO Kota Cilegon sebesar Rp40.000.000.000,00 dirinci dalam Tabel berikut :

Tabel LO 12

Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan-LO

Rincian Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan-LO				
(Dalam Rupiah)				
URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK (TURUN)	%
824 Bantuan Keuangan - LO	40.000.000.000,00	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	33,33%
82401 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	40.000.000.000,00	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	33,33%
8240101 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO	40.000.000.000,00	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	33,33%

5.3.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH -LO

Lain-lain pendapatan yang sah - LO tahun 2019 sebesar Rp81.729.210.546,00 dirinci dalam tabel berikut :

TABEL LO 13

Lain Lain Pendapatan yang Sah Lainnya-LO

Rincian Lain-lain pendapatan yang sah - LO	
(Dalam Rupiah)	
URAIAN	SALDO 2019
83 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -	81,729,210,546.00
831 Pendapatan Hibah - LO	53,261,151,166.00
833 Pendapatan Lainnya - LO	28,468,059,380.00

5.3.3.1 PENDAPATAN HIBAH-LO

Pendapatan Hibah-LO Kota Cilegon Sebesar Rp53.261.151.166,00 tahun 2019 dirinci dalam tabel berikut :

TABEL LO 14.1

Pendapatan Hibah-LO

Rincian Pendapatan Hibah-LO				
(Dalam Rupiah)				
URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK (TURUN)	%
831 Pendapatan Hibah - LO	53,261,151,166.00	67,094,557,811.00	(13,833,406,645.00)	(20.62)
83101 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	4,842,616,875.00	27,587,588,970.00	(22,744,972,095.00)	(82.45)
83103 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	9,552,168,878.00	1,157,377,000.00	8,394,791,878.00	725.33
83104 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	2,600,000.00	-	2,600,000.00	#DIV/0!
83106 Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	38,863,765,413.00	38,349,591,841.00	514,173,572.00	1.34

Pada tahun 2019 Pendapatan Hibah-LO adalah Rp53.261.151.166,00 turun sebesar (Rp13.833.406.645,00) atau (20,62%) dibandingkan tahun 2018 yaitu Rp67.094.557.811,00

Tabel 14.2

Komparasi Pendapatan Hibah-LO dan Pendapatan Hibah-LRA			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
Uraian	Realisasi Pendapatan LRA 2019	Penyesuaian Pendapatan 2019	Pendapatan-LO 2019
Pendapatan Hibah - LO	38,863,765,413.00	14,397,385,753.00	53,261,151,166.00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	-	4,842,616,875.00	4,842,616,875.00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	-	9,552,168,878.00	9,552,168,878.00
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	-	2,600,000.00	2,600,000.00
Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	38,863,765,413.00	-	38,863,765,413.00

Selisih antara Pendapatan Hibah-LO dan Pendapatan Hibah- LRA adalah Pendapatah Hibah dari Pemerintah senilai Rp4.842.616.875,00, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri senilai Rp9.552.168.878,00 dan Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan senilai Rp2.600.000,00 yang diterima berupa barang.

Pendapatan Hibah BOS-LO dirinci dalam tabel berikut:

Tabel LO15

Rincian Pendapatan Hibah BOS-LO

(Dalam Rupiah)

URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK(TURUN)	%
83106 Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	38.863.765.413,00	38.349.591.841,00	514.173.572,00	1,34%
83106001 Hibah Dana BOS SMPN 1 - LO	684.724.302,00	697.786.285,00	(13.061.983,00)	-1,87%
83106002 Hibah Dana BOS SMPN 2 - LO	1.563.859.646,00	919.234.147,00	644.625.499,00	70,13%
83106003 Hibah Dana BOS SMPN 3 - LO	849.805.485,00	858.815.172,00	(9.009.687,00)	-1,05%
83106004 Hibah Dana BOS SMPN 4 - LO	785.648.175,00	804.481.786,00	(18.833.611,00)	-2,34%
83106005 Hibah Dana BOS SMPN 5 - LO	871.800.000,00	949.800.000,00	(78.000.000,00)	-8,21%
83106006 Hibah Dana BOS SMPN 6 - LO	740.773.103,00	764.014.454,00	(23.241.351,00)	-3,04%
83106007 Hibah Dana BOS SMPN 7 - LO	798.577.367,00	836.844.796,00	(38.267.429,00)	-4,57%
83106008 Hibah Dana BOS SMPN 8 - LO	617.795.241,00	646.375.518,00	(28.580.277,00)	-4,42%
83106009 Hibah Dana BOS SMPN 9 - LO	504.990.683,00	530.051.188,00	(25.060.505,00)	-4,73%
83106010 Hibah Dana BOS SMPN 10 - LO	366.936.093,00	404.029.033,00	(37.092.940,00)	-9,18%
83106011 Hibah Dana BOS SMPN 11 - LO	534.800.000,00	498.875.243,00	35.924.757,00	7,20%
83106012 Hibah Dana BOS SDN JANGKAR - LO	207.200.000,00	198.400.000,00	8.800.000,00	4,44%
83106013 Hibah Dana BOS SDN PANGABUAN - LO	173.920.000,00	174.283.975,00	(363.975,00)	-0,21%
83106014 Hibah Dana BOS SDN KUBANG SARI II - LO	314.880.000,00	311.200.000,00	3.680.000,00	1,18%
83106015 Hibah Dana BOS SDN PEMATANG KEPUH - LO	100.480.000,00	100.160.000,00	320.000,00	0,32%
83106016 Hibah Dana BOS SDN SERANG ILIR - LO	251.200.000,00	256.368.540,00	(5.168.540,00)	-2,02%
83106017 Hibah Dana BOS SDN KARANG SETRA - LO	202.680.000,00	116.000.000,00	86.680.000,00	74,72%
83106018 Hibah Dana BOS SDN KEPUH - LO	137.280.000,00	129.120.000,00	8.160.000,00	6,32%
83106019 Hibah Dana BOS SDN KUBANG SARI I - LO	219.520.000,00	225.920.000,00	(6.400.000,00)	-2,83%
83106020 Hibah Dana BOS SDN TEMUGIRING - LO	264.800.000,00	262.880.000,00	1.920.000,00	0,73%
83106021 Hibah Dana BOS SDN TEGAL RATU - LO	204.160.000,00	197.280.000,00	6.880.000,00	3,49%
83106022 Hibah Dana BOS SDN TEGAL KIDONGDONG - LO	183.840.000,00	177.760.000,00	6.080.000,00	3,42%
83106023 Hibah Dana BOS SDN CIWANDAN - LO	230.080.000,00	234.720.000,00	(4.640.000,00)	-1,98%
83106024 Hibah Dana BOS SDN CIPAOT CIWANDAN - LO	166.240.000,00	160.000.000,00	6.240.000,00	3,90%
83106025 Hibah Dana BOS SDN GUNUNG SUGIH - LO	171.360.000,00	165.760.000,00	5.600.000,00	3,38%
83106026 Hibah Dana BOS SDN BOJONG BARU - LO	324.800.000,00	316.480.000,00	8.320.000,00	2,63%
83106027 Hibah Dana BOS SDN BELUMBANG - LO	318.560.000,00	307.591.599,00	10.968.401,00	3,57%
83106028 Hibah Dana BOS SDN BANJAR NEGARA - LO	131.840.000,00	130.240.000,00	1.600.000,00	1,23%
83106029 Hibah Dana BOS SDN CIGEBLAG - LO	254.400.000,00	245.120.000,00	9.280.000,00	3,79%
83106030 Hibah Dana BOS SDN CIODAN - LO	163.840.000,00	166.560.000,00	(2.720.000,00)	-1,63%
83106031 Hibah Dana BOS SDN MERAK - LO	164.640.000,00	172.305.393,00	(7.665.393,00)	-4,45%
83106032 Hibah Dana BOS SDN MEKARSARI - LO	170.720.000,00	179.680.000,00	(8.960.000,00)	-4,99%
83106033 Hibah Dana BOS SDN LEBAK GEDE - LO	134.240.000,00	130.967.867,00	3.272.133,00	2,50%
83106034 Hibah Dana BOS SDN LANGON - LO	129.600.000,00	125.856.049,00	3.743.951,00	2,97%
83106035 Hibah Dana BOS SDN SUKAJADI - LO	156.480.000,00	166.534.430,00	(10.054.430,00)	-6,04%
83106036 Hibah Dana BOS SDN PRINGORI - LO	101.760.000,00	98.490.801,00	3.269.199,00	3,32%
83106037 Hibah Dana BOS SDN SURALAYA - LO	176.000.000,00	178.968.000,00	(2.968.000,00)	-1,66%
83106038 Hibah Dana BOS SDN KAHAL - LO	186.400.000,00	178.847.193,00	7.552.807,00	4,22%

Lanjutan :

URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK(TURUN)	%
83106039 Hibah Dana BOS SDN TEMBULUN - LO	135.040.000,00	137.706.000,00	(2.666.000,00)	-1,94%
83106040 Hibah Dana BOS SDN TANJUNG SEKONG - LO	132.320.000,00	135.146.000,00	(2.826.000,00)	-2,09%
83106041 Hibah Dana BOS SDN TAMAN SARI V - LO	208.640.000,00	215.314.110,00	(6.674.110,00)	-3,10%
83106042 Hibah Dana BOS SDN TAMAN SARI IV - LO	137.280.000,00	133.737.289,00	3.542.711,00	2,65%
83106043 Hibah Dana BOS SDN TAMANSARI III - LO	162.720.000,00	185.280.000,00	(22.560.000,00)	-12,18%
83106044 Hibah Dana BOS SDN TAMANSARI II - LO	122.495.729,00	134.980.993,00	(12.485.264,00)	-9,25%
83106045 Hibah Dana BOS SDN WIDIYATAMA -LO	190.400.000,00	199.336.000,00	(8.936.000,00)	-4,48%
83106046 Hibah Dana BOS SDN WILULANG - LO	239.200.000,00	224.568.000,00	14.632.000,00	6,52%
83106047 Hibah Dana BOS SDN TAMAN SARI I - LO	207.520.000,00	226.186.000,00	(18.666.000,00)	-8,25%
83106048 Hibah Dana BOS SDN CIPALA - LO	97.120.000,00	86.648.000,00	10.472.000,00	12,09%
83106049 Hibah Dana BOS SDN GUNUNG BATUR - LO	71.040.000,00	67.040.000,00	4.000.000,00	5,97%
83106050 Hibah Dana BOS SDN FLORIDA - LO	147.040.000,00	150.986.000,00	(3.946.000,00)	-2,61%
83106051 Hibah Dana BOS SDN BABAKAN TURI - LO	266.400.000,00	254.880.000,00	11.520.000,00	4,52%
83106052 Hibah Dana BOS SDN BUMI WARAS - LO	267.200.000,00	276.266.506,00	(9.066.506,00)	-3,28%
83106053 Hibah Dana BOS SDN TEMBULUN II - LO	120.360.000,00	60.728.000,00	59.632.000,00	98,20%
83106054 Hibah Dana BOS SDN LEBAK GEBANG - LO	97.120.000,00	95.360.000,00	1.760.000,00	1,85%
83106055 Hibah Dana BOS SDN KETILENG III - LO	157.760.000,00	156.960.000,00	800.000,00	0,51%
83106056 Hibah Dana BOS SDN KETILENG II - LO	207.680.000,00	216.320.000,00	(8.640.000,00)	-3,99%
83106057 Hibah Dana BOS SDN KETILENG I - LO	202.240.000,00	204.320.000,00	(2.080.000,00)	-1,02%
83106058 Hibah Dana BOS SDN CIWADUK - LO	283.200.000,00	290.560.000,00	(7.360.000,00)	-2,53%
83106059 Hibah Dana BOS SDN CIPAOT - LO	337.400.000,00	193.920.000,00	143.480.000,00	73,99%
83106060 Hibah Dana BOS SDN CILEGON VI - LO	134.400.000,00	135.360.000,00	(960.000,00)	-0,71%
83106061 Hibah Dana BOS SDN CIWEDUS I - LO	158.880.000,00	156.000.000,00	2.880.000,00	1,85%
83106062 Hibah Dana BOS SDN CIWEDUS II - LO	151.200.000,00	144.320.000,00	6.880.000,00	4,77%
83106063 Hibah Dana BOS SDN BLOK I - LO	459.360.000,00	474.400.000,00	(15.040.000,00)	-3,17%
83106064 Hibah Dana BOS SDN BENDUNGAN II - LO	252.960.000,00	235.040.000,00	17.920.000,00	7,62%
83106065 Hibah Dana BOS SDN BENDUNGAN I - LO	173.920.000,00	175.520.000,00	(1.600.000,00)	-0,91%
83106066 Hibah Dana BOS SDN KEDALEMAN I - LO	475.520.000,00	499.520.000,00	(24.000.000,00)	-4,80%
83106067 Hibah Dana BOS SDN KEDALEMAN IV - LO	591.840.000,00	611.680.000,00	(19.840.000,00)	-3,24%
83106068 Hibah Dana BOS SDN KEDALEMAN III - LO	134.880.000,00	139.200.000,00	(4.320.000,00)	-3,10%
83106069 Hibah Dana BOS SDN KEDALEMAN II - LO	136.480.000,00	141.920.000,00	(5.440.000,00)	-3,83%
83106070 Hibah Dana BOS SDN KALITIMBANG I - LO	93.280.000,00	86.400.000,00	6.880.000,00	7,96%
83106071 Hibah Dana BOS SDN KEROTEK - LO	113.280.000,00	108.640.000,00	4.640.000,00	4,27%
83106072 Hibah Dana BOS SDN JERANG ILIR - LO	172.000.000,00	171.360.000,00	640.000,00	0,37%
83106073 Hibah Dana BOS SDN JERANG BARAT - LO	232.960.000,00	217.934.101,00	15.025.899,00	6,89%
83106074 Hibah Dana BOS SDN BULAKAN I - LO	162.240.000,00	168.640.000,00	(6.400.000,00)	-3,80%
83106075 Hibah Dana BOS SDN BULAKAN II - LO	193.120.000,00	187.520.000,00	5.600.000,00	2,99%
83106076 Hibah Dana BOS SDN CIKERUT - LO	221.920.000,00	210.560.000,00	11.360.000,00	5,40%
83106077 Hibah Dana BOS SDN CIKERAI II - LO	168.640.000,00	173.486.596,00	(4.846.596,00)	-2,79%

Lanjutan :

URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK(TURUN)	%
83106078 Hibah Dana BOS SDN CIKERAI I - LO	140.160.000,00	134.880.000,00	5.280.000,00	3,91%
83106079 Hibah Dana BOS SDN BULAKAN III - LO	131.040.000,00	133.280.000,00	(2.240.000,00)	-1,68%
83106080 Hibah Dana BOS SDN CIBEBER I - LO	191.520.000,00	188.480.000,00	3.040.000,00	1,61%
83106081 Hibah Dana BOS SDN CIBEBER II - LO	226.720.000,00	228.640.000,00	(1.920.000,00)	-0,84%
83106082 Hibah Dana BOS SDN CIBEBER III - LO	370.400.000,00	360.535.988,00	9.864.012,00	2,74%
83106083 Hibah Dana BOS SDN KALITIMBANG II - LO	155.840.000,00	164.320.000,00	(8.480.000,00)	-5,16%
83106084 Hibah Dana BOS SDN SUMURWULUH - LO	126.880.000,00	122.080.000,00	4.800.000,00	3,93%
83106085 Hibah Dana BOS SDN KAMPUNG BARU - LO	218.880.000,00	218.880.000,00	-	0,00%
83106086 Hibah Dana BOS SDN KOTASARI - LO	313.320.000,00	202.240.000,00	111.080.000,00	54,92%
83106087 Hibah Dana BOS SDN TEGAL WANGI - LO	163.840.000,00	175.360.000,00	(11.520.000,00)	-6,57%
83106088 Hibah Dana BOS SDN CIORA - LO	180.960.000,00	167.680.000,00	13.280.000,00	7,92%
83106089 Hibah Dana BOS SDN PABUARAN - LO	173.760.000,00	185.280.000,00	(11.520.000,00)	-6,22%
83106090 Hibah Dana BOS SDN GROGOL II - LO	219.520.000,00	228.960.000,00	(9.440.000,00)	-4,12%
83106091 Hibah Dana BOS SDN GROGOL I - LO	242.400.000,00	236.640.000,00	5.760.000,00	2,43%
83106092 Hibah Dana BOS SDN GEREM III - LO	130.720.000,00	129.600.000,00	1.120.000,00	0,86%
83106093 Hibah Dana BOS SDN GEREM II - LO	138.416.967,00	134.080.000,00	4.336.967,00	3,23%
83106094 Hibah Dana BOS SDN GEREM I - LO	184.000.000,00	176.800.000,00	7.200.000,00	4,07%
83106095 Hibah Dana BOS SDN BUJANGGADUNG - LO	353.280.000,00	369.760.000,00	(16.480.000,00)	-4,46%
83106096 Hibah Dana BOS SDN CIKUASA II - LO	151.200.000,00	141.600.000,00	9.600.000,00	6,78%
83106097 Hibah Dana BOS SDN CIKUASA I - LO	141.920.000,00	146.880.000,00	(4.960.000,00)	-3,38%
83106098 Hibah Dana BOS SDN PABEAN - LO	87.840.000,00	81.280.000,00	6.560.000,00	8,07%
83106099 Hibah Dana BOS SDN PASAR BUNDER - LO	198.560.000,00	200.960.000,00	(2.400.000,00)	-1,19%
83106100 Hibah Dana BOS SDN PECINAN - LO	75.520.000,00	80.960.000,00	(5.440.000,00)	-6,72%
83106101 Hibah Dana BOS SDN SUMAMPIR - LO	333.760.000,00	342.080.000,00	(8.320.000,00)	-2,43%
83106102 Hibah Dana BOS SDN SIMPANG TIGA - LO	302.080.000,00	321.440.000,00	(19.360.000,00)	-6,02%
83106103 Hibah Dana BOS SDN RAMANUJU - LO	183.680.000,00	195.360.000,00	(11.680.000,00)	-5,98%
83106104 Hibah Dana BOS SDN PURWAKARTA II - LO	105.120.000,00	105.627.470,00	(507.470,00)	-0,48%
83106105 Hibah Dana BOS SDN PURWAKARTA I - LO	287.200.000,00	288.960.000,00	(1.760.000,00)	-0,61%
83106106 Hibah Dana BOS SDN PURWAKARTA - LO	150.400.000,00	148.480.000,00	1.920.000,00	1,29%
83106107 Hibah Dana BOS SDN KENANGA - LO	120.320.000,00	138.880.000,00	(18.560.000,00)	-13,36%
83106108 Hibah Dana BOS SDN KEBON DALEM - LO	272.800.000,00	269.760.000,00	3.040.000,00	1,13%
83106109 Hibah Dana BOS SDN KUBANG KUTU II - LO	216.480.000,00	209.600.000,00	6.880.000,00	3,28%
83106110 Hibah Dana BOS SDN KUBANGKUTU I - LO	177.120.000,00	184.960.000,00	(7.840.000,00)	-4,24%
83106111 Hibah Dana BOS SDN KUBANG KALAK - LO	141.760.000,00	139.840.000,00	1.920.000,00	1,37%
83106112 Hibah Dana BOS SDN KOTA BUMI - LO	159.200.000,00	149.440.000,00	9.760.000,00	6,53%
83106113 Hibah Dana BOS SDN BLACU - LO	139.040.000,00	130.880.000,00	8.160.000,00	6,23%
83106114 Hibah Dana BOS SDN PANGGUNG RAWI - LO	156.800.000,00	152.960.000,00	3.840.000,00	2,51%
83106115 Hibah Dana BOS SDN MASIGIT III - LO	48.800.000,00	57.280.000,00	(8.480.000,00)	-14,80%
83106116 Hibah Dana BOS SDN MASIGIT II - LO	179.200.000,00	172.640.000,00	6.560.000,00	3,80%

Pendapatan
Lainnya-
LO

Lanjutan:

URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK(TURUN)	%
83106117 Hibah Dana BOS SDN SUKMAJAYA II - LO	138.560.000,00	132.640.000,00	5.920.000,00	4,46%
83106118 Hibah Dana BOS SDN SUKMAJAYA I - LO	120.050.410,00	118.560.000,00	1.490.410,00	1,26%
83106119 Hibah Dana BOS SDN KEPENDILAN - LO	174.720.000,00	190.240.000,00	(15.520.000,00)	-8,16%
83106120 Hibah Dana BOS SDN KERANGGOT - LO	274.884.831,00	281.440.000,00	(6.555.169,00)	-2,33%
83106121 Hibah Dana BOS SDN KUBANG LABAN - LO	253.120.000,00	267.200.000,00	(14.080.000,00)	-5,27%
83106122 Hibah Dana BOS SDN MASIGIT I - LO	208.000.000,00	212.320.000,00	(4.320.000,00)	-2,03%
83106123 Hibah Dana BOS SDN CILEGON XII - LO	192.480.000,00	200.000.000,00	(7.520.000,00)	-3,76%
83106124 Hibah Dana BOS SDN CILEGON XI - LO	290.880.000,00	307.714.688,00	(16.834.688,00)	-5,47%
83106125 Hibah Dana BOS SDN CILEGON X - LO	144.480.000,00	151.680.000,00	(7.200.000,00)	-4,75%
83106126 Hibah Dana BOS SDN CILEGON VIII - LO	95.040.000,00	96.000.000,00	(960.000,00)	-1,00%
83106127 Hibah Dana BOS SDN CILEGON VII - LO	100.160.000,00	97.920.000,00	2.240.000,00	2,29%
83106128 Hibah Dana BOS SDN GEDONG DALEM III - LO	137.280.000,00	135.680.000,00	1.600.000,00	1,18%
83106129 Hibah Dana BOS SDN GEDONG DALEM II - LO	182.720.000,00	182.810.000,00	(90.000,00)	-0,05%
83106130 Hibah Dana BOS SDN GEDONG DALEM I - LO	111.522.500,00	97.600.000,00	13.922.500,00	14,26%
83106131 Hibah Dana BOS SDN CILEGON V - LO	207.520.000,00	209.120.000,00	(1.600.000,00)	-0,77%
83106132 Hibah Dana BOS SDN CILEGON IX - LO	265.920.000,00	282.880.000,00	(16.960.000,00)	-6,00%
83106133 Hibah Dana BOS SDN BLOK C - LO	238.880.000,00	241.600.000,00	(2.720.000,00)	-1,13%
83106134 Hibah Dana BOS SDN CILEGON IV - LO	385.790.660,00	376.983.642,00	8.807.018,00	2,34%
83106135 Hibah Dana BOS SDN CILEGON III - LO	283.680.000,00	295.840.000,00	(12.160.000,00)	-4,11%
83106136 Hibah Dana BOS SDN CILEGON II - LO	495.680.000,00	504.160.000,00	(8.480.000,00)	-1,68%
83106137 Hibah Dana BOS SDN CILEGON I - LO	381.774.221,00	391.300.747,00	(9.526.526,00)	-2,43%
83106138 Hibah Dana BOS SDN PEKALONGAN I - LO	129.120.000,00	130.400.000,00	(1.280.000,00)	-0,98%
83106139 Hibah Dana BOS SDN PEKALONGAN II - LO	216.640.000,00	211.840.000,00	4.800.000,00	2,27%
83106140 Hibah Dana BOS SDN SAMANGRAYA II - LO	400.960.000,00	407.200.000,00	(6.240.000,00)	-1,53%
83106141 Hibah Dana BOS SDN SAMANGRAYA I - LO	272.000.000,00	285.120.000,00	(13.120.000,00)	-4,60%
83106142 Hibah Dana BOS SDN KUBANG SEPAT II - LO	321.760.000,00	330.560.000,00	(8.800.000,00)	-2,66%
83106143 Hibah Dana BOS SDN KUBANG SEPAT I - LO	395.840.000,00	439.840.000,00	(44.000.000,00)	-10,00%
83106144 Hibah Dana BOS SDN KEPUH DENOK - LO	221.280.000,00	219.840.000,00	1.440.000,00	0,66%
83106145 Hibah Dana BOS SDN KELELET - LO	233.280.000,00	237.760.000,00	(4.480.000,00)	-1,88%
83106146 Hibah Dana BOS SDN KEBONSARI II - LO	259.840.000,00	259.200.000,00	640.000,00	0,25%
83106147 Hibah Dana BOS SDN KEBONSARI I - LO	262.560.000,00	271.840.000,00	(9.280.000,00)	-3,41%
83106148 Hibah Dana BOS SDN KUBANG LESUNG - LO	172.160.000,00	170.240.000,00	1.920.000,00	1,13%
83106149 Hibah Dana BOS SDN KUBANG LESUNG KULON - LO	70.400.000,00	68.320.000,00	2.080.000,00	3,04%
83106150 Hibah Dana BOS SDN KRENCENG II - LO	132.640.000,00	136.960.000,00	(4.320.000,00)	-3,15%
83106151 Hibah Dana BOS SDN KRENCENG I - LO	321.760.000,00	353.600.000,00	(31.840.000,00)	-9,00%
83106152 Hibah Dana BOS SDN TAMAN BARU II - LO	191.040.000,00	180.640.000,00	10.400.000,00	5,76%
83106153 Hibah Dana BOS SDN WARNASARI - LO	327.360.000,00	341.600.000,00	(14.240.000,00)	-4,17%
83106154 Hibah Dana BOS SDN WALIKUKUN - LO	118.080.000,00	120.960.000,00	(2.880.000,00)	-2,38%
83106155 Hibah Dana BOS SDN TEMIANG - LO	57.600.000,00	56.320.000,00	1.280.000,00	2,27%

Lanjutan:

URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK(TURUN)	%
83106156 Hibah Dana BOS SDN TEGAL CABE - LO	243.360.000,00	247.520.000,00	(4.160.000,00)	-1,68%
83106157 Hibah Dana BOS SDN TAMAN BARU I - LO	121.440.000,00	119.360.000,00	2.080.000,00	1,74%
83106158 Hibah Dana BOS SDN CITANGKIL BARU - LO	107.200.000,00	114.560.000,00	(7.360.000,00)	-6,42%
83106159 Hibah Dana BOS SDN CIRIU - LO	362.080.000,00	379.840.000,00	(17.760.000,00)	-4,68%
83106160 Hibah Dana BOS SDN DELINGSENG - LO	403.360.000,00	408.034.242,00	(4.674.242,00)	-1,15%
83106161 Hibah Dana BOS SDN DERINGO - LO	170.720.000,00	165.440.000,00	5.280.000,00	3,19%

5.3.3.2 PENDAPATAN LAINNYA-LO

Pendapatan Lainnya-LO merupakan pendapatan yang berasal dari hasil penyesuaian peningkatan/penurunan penyertaan modal BUMD pada investasi jangka panjang permanen diluar penyertaan modal yang pencairannya melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pendapatan Lainnya-LO Kota Cilegon dirinci dalam Tabel berikut :

Table LO16

Rincian Pendapatan Lainnya-LO				
<i>(Dalam Rupiah)</i>				
URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK (TURUN)	%
833 Pendapatan Lainnya - LO	28,468,059,380.00	1,007,256,045,593.00	(978,787,986,213.00)	-97.17%
83301 Pendapatan Lainnya - LO	28,468,059,380.00	1,007,256,045,593.00	(978,787,986,213.00)	-97.17%
8330101 Pendapatan Lainnya - LO	28,468,059,380.00	1,007,256,045,593.00	(978,787,986,213.00)	-97.17%

5.3.4 BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban pemerintah Kota Cilegon pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.633.053.737.276.93 dirinci dalam Tabel LO 17 berikut:

Beban

RINCIAN BEBAN - LO				
<i>(Dalam R)</i>				
URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK (TURUN)	
9 BEBAN	1,633,053,737,276.93	1,478,697,397,756.00	154,356,339,520.93	:
91 BEBAN OPERASI	1,632,077,006,677.93	1,477,784,000,548.00	(61,245,956,873.00)	:
92 BEBAN TRANSFER	976,730,599.00	913,397,208.00	63,333,391.00	:

Dokumen sumber untuk pengakuan Beban adalah Surat Tagihan, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Kemajuan

Pekerjaan, Berita Acara Sock Opname Persediaan, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Aset Tetap dan dokumen sumber lainnya yang dipersamakan untuk pengakuan Beban.

5.3.4.1 BEBAN OPERASI

Beban
Operasi

Beban Operasi Pemerintah Kota Cilegon pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.632.077.006.677.93 naik sebesar Rp154.293.006.129,93 atau naik 10,44% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1.477.784.000.548,00.

Beban Operasi dirinci dalam Tabel berikut:

TABEL LO 18

RINCIAN BEBAN OPERASI -LO					
(Dalam Rupiah)					
	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK (TURUN)	%
91	BEBAN OPERASI	1,632,077,006,677.93	1,477,784,000,548.00	154,293,006,129.93	10.44%
911	Beban Pegawai - LO	682,377,338,889.00	597,044,773,746.00	85,332,565,143.00	14.29%
912	Beban Barang dan Jasa	669,913,656,342.00	649,130,269,864.00	20,783,386,478.00	3.20%
915	Beban Hibah	52,699,361,490.00	43,287,073,044.00	9,412,288,446.00	21.74%
916	Beban Bantuan Sosial	2,232,360,000.00	6,036,520,000.00	(3,804,160,000.00)	-63.02%
917	Beban Penyusutan dan Amortisasi	223,413,466,810.00	172,960,717,694.00	50,452,749,116.00	29.17%
918	Beban Penyisihan Piutang	203,837,137.05	8,688,309,438.00	8,484,472,300.95	-97.65%
919	Beban Lain-lain	1,236,986,009.88	636,336,762.00	600,649,247.88	94.39%

5.3.4.1.1 BEBAN PEGAWAI - LO

Beban
Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai-LO Pemerintah Kota Cilegon meliputi Beban Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Beban Penerimaan Lainnya, Insentif pemungutan dengan realisasi TA 2019 dirinci sebagai berikut:

Tabel LO 19.2:

RINCIAN BEBAN PEGAWAI - LO		(Dalam Rupiah)
URAIAN	SALDO 2019	
911	Beban Pegawai - LO	682,377,338,889.00
91101	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	409,410,974,202.00
9110101	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	245,225,965,012.00
9110102	Beban Tunjangan Keluarga - LO	25,264,486,923.00
9110103	Beban Tunjangan Jabatan - LO	8,891,967,613.00
9110104	Beban Tunjangan Fungsional - LO	15,151,617,000.00
9110105	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	3,633,675,000.00
9110106	Beban Tunjangan Beras - LO	13,231,290,112.00
9110107	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	434,004,227.00
9110108	Beban Pembulatan Gaji - LO	3,896,940.00
9110109	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	6,951,675,187.00
9110110	Beban Uang Paket - LO	68,607,000.00
9110111	Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO	22,304,625.00
9110112	Beban Tunjangan Komisi - LO	40,300,575.00
9110113	Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO	22,030,575.00
9110114	Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO	6,059,550.00
9110115	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO	17,584,875.00
9110116	Beban Tunjangan Perumahan - LO	6,140,000,000.00
9110118	Beban Uang Jasa Pengabdian - LO	309,960,000.00
9110121	Beban Tunjangan Badan Legislasi Daerah - LO	12,225,675.00
9110122	Premi Asuransi JKK 1) - LO	500,815,822.00
9110123	Premi Asuransi JKM 1) - LO	1,502,441,741.00
9110124	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi - LO	75,944,440,750.00
9110125	Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah - LO	219,825,000.00
9110126	Tunjangan Reses - LO	1,087,800,000.00
9110127	Tunjangan Transportasi - LO	4,728,000,000.00
91102	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	247,761,043,827.00
9110201	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	246,990,288,827.00
9110202	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO	550,755,000.00
9110205	Beban Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah - LO	220,000,000.00
91103	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	7,423,482,708.00
9110301	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	6,321,000,000.00
9110302	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO	816,042,708.00
9110303	Beban Penunjang Penunjang Pimpinan DPRD - LO	286,440,000.00
91105	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	17,043,410,070.00
9110501	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO	17,043,410,070.00
91106	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	738,428,082.00
9110601	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO	738,428,082.00

Penyesuaian pada Beban Gaji dan Tunjangan-LO sebesar Rp929.156.999,00 adalah kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan PNSD.

Pada Beban Tambahan Penghasilan PNS–LO terdapat penyesuaian sebesar Rp223.073.600,00 yaitu kekurangan pembayaran Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Rp3.073.600,00 dan kekurangan pembayaran Beban Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah Rp220.000.000,00.

Beban
Barang
Jasa

5.3.4.2. BEBAN BARANG JASA

Beban Barang Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai.

Beban barang jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Realisasi Beban Barang Jasa Tahun 2019 senilai Rp669.913.656.342,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Jasa -LO	
(Dalam Rupiah)	
URAIAN	SALDO 2019
912 Beban Barang dan Jasa	669,913,656,342.00
91201 Beban Bahan Pakai Habis	16,416,575,617.00
91202 Beban Persediaan Bahan/ Material	43,093,499,320.00
91203 Beban Jasa Kantor	166,883,759,088.00
91204 Beban Premi Asuransi	13,163,628,220.00
91205 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	22,873,837,395.00
91206 Beban Cetak dan Penggandaan	17,612,902,718.00
91207 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,120,457,893.00
91208 Beban Sewa Sarana Mobilitas	1,320,966,000.00
91210 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,879,210,410.00
91211 Beban Makanan dan Minuman	47,654,256,936.00
91212 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1,086,439,000.00
91213 Beban Pakaian Kerja	3,241,230,150.00
91214 Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4,922,662,150.00
91215 Beban Perjalanan Dinas	47,161,299,684.00
91216 Beban Beasiswa Pendidikan PNS	90,143,400.00
91217 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5,821,763,250.00
91220 Beban Pemeliharaan	6,613,152,340.00
91221 Beban Jasa Konsultasi	13,247,958,109.00
91222 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35,052,591,870.00
91226 Beban Honorarium PNS - LO	14,086,446,500.00
91227 Beban Honorarium Non PNS - LO	87,250,855,914.00
91228 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	805,200,000.00
91229 Beban Pegawai BLUD/BOS	12,438,749,999.00
91230 Beban Barang BLUD/BOS	93,076,070,379.00

Beban
Pakai
Habis

5.3.4.2.1. BEBAN PAKAI HABIS

Realisasi beban bahan pakai habis Tahun 2019 senilai Rp16.416.575.617,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel LO 21.2

Komparasi Beban Bahan Pakai Habis				
dan Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis				
(Dalam Rupiah)				
No.	Uraian	Realisasi Belanja 2019	Penyesuaian Beban 2019	Beban 2019
	Beban Bahan Pakai Habis	17.313.788.072,00	(897.212.455,00)	16.416.575.617,00
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	10.645.740.454,00	(568.078.360,00)	10.077.662.094,00
2	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	2.140.000,00	17.000,00	2.157.000,00
3	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batte	1.929.809.684,00	(282.943.475,00)	1.646.866.209,00
4	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	490.216.000,00	1.045.000,00	491.261.000,00
5	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.846.681.935,00	(87.584.620,00)	1.759.097.315,00
6	Beban Habis Pakai komputer	-	173.549.000,00	173.549.000,00
7	Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	133.490.000,00	20.850.000,00	154.340.000,00
8	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	23.429.999,00	-	23.429.999,00
9	Beban Suku Cadang Peralatan Kantor	530.946.100,00	-	530.946.100,00
10	Beban Suku Cadang Komputer	806.354.300,00	-	806.354.300,00
11	Beban Suku Cadang Alat Studio	40.820.000,00	-	40.820.000,00
12	Beban Suku Cadang Alat Komunikasi	18.450.000,00	-	18.450.000,00
13	Beban Suku Cadang Alat Musik	63.327.000,00	-	63.327.000,00
14	Beban Suku Cadang Alat Bengkel	171.599.000,00	-	171.599.000,00
15	Beban Suku Cadang Perlengkapan Kantor	250.113.000,00	-	250.113.000,00
16	Beban Suku Cadang Alat Kedokteran	37.475.000,00	18.877.000,00	56.352.000,00
17	Beban Suku Cadang Alat Laboratorium	54.175.000,00	-	54.175.000,00
18	Beban Suku Cadang Alat Rumah Tangga	59.120.000,00	-	59.120.000,00
19	Beban Suku Cadang Survey	4.019.300,00	-	4.019.300,00
20	Beban Suku Cadang Lainnya	32.937.300,00	-	32.937.300,00

5.3.4.2.2. Beban Persediaan Bahan/Material

Realisasi Beban Persediaan Bahan/Material Tahun 2019 senilai Rp43.093.499.320,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel LO 22.2

RINCIAN BEBAN PERSEDIAAN BAHAN/MATERIAL		(Dalam Rupiah)
URAIAN		SALDO 2019
91202	Beban Persediaan Bahan/ Material	43,093,499,320.00
9120201	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	8,764,584,118.00
9120202	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	1,895,015,185.00
9120203	Beban Persediaan Obat-obatan	8,250,760,855.00
9120204	Beban Bahan Kesehatan	126,335,050.00
9120205	Beban Bahan Pakaian	190,483,850.00
9120206	Beban Bahan Kimia	28,050,000.00
9120208	Beban bahan percontohan	614,862,000.00
9120209	Beban ternak/bibit ternak	28,715,000.00
9120210	Beban pandel, plakat dan umbul-umbul	562,304,450.00
9120211	Beban bahan laboratorium/reagent	828,661,888.00
9120212	Beban bahan alat habis pakai rumah sakit	1,358,959,296.00
9120213	Beban Bahan Makanan	1,830,628,250.00
9120214	Beban Bahan Alat perlengkapan pendidikan/pelatihan	7,846,598,515.00
9120215	Beban peralatan dapur	272,519,210.00
9120216	Beban Bahan/Barang Hadiah	5,848,195,150.00
9120217	Beban Bahan Alat Bangunan	233,142,040.00
9120218	Beban Bahan Lainnya	4,413,684,463.00

5.3.4.2.3. Beban Jasa Kantor

Beban Jasa Kantor-LO meliputi belanja pemakaian telepon, listrik dan air, kebutuhan kantor lainnya, dan belanja jasa yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan. Realisasi Beban Jasa Kantor-LO Tahun 2019 senilai Rp166.883.759.088,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel LO 23.2

Komparasi Beban Jasa Kantor dan Realisasi Belanja Jasa Kantor				
<i>(Dalam Rupiah)</i>				
No.	Uraian	Realisasi Belanja 2019	Penyesuaian Beban 2019	Realisasi Beban 2019
	Beban Jasa Kantor	167.675.405.902,00	(791.646.814,00)	166.883.759.088,00
1	Beban Jasa telepon	500.376.811,00	6.542.202,00	506.919.013,00
2	Beban Jasa air	661.790.400,00	(10.404.974,00)	651.385.426,00
3	Beban Jasa listrik	21.575.369.132,00	(983.037.816,00)	20.592.331.316,00
4	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	1.615.629.456,00	-	1.615.629.456,00
5	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.367.246.974,00	(26.094.536,00)	2.341.152.438,00
6	Beban Jasa Paket/Pengiriman	0,00	-	-
7	Beban Jasa Sertifikasi	412.613.196,00	-	412.613.196,00
8	Beban Jasa Transaksi Keuangan	3.604.000,00	-	3.604.000,00
9	Beban Jasa / Upah Tenaga Kerja	50.428.334.447,00	-	50.428.334.447,00
10	Beban Jasa Keanggotaan	918.000.000,00	-	918.000.000,00
11	Beban Transportasi dan Akomodasi	28.268.971.750,00	-	28.268.971.750,00
12	Beban Dokumentasi	446.062.720,00	-	446.062.720,00
13	Beban Dekorasi	978.296.849,00	-	978.296.849,00
14	Beban Pemberitaan	4.793.018.200,00	-	4.793.018.200,00
15	Beban Promosi dan Propaganda	2.268.014.982,00	-	2.268.014.982,00
16	Beban Jasa Laboratorium	1.200.970.900,00	-	1.200.970.900,00
17	Beban Jasa Kesehatan	9.889.621.938,00	221.348.310,00	10.110.970.248,00
18	Beban Jasa tenaga ahli/narasumber/pakar/praktisi/pembicara khusus dan pendukungnya	14.504.076.897,00	-	14.504.076.897,00
19	Beban Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor	24.717.373.850,00	-	24.717.373.850,00
20	Beban Jasa Kantor Lainnya	2.126.033.400,00	-	2.126.033.400,00

Penyesuaian Beban Jasa telepon, listrik, air, dan internet adalah hasil perhitungan mutasi tambah/kurang dari kewajiban untuk membayar tagihan pemakaian jasa tersebut yang telah dinikmati manfaatnya namun belum dilakukan pembayaran.

5.3.4.2.4. Beban cetak dan Penggandaan

Realisasi Beban cetak dan Penggandaan-LO Tahun 2019 senilai Rp17.612.902.718,00. Komparasi Realisasi Beban cetak dan Penggandaan-LO dan Belanja cetak dan Penggandaan-LRA dirinci sebagai berikut :

Tabel LO 26.2

Komparasi Beban Cetak dan Penggandaan dan Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan (Dalam Rupiah)				
No.	Uraian	Realisasi Belanja 2019	Penyesuaian Beban 2019	Beban 2019
	Beban Cetak dan Penggandaan	17.717.992.217,00	(105.089.499,00)	17.612.902.718,00
1	Beban Cetak	14.540.859.690,00	(105.089.499,00)	14.435.770.191,00
2	Beban Penggandaan	1.600.492.677,00	-	1.600.492.677,00
3	Belanja Cetak Spanduk	1.576.639.850,00	-	1.576.639.850,00

5.3.4.2.5 Beban Sewa Rumah/Gedung/Parkir

Realisasi Beban Sewa Rumah/Gedung/Parkir-LO Tahun 2019 senilai Rp9.120.457.893,00. Komparasi Realisasi Beban cetak dan Penggandaan-LO dan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Parkir-LRA dirinci sebagai berikut :

Tabel LO 27.2

Komparasi Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir dan Realisasi Belanja Rumah/Gedung/Gudang/Parkir (Dalam Rupiah)				
No.	Uraian	Realisasi Belanja 2019	Penyesuaian Beban 2019	Beban 2019
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.303.550.601,00	(183.092.708,00)	9.120.457.893,00
1	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	4.343.447.500,00	(183.092.708,00)	4.160.354.792,00
2	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.156.965.625,00	0	1.156.965.625,00
3	Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	9.000.000,00	0	9.000.000,00
4	Belanja Sewa lainnya	3.794.137.476,00	0	3.794.137.476,00

Penyesuaian Beban Sewa Rumah/Gedung/Rumah Sakit/Gudang/Parkir adalah hasil perhitungan mutasi tambah/kurang dari biaya sewa yang sudah dibayarkan tetapi belum dibebankan sebagai biaya pada tahun 2019 karena belum dinikmati manfaatnya (belanja sewa dibayar dimuka).

5.3.4.2.6 Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2019 senilai Rp6.613.152.340,00. Komparasi Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA adalah sebagai berikut:

Tabel LO 38.2

Komparasi Beban Pemeliharaan-LO dan Realisasi Belanja Pemeliharaan-LRA (Dalam Rupiah)				
No.	Uraian	Realisasi Belanja 2019	Penyesuaian Beban 2019	Beban 2019
	Beban Pemeliharaan	6.391.991.662,00	221.160.678,00	6.613.152.340,00
1	Beban Pemeliharaan Tanah	14.910.000,00	-	14.910.000,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.480.961.358,00	63.799.000,00	1.544.760.358,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.741.860.020,00	57.007.827,00	3.798.867.847,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	185.679.684,00	(36.497.649,00)	149.182.035,00
5	Beban Pemeliharaan Lainnya	968.580.600,00	136.851.500,00	1.105.432.100,00

5.3.4.2.7 Beban Jasa Konsultasi

Realisasi Beban Jasa Konsultasi-LO Tahun 2019 senilai Rp13.247.958.109,00. Komparasi Beban Jasa Konsultasi dan Realisasi Belanja Konsultasi dirinci sebagai berikut:

Tabel LO 39.2

Komparasi Beban Jasa Konsultasi-LO dan Realisasi Belanja Konsultasi-LRA (Dalam Rupiah)				
No.	Uraian	Realisasi Belanja 2019	Penyesuaian Beban 2019	Beban 2019
	Beban Jasa Konsultasi	15.356.735.070,00	(2.108.776.961,00)	13.247.958.109,00
1	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	6.492.142.620,00	-	6.492.142.620,00
2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	8.224.779.700,00	(2.173.203.461,00)	6.051.576.239,00
3	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	243.101.500,00	-	243.101.500,00
4	Beban Jasa Konsultansi Lainnya	396.711.250,00	64.426.500,00	461.137.750,00

5.3.4.2.8 Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Realisasi Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LO Tahun 2019 senilai Rp35.052.591.870,00. Komparasi Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LO dan Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LRA dirinci sebagai berikut:

Tabel LO 40

Komparasi Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LO dan Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LRA (Dalam Rupiah)				
No.	Uraian	Realisasi Belanja 2019	Penyesuaian Beban 2019	Beban 2019
	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.993.274.370,00	59.317.500,00	35.052.591.870,00
1	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	34.783.062.170,00	23.017.500,00	34.806.079.670,00
2	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	210.212.200,00	36.300.000,00	246.512.200,00

5.3.4.2.9 Beban Honorarium PNS

Realisasi Beban Honorarium PNS-LO Tahun 2019 senilai Rp14.086.446.500,00. Komparasi Beban Honorarium PNS-LO dan Belanja Honorarium PNS-LRA dirinci sebagai berikut:

Tabel LO 41.2

Komparasi Beban Honorarium PNS-LO dan Realisasi Belanja Honorarium PNS-LRA (Dalam Rupiah)				
No.	Uraian	Realisasi Belanja 2019	Penyesuaian Beban 2019	Beban 2019
	Beban Honorarium PNS - LO	14.093.846.500,00	(7.400.000,00)	14.086.446.500,00
1	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	5.813.020.000,00	-	5.813.020.000,00
2	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	398.825.000,00	(7.400.000,00)	391.425.000,00
4	Beban Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan - LO	557.406.500,00	-	557.406.500,00
5	Beban Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen - LO	638.105.000,00	-	638.105.000,00
6	Beban Honorarium/Upah Bulanan - LO	3.366.740.000,00	-	3.366.740.000,00
7	Beban Honorarium/Upah Harian - LO	1.235.550.000,00	-	1.235.550.000,00
8	Beban Honorarium PNS Lainnya - LO	2.084.200.000,00	-	2.084.200.000,00

5.3.4.2.10 Beban Barang BLUD/BOS

Realisasi Beban Barang BLUD/BOS-LO Tahun 2019 senilai Rp93.076.070.379,00. dirinci sebagai berikut:

Tabel LO 45.2

RINCIAN BEBAN BARANG (Dalam Rupiah)		
URAIAN		SALDO 2019
91230	Beban Barang BLUD/BOS	93,076,070,379.00
9123001	Beban Barang BLUD	93,076,070,379.00

Beban Hibah

5.3.4.3. BEBAN HIBAH

Realisasi Beban Hibah Tahun 2019 senilai Rp52.699.361.490,00. Komparasi Beban Hibah dan Belanja Hibah dirinci sebagai berikut:

Tabel 46.2

Komparasi Beban Hibah-LO dan Realisasi Belanja Hibah-LRA			
(Dalam Rupiah)			
Uraian	Realisasi Belanja 2019	Penyesuaian Beban 2019	Beban 2019
Beban Hibah	52.488.994.040,00	210.367.450,00	52.699.361.490,00
Beban Hibah kepada Pemerintah	22.290.889.000,00	210.367.450,00	22.501.256.450,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	22.290.889.000,00	210.367.450,00	22.501.256.450,00
Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	27.046.725.000,00	0,00	27.046.725.000,00
Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	81.525.000,00	0,00	81.525.000,00
Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pendidikan	6.955.200.000,00	0,00	6.955.200.000,00
Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemuda dan	18.680.000.000,00	0,00	18.680.000.000,00
Beban Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan	1.330.000.000,00	0,00	1.330.000.000,00
Beban Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	3.151.380.040,00	0,00	3.151.380.040,00
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	935.656.950,00	0,00	935.656.950,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	2.215.723.090,00	0,00	2.215.723.090,00

Beban Penyusutan dan amortisasi

5.3.4.4. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi Kota Cilegon Tahun 2019 dirinci dalam Tabel LO 48 berikut:

RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
(Dalam Rupiah)				
URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK (TURUN)	%
917 Beban Penyusutan dan Amortisasi	223,413,466,810.00	172,960,717,694.00	(50,452,749,116.00)	-29.17%
91701 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	96,046,345,849.00	17,902,744,828.00	(78,143,601,021.00)	-436.49%
9170104 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	95,962,007,849.00	17,902,744,828.00	(78,059,263,021.00)	-436.02%
9170124 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	84,338,000.00	-	(84,338,000.00)	#DIV/0!
91702 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17,280,040,370.00	41,693,744,428.00	24,413,704,058.00	58.55%
9170201 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	17,280,040,370.00	41,693,744,428.00	24,413,704,058.00	58.55%
91703 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	100,558,760,713.00	105,920,683,914.00	5,361,923,201.00	5.06%
9170301 Beban Penyusutan Jalan	100,558,760,713.00	105,920,683,914.00	5,361,923,201.00	5.06%
91704 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7,093,422,498.00	6,204,743,767.00	(888,678,731.00)	-14.32%
9170401 Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi	7,093,422,498.00	6,204,743,767.00	(888,678,731.00)	-14.32%
91705 Beban Penyusutan Aset Lainnya	172,600,000.00	0.00	(172,600,000.00)	#DIV/0!
9170501 Beban Penyusutan Barang Rusak Berat	172,600,000.00	0.00	(172,600,000.00)	#DIV/0!
91706 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2,262,297,380.00	1,238,800,757.00	(1,023,496,623.00)	-82.62%
9170605 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	2,262,297,380.00	1,238,800,757.00	(1,023,496,623.00)	-82.62%

Beban Penyisihan Piutang

5.3.4.5. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban Penyisihan Piutang Kota Cilegon Tahun 2019 dirinci dalam Tabel Lo 49 berikut:

RINCIAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG					
(Dalam Rupiah)					
URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK (TURUN)	%	
918 Beban Penyisihan Piutang	203,837,137.05	8,688,309,438.00	(8,484,472,300.95)	-97.65%	
91801 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	10,251,821.75	8,412,010,247.00	8,401,758,425.25	-99.88%	
918010 Beban Penyisihan Piutang Pajak	68,205,495.75	7,086,557,816.00	7,018,352,320.25	-99.04%	
918010 Beban Penyisihan Piutang Retribusi	438,757,203.00	304,120,064.00	134,637,139.00	44.27%	
9E+06 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya	0.00	(51,839,073.00)	51,839,073.00	-100.00%	
918011 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(496,710,877.00)	1,073,171,440.00	(1,569,882,317.00)	-146.28%	
91802 Beban Penyisihan Piutang Lainnya	193,585,315.30	276,299,191.00	(82,713,875.70)	-29.94%	
918020 Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	184,933,158.00	276,299,191.00	(91,366,033.00)	-33.07%	
918020i Dst.....	8,652,157.30	0.00	8,652,157.30		

5.3.4.6. BEBAN LAIN-LAIN

Beban
Lain-Lain

Beban lain-lain Kota Cilegon Tahun 2019 sebesar Rp1.236.986.009,88 dapat dilihat dalam Tabel 50 berikut:

RINCIAN BEBAN LAIN - LAIN					
(Dalam Rupiah)					
URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK (TURUN)	%	
919 Beban Lain-lain	1,236,986,009.88	636,336,762.00	600,649,247.88	94.39%	
91901 Beban Penurunan Nilai Investasi	1,234,088,139.88	636,336,762.00	597,751,377.88	93.94%	
9190101 Beban Penurunan Nilai Investasi	1,234,088,139.88	636,336,762.00	597,751,377.88	93.94%	
91902 Beban Penyisihan Dana Bergulir	2,897,870.00	-	2,897,870.00	#DIV/0!	
9190201 Beban Penyisihan Dana Bergulir	2,897,870.00	0	2,897,870.00	#DIV/0!	

Informasi:

- Beban Penurunan nilai investasi jangka panjang permanen pada BPRS dari nilai investasi di tahun 2019 sebesar Rp1.234.088.139,88
- Nilai beban penyisihan investasi jangka panjang non permanen pada BLUD PDB dari nilai investasi sebesar Rp2.897.870,00

5.3.5 BEBAN TRANSFER

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban
Transfer

Beban transfer Pemerintah Kota Cilegon tahun 2019 seluruhnya merupakan beban transfer bantuan partai politik sebesar Rp976.730.599,00 sedangkan tahun 2018 sebesar Rp913.397.208,00.

Beban Transfer Kota Cilegon Tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel 51 berikut:

RINCIAN BEBAN TRANSFER					
(Dalam Rupiah)					
	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	NAIK (TURUN)	%
92	BEBAN TRANSFER	976.730.599,00	913.397.208,00	63.333.391,00	6,93%
925	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	976.730.599,00	913.397.208,00	63.333.391,00	6,93%
92501	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	976.730.599,00	913.397.208,00	63.333.391,00	6,93%
9250101	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik GOLKAR	292.586.683,00	302.978.352,00	(10.391.669,00)	-3,43%
9250102	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik PDIP	88.472.533,00	95.832.400,00	(7.359.867,00)	-7,68%
9250103	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik DEMOKRAT	41.853.365,00	35.313.488,00	6.539.877,00	18,52%
9250104	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik PAN	84.925.924,00	68.823.616,00	16.102.308,00	23,40%
9250105	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik PKB	53.550.543,00	52.320.560,00	1.229.983,00	2,35%
9250106	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik PPP	93.905.733,00	114.175.800,00	(20.270.067,00)	-17,75%
9250107	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik GERINDRA	118.916.949,00	98.611.424,00	20.305.525,00	20,59%
9250108	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik NASDEM	82.407.386,00	83.190.384,00	(782.998,00)	-0,94%
9250109	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik PKS	81.713.787,00	62.151.184,00	19.562.603,00	31,48%
9250110	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik Berkarya	38.397.696,00	0,00	38.397.696,00	

5.3.6. SURPLUS NON OPERASIONAL

Pendapatan yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam pendapatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Surplus Non Operasional Pemerintah Kota Cilegon pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00.

Surplus
Non
Operasional

5.3.7 DEFISIT NON OPERASIONAL

Beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Defisit Non Operasional Pemerintah Kota Cilegon pada periode Tahun Anggaran 2019 seluruhnya berasal dari Defisit Non Operasional Lainnya sebesar Rp165.144.916,00 merupakan kerugian selisih kurs piutang pendapatan Kepelabuhanan di dinas perhubungan sebesar Rp160.272.916,00 dan selisih kurs retribusi IMTA sebesar Rp4.872.000,00.

Defisit Non
Operasional

Beban Luar
Biasa

5.3.8 BEBAN LUAR BIASA

Pendapatan/Beban Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali.

Beban Luar Biasa Pemerintah Kota Cilegon pada periode Tahun Anggaran 2019 berasal dari belanja tidak terduga sebesar Rp0,00.

Surplus
/Defisit-LO

5.3.9 SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Surplus LO Pemerintah Kota Cilegon pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp195.438.913.908,07 sedangkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.064.691.086.254,00

Laporan
Perubahan
Ekuitas

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Ekuitas Awal Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019 adalah sebesar Rp4.499.088.372.886,00. Ekuitas tersebut merupakan ekuitas akhir neraca tahun 2018.

Surplus/(Defisit) LO pada periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp195.438.913.908,88 yang dihasilkan dari Laporan Operasional 2019.

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung merubah ekuitas pada tahun 2019 sebesar Rp11.321.684.484,24

Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2018 adalah sebesar Rp4.683.205.602.309,83

5.5. NERACA

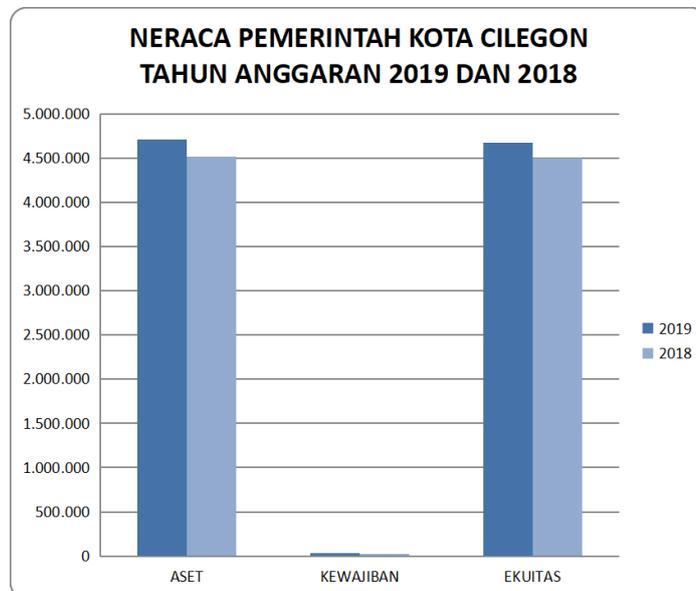
Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2019 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan.

Komponen
Neraca

Komponen Neraca Tahun Anggaran 2019 dan komparasinya dengan Neraca Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut:

NERACA	2019	2018
ASET	4.715.039.121.989,83	4.520.506.103.109,00
KEWAJIBAN	31.833.519.680,00	21.417.730.223,00
EKUITAS	4.683.205.602.309,83	4.499.088.372.886,00

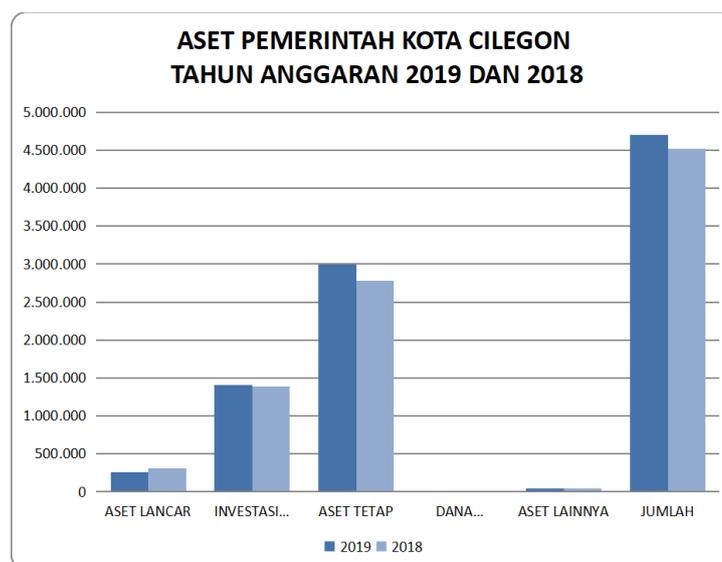


5.5.1. Aset

Komponen
Aset

Aset Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2019 dapat dilihat dalam Tabel berikut :

ASET	2019	2018
ASET LANCAR	262.455.093.613,71	310.146.805.583,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	1.417.693.962.439,12	1.390.816.166.246,00
ASET TETAP	2.992.502.932.939,00	2.779.496.804.419,00
DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA	42.387.132.998,00	40.046.326.861,00
JUMLAH	4.715.039.121.989,83	4.520.506.103.109,00



5.5.1.1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya kurang dari satu tahun. Aset Lancar dapat berupa Kas dan Setara Kas, Piutang, Persediaan, dan Belanja Dibayar Dimuka. Aset lancar Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp262.567.074.538,00, dengan uraian sebagai berikut :

ASET	2019	2018
Kas dan Setara Kas	136.574.564.175,00	192.902.114.842,00
Piutang	217.386.601.228,00	199.402.255.028,00
Penyisihan Piutang	(111.378.690.356,29)	(102.612.076.080,00)
Belanja Dibayar Dimuka	2.466.447.868,00	2.639.536.814,00
Persediaan	17.406.170.699,00	17.814.974.979,00
JUMLAH	262.455.093.613,71	310.146.805.583,00

5.5.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas

Nilai saldo Kas dan Bank Per 31 Desember 2019 sebesar Rp136.574.564.175,00 merupakan saldo buku kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di BLUD dan Kas Lainnya. Kas telah disajikan berdasarkan rekonsiliasi bank dan Kas Opname Inspektorat.

Kas Pemerintah Kota Cilegon Per 31 Desember 2019 dan komparasinya dengan tahun 2018 dirinci pada tabel berikut:

URAIAN		31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
11101	Kas di Kas Daerah	131.065.822.742,00	188.396.494.503,00
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.000,00	10.000,00
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	16.059.430,00	0,00
11104	Kas di BLUD	2.337.760.775,00	2.745.750.554,00
	Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD	863.040.650,00	1.122.110.307,00
	Kas di Badan Layanan Umum Daerah PDB	1.474.720.125,00	1.623.640.247,00
11105	Kas Lainnya	3.154.920.228,00	1.759.859.785,00
	Kas Lainnya- FKTP JKN	1.416.230.346,00	855.801.918,00
	Kas Lainnya-Dana BOS	1.738.689.882,00	904.057.867,00
	JUMLAH	136.574.564.175,00	192.902.114.842,00

Adapun penjelasan masing-masing rincian sebagai berikut:

- a. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp131.065.822.742,00 terdapat pada Rekening Giro Kas Umum Daerah di Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening 0000630748001, Didalam Kas di Kas Daerah terdapat Dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru yang belum dibayarkan di rinci sebagai berikut:

No	URAIAN	Nilai
1	Saldo TA 2018	4.492.084.480,00
2	Transfer TA 2019	72.513.531.920,00
3	Belanja TA 2019	75.944.440.760,00
	Saldo TA 2019 (1+2-3)	1.061.175.640,00

Dana tersebut akan digunakan untuk membayar kekurangan pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2020;

- b. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran ;
- Kas di bendahara pengeluaran Pembantu SMPN 1 per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.000,00 merupakan pajak PFK Kurang Bayar PPh 23 yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran, kurang bayar PFK tersebut sudah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 9 Januari 2020 dengan Nomor NTPN B188867JU2Q9R3T5;
 - Informasi pengungkapan : pada rekening koran bendahara SMPN 8 per 31 Desember 2019 terdapat sisa kas bank sebesar Rp113.250,00 sisa uang persediaan SMPN 8 yang tersetor 2 kali, ke rekening kas umum daerah dan di rekening bendahara.
- c. Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.16.059.430,00 merupakan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) pada OPD BPKAD yang pelimpahan ke Kas Umum Daerah melebihi tahun 2019, atas penerimaan pajak tersebut sudah dilimpahkan ke Kas Umum Daerah pada tanggal 2 januari 2020 sebesar Rp1.856.998,00 dan tanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp14.202.432,00;
- d. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.337.760.775,00 yang terdiri dari saldo kas di BLUD RSUD Cilegon sebesar

Rp863.040.650,00 dan saldo kas di BLUD Pengelola Dana Bergulir (PDB) sebesar Rp1.474.720.125,00 dapat dilihat pada tabel berikut;

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	NO REKENING
I	BLUD RSUD			
1	Kas Bank	849.103.910,00	1.110.765.379,00	0280030064153 (BJB)
2	Kas Tunai	13.936.740,00	11.344.900,00	-
	Jumlah I	863.040.650,00	1.122.110.279,00	
II	BLUD PDB			
1	BPRS PERDAGANGAN	507.990.156,00	559.991.797,00	1100101498 (BPRS CM)
2	BPRS JASA KOTA	695.781.555,00	809.941.497,00	1100101455 (BPRS CM)
3	BPRS PASAR MERAK	269.079.730,00	253.706.953,00	1100100249 (BPRS CM)
4	Pendapatan Jasa Bunga Bank dari Rekening Pokok Dana Bergulir yang belum dioverbooking ke rekening Jasa	1.868.684,00	0,00	
	JUMLAH II	1.474.720.125,00	1.623.640.247,00	
	JUMLAH I + II	2.337.760.775,00	2.745.750.526,00	

- e. Saldo Kas di Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.154.920.228,00 yang terdiri dari saldo kas Lainnya - FKTP JKN sebesar Rp1.416.230.346,00 dan saldo kas Lainnya – Dana BOS sebesar Rp1.738.689.882,00;
- Saldo Kas Lainnya – FKTP JKN per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.416.230.346,00 dapat dirinci pada masing-masing puskesmas sebagai berikut:

NAMA FKTP	NOMOR REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2019 (Rp)	SALDO PER 31 DESEMBER 2018 (Rp)
PKM CILEGON	0075630557002	170.530.961,00	68.137.844,00
PKM CIWANDAN	0075554893002	241.169.484,00	217.002.481,00
PKM CIBEKER	0075572735002	190.370.579,00	175.436.457,00
PKM GROGOL	0075551584002	54.013.564,00	40.068.337,00
PKM PULOMERAK	0075554575002	292.364.892,00	170.801.754,00
PKM PURWAKARTA	0075565739002	56.675.150,00	55.664.421,00
PKM JOMBANG	0075553536002	238.811.032,00	124.110.253,00
PKM CITANGKIL	0075572931002	172.294.684,00	4.580.371,00
	JUMLAH	1.416.230.346,00	855.801.918,00

- Saldo Kas Lainnya – Dana BOS per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.738.689.882,00 terdiri dari kas di bank sebesar Rp1.680.707.616,00 dan kas Tunai sebesar Rp57.982.266,00, dapat dirinci pada masing-masing sekolah sebagai berikut:

**REKAPITULASI SALDO DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2019
PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON**

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2019 (Rp)	SALDO PER 31 DESEMBER 2019			SALDO TUNAI (Rp.-)
			SALDO BANK (Rp.-)			
			NO. REK	NAMA BANK	NILAI (Rp)	
A	SD NEGERI	435.464.421,00			397.401.471,00	38.062.950,00
1	SDN BULAKAN I	267.178,00	0012813147001	BJB	617,00	266.561,00
2	SDN BULAKAN II	122.795,00	0012817703001	BJB	122.795,00	0,00
3	SDN BULAKAN III	103.098,00	0012821328001	BJB	38,00	103.060,00
4	SDN CIBEBER I	359.402,00	0012813554001	BJB	1.011,00	358.391,00
5	SDN CIBEBER II	168.377,00	0012812981001	BJB	27.498,00	140.879,00
6	SDN CIBEBER III	171.858,00	0012819064001	BJB	106.577,00	65.281,00
7	SDN CIKERAI I	1.689.702,00	0012828241001	BJB	42.802,00	1.646.900,00
8	SDN CIKERAI II	12.486,00	0012818009001	BJB	11.852,00	634,00
9	SDN CIKERUT	20.262,00	0012825374001	BJB	4.754,00	15.508,00
10	SDN JERANG BARAT	447.026,00	0012818440001	BJB	74.965,00	372.061,00
11	SDN JERANG ILIR	1.013.655,00	0012809557001	BJB	700.000,00	313.655,00
12	SDN KALITIMBANG I	303,00	0012817193001	BJB	303,00	0,00
13	SDN KALITIMBANG II	1.737,00	0012809972001	BJB	0,00	1.737,00
14	SDN KEDALEMAN I	2.445.647,00	0012813201001	BJB	788.527,00	1.657.120,00
15	SDN KEDALEMAN II	1.322.312,00	0012814801001	BJB	1.273.548,00	48.764,00
16	SDN KEDALEMAN III	323.287,00	0012814542001	BJB	0,00	323.287,00
17	SDN KEDALEMAN IV	685.958,00	0012812841001	BJB	340.545,00	345.413,00
18	SDN KROTEK	4.474.369,00	0012814887001	BJB	0,00	4.474.369,00
UPTD	CIBEBER	13.629.452,00			3.495.832,00	10.133.620,00
19	SDN BENDUNGAN I	0,00	0012824556001	BJB	0,00	0,00
20	SDN BENDUNGAN II	0,00	0012824769001	BJB	0,00	0,00
21	SDN BLOK I	340,00	0012817282001	BJB	340,00	0,00
22	SDN CILEGON VI	0,00	0012848171001	BJB	0,00	0,00
23	SDN CIPAOT CILEGON	127.000.000,00	0012812531001	BJB	127.000.000,00	0,00
24	SDN CIWADUK	534,00	0012818157001	BJB	534,00	0,00
25	SDN CIWEDUS I	0,00	0012810385001	BJB	0,00	0,00
26	SDN CIWEDUS II	0,00	0012817411001	BJB	0,00	0,00
27	SDN KETILENG I	499,00	0012813759001	BJB	0,00	499,00
28	SDN KETILENG II	0,00	0012810202001	BJB	0,00	0,00
29	SDN KETILENG III	280.025,00	0012822731001	BJB	0,00	280.025,00
30	SDN LEBAK GEBANG	227,00	0012810261001	BJB	227,00	0,00
UPTD	CILEGON	127.281.625,00			127.001.101,00	280.524,00
31	SDN CIRIU CITANGKIL	620.000,00	0012819366001	BJB	620.000,00	0,00
32	SDN CITANGKIL BARU	250.000,00	0012812191001	BJB	250.000,00	0,00
33	SDN DELINGSENG	471.416,00	0012812167001	BJB	200.000,00	271.416,00
34	SDN DERINGO	250.000,00	0012819196001	BJB	250.000,00	0,00
35	SDN KEBONSARI I	0,00	0012807295001	BJB	0,00	0,00
36	SDN KEBONSARI II	250.000,00	0012814348001	BJB	250.000,00	0,00
37	SDN KELELET	0,00	0012818084001	BJB	0,00	0,00
38	SDN KEPUH DENOK	450.038,00	0012820518001	BJB	450.000,00	38,00
39	SDN KRENCENG I	12,00	0012809281001	BJB	0,00	12,00
40	SDN KRENCENG II	250.042,00	0012815123001	BJB	250.042,00	0,00
41	SDN KUBANG LESUNG	265.000,00	0012820682001	BJB	265.000,00	0,00
42	SDN KUBANG LESUNG KULON	250.000,00	0012819870001	BJB	250.000,00	0,00
43	SDN KUBANG SEPAT I	792.269,00	0012810733001	BJB	492.782,00	299.487,00
44	SDN KUBANG SEPAT II	478,00	0012817789001	BJB	0,00	478,00
45	SDN PEKALONGAN I	76,00	0012808240001	BJB	0,00	76,00
46	SDN PEKALONGAN II	0,00	0012816693001	BJB	0,00	0,00
47	SDN SAMANGRAYA I	0,00	0012806531001	BJB	0,00	0,00
48	SDN SAMANGRAYA II	97,00	0012817959001	BJB	0,00	97,00
49	SDN TAMAN BARU I	0,00	0012817835001	BJB	0,00	0,00
50	SDN TAMAN BARU II	0,00	0012816790001	BJB	0,00	0,00
51	SDN TEGAL CABE	8.327,00	0012807392001	BJB	206,00	8.121,00
52	SDN TEMIANG	330.000,00	0012813368001	BJB	330.000,00	0,00
53	SDN WALIKUKUN	0,00	0012816626001	BJB	0,00	0,00
54	SDN WARNASARI	0,00	0012811845001	BJB	0,00	0,00
UPTD	CITANGKIL	4.187.755,00			3.608.030,00	579.725,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2019 (Rp)	SALDO PER 31 DESEMBER 2019			SALDO TUNAI (Rp,-)
			SALDO BANK (Rp,-)			
			NO. REK	NAMA BANK	NILAI (Rp)	
55	SDN BANJAR NEGARA	119.276,00	0012806698001	BJB	119.276,00	0,00
56	SDN BELUNGBANG	199.121,00	0012825838001	BJB	199.121,00	0,00
57	SDN BOJONG BARU	16.359,00	0012840225001	BJB	16.359,00	0,00
58	SDN CIGEBLAG	120.119,00	0012813449001	BJB	120.119,00	0,00
59	SDN CILODAN	0,00	0012827547001	BJB	0,00	0,00
60	SDN CIPAOT CIWANDAN	0,00	0012843615001	BJB	0,00	0,00
61	SDN CIWANDAN	200.000,00	0012835231001	BJB	200.000,00	0,00
62	SDN GUNUNG SUGIH	41.294,00	0012822383001	BJB	0,00	41.294,00
63	SDN JANGKAR	793,00	0012827792001	BJB	0,00	793,00
64	SDN KARANGSETRA	79.080.711,00	0012818394001	BJB	79.080.711,00	0,00
65	SDN KEPUH	898,00	0012817908001	BJB	898,00	0,00
66	SDN KUBANGSARI I	120.000,00	0012815832001	BJB	120.000,00	0,00
67	SDN KUBANG SARI II	280.587,00	0012832311001	BJB	280.587,00	0,00
68	SDN PANGABUAN	532.600,00	0012832559001	BJB	532.600,00	0,00
69	SDN PEMATANG KEPUH	250.340,00	0012823282001	BJB	250.340,00	0,00
70	SDN SERANG ILIR	160.479,00	0012838638001	BJB	160.479,00	0,00
71	SDN TEGAL KIDONGDONG	171.941,00	0012827156001	BJB	171.941,00	0,00
72	SDN TEGAL RATU	1.504,00	0012816138001	BJB	1.504,00	0,00
73	SDN TEMUGIRING	0,00	0012839065001	BJB	0,00	0,00
UPTD	CIWANDAN	81.296.022,00			81.253.935,00	42.087,00
74	SDN BUJANG GADUNG	37.421,00	0084113557002	BJB	0,00	37.421,00
75	SDN CIKUASA I	1.992,00	0084113689002	BJB	0,00	1.992,00
76	SDN CIKUASA II	753,00	0012861605001	BJB	0,00	753,00
77	SDN CIORA	0,00	0084113964001	BJB	0,00	0,00
78	SDN GEREM I	1.978,00	0012861184001	BJB	0,00	1.978,00
79	SDN GEREM II	157,00	0084114048002	BJB	0,00	157,00
80	SDN GEREM III	40.940,00	0012862148001	BJB	40.000,00	940,00
81	SDN GROGOL I	5.029.334,00	0012819919001	BJB	0,00	5.029.334,00
82	SDN GROGOL II	307,00	0084114170002	BJB	0,00	307,00
83	SDN KAMPUNG BARU	533,00	0084114261002	BJB	0,00	533,00
84	SDN KOTASARI	113.002.020,00	0084114332002	BJB	113.000.000,00	2.020,00
85	SDN PABUARAN	4.197,00	0084114448002	BJB	0,00	4.197,00
86	SDN SUMUR WULUH	145,00	0084114502001	BJB	0,00	145,00
87	SDN TEGAL WANGI	102,00	0084114571002	BJB	0,00	102,00
UPTD	GROGOL	118.119.879,00			113.040.000,00	5.079.879,00
88	SDN BLOK C	662.379,00	0012808089001	BJB	0,00	662.379,00
89	SDN CILEGON I	1.680.503,00	0012817800001	BJB	1.677.343,00	3.160,00
90	SDN CILEGON II	2.442.860,00	0012807058001	BJB	1.196.978,00	1.245.882,00
91	SDN CILEGON III	294.541,00	0012809700001	BJB	294.506,00	35,00
92	SDN CILEGON IV	522.954,00	0012808471001	BJB	458.017,00	64.937,00
93	SDN CILEGON IX	320.070,00	0012809484001	BJB	320.000,00	70,00
94	SDN CILEGON V	299.099,00	0012807783001	BJB	250.391,00	48.708,00
95	SDN CILEGON VII	430.122,00	0012845995001	BJB	430.000,00	122,00
96	SDN CILEGON VIII	35.108,00	0012819013001	BJB	35.108,00	0,00
97	SDN CILEGON X	2.036,00	0012821603001	BJB	826,00	1.210,00
98	SDN CILEGON XI	280.366,00	0012848501001	BJB	280.366,00	0,00
99	SDN CILEGON XII	250.000,00	0012809085001	BJB	250.000,00	0,00
100	SDN GEDONG DALEM I	0,00	0012808755001	BJB	0,00	0,00
101	SDN GEDONG DALEM II	250.024,00	0012812701001	BJB	250.024,00	0,00
102	SDN GEDONG DALEM III	250.572,00	0012816881001	BJB	250.500,00	72,00
103	SDN KEPENDILAN	187.943,00	0012818841001	BJB	151.923,00	36.020,00
104	SDN KERANGGOT	251.001,00	0012818076001	BJB	251.001,00	0,00
105	SDN KUBANG LABAN	20.000,00	0012807619001	BJB	20.000,00	0,00
106	SDN MASIGIT I	1.917,00	0012807740001	BJB	575,00	1.342,00
107	SDN MASIGIT II	260.912,00	0012808488001	BJB	259.800,00	1.112,00
108	SDN MASIGIT III	250.000,00	0012811357001	BJB	250.000,00	0,00
109	SDN PANGGUNG RAWI	0,00	0012811799001	BJB	0,00	0,00
110	SDN SUKMAJAYA I	206.601,00	0012821247001	BJB	3.581,00	203.020,00
111	SDN SUKMAJAYA II	4.134.235,00	0012818130001	BJB	134.235,00	4.000.000,00
UPTD	JOMBANG	13.033.243,00			6.765.174,00	6.268.069,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2019 (Rp)	SALDO PER 31 DESEMBER 2019			SALDO TUNAI (Rp,-)
			SALDO BANK (Rp,-)			
			NO. REK	NAMA BANK	NILAI (Rp)	
112	SDN BABAKAN TURI	91,00	0084114723001	BJB	0,00	91,00
113	SDN BUMI WARAS	0,00	0084114790001	BJB	0,00	0,00
114	SDN CIPALA	0,00	0084114855001	BJB	0,00	0,00
115	SDN FLORIDA	357,00	0084115142001	BJB	0,00	357,00
116	SDN GUNUNG BATUR	0,00	0084115177001	BJB	0,00	0,00
117	SDN KAHAL	0,00	0084115355001	BJB	0,00	0,00
118	SDN LANGON	85,00	0084115495001	BJB	0,00	85,00
119	SDN LEBAK GEDE	155,00	0084115576001	BJB	0,00	155,00
120	SDN MEKARSARI	192,00	0084115691001	BJB	0,00	192,00
121	SDN MERAH	960.000,00	0084115746001	BJB	0,00	960.000,00
122	SDN PRINGORI	0,00	0084115762001	BJB	0,00	0,00
123	SDN SUKAJADI	3.104,00	0084115851001	BJB	0,00	3.104,00
124	SDN SURALAYA	0,00	0084116033001	BJB	0,00	0,00
125	SDN TAMANSARI I	9.169.984,00	0084116122001	BJB	0,00	9.169.984,00
126	SDN TAMANSARI II	516.614,00	0007869101001	BJB	515.729,00	885,00
127	SDN TAMANSARI III	0,00	0084116191001	BJB	0,00	0,00
128	SDN TAMANSARI IV	720,00	0084116246001	BJB	0,00	720,00
129	SDN TAMANSARI V	0,00	0084116262001	BJB	0,00	0,00
130	SDN TANJUNG SEKONG	0,00	0084116300001	BJB	0,00	0,00
131	SDN TEMBULUN	80.520,00	0084116424001	BJB	0,00	80.520,00
132	SDN WIDIYATAMA	0,00	0084116440001	BJB	0,00	0,00
133	SDN WILULANG	386.073,00	0084116491001	BJB	0,00	386.073,00
134	SDN TEMBULUN II	61000000,00	0084118540001	BJB	61.000.000,00	0,00
UPTD	PULOMERAK	72.117.895,00			61.515.729,00	10.602.166,00
135	SDN PABEAN	2.177,00	0012819684001	BJB	0,00	2.177,00
136	SDN BLACU	20.000,00	0012806701001	BJB	20.000,00	0,00
137	SDN KEBON DALEM	0,00	0012818335001	BJB	0,00	0,00
138	SDN KENANGA	452.334,00	0012821816001	BJB	180.000,00	272.334,00
139	SDN KOTA BUMI	4.793.633,00	0012847084001	BJB	0,00	4.793.633,00
140	SDN KUBANG KALAK	0,00	0012814038001	BJB	0,00	0,00
141	SDN KUBANG KUTU I	0,00	0012841736001	BJB	0,00	0,00
142	SDN KUBANG KUTU II	0,00	0012824416001	BJB	0,00	0,00
143	SDN PASAR BUNDER	50.939,00	0012808951001	BJB	50.939,00	0,00
144	SDN PECINAN	0,00	0012820240001	BJB	0,00	0,00
145	SDN PURWAKARTA	0,00	0012815336001	BJB	0,00	0,00
146	SDN PURWAKARTA I	8.062,00	0012845103001	BJB	0,00	8.062,00
147	SDN PURWAKARTA II	0,00	0007934939001	BJB	0,00	0,00
148	SDN RAMANUJU	0,00	0012817592001	BJB	0,00	0,00
149	SDN SIMPANG TIGA	470.541,00	0012813244001	BJB	470.541,00	0,00
150	SDN SUMAMPIR	864,00	0012806620001	BJB	190,00	674,00
UPTD	PURWAKARTA	5.798.550,00			721.670,00	5.076.880,00
SD	JUMLAH A	435.464.421,00			397.401.471,00	38.062.950,00
B	SMP NEGERI	1.303.225.461,00			1.283.306.145,00	19.919.316,00
1	SMPN 1 CILEGON	193.618.079,00	0012825927001	BJB	193.386.434,00	231.645,00
2	SMPN 2 CILEGON	741.185.820,00	0012841078001	BJB	738.149.575,00	3.036.245,00
3	SMPN 3 CILEGON	226.155.519,00	0012834314001	BJB	226.155.404,00	115,00
4	SMPN 4 CILEGON	43.365.342,00	0012878613001	BJB	40.764.007,00	2.601.335,00
5	SMPN 5 CILEGON	1.806.746,00	0012833296001	BJB	1.162.127,00	644.619,00
6	SMPN 6 CILEGON	24.123.064,00	0012852924001	BJB	20.176.621,00	3.946.443,00
7	SMPN 7 CILEGON	5.839.919,00	0012837895001	BJB	5.042.069,00	797.850,00
8	SMPN 8 CILEGON	19.889.279,00	0012823754001	BJB	19.864.971,00	24.308,00
9	SMPN 9 CILEGON	36.379.729,00	0084118648001	BJB	36.254.437,00	125.292,00
10	SMPN 10 CILEGON	9.852.373,00	0012834810001	BJB	1.424.658,00	8.427.715,00
11	SMPN 11 CILEGON	1.009.591,00	0012839405001	BJB	925.842,00	83.749,00
SMP	JUMLAH B	1.303.225.461,00			1.283.306.145,00	19.919.316,00
	JUMLAH BOS (A+B)	1.738.689.882,00			1.680.707.616,00	57.982.266,00

Informasi kas lainnya – Dana BOS:

- Sehubungan dengan alokasi BOS afirmasi dan BOS Kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan Bos Kinerja Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 364/P/2019 serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, dengan ini Dinas Pendidikan Kota Cilegon menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja yang diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun 2019, diantaranya sebagai berikut:

NO	SEKOLAH	JUMLAH
I	SDN:	380.000.000,00
1	SDN CIPAOT CILEGON	127.000.000,00
2	SDN KARANG SETRA	79.000.000,00
3	SDN KOTA SARI	113.000.000,00
4	SDN TEMBULUN II	61.000.000,00
II	SMPN :	663.000.000,00
1	SMPN 2 CILEGON	663.000.000,00
JUMLAH I + II		1.043.000.000,00

5.5.1.1.2. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Saldo piutang bersih pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp106.119.891.796,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2019	2018
Piutang Pajak	166.997.762.963,00	158.690.593.026,00
Piutang Retribusi	1.079.818.950,00	1.289.000.950,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	14.733.460.793,00	5.620.008.822,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	1.130.443.654,00
Piutang Lainnya	34.575.558.522,00	32.672.208.576,00
Penyisihan Piutang	(111.378.690.356,29)	(102.612.076.080,00)
JUMLAH	106.007.910.871,71	96.790.178.948,00

5.5.1.1.2.1. Piutang Pajak

Piutang
Pajak

Piutang Pajak merupakan saldo tagihan Pajak Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah) yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp166.997.762.963,00.

Piutang Pajak Kota Cilegon per 31 Desember 2019 dirinci pada tabel berikut:

No.	Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	4	5	6	7 = 4+5-6
	Piutang Pajak	158.690.593.026,00	497.040.862.476,00	488.733.692.539,00	166.997.762.963,00
1	Pajak Hotel	223.889.218,00	11.187.319.996,00	11.251.118.434,00	160.090.780,00
2	Pajak Restoran	3.168.214.632,00	32.899.935.816,00	32.119.241.400,00	3.948.909.048,00
3	Pajak Hiburan	1.955.870,00	6.441.858.130,00	6.395.835.058,00	47.978.942,00
4	Pajak Penerangan Jalan	203.381.539,00	209.206.565.337,00	209.190.428.545,00	219.518.331,00
5	Pajak Reklame	151.101.023,00	1.980.156.866,00	1.891.936.109,00	239.321.780,00
6	Pajak Air Tanah	32.595.302,00	1.587.816.172,00	1.575.066.769,00	45.344.705,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam	1.018.379.500,00	8.207.266.300,00	8.144.706.900,00	1.080.938.900,00
8	Pajak Parkir	541.972.649,00	2.231.696.156,00	2.222.628.156,00	551.040.649,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	103.849.103.293,00	93.824.529.277,00	86.469.012.742,00	111.204.619.828,00
10	Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan	49.500.000.000,00	129.473.718.426,00	129.473.718.426,00	49.500.000.000,00

Informasi:

- Piutang BPHTB didasarkan atas hasil audit laporan keuangan PT PCM Tahun 2018 (audited) yang dilaksanakan oleh KAP Rama Wendra Nomor 00010/0.1271/AU.1/05/0202-02/II/2013/2019. Pada hasil laporan keuangan tersebut menyajikan adanya hutang BPHTB PT PCM untuk mendapatkan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Cilegon untuk pembangunan kepelabuhanan dan pergudangan atas penyertaan modal pemerintah kota cilegon di lahan tanah warnasari.

Penyisihan Piutang Pajak

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Untuk menyajikan piutang tersebut diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih.

Penyisihan piutang pajak tak tertagih Kota Cilegon per 31 Desember 2019 dirinci pada tabel berikut:

Penyisihan
piutang
pajak

JENIS PIUTANG PAJAK	SALDO AKHIR PIUTANG (Rp)	UMUR SALDO PIUTANG				JUMLAH
		< 1 TAHUN	1 s/d < 3 TAHUN	3 s/d < 5 TAHUN	≥ 5 TAHUN	
Pajak Hotel	160.090.780,00	154.747.391,00	2.243.389,00	400.000,00	2.700.000,00	160.090.780,00
Pajak Restoran	3.948.909.048,00	960.120.717,00	1.169.854.271,00	1.777.921.642,00	41.012.418,00	3.948.909.048,00
Pajak Hiburan	47.978.942,00	47.933.942,00	-	45.000,00	-	47.978.942,00
Pajak Penerangan Jalan	219.518.331,00	143.848.998,00	228.653,00	40.680,00	75.400.000,00	219.518.331,00
Pajak Reklame	239.321.780,00	100.145.279,00	61.341.023,00	21.545.326,00	56.290.152,00	239.321.780,00
Pajak Air Tanah	45.344.705,00	21.545.634,00	16.851.851,00	3.094.588,00	3.852.632,00	45.344.705,00
Pajak Mineral Bukan Logam	1.080.938.900,00	64.659.400,00	181.530.800,00	1.316.000,00	833.432.700,00	1.080.938.900,00
Pajak Parkir	551.040.649,00	9.068.000,00	264.197.149,00	95.462.000,00	182.313.500,00	551.040.649,00
Pajak Bumi dan Bangunan	111.204.619.828,00	12.140.333.936,00	18.431.635.764,00	10.098.817.627,00	70.533.832.501,00	111.204.619.828,00
Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan	49.500.000.000,00	-	49.500.000.000,00	-	-	49.500.000.000,00
Jumlah	166.997.762.963,00	13.642.403.297,00	69.627.882.900,00	11.998.642.863,00	71.728.833.903,00	166.997.762.963,00
% Penyisihan Piutang		0,5%	10%	50%	100%	
Penyisihan Putang Tak Tertagih		68.212.016,49	6.962.788.290,00	5.999.321.431,50	71.728.833.903,00	84.759.155.640,99

INFORMASI:

- Terkait dengan penyisihan piutang pada tahun 2019 menggunakan analisa Aging Schedule berdasarkan Kebijakan Akuntansi Kota Cilegon.

B.1.1.3.2 Piutang Retribusi

Piutang
Retribusi

Piutang Retribusi merupakan saldo tagihan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang belum dibayarkan oleh Wajib Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.079.818.950,00 dirinci pada tabel berikut:

No.	Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
	Piutang Retribusi	1.289.000.950,00	13.515.481.850,00	13.724.663.850,00	1.079.818.950,00
1	Retribusi Kesehatan	118.235.000,00	67.760.000,00	118.235.000,00	67.760.000,00
2	Retribusi Kebersihan	75.482.400,00	434.495.000,00	448.235.000,00	61.742.400,00
3	Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	1.092.500,00	80.082.000,00	80.082.000,00	1.092.500,00
4	Retribusi IMTA	121.640.400,00	4.921.965.600,00	4.926.837.600,00	116.768.400,00
5	Retribusi IMB	225.154.000,00	8.011.179.250,00	8.151.274.250,00	85.059.000,00
6	Retribusi Izin Gangguan (HO)	747.396.650,00	0,00	0,00	747.396.650,00

Penyisihan Piutang Retribusi

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Untuk menyajikan piutang dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih.

Penyisihan piutang retribusi tak tertagih Kota Cilegon per 31 Desember 2019 dirinci pada tabel berikut:

NO	JENIS PIUTANG RETRIBUSI	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR SALDO PIUTANG				JUMLAH
			< 1 TAHUN	1 s/d < 2 TAHUN	2 s/d < 3 TAHUN	≥ 3 TAHUN	
1	Retribusi Kesehatan	67.760.000,00	67.760.000,00	0,00	0,00	0,00	67.760.000,00
2	Retribusi IMTA	116.768.400,00	0,00	116.768.400,00	0,00	0,00	116.768.400,00
3	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakar	1.092.500,00	0,00	0,00	0,00	1.092.500,00	1.092.500,00
4	Retribusi Pelayanan Kebersihan	61.742.400,00	56.190.000,00	5.130.000,00	0,00	422.400,00	61.742.400,00
5	Retribusi IMB	85.059.000,00	6.723.000,00	10.173.000,00	11.952.000,00	56.211.000,00	85.059.000,00
6	Retribusi Izin Gangguan	747.396.650,00	0,00	0,00	0,00	747.396.650,00	747.396.650,00
	Jumlah	1.079.818.950,00	130.673.000,00	132.071.400,00	11.952.000,00	805.122.550,00	1.079.818.950,00
	% Penyisihan Piutang		0,5%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Putang Tak Tertagih		653.365,00	13.207.140,00	5.976.000,00	805.122.550,00	824.959.055,00

INFORMASI:

- Nilai penyisihan piutang retribusi tahun 2019 menggunakan Analisa Aging Schedule berdasarkan Kebijakan Akuntansi Kota Cilegon.

B.1.1.3.3 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Bagi
Hasil Dana
Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan saldo tagihan hak bagi hasil penerimaan pajak Kota Cilegon untuk Tahun Anggaran 2019 yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp14,733.460.793,00 dapat dirinci pada tabel berikut:

No.	Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.620.008.822,00	14.733.460.793,00	5.620.008.822,00	14.733.460.793,00
1	PKB	0,00	3.371.546.573,00	0,00	3.371.546.573,00
2	BBNKB	0,00	2.924.756.174,00	0,00	2.924.756.174,00
3	PBBKB	0,00	4.968.814.937,00	0,00	4.968.814.937,00
4	PAJAK ROKOK	5.620.008.822,00	3.468.343.109,00	5.620.008.822,00	3.468.343.109,00

B.1.1.3.4 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian
Lancar
TGR

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi saldo tagihan TGR Daerah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00.

B.1.1.3. Piutang Lainnya

Piutang
Lainnya

Piutang lainnya merupakan piutang Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2019 di luar piutang kategori diatas sebesar Rp34.575.558.522,00. dengan rincian sebagai berikut:

Piutang lainnya Kota Cilegon per 31 Desember 2019 dirinci pada tabel berikut:

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
	Piutang Lain-lain Lainnya		32.672.208.576,00	63.972.067.264,00	62.068.717.318,00	34.575.558.522,00
1	Piutang Angsuran Kios Kranggot	2019	11.129.800.013,00	0,00	54.652.429,00	11.075.147.584,00
2	Piutang BLUD RSUD	2019	6.571.760.322,00	63.348.401.754,00	61.515.809.884,00	8.404.352.192,00
3	Piutang Hasil Lelang Kendaraan	2019	40.985.000,00	0,00	0,00	40.985.000,00
4	Piutang Angsuran Kios Merak	2019	3.228.515.408,00	0,00	46.861.294,00	3.181.654.114,00
5	Piutang BLUD PDB	2019	322.720.517,00	368.528.350,00	256.790.795,00	434.458.072,00
6	Piutang Kepelabuhan - Pajak	2019	7.607.494.467,00	0,00	19.567.102,00	7.587.927.365,00
7	Piutang Kepelabuhan - Retribusi	2019	3.628.347.489,00	0,00	140.705.814,00	3.487.641.675,00
8	Piutang Denda Retribusi Kekayaan Daerah	2019	108.255.360,00	10.055.160,00	0,00	118.310.520,00
9	Piutang Lain-lain aset tanah	2019	34.330.000,00	245.082.000,00	34.330.000,00	245.082.000,00

Penyisihan Piutang Lainnya Kota Cilegon per 31 Desember 2019 dirinci pada tabel berikut:

NO	JENIS PIUTANG LAINNYA	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR SALDO PIUTANG					JUMLAH
			< 1 TAHUN	1 s/d < 2 TAHUN	2 s/d < 3 TAHUN	3 s/d < 4 TAHUN	4 s/d < 5 TAHUN	
1	Piutang Angsuran Kios Kranggot	11.075.147.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.075.147.584,00
2	Piutang BLUD RSUD	8.404.352.192,00	7.983.603.274,78	1.270.367,82	14.709.604,40	97.565.493,00	38.109.468,00	8.404.352.192,00
3	Piutang Hasil Lelang Kendaraan	40.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.985.000,00
4	Piutang Angsuran Kios Merak	3.181.654.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.654.114,00
5	Piutang BLUD PDB	434.458.072,00	335.791.622,00	34.818.500,00	1.280.000,00	0,00	2.972.500,00	434.458.072,00
6	Piutang Kepelabuhan - Pajak	7.587.927.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587.927.365,00
7	Piutang Kepelabuhan - Retribusi	3.487.641.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487.641.675,00
8	Piutang Denda Retribusi Kekayaan Daerah	118.310.520,00	10.055.160,00	18.134.460,00	90.120.900,00	0,00	0,00	118.310.520,00
10	Piutang Lain-lain aset tanah	245.082.000,00	245.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.082.000,00
	Jumlah	34.575.558.522,00	8.574.532.056,78	54.223.327,82	106.110.504,40	97.565.493,00	41.081.968,00	25.702.045.172,00
	% Penyisihan Piutang		0,5%	10%	50%	80%	100%	
	Penyisihan Putang Tak Tertagih		271.116,64	10.611.050,44	48.782.746,50	32.865.574,40	25.702.045.172,00	25.794.575.659,98

Informasi:

- Penyisihan Piutang lain-lain aset tanah tidak diperhitungkan karena Penyisihan Piutang Kurang dari 1 (Satu) Tahun.
- Penambahan piutang lain-lain aset tanah sebesar Rp245.082.000,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terkait kelebihan pembayaran pembebasan lahan Jalan Lintas Utara (JLU).

B.1.1.5 Belanja Dibayar Dimuka

*Beban
Dibayar
Dimuka*

Belanja dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau dianggarkan.

Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.466.447.868,00. Beban dibayar dimuka merupakan beban yang telah dibayar tahun 2019 namun kontraknya berakhir di tahun 2020.

Beban dibayar dimuka Kota Cilegon per 31 Desember 2019 dirinci pada tabel berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon

Tahun 2019

No.	PERUNTUKAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2019 (Rp)	KETERANGAN
1	SEWA GEDUNG	1.029.428.036,00	2.153.020.000,00	1.969.927.292,00	1.212.520.744,00	
-	Kelurahan Citangkil	0,00	18.000.000,00	5.885.559,00	12.114.441,00	
-	- Sewa Ruko - 2019	0,00	18.000.000,00	5.885.559,00	12.114.441,00	3 September 2019 S/D 3 September 2020
-	DINKES	0,00	140.000.000,00	70.190.736,00	69.809.264,00	
-	- Sewa Gedung UPTD Puskesmas Jombang - 2019	0,00	140.000.000,00	70.190.736,00	69.809.264,00	01 Juli 2019 S/D 01 Juli 2020
-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	17.490.411,00	35.000.000,00	22.490.411,00	30.000.000,00	
-	- Sewa Gedung Gudang Kantor - 2018	17.490.411,00	0,00	17.490.411,00	0,00	1 November 2018 S/D 31 Oktober 2019
-	- Sewa Gedung Gudang Kantor - 2019	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	01 November 2019 S/D 31 Desember 2020
-	DKUMK	155.092.897,00	223.000.000,00	217.158.290,00	160.934.607,00	
-	- Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Jombang dan Purwakarta - 2018	19.106.557,00	0,00	19.106.557,00	0,00	8 Juli 2018 S/D 8 Juli 2019
-	- Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Citangkil dan Cwandan - 2018	28.609.290,00	0,00	28.609.290,00	0,00	10 Oktober 2018 S/D 10 Oktober 2019
-	- Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Cilegon dan Cibeber - 2018	28.609.290,00	0,00	28.609.290,00	0,00	10 Oktober 2018 S/D 10 Oktober 2019
-	- Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Grogol dan Pulomerak - 2018	28.609.290,00	0,00	28.609.290,00	0,00	10 Oktober 2018 S/D 10 Oktober 2019
-	- Sewa Gedung Kantor Pusat Inkubator Wirausaha dan Klinik - 2018	50.158.470,00	0,00	50.158.470,00	0,00	1 Oktober 2018 S/D 1 Oktober 2019
-	- Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Jombang dan Purwakarta - 2019	0,00	39.000.000,00	18.809.264,00	20.190.736,00	8 Juli 2019 S/D 8 Juli 2020
-	- Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Citangkil dan Cwandan - 2019	0,00	39.000.000,00	8.820.163,00	30.179.837,00	10 Oktober 2019 S/D 10 Oktober 2020
-	- Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Cilegon dan Cibeber - 2019	0,00	39.000.000,00	8.820.163,00	30.179.837,00	10 Oktober 2019 S/D 10 Oktober 2020
-	- Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Grogol dan Pulomerak - 2019	0,00	39.000.000,00	8.820.163,00	30.179.837,00	10 Oktober 2019 S/D 10 Oktober 2020
-	- Sewa Gedung Kantor PIWUJ - 2019	0,00	67.000.000,00	16.795.640,00	50.204.360,00	1 Oktober 2019 S/D 1 Oktober 2020
-	DPMPSTP	93.648.404,00	0,00	93.648.404,00	0,00	
-	- sewa gedung kantor DPMPSTP Kota Cilegon (Blok C 10,11) - 2018	60.576.923,00	0,00	60.576.923,00	0,00	5 September 2017 S/D 4 September 2018
-	- sewa gedung kantor DPMPSTP Kota Cilegon (Blok C 12) - 2018	30.288.462,00	0,00	30.288.462,00	0,00	5 September 2017 S/D 4 September 2018
-	- sewa gedung kantor DPMPSTP Kota Cilegon (Blok C 22) - 2018	2.783.019,00	0,00	2.783.019,00	0,00	2 Januari 2019 S/D 28 Februari 2019
-	SETDA	44.493.151,00	0,00	44.493.151,00	0,00	
-	- Sewa Gedung Untuk Kantor Dinas Koperasi 2 Kota Cilegon - 2018	5.369.863,00	0,00	5.369.863,00	0,00	15 Januari 2018 S/D 14 Januari 2019
-	- Sewa Gedung Untuk Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil Kota Cilegon	39.123.288,00	0,00	39.123.288,00	0,00	13 April 2018 S/D 12 April 2019
-	BPKAD	108.849.864,00	571.000.000,00	526.960.442,00	152.889.422,00	
-	- Sewa Gedung Kantor UPT I - 2018	11.311.475,00	0,00	11.311.475,00	0,00	15 Februari 2018 S/D 15 Februari 2019
-	- Sewa Gedung Kantor UPT II - 2018	22.929.155,00	0,00	22.929.155,00	0,00	30 Maret 2018 S/D 31 Maret 2019
-	- Sewa Gedung Kantor UPT III - 2018	10.972.678,00	0,00	10.972.678,00	0,00	1 Februari 2018 S/D 1 Februari 2019
-	- Sewa Gedung Kantor UPT IV - 2018	43.520.436,00	0,00	43.520.436,00	0,00	11 Mei 2018 S/D 12 Mei 2019
-	- Sewa Gudang ASET - 2018	20.116.120,00	0,00	20.116.120,00	0,00	4 Juni 2018 S/D 4 Juni 2019
-	- Sewa Gedung Kantor UPT I - 2019	0,00	90.000.000,00	78.688.525,00	11.311.475,00	15 Februari 2019 S/D 15 Februari 2020
-	- Sewa Gedung Kantor UPT II - 2019	0,00	98.000.000,00	73.433.243,00	24.566.757,00	01 April 2019 S/D 01 April 2020
-	- Sewa Gedung Kantor UPT III - 2019	0,00	145.000.000,00	132.322.404,00	12.677.596,00	01 Februari 2019 S/D 01 Februari 2020
-	- Sewa Gedung Kantor UPT IV - 2019	0,00	130.000.000,00	83.596.730,00	46.403.270,00	10 Mei 2019 S/D 10 Mei 2020
-	- Sewa Gedung Gudang Kantor (Aset) - 2019	0,00	50.000.000,00	12.568.306,00	37.431.694,00	01 Oktober 2019 S/D 30 September 2020
-	- Sewa Gedung Gudang Kantor (Aset) - 2019	0,00	58.000.000,00	37.501.370,00	20.498.630,00	01 Mei 2019 S/D 08 Mei 2020
-	DP3AKB	159.699.453,00	274.200.000,00	252.732.688,00	181.166.765,00	
-	- Sewa Gedung Kantor UPT KCM I - 2018	8.196.721,00	0,00	8.196.721,00	0,00	1 Maret 2018 S/D 1 Maret 2019
-	- Sewa Gedung Kantor UPT KCM II - 2018	8.879.781,00	0,00	8.879.781,00	0,00	6 Maret 2018 S/D 6 Maret 2019
-	- Sewa Gedung Kantor DP3AKB - 2018	142.622.951,00	0,00	142.622.951,00	0,00	14 Desember 2018 S/D 14 Desember 2019
-	- Sewa Gedung Kantor UPT KCM I - 2019	0,00	49.600.000,00	41.355.858,00	8.244.142,00	01 Maret 2019 S/D 01 Maret 2020
-	- Sewa Gedung Kantor UPT KCM II - 2019	0,00	49.600.000,00	40.680.109,00	8.919.891,00	06 Maret 2019 S/D 06 Maret 2020
-	- Sewa Gedung Kantor DP3AKB - 2019	0,00	175.000.000,00	10.997.268,00	164.002.732,00	09 DESEMBER 2019 S/D 08 DESEMBER 2020
-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12.653.582,00	0,00	12.653.582,00	0,00	
-	- Sewa Gedung untuk gudang kantor - 2018	2.642.623,00	0,00	2.642.623,00	0,00	26 Januari 2018 S/D 26 Januari 2019
-	- Sewa Gedung untuk gudang kantor - 2018	10.010.959,00	0,00	10.010.959,00	0,00	28 Februari 2018 S/D 27 Februari 2019
-	- Sewa Gedung untuk gudang kantor	0,00	0,00	0,00	-	-
-	- Sewa Gedung untuk gudang kantor	0,00	0,00	0,00	-	-
-	DINAS LINGKUNGAN HUJUP	166.027.396,00	200.000.000,00	199.907.176,00	166.120.220,00	
-	- Sewa Gedung Kantor UPT Kebersihan Wilayah I - 2018	41.506.849,00	0,00	41.506.849,00	0,00	31 Oktober 2018 S/D 30 Oktober 2019
-	- Sewa Gedung Kantor UPT Kebersihan Wilayah II - 2018	41.506.849,00	0,00	41.506.849,00	0,00	31 Oktober 2018 S/D 30 Oktober 2019
-	- Sewa Gedung Kantor UPT Kebersihan Wilayah III - 2018	41.506.849,00	0,00	41.506.849,00	0,00	31 Oktober 2018 S/D 30 Oktober 2019
-	- Sewa Gedung Kantor UPT Kebersihan Wilayah IV - 2018	41.506.849,00	0,00	41.506.849,00	0,00	31 Oktober 2018 S/D 30 Oktober 2019
-	- Sewa Gedung Kantor UPT Kebersihan Wilayah I - 2019	0,00	50.000.000,00	8.469.945,00	41.530.055,00	31 Oktober 2019 S/D 30 Oktober 2020
-	- Sewa Gedung Kantor UPT Kebersihan Wilayah II - 2019	0,00	50.000.000,00	8.469.945,00	41.530.055,00	31 Oktober 2019 S/D 30 Oktober 2020
-	- Sewa Gedung Kantor UPT Kebersihan Wilayah III - 2019	0,00	50.000.000,00	8.469.945,00	41.530.055,00	31 Oktober 2019 S/D 30 Oktober 2020
-	- Sewa Gedung Kantor UPT Kebersihan Wilayah IV - 2019	0,00	50.000.000,00	8.469.945,00	41.530.055,00	31 Oktober 2019 S/D 30 Oktober 2020
-	DISHUB	98.688.525,00	105.000.000,00	104.982.803,00	98.705.722,00	
-	- Sewa Gedung/Workshop - 2018	98.688.525,00	0,00	98.688.525,00	0,00	10 Desember 2018 S/D 10 Desember 2019
-	- Sewa Gedung/Workshop - 2019	0,00	105.000.000,00	6.294.278,00	98.705.722,00	10 Desember 2019 S/D 10 Desember 2020
-	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	22.502.733,00	87.500.000,00	71.255.002,00	38.747.731,00	
-	- Sewa Gedung Kantor (LAB.METROLOGI) - 2018	15.836.066,00	0,00	15.836.066,00	0,00	2 April 2018 S/D 2 April 2019
-	- Sewa Gedung Kantor (LAB.METROLOGI) - 2018	6.666.667,00	0,00	6.666.667,00	0,00	2 Maret 2018 S/D 0 Maret 2019
-	- Sewa Gedung Kantor (LAB.METROLOGI) - 2019	0,00	87.500.000,00	48.752.269,00	38.747.731,00	28 Februari 2019 s.d 31 Agustus 2020
-	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	105.109.489,00	255.000.000,00	200.273.423,00	159.836.066,00	
-	- Sewa Gedung Kantor - 2018	105.109.489,00	0,00	105.109.489,00	0,00	14 Desember 2018 S/D 13 September 2019
-	- Sewa Gudang Dinas - 2019	0,00	105.000.000,00	87.786.885,00	17.213.115,00	01 Maret 2019 S/D 29 Februari 2020
-	- Sewa Gedung Kantor - 2019	0,00	150.000.000,00	7.377.049,00	142.622.951,00	14 Desember 2019 S/D 13 Desember 2020
-	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	45.172.131,00	49.500.000,00	49.353.330,00	45.318.801,00	
-	- Sewa Gedung / Rumah (Pos Citangkil) - 2018	45.172.131,00	0,00	45.172.131,00	0,00	30 November 2018 S/D 30 November 2019
-	- Sewa Gedung / Rumah (Pos Cwandan) - 2019	0,00	49.500.000,00	4.181.199,00	45.318.801,00	01 Desember 2019 S/D 01 Desember 2020
-	DINAS SOSIAL	0,00	194.820.000,00	97.942.295,00	96.877.705,00	
-	- Sewa Gedung Kantor - 2019	0,00	194.820.000,00	97.942.295,00	96.877.705,00	01 Oktober 2019 S/D 31 Maret 2020

2	SEWA SERVER	73.246.567,00	86.400.000,00	87.646.567,00	72.000.000,00	
	- DISKOMINFO	73.246.567,00	86.400.000,00	87.646.567,00	72.000.000,00	
	- Sewa Server Simral BPPT - 2018	73.246.567,00	0,00	73.246.567,00	0,00	15 November 2018 S/D 15 Oktober 2019
	- Sewa Server Simral BPPT- 2019		86.400.000,00	14.400.000,00	72.000.000,00	1 November 2019 S/D 31 Oktober 2020
3	ASURANSI KESEHATAN	284.253.803,00	0,00	284.253.803,00	0,00	
	- RSUD	243.112.000,00	0,00	243.112.000,00	0,00	
	- Asuransi Profesi Dokter - 2018	243.112.000,00	0,00	243.112.000,00	0,00	2 Januari 2019 S/D 31 Desember 2019
	- DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	41.141.803,00	0,00	41.141.803,00	0,00	
	- Asuransi Tenaga Harian Lepas - 2018	41.141.803,00	0,00	41.141.803,00	0,00	17 Desember 2018 S/D 17 Desember 2019
4	ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	1.252.608.408,00	1.651.264.909,00	1.721.946.193,00	1.181.927.124,00	
	- BPKAD	1.113.265.273,00	1.451.220.000,00	1.461.481.785,00	1.103.003.488,00	
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 4) - 2018	533.417.880,00	0,00	533.417.880,00	0,00	22 Juni 2018 S/D 22 Juni 2019
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 4) - 2018	277.156.808,00	0,00	277.156.808,00	0,00	18 Desember 2018 S/D 18 Desember 2019
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 2) - 2018	131.031.008,00	0,00	131.031.008,00	0,00	26 November 2018 S/D 26 November 2019
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Gedung Kebakaran - 2018	82.456.934,00	0,00	82.456.934,00	0,00	30 November 2018 S/D 30 November 2019
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Gedung Cempa Bumi - 2018	89.202.643,00	0,00	89.202.643,00	0,00	21 September 2018 S/D 21 September 2019
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 4) - 2019		448.300.000,00	6.107.629,00	442.192.371,00	27 Desember 2019 S/D 27 Desember 2020
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 4) - 2019		860.085.000,00	328.097.820,00	531.987.180,00	14 Agustus 2019 S/D 14 Agustus 2020
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 2) - 2019		142.835.000,00	14.011.063,00	128.823.937,00	26 November 2019 S/D 26 November 2020
	- RSUD	83.895.740,00	84.779.359,00	144.188.417,00	24.486.682,00	
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Gedung Kebakaran - 2018	83.895.740,00	0,00	83.895.740,00	0,00	12 Agustus 2018 S/D 12 Agustus 2019
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi BMD Roda Dua - 2019		3.001.000,00	2.134.226,00	866.774,00	15 April 2019 S/D 15 April 2020
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi BMD Roda Empat- 2019		81.778.359,00	58.158.451,00	23.619.908,00	15 April 2019 S/D 15 April 2020
	SEKRETARIAT DPRD	55.447.395,00	115.265.550,00	116.275.991,00	54.436.954,00	
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 4) - 2018	17.167.360,00	0,00	17.167.360,00	0,00	23 Agustus 2018 S/D 23 Agustus 2019
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 4) - 2018	36.828.689,00	0,00	36.828.689,00	0,00	30 Mei 2018 S/D 30 Mei 2019
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 2) - 2018	971.141,00	0,00	971.141,00	0,00	23 Agustus 2018 S/D 23 Agustus 2019
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 2) - 2018	480.205,00	0,00	480.205,00	0,00	30 Mei 2018 S/D 30 Mei 2019
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 4) - 2019		26.024.250,00	8.438.381,00	17.585.869,00	4 September 2019 S/D 4 September 2020
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 4) - 2019		86.769.500,00	51.305.127,00	35.464.373,00	29 Mei 2019 S/D 29 Mei 2020
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 2) - 2019		1.068.500,00	630.067,00	438.433,00	29 Mei 2019 S/D 30 Mei 2020
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 2) - 2019		1.403.300,00	455.021,00	948.279,00	4 September 2019 S/D 4 September 2020
	TOTAL (1+2+3+4)	2.639.536.814,00	3.890.684.909,00	4.063.773.855,00	2.466.447.868,00	

B.1.1.5. Persediaan

Persediaan merupakan sisa barang habis pakai yang tidak terpakai dalam tahun anggaran berjalan. Jumlah Persediaan per 31 Desember adalah sebesar Rp17.406.170.699,00. Dapat dilihat pada rekapitulasi persediaan sebagai berikut:

NO	PERSEDIAAN	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
A	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.254.411.461,00	694.805.401,00
B	Persediaan Alat Listrik	1.888.253.438,00	1.337.035.173,00
C	Persediaan Barang cetakan	1.356.044.651,00	1.511.333.252,00
D	Persediaan Benda Pos	2.309.000,00	3.345.000,00
E	Persediaan Material/Bahan :	12.905.152.149,00	14.268.456.153,00
	- Obat-Obatan dan Alat Kesehatan	12.051.365.114,00	13.000.203.698,00
	- Buffer Stock	462.784.240,00	316.587.900,00
	- Barang Hadiah/Barang untuk diserahkan	0,00	0,00
	- Barang Perdagangan	2.975.000,00	3.459.000,00
	- Bahan Alat Perlengkapan Pendidikan/Pelatihan	6.744.000,00	19.673.100,00
	- Bahan Makanan dan Peralatan Dapur	94.365.095,00	79.655.915,00
	- Material Lainnya/Bahan Bangunan	176.301.550,00	663.758.760,00
	- Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	110.617.150,00	185.117.780,00
	JUMLAH (A+B+C+D+E)	17.406.170.699,00	17.814.974.979,00

Adapun jenis persediaan per masing-masing OPD per 31 Desember 2019 di rinci pada tabel berikut:

Persediaan

No	OPD	ATK	BARANG CETAK	OBAT - OBATAN dan ALAT KESEHATAN	BUFFER STOCK	ALAT LISTRIK	BARANG HAJAH / BARANG UNTUK PERAGAMAAN	BARANG PERDAGANGAN	BAHAN ALAT PERLENGKAPAN PENDIDIKAN/P ELATIHAN	BENDA POS LAINNYA	BAHAN MAKANAN DAN PERALATAN PAKSI	MATERIAL LAINNYA/ BAHAN BANGUNAN	PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	SALDO
DINAS														
1	DINAS PENDIDIKAN	1.351.000	1.105.000											2.456.000
2	BOS SD	16.507.000	300.000							248.000	143.000		183.000	17.381.000
3	DINAS SOSIAL	3.051.600	2.011.000		371.432.240					486.000			924.000	377.904.840
4	DINAS PERHUBUNGAN	2.914.000	220.529.095			1.480.417.938								1.703.961.033
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		15.032.400								809.700			15.842.100
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.129.500	4.900.000								374.000			8.403.500
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERESKAYA	1.228.700	400.000	272.014.800										273.641.500
8	DINAS PERTANIAN	2.590.520	1.961.300	15.638.574										20.190.394
9	DINAS KEPENDIDIKAN DAN PENCATATAN SIPIL	775.471.000	521.238.787											1.296.709.787
10	DINAS KESEHATAN	2.647.500	159.697.524	5.342.358.459		75.500				85.000		1.182.000		5.508.045.983
11	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	8.633.700	14.055.000			1.140.000							175.000	24.141.700
12	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.964.150	462.000								142.500		270.000	2.838.650
13	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.049.650	4.071.500											8.121.150
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DAHDI DAN STATISTIK	3.742.500	5.907.500											9.650.000
15	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECA	1.717.500	1.647.000								30.000			3.394.500
16	ILIS D POB							2.975.000						2.975.000
17	DINAS TENAGA KERJA	3.171.000	5.854.000								144.000		505.000	9.674.000
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	5.534.800	1.878.000											7.412.800
19	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (HASIL CEK ULANG)	3.325.200	3.173.000											6.498.200
20	DINAS PERSIAPAN DAN ARSIP DAERAH	1.325.000	42.415.000										511.000	44.251.000
21	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	845.000	2.450.000									70.950.000		74.245.000
22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	680.000	1.010.000											1.870.000.000
BADAN														
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.069.500	8.401.000								1.530.850		931.500	17.932.850
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.213.300	33.612.300			1.031.000							2.232.550	46.089.150
25	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	800.580	627.000								137.400			1.564.980
26	BADAN KESBAANGPOL	1.640.000	1.415.000								588.000			3.643.000
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	345.000	630.000		91.352.000									92.327.000
28	INSPEKTORAT	4.988.350	3.262.900											8.251.250
29	RSUD	2.676.040	21.873.445	3.930.027.821		270.164.500					45.402.955		88.542.305	4.358.987.066
BETDA														
30	BAGIAN PEMERINTAHAN	47.850	517.550											565.400
31	BAGIAN KESRA	193.338	800.800											994.038
32	BAGIAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN	94.600	438.900											533.500
33	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	353.676	907.500											1.261.176
34	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	15.357.425	950.000											16.307.425
35	BETDA	483.228												483.228
36	BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	236.500												236.500
37	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	3.080.576	9.657.450											12.738.026
38	BAGIAN UMUM	61.361.526	48.977.729			58.723.500					13.626.550		8.280.250	189.269.545
SEKERTARIAT DPRD														
39	SEKERTARIAT DPRD	187.183.100	100.663.800			78.966.000					40.895.100	91.425.000		496.643.000
40	SEKERTARIAT KORPRI	729.000	1.000.000											1.729.000
KECAMATAN														
41	KECAMATAN CIBEER	2.391.000	2.150.000											4.541.000
42	KECAMATAN PURWAKARTA	2.002.000	851.000								80.000			2.913.000
43	KECAMATAN CIWANDAN	2.305.000	2.667.800											4.972.800
44	KECAMATAN CITANGKIL	2.718.750	5.737.500											8.456.250
45	KECAMATAN CILEGON	1.034.000	1.420.000											2.454.000
46	KECAMATAN JOMBANG	3.039.000	2.158.600											5.197.600
47	KECAMATAN GROGOL	1.931.000	1.560.500							1.155.000			299.000	4.945.500
48	KECAMATAN PULOMERAK	1.187.000	976.000								252.000		105.000	2.500.000
PUSKESMAS														
47	PUSKESMAS CIBEER	3.326.200	53.420.500	408.320.972						180.000	558.500		2.612.045	466.418.217
48	PUSKESMAS PURWAKARTA	17.504.800	17.737.900	240.350.757		975.000					535.000		1.457.000	278.560.257
49	PUSKESMAS CIWANDAN	1.195.000		309.188.692										310.663.692
50	PUSKESMAS CITANGKIL	5.437.500	8.271.000	263.262.661		760.000								378.960.561
51	PUSKESMAS CILEGON	489.080	7.743.300	311.003.849							40.000			319.643.829
52	PUSKESMAS JOMBANG	594.000	149.500	461.267.036										462.010.536
53	PUSKESMAS GROGOL	250.000	250.000	161.105.144										161.355.144
54	PUSKESMAS PULOMERAK	1.676.800	1.014.600	238.848.849									15.000	241.653.249
55	UPTD PKT	70.000	80.000											150.000
56	UPTD JPM	46.000	1.955.000											2.001.000
57	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN	101.000	2.800.000										385.000	3.286.000
SEKOLAH														
58	SMPN 1 CILEGON	300.000												300.000
59	SMPN 2 CILEGON	900.000	1.140.000											2.280.000
60	SMPN 3 CILEGON	1.600.000								5.250.000	240.000			7.630.000
61	SMPN 4 CILEGON	52.353.222												52.672.222
62	SMPN 5 CILEGON	3.749.000												5.289.000
63	SMPN 6 CILEGON	1.989.000												1.989.000
64	SMPN 7 CILEGON	961.000												961.000
65	SMPN 8 CILEGON	366.000												366.000
66	SMPN 9 CILEGON	203.500												1.787.500
67	SMPN 10 CILEGON	182.500	100.000							1.484.000	90.000			262.500
68	SMPN 11 CILEGON	4.258.500												4.258.500
	Jumlah	1.254.411.461	1.356.044.651	12.051.365.114	462.794.240	1.888.253.438	-	2.975.000	6.744.000	2.309.000	94.365.095	176.301.550	110.617.150	17.406.170.699

Dalam penyajian nilai persediaan sebesar Rp17.406.170.699,00 pada Neraca Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019 menggunakan metode pencatatan periodik untuk seluruh jenis persediaan, serta mekanisme penghitungan persediaan menggunakan harga terakhir pembelian.

INFORMASI:

- Pada Dinas Kesehatan dan RSUD mekanisme pengelolaan (manajemen) logistik persediaan obat-obatan dan barang habis pakai rumah sakit menggunakan mekanisme perpetual sedangkan untuk metode penilaian persediaan menggunakan metode periodik.
- persediaan obat kadaluarsa di RSUD Cilegon sebesar Rp12.244.800,00.

B.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Permanen berupa penyertaan modal di BUMD serta Investasi Non Permanen Lainnya pada UPTD BLUD Pengelola Dana Bergulir (PDB).

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 di sebagai berikut:

- **Investasi Non Permanen Lainnya** per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.672.657.347,00 merupakan nilai investasi dana bergulir Pemerintah Kota Cilegon di BLUD UPT PDB, SKPD DKUMK yang disajikan dengan metode penilaian investasi Net Realizable Value (NRV) berdasarkan kolektibilitas dana bergulir. Dalam penghitungan Nilai NRV Dana Bergulir, BLUD UPT PDB berpedoman pada Peraturan Walikota Cilegon Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon.

$$\begin{aligned} \text{NRV} &= \text{Kas Dana Bergulir} + \text{Piutang Dana Bergulir} - \text{Penyisihan Piutang Bergulir} \\ &= \text{Rp}1.317.172.197,00 + \text{Rp}6.343.465.174,00 - \text{Rp}2.987.980.024,00 \\ &= \text{Rp}4.672.657.347,00 \end{aligned}$$

Akun	INVESTASI NONPERMANEN	PER 31 DESEMBER 2019 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2018 (Rp)
12104	Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir	7.660.637.371,00	5.028.832.394,00
12105	Dana Bergulir diragukan tertagih	(2.987.980.024,00)	
	Jumlah	4.672.657.347,00	5.028.832.394,00

- **Investasi Permanen dalam bentuk penyertaan modal** pemerintah daerah sebesar Rp1.413.021.305.092,12 dapat dilihat pada tabel berikut:

Investasi Jk Panjang

NO	NILAI INVESTASI HASIL PENYERTAAN MODAL	PER 31 DESEMBER 2019 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2018 (Rp)
1	PT PCM	1.253.984.106.036,00	1.228.102.000.817,00
2	PDAM	74.307.437.903,00	71.721.483.742,00
3	BPRS	65.229.762.953,12	66.463.851.093,00
4	BJB	19.499.998.200,00	19.499.998.200,00
	Jumlah	1.413.021.305.092,12	1.385.787.333.852,00

INFORMASI:

- Nilai investasi permanen berupa penyertaan modal pada BUMD per 31 Desember 2019 disajikan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD PT PCM audited tahun 2019; Laporan Keuangan BUMD PT BPRS audited tahun 2019 dan Laporan Keuangan BUMD PT PDAM audited tahun 2019.
- Penyajian investasi di PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri, dan PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri menggunakan metode penilaian equity method karena dimiliki oleh Pemerintah Kota Cilegon lebih dari 50%.
- Penyajian investasi di Bank Jabar Banten menggunakan Cost Method karena pemilikan Pemerintah Kota Cilegon hanya sebesar 0,60% atau kurang dari 25%.
- Laporan keuangan BPRS audited, Penyajian investasi di BPRS di peroleh dari nilai ekuitas sebesar Rp65.345.213.861,00 dikali 99,82% (persentase kepemilikan modal Pemerintah Kota Cilegon sebesar Rp56.500.000.000,00 dari total modal BPRS CM sebesar Rp56.600.000.000,00).
- Penyajian Investasi Dana Bergulir berdasarkan Laporan Keuangan UPT PDB OPD DISKOP UMK Tahun 2019 audited.

B.1.3 Aset Tetap

1. Dasar Hukum

Aset Tetap

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon;
 14. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi dan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi dan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon;

2. Periode Laporan

Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Cilegon ini disusun dan disajikan untuk periode pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2019

I. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

Berdasarkan Pasal 478 ayat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa :

- (1) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.
- (2) Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478 ayat (2) serta Laporan Barang Pengelolasebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan LBMD.
- (3) LBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis AkruaI Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019 mencakup seluruh transaksi pengelolaan dan penatausahaan BMD yang berasal dari APBD Kota Cilegon Tahun 2019 dan atau yang pelaksanaannya di Perangkat Daerah/UPB selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. LBMD ini tidak mencakup entitas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

LBMD disusun dan dihimpun oleh masing-masing Pengguna/Kuasa Pengguna Barang tersebut diatas berdasarkan jenjang pelaporan, yaitu mulai jenjang struktur di bawahnya seperti Unit Pengguna Barang (UPB) yang terendah.

LBMD Tahun 2017 ini disusun berdasarkan Buku Inventaris (BI) Gabungan Pemerintah Kota Cilegon Per 31 Desember 2019 yang terdiri dari Aset Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel (Audited) yang dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP BMD) yang dilengkapi dengan data-data manual serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mutasi tambah kurang BMD pada Tahun Anggaran 2019.

Nilai BMD Per 31 Desember 2019 merupakan penjumlahan nilai BMD Per 31 Desember 2018 (Saldo Awal 02 Januari 2019) dan nilai mutasi tambah kurang (+/-) BMD selama kurun waktu antara 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. LBMD Tahun 2019 juga menyajikan nilai BMD secara menyeluruh, baik Aset Intrakomptabel maupun Aset Ekstrakomptabel berdasarkan penggolongan dan kodefikasi BMD.

Penggolongan dan kodefikasi BMD yang disusun telah sesuai dengan klasifikasi golongan, bidang dan kelompok BMD menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Sedangkan penyajian BMD berdasarkan akun Neraca meliputi nilai BMD yang dalam pencatatannya telah memenuhi persyaratan minimum kapitalisasi (Aset Intrakomptabel), sementara terhadap BMD yang tidak memenuhi persyaratan minimum kapitalisasi dinyatakan sebagai Aset/BMD Ekstrakomptabel, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi dan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi dan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon.

BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perolehan lainnya yang sah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa, Barang Milik Daerah (BMD) meliputi :

- a. Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
- b. Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Selanjutnya, Pasal 6 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa, Barang Milik Daerah (BMD) yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi :

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang;
-

atau

- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMD yang diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMD, yaitu asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan asas kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan BMD tercermin dari pelaporan BMD secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu kesatuan informasi sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengacu pada Pasal 1 angka 47 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, menyebutkan bahwa : “Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD.

Penatausahaan BMD bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMD yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

LBMD sebagai output utama penatausahaan aset daerah, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMD yang dilakukan oleh Pengelola dan Pengguna/Kuasa Barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (*prediction value*) terkait BMD. LBMD juga merupakan bahan menyusun Neraca Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Oleh karena itu, Kebijakan Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan prinsip-prinsip dasar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah yang berlaku umum.

Agar dapat dimanfaatkan sebagaimana uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam LBMD harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat dihubungkan dengan penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*prediktif value*),

disajikan tepat waktu dan disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Laporan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Keandalan suatu laporan juga dicerminkan pada penyajian informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Informasi yang termuat dalam suatu laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan pengguna lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Dan agar dapat dipahami oleh penggunanya, maka informasi yang disajikan pada suatu laporan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

Dalam rangka mencapai kualitas LBMD sebagaimana persyaratan kualitatif tersebut diatas, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMD Pemerintah Kota Cilegon dilakukan sebagai berikut :

1. Penyeragaman Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
2. Penyajian BMD Sesuai Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah;
3. Kebijakan Kapitalisasi;
4. Kebijakan Penyusutan Aset Tetap ;
5. Rekonsiliasi Nilai Data BMD Pemerintah Kota Cilegon.

1. Penyeragaman Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah

Penggolongan dan pengkodefikasian BMD digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan dan inventarisasi BMD. Kodifikasi BMD yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap Pengguna/Kuasa Pengguna dan Pengelola BMD akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBMD dapat dibandingkan dan mudah dipahami karena menggunakan kaidah-kaidah pengelompokan yang sama dan konsisten baik antar periode pelaporan maupun entitas pelaporan, yaitu Perangkat Daerah/UPB sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna Barang. Selain itu, penggolongan dan kodifikasi BMD juga akan memudahkan dalam sistem penatausahaan BMD .

Dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 diatur pemberian kode BMD sesuai dengan penggolongan kodefikasi masing-masing BMD. Selain itu, harmonisasi nilai BMD dalam penyusunan Neraca Aset Tetap dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Akuntansi Pemerintah, Kodefikasi BMD diselaraskan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) meskipun belum secara keseluruhan.

BMD diklasifikasikan ke 6 (*enam*) golongan barang, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Masing-masing golongan tersebut terbagi atas bidang barang yang kemudian terbagi lagi atas kelompok barang. Kelompok barang terbagi atas sub kelompok barang yang kemudian terbagi lagi atas sub-sub kelompok barang.

2. Penyajian BMD/Aset Tetap Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Salah satu tujuan penyusunan laporan BMD adalah untuk penyusunan Neraca Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, agar relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMD Kota Cilegon dalam hal ini, harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan Neraca, yang antara lain dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMD berdasarkan Permendagri agar sesuai dengan penggolongan bidang barang pada akun Neraca. Sebagaimana diatur dalam Lampiran III Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, perihal Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah. Penyesuaian ini dilakukan (meski belum seluruhnya) melalui proses mapping yang dikenal sebagai dengan konversi dan menghasilkan penyajian BMD dalam pos-pos Neraca yaitu : persediaan, aset tetap (terdiri dari : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan) dan aset lainnya (terdiri dari : Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain, Hibah ke masyarakat, Kemitraan dengan pihak ketiga).

3. Kebijakan Kapitalisasi

Laporan BMD ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Penatausahaan Aset Milik Daerah, yaitu serangkaian prosedur

manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan dan penyajian Laporan BMD Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2019 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk :
 1. Peralatan dan mesin; atau
 2. Aset Tetap Renovasi Peralatan dan Mesin; dan
- b. Sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk :
 1. Gedung dan Bangunan; atau
 2. Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan.

4. Kebijakan Penyusutan Aset Tetap

Penyusunan Laporan BMD Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2019, sudah menerapkan penyusutan Barang Milik Daerah atas Aset Tetap dengan berpedoman kepada Peraturan Walikota Cilegon Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi dan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi dan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap dengan beberapa ketentuan dasar sebagai berikut :

1. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Aset Tetap berupa Tanah, baik yang digunakan untuk operasional pemerintah daerah maupun yang dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - b. Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan aset tersebut siap untuk dioperasikan dan direklasifikasi ke jenis aset yang bersangkutan;
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumensumber yang sah dan telah diusulkan kepada PengelolaBarang untuk dilakukan penghapusannya;
 - d. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dipindahtangankan, dimusnahkan dan dihapuskan;
 - e. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
 - f. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.
 2. Aset Tetap Lainnya berupa buku perpustakaan, hewan dan tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 3. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 yang merupakan Nilai Buku per 31 Desember 2014. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan.
 4. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap **Akhir Tahun** tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 5. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan **Metode Garis Lurus** yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Akhir Tahun selama Masa Manfaat.
 6. Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman kepada Peraturan Walikota Cilegon Nomor 36 Tahun 2015
-

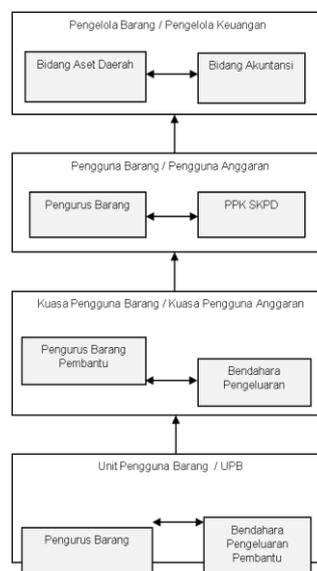
tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi dan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi dan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon

5. Rekonsiliasi Nilai Data BMD Kota Cilegon.

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai BMD telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan BMD secara tepat dan memadai, sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMD harus dilakukan setiap jenjang pelaporan secara periodik, dimulai dari rekonsiliasi internal pada tingkat Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (PB/KPB), rekonsiliasi eksternal PB/KPB dengan Pengelola Barang, dan rekonsiliasi internal bendahara umum daerah yang dilakukan secara berjenjang tersaji pada Gambar 1 sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Pelaporan dan Rekonsiliasi Data BMD



Sampai dengan Tahun Anggaran 2019, mekanisme rekonsiliasi sebagaimana tergambar di atas sepenuhnya telah dilakukan, dimana rekonsiliasi dilakukan melalui proses pemutakhiran (*updating*) data BMD antara pengelola dan pengguna barang yang dilakukan secara semesteran dan tahunan dan berdasarkan sinkronisasi dengan laporan bulanan Kartu Inventaris Barang (KIB) masing-masing Pengguna/Kuasa Pengguna Barang. Pada Tahun 2019 ini nilai yang disajikan telah dilakukan rekonsiliasi data transaksi dan mutasi tambah kurang dengan nilai BMD yang disajikan sebagai bahan dalam penyusunan Neraca (LKPD Audited Tahun 2018) oleh Bidang Akuntansi pada BPKAD Kota Cilegon.

Namun seiring dengan pengisian jabatan sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, pada tanggal 13 Januari 2017 diterbitkan Surat Perintah tentang Pelaksanaan tugas Pengelolaan BMD sesuai kewenangannya berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Pelaporan dan Rekonsiliasi Data BMD ditingkat Pengelola Barang dengan Pengelola Keuangan dilakukan oleh **Bidang Aset Daerah** dengan **Bidang Akuntansi** pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon.

Penyusunan Tahun 2019 masih sama seperti pada LBMD Tahun 2018 yang lalu, yaitu :

1. OPD dan UPB *wajib* menyerahkan dokumen berupa bukti memorial dan transaksi antara lain seperti LRA Belanja Modal, SPK/Kontrak, Surat Pesanan, Kwitansi, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Mutasi/Hibah Barang, SP2D UP/GU/LS sebagai dasar untuk pengakuan dan pencatatan BMD;
 2. BMD yang perolehannya berasal/bersumber baik dari APBD maupun Hibah Masuk dari pihak ketiga pada Tahun Anggaran 2019 dilakukan rekonsiliasi secara manual dengan format yang telah ditentukan dan diinput pada Sistem Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP BMD) Kota Cilegon;
 3. Mulai Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor : 032/523/PLK/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Tambahan Persyaratan Dalam Pengajuan SPP GU/LS Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Cilegon Tahun
-

Anggaran 2016, maka Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran OPD/UPB wajib menyerahkan salinan Buku Kontrak/SPK beserta kelengkapannya kepada Bidang Aset Daerah pada BPKAD Kota Cilegon Aset selaku Pejabat Penatausahaan BMD sebelum diajukan realisasi Belanja Modalnya. Maksud dan tujuan surat edaran tersebut adalah selain dalam rangka penyusunan laporan BMD berbasis akrual juga diharapkan adanya peningkatan kualitas inventarisasi data realisasi Belanja Modal OPD dan kemudahan/kelancaran dalam kegiatan rekonsiliasi data BMD Bulanan dengan bukti dokumen kepemilikan barang milik daerah secara lengkap dan memadai.

II. RINGKASAN BARANG MILIK DAERAH PER 31 DESEMBER 2019

1. Saldo Awal Per 02 Januari 2019

Nilai Barang Milik Daerah per 02 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 4.170.324.914.799,00 (Empat Triliun Seratus Tujuh Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Nol Nol Rupiah), yang terdiri atas Barang Milik Daerah Intrakomptabel (nilai Barang Milik Daerah yang disajikan dalam Neraca) sebesar sebesar Rp. 4.139.927.461.800,53 (Empat Triliun Seratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Koma Lima Tiga Rupiah) dan nilai Barang Milik Daerah Ekstrakomptabel sebesar Rp. 30.397.452.998,47 (Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Empat Tujuh Rupiah).

a. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Milik Daerah *Unaudited* Per 31 Desember 2019 sebesar Rp805.724.663.234,72 (*Delapan Ratus Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat koma Tujuh Dua Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah sebanyak 1101 bidang dengan nilai sebesar Rp683.799.065.334,81 (*Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Koma Delapan Puluh Satu Rupiah*), mutasi tambah pada tahun 2019 berupa pembelian/pengadaan Tanah sebanyak 2 bidang dan reklasifikasi masuk dengan nilai sebesar

Rp121.925.597.899,91 (Seratus Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Satu Rupiah) dan mutasi kurang pada Tahun 2019 sebesar Rp0,00 (Nol Koma Nol Nol Rupiah).

Buku Inventaris Tanah Per 31 Desember 2018 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
683.799.065.334,81	683.799.065.334,81	0,00

Mutasi Tambah Tanah Tahun 2019 tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)
Pembelian/Pengadaan Tanah TA.2019	120.302.999.399,91
Reklasifikasi Masuk	1.622.598.500,00
Total	121.925.597.899,91

Buku Inventaris Tanah Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
805.724.663.234,72	805.724.663.234,72	0,00

Penambahan Aset Tetap Tanah senilai Rp121.925.597.899,91 terjadi karena adanya transaksi pembelian/pengadaan dan reklasifikasi masuk yang terdapat pada Pengguna Barang sebagai berikut:

- 1) Transaksi pembelian dari belanja modal senilai Rp115.262.750.521,91 terdiri atas:
 - i. Transaksi Pengadaan tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon dengan nilai Rp113.231.656.012,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pengadaan tanah untuk Kotamadya peruntukan Jalan Lingkar Utara yang berlokasi di Jalan Lingkar Utara seluas 121.193,20 m² dengan harga Rp102.312.696.550,00, dengan biaya umum sebesar Rp390.713.500,00. Sehingga total harga sebesar Rp102.703.410.050,00;

-
- b. Pengadaan tanah untuk jalan khusus/komplek peruntukan Pekerjaan Pembayaran Kekurangan Pengadaan Tanah Jalan Akses Untuk Tandon Cibuntu berupa Lanjutan Sisa pembayaran tanah a.n Subhiyah Tahun Anggaran 2018 yang dibebankan APBD 2019, dengan harga Rp26.106.084,00;
 - c. Pengadaan tanah untuk jalan khusus/komplek peruntukan Jalan Akses Untuk Tandon Cibeber/Bulakan Kelurahan Bulakan seluas 9.296,00 m² dengan harga Rp5.289.329.000,00, dengan biaya umum sebesar Rp172.562.000,00. Sehingga total harga sebesar Rp5.461.891.000,00;
 - ii. Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Biaya Sertifikasi Tanah Kec. Purwakarta yang beralamat di Kp. Kubangwelingi Rt. 06/03 Kel. Purwakarta Kec. Purwakarta dengan peruntukan Tanah untuk Taman Kota Kec.Purwakarta sebesar Rp5.747.520,00.
 - iii. Pengadaan Tanah Tegalan Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan peruntukan sebagai Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) yang beralamat di Jl. TMMD, Link. Jeruk Tipis Kel. Bulakan Kec. Cibeber Kota Cilegon seluas 21.977 m² dengan harga Rp6.623.252.867,91 dengan biaya umum sebesar Rp195.826.200,00 dan kapitalisasi biaya umum dari kode rekening 5.2.2 sebesar Rp14.436.800,00. Sehingga total harga sebesar Rp6.833.515.867,91;
 - iv. Pematangan Lahan Pasar Kecamatan Cibeber pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon seharga Rp229.655.000,00 dengan biaya umum sebesar Rp2.425.000,00. Sehingga total harga sebesar Rp232.080.000,00;
- 2) Reklasifikasi masuk sebesar Rp1.622.598.500,00 terdiri dari:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang berupa pengadaan tanah Tahun 2017 untuk Jalan Lingkar Utara berupa (Biaya Umum Belanja Jasa/Upah Tenaga Kerja,dan Bantuan Transportasi,Belanja)Senilai Rp1.270.511.000,00;
 - b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa reklasifikasi masuk ke KIB A dari KIB F (KDP Master Plant Belanja Pengadaan Tanah Tegalan TA. 2017 senilai Rp352.087.500,00;
- 3) Hibah masuk sebesar Rp5.040.248.878,00 yang merupakan
-

- Tanah untuk Jalan Khusus/Komplek dari BPRS yang selanjutnya dicatat dalam daftar barang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
2. Pengurangan Aset Tetap Tanah senilai Rp0,00 (Nol Koma Nol Nol Rupiah)
 3. Mutasi antar OPD dibawah tahun 2019 senilai Rp23.453.661.000,00 terdiri atas:
 - 1) Mutasi Tambah pada UPTD ke Puskesmas Kecamatan Cibeber Sebesar Rp20.001.000,00 dari dari ex. UPTD P2KP dimana UPTD tersebut mengalami peleburan di Tahun Anggaran 2019;
 - 2) Mutasi Tambah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp118.500.000 berupa tanah tegalan dari Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 3) Mutasi pada BPKAD (Pengelola) berupa Tanah Terminal Terpadu Merak dari Dinas Perhubungan ke senilai Rp23.315.160.000 Berdasarkan Surat Walikota Cilegon Perihal: Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, Nomor: 032/1536/Aset- BPKAD/2019, Tanggal 17 Juli 2019;

Mutasi tersebut diatas tidak berpengaruh terhadap Buku Inventaris karena mutasi terjadi masih dalam lingkup/antar OPD pada Kota Cilegon.

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
805.724.663.234,72	805.724.663.234,72	0,00

Dari jumlah/nilai tanah diatas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 m² bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 m² bidang nilai sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (Bid./ m2)	NILAI (Rp)
Baik (B)	1.103 Bidang	805.724.663.234,72
Kurang Baik (KB)	0	0
Rusak Berat (RB)	0	0

Tidak terdapat permasalahan pada BMD berupa aset tetap tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Pemerintah Kota Cilegon yaitu:

PERMASALAHAN TANAH	KUANTITAS	NILAI (Rp)
Sengketa	0	0
Tidak Terdapat bukti kepemilikan	0	0
Dikuasai pihak lain	0	0

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Milik Daerah Audited per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp695.366.045.559,50 (Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Lima Nol Rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 265.706 unit dengan nilai sebesar Rp621.853.905.202,89 (Enam Ratus Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Dua Ratus Dua Koma Delapan Sembilan Rupiah), mutasi tambah jumlah barang 18.972 unit/buah dengan nilai sebesar Rp95.257.573.501,83 (Sembilan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Satu Satu Koma Delapan Rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 4.222 unit/buah dengan nilai sebesar Rp21.745.433.145,22 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Lima Koma Dua Dua Rupiah).

Buku Inventaris Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2019 terdiri dari :

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
621.853.905.202,89	592.607.978.449,11	29.245.926.753,78

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin Tahun 2019 tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)	JUMLAH
------------------------	---------------------	---------------------	--------

Penambahan Tahun Berjalan	92.321.307.237,14	3.287.218.264,69	95.608.525.501,83
---------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Mutasi tambah kurang atas nilai penambahan Peralatan dan Mesin senilai Rp96.608.525.501,83 sebagai berikut:

No.	URAIAN	MUTASI TAMBAH TAHUN BERJALAN	MUTASI KURANG TAHUN BERJALAN
1	BELANJA MODAL	89.775.337.181,00	
2	REKLASIFIKASI JENIS BARANG	4.755.175.833,50	607.432.881,00
3	MUTASI ANTAR OPD	32.014.726.248,00	32.014.726.248,00
4	HIBAH	1.621.031.225,00	-
5	REKLASIFIKASI KODE BELANJA	61.330.050,00	115.324.000,00
6	REKLASIFIKASI DIBAWAH T.A. 2019	118.408.093,33	-
	JUMLAH	128.346.008.630,83	32.737.483.129,00

Peralatan dan Mesin senilai Rp96.608.525.501,83 terdapat pada:

Kode Barang	Nama barang	Qty	BI
1.3.2.01	ALAT BESAR	34,00	2.738.991.557,00
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	127,00	16.799.378.505,00
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	147,00	175.301.696,00
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	48,00	115.851.042,00
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	14.829,00	29.436.958.304,57
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	458,00	1.688.121.577,20
1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	681,00	19.383.374.531,76
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	116,00	5.980.059.092,00
1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	29,00	523.041.438,00
1.3.2.10	KOMPUTER	2.192,00	16.673.916.834,30
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	2,00	9.019.262,00
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-

1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	86,00	68.415.200,00
1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7,00	58.779.700,00
1.3.2.18	RAMBU – RAMBU	235,00	727.100.218,00
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	49,00	1.230.216.544,00
TOTAL		19.040,00	95.608.525.501,83

Beberapa catatan yang dapat dijelaskan dari mutasi tersebut diatas, diantaranya adalah:

- Hibah masuk senilai Rp1.621.031.225,00 terdiri atas :

OPD/UPB	HIBAH MASUK (Rp.)	KETERANGAN
TKN Perintis	2.600.000,00	Hibah Masuk
SDN Lebak Gede	43.869.000,00	Hibah Masuk dari Kemendikbud
SDN Cikerai I	43.869.000,00	Hibah Masuk dari Kemendikbud
SDN Kerotek	43.869.000,00	Hibah Masuk dari Kemendikbud
SDN Banjarnegara	43.869.000,00	Hibah Masuk dari Kemendikbud
SDN Kepuh	43.869.000,00	Hibah Masuk dari Kemendikbud
SDN Sukmajaya II	43.869.000,00	Hibah Masuk dari Kemendikbud
SDN Belacu	43.869.000,00	Hibah Masuk dari Kemendikbud
SDN Pekalongan I	43.869.000,00	Hibah Masuk dari Kemendikbud
SDN Karang Setra	43.869.000,00	Hibah Masuk dari Kemendikbud
SMP Negeri 6 Cilegon	240.006.988,00	Hibah Masuk dari Kemendikbud
SMP Negeri 9 Cilegon	240.006.988,00	Hibah Masuk dari Kemendikbud
DINAS KESEHATAN	490.400.000,00	Hibah Dari Bank BNI Berupa Mobil Ambulance MerkHyundai No.Pol. A 9938 RZ
UPTD Puskesmas DTP Kecamatan Cibeber	7.928.250,00	Hibah berupa alat kesehatan (KIT Kebugaran) dari Kementerian Kesehatan RI
UPTD Puskesmas Kecamatan Cilegon	7.928.250,00	Hibah berupa alat kesehatan (KIT Kebugaran) dari Kementerian Kesehatan RI
UPTD Puskesmas DTP Kecamatan Pulomerak	15.144.149,00	Hibah berupa alat kesehatan (KIT Kebugaran) dari Kementerian Kesehatan RI
UPTD Puskesmas DTP Kecamatan Ciwandan	7.928.250,00	Hibah berupa alat kesehatan (KIT Kebugaran) dari Kementerian Kesehatan RI
UPTD Puskesmas Kecamatan Jombang	7.928.250,00	Hibah berupa alat kesehatan (KIT Kebugaran) dari Kementerian Kesehatan RI

UPTD Puskesmas Kecamatan Grogol	7.928.250,00	Hibah berupa alat kesehatan (KIT Kebugaran) dari Kementerian Kesehatan RI
UPTD Puskesmas Kecamatan Purwakarta	7.928.250,00	Hibah berupa alat kesehatan (KIT Kebugaran) dari Kementerian Kesehatan RI
UPTD Puskesmas Kecamatan Citangkil	7.928.250,00	Hibah berupa alat kesehatan (KIT Kebugaran) dari Kementerian Kesehatan RI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	53.702.150,00	Hibah dari PT CSSR berupa perlengkapan/peralatan taman (bicycle outdoor fitness, hourserider machine, rowing machine, perosotan, jungkat-jungkit, mangkok putar, lampu sorot LED, lampu taman dan bollard)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	128.852.200,00	1. Hibah dari CSR BJB berupa PC unit senilai Rp. 42.500.000 (5 unit x Rp. 8500.000) 2. Hibah dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) senilai Rp. 86.352.200 berupa server, scanner, PC unit, switcher.
JUMLAH	1.621.031.225,00	

- Reklasifikasi Kode Belanja Rp61.330.050,00:

OPD/UPB	REKLASIFIKASI KODE BELANJA	KETERANGAN
SMP Negeri 6 Cilegon	500.000,00	Reklasifikasi kode belanja
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15.390.050,00	- Rambu-rambu larangan Rp. 2.225.350 - Papan Pengumuman Rp. 105.600 - Keranjang bora/ring Rp. 1.141.800
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.000.000,00	Berupa Gerobak dorong, timbangan barang, peralatan pencampur kompos & bio stabilizer, papan visual/papan nama, kursi lipat, meja kerja kayu.
Kelurahan Gerem	800.000,00	Reklasifikasi kode belanja
KECAMATAN JOMBANG	43.040.000,00	Reklasifikasi kode belanja
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	600.000,00	Berupa Biaya umum pengadaan yaitu Honorarium panitia/pejabat Pengadaan Meja Kerja Pejabat dan Kursi Tamu di ruangan Pejabat dari kode rekening 5.2.1
JUMLAH	61.330.050,00	

Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin Tahun 2019 tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	21.278.230.719,56	467.202.425,66

Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin Tahun 2019 tersebut meliputi:

URAIAN	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL EL (Rp)	BI
Lelang	19.551.999.780,82	381.114.112,33	19.933.113.893,15
Pemusnahan	1.287.457.488,74	46.661.620,00	1.334.119.108,74
Ke Aset Lain-lain	172.600.000,00	0	172.600.000,00
Hibah	210.367.450,00	560.000,00	210.927.450,00
Reklasifikasi	55.806.000,00	38.866.693,33	94.672.693,33
Total	21.278.230.719,56	467.202.425,66	21.745.433.145,22

Buku Inventaris Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2019 terdiri dari :

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
695.716.997.559,50	663.651.054.966,69	32.065.942.592,81

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Total Akumulasi Penyusutan pada Golongan Barang Peralatan dan Mesin (KIB B) pada LBMD Kota Cilegon *Audited* Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp453.326.812.652,77 (*Empat Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Koma Tujuh Tujuh Rupiah*).

Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Pada Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

KODE	BARANG	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN
1.3.2.01	ALAT BESAR	39.298.355.787,84	20.211.594.120,72
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	168.508.845.614,66	117.753.133.280,96
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	7.079.983.661,21	4.737.753.802,59
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	7.764.217.342,99	6.502.759.461,16
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	192.613.832.091,20	119.271.481.634,63
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	19.089.237.821,93	14.948.223.726,86
1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	120.352.812.088,16	76.812.362.806,63
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	42.927.343.684,27	20.022.168.980,48
1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	1.599.256.981,59	1.096.363.347,07
1.3.2.10	KOMPUTER	86.381.112.826,82	66.528.778.724,43
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	9.176.562,00	901.926,20
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	183.799.050,00	40.995.957,14
1.3.2.16	ALAT PERAGA	285.010.000,00	57.002.000,00
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	96.672.600,00	13.504.520,00
1.3.2.18	RAMBU - RAMBU	7.541.341.903,00	4.460.895.361,33
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	1.985.999.543,83	868.893.002,57
	Jumlah	695.716.997.559,50	453.326.812.652,77

Adapun Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut :

Alat Besar

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp39.298.355.787,84 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Delapan Empat Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 493 unit dengan nilai sebesar Rp39.437.897.560,84 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Koma Delapan Empat Rupiah*) mutasi tambah jumlah barang sebanyak 34 unit dengan nilai sebesar Rp2.738.991.557,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang sebanyak 21 unit dengan nilai sebesar Rp2.878.533.330,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Buku Inventaris Alat-alat Besar Per 31 Desember 2019 terdiri dari :

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
39.437.897.560,84	39.409.281.376,84	28.616.184,00

Mutasi Tambah Tahun 2019 Alat-alat Besar tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	2.738.491.557,00	500.000,00

Mutasi Kurang Tahun 2019 Alat-alat Besar tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	2.878.533.330,00	-

Mutasi Kurang tersebut diantaranya adalah:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Lelang	2.672.033.330,00	-
Pemusnahan	-	-
Ke Aset Lain-lain	-	-
Hibah Keluar	206.500.000,00	-
Reklasifikasi	-	-
Total	2.878.533.330,00	-

Mutasi kurang dari lelang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp18.500.000,00 berupa 1 unit Mesin Aerator Rp34.500.000,00 dan 1 unit Water Treatment Rp2.500.000,00
2. Dinas Lingkungan Hidup Rp2.610.433.330,00 berupa 14 unit Dump Truck
3. Kecamatan Jombang sebesar Rp1.500.000,00 berupa 1 unit Pompa Air (Jet Pump)
4. Sekretariat DPRD sebesar Rp23.100.000,00 berupa 3 unit Pompa Air (Jet Pump)

Adapun untuk mutasi hibah keluar berupa Stationary Generating Set dari Dinas Perhubungan ke Kementerian Perhubungan (Dirjen Perhubungan Darat) sebesar Rp206.500.000,00

Buku Inventaris Alat-alat Besar Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
39.298.355.787,84	39.269.239.603,84	29.116.184,00

Dari jumlah Alat Besar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Alat-alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	506
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Bidang barang Alat-alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit / Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Alat-Alat Angkutan

Saldo Alat-alat Angkutan pada Laporan Barang Milik Daerah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp168.508.845.614,66 (*Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Belas Koma Enam Enam Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 2.333 unit dengan nilai sebesar Rp153.261.748.752,32 (*Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Dua Rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 127 unit dengan nilai sebesar Rp16.799.378.505,00 (*Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 56 unit dengan nilai sebesar Rp1.552.281.642,66 (*Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Koma Enam Enam Rupiah*).

Buku Inventaris Alat-alat Angkutan Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
153.261.748.752,32	153.255.513.752,32	6.235.000,00

Mutasi Tambah Tahun 2019 Alat-alat Angkutan tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi tambah	16.799.378.505,00	0

Mutasi Kurang Tahun 2019 Alat-alat Angkutan tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi kurang	1.552.281.642,66	0

Penjelasan mutasi kurang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Lelang	1.311.261.996,00	-
Pemusnahan	68.419.646,66	-
Ke Aset Lain-lain	172.600.000,00	-
Hibah Keluar	-	-
Reklasifikasi	-	-
Total	1.552.281.642,66	-

Rincian mutasi kurang berasal dari transaksi lelang adalah sebagai berikut:

No	Nama OPD	Volume (unit)	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2	179.000.000	179.000.000	0
2	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	4	220.500.000	220.500.000	0
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	1	70.000.000	70.000.000	0
4	Dinas Lingkungan Hidup	18	425.589.340	425.589.340	0
5	Dinas Perhubungan	5	227.668.500	227.668.500	0
6	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil	9	22.500.000	22.500.000	0
7	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1	12.305.000	12.305.000	0
8	Kecamatan Cibeber	2	26.500.000	26.500.000	0
9	Kecamatan Purwakarta	1	8.000.000	8.000.000	0
10	Kecamatan Jombang	3	13.066.956	13.066.956	0
11	Kecamatan Pulomerak	1	16.132.200	16.132.200	0
12	Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	90.000.000	90.000.000	0
	Jumlah	48	1.311.261.996	1.311.261.996	0

Rincian mutasi kurang berasal dari transaksi Pemusnahan adalah sebagai berikut:

No	Nama OPD	Volumen (unit)	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Bu
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	13.499.646,66	9.642.604,75	3.857
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5	54.920.000,00	54.920.000,00	
	Jumlah	6	68.419.646,66	64.562.604,75	3.857

Rincian mutasi kurang berasal dari transaksi Pemusnahan adalah sebagai berikut:

No	Nama OPD	Volumen (unit)	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	1	75.000.000,00	75.000.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5	97.600.000,00	97.600.000,00
	Jumlah	6	172.600.000,00	172.600.000,00

Buku Inventaris Alat-alat Angkutan Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
168.508.845.614,66	168.502.610.614,66	6.235.000,00

Dari jumlah Alat-alat Angkutan diatas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Alat-alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	2.404
Kurang Baik (KB)	0
RusakBerat (RB)	0

Bidang barang Alat-alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit / Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur

Saldo Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.079.983.661,21 (*Tujuh Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Koma Dua Satu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang 1.819 unit dengan nilai sebesar Rp. 7.050.835.805,21 (*Tujuh Miliar Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Koma Dua Satu Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 147 unit dengan nilai sebesar Rp175.301.696,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 65 unit dengan nilai sebesar Rp146.153.840,00 (*Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Buku Inventaris Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
7.050.853.805,21	6.778.181.649,21	272.654.156,00

Mutasi Tambah Tahun 2019 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	148.147.723,00	27.153.973,00

Mutasi Kurang Tahun 2019 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	133.926.840,00	12.227.000,00

Mutasi Kurang tersebut diantaranya adalah:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Lelang	51.250.000,00	11.383.000,00
Pemusnahan	82.676.840,00	844.000,00
Ke Aset Lain-lain	-	-
Hibah Keluar	-	-
Reklasifikasi	-	-
Total	133.926.840,00	12.227.000,00

Rincian mutasi kurang berasal dari transaksi lelang sebanyak 48 unit alat bengkel dan alat ukur pada RSUD Kota Cilegon dengan harga perolehan Rp62.633.000,00 sedangkan untuk mutasi kurang berasal dari transaksi pemusnahan terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sejumlah 17 unit barang dengan nilai sebesar Rp83.520.840,00 berupa Global Positioning System, Timbangan Gantung dan PH Meter.

Buku Inventaris Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur Per 31 Desember 2019 menjadi :

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
7.079.983.661,21	6.792.402.532,21	287.581.129,00

Dari Jumlah Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	1.901
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Bidang barang Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Alat-alat Pertanian/Peternakan

Saldo Alat-alat Pertanian/Peternakan Laporan Barang Milik Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.764.217.342,99 (*Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Koma Sembilan Sembilan Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 1.121 unit dengan nilai sebesar Rp8.130.947.780,99 (*Delapan Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Koma Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 48 unit dengan nilai sebesar Rp115.851.042,00 (*Seratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 48 unit dengan nilai sebesar Rp482.581.480,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Buku Inventaris Alat-alat Pertanian/Peternakan Per 31 Desember 2019 terdiri dari :

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
8.130.947.780,99	8.056.278.225,99	74.669.555,00

Mutasi Tambah Tahun 2019 Alat-alat Pertanian/Peternakan tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	115.851.042,00	-

Mutasi Kurang Tahun 2019 Alat-alat Pertanian/Peternakan tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	482.281.480,00	300.000,00

Mutasi Kurang tersebut diantaranya adalah:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Lelang	3.069.000,00	300.000,00
Pemusnahan	479.212.480,00	-
Ke Aset Lain-lain	-	-
Hibah Keluar	-	-
Reklasifikasi	-	-
Total	482.281.480,00	300.000,00

Rincian mutasi kurang berasal dari transaksi lelang berasal dari RSUD Kota Cilegon dengan harga perolehan sebesar Rp3.069.000,00 sedangkan untuk mutasi kurang berasal dari transaksi pemusnahan terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp479.212.480,00 berupa alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya sebanyak 8 unit; Alat Peternakan Lainnya sebanyak 36 unit dan PenyemprotMesin (Power Sprayer) sebanyak 1 unit.

Buku Inventaris Alat-alat Pertanian/Peternakan Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
7.764.217.342,99	7.689.847.787,99	74.369.555,00

Dari Jumlah Alat-alat Pertanian/Peternakan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindah tangan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Alat-alat Pertanian/Peternakan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	1.122
Kurang Baik (KB)	0
RusakBerat (RB)	0

Bidang barang Alat-alatPertanian/Peternakan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Alat-Alat Kantor dan RumahTangga

Saldo Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 sebesar Rp192.613.832.091,20 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Satu Koma Dua Nol Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 210.727 unit dengan nilai sebesar Rp166.986.654.655,22 (*Seratus Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Koma Dua Puluh Dua Rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 14.829unit dengan nilai sebesar Rp29.436.958.304,57 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Koma Lima Tujuh Rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 2.298 unit dengan nilai sebesar Rp3.809.780.868,59 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Koma Lima Sembilan Rupiah*).

Buku Inventaris Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
166.986.654.655,22	141.065.076.150,65	25.921.578.504,57

Mutasi Tambah Tahun 2019 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	26.311.410.789,57	3.125.547.515,00

Mutasi Kurang Tahun 2019 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	3.504.111.109,93	305.669.758,66

Mutasi Kurang tersebut diantaranya adalah:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Lelang	3.130.833.987,85	244.860.805,33
Pemusnahan	314.003.672,08	45.817.620,00
Ke Aset Lain-lain	-	-
Hibah Keluar	3.867.450,00	560.000,00
Reklasifikasi	55.406.000,00	14.431.333,33
Total	3.504.111.109,93	305.669.758,66

Rincian mutasi kurang berasal dari transaksi lelang adalah sebagai berikut:

No	Nama OPD	Volume (Unit)	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Dinas Pendidikan	7	2.616.666,68	2.350.000,00	266.666,68
2	Dinas Kesehatan	5	1.750.000,00	900.000,00	850.000,00
3	RumahSakitUmum Daerah	1.609	2.506.931.039,91	2.206.457.262,26	300.473.777,65
4	DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman	6	4.110.900,00	3.370.900,00	740.000,00
5	DinasSatuanPolisiPamongPraja	31	86.535.330,00	84.252.000,00	2.283.330,00
6	DinasLingkunganHidup	66	191.146.380,00	187.296.380,00	3.850.000,00
7	DinasPerhubungan	33	42.664.000,00	31.978.360,00	10.685.640,00
8	DinasKoperasi, Usaha Mikro dan Kecil	9	5.384.000,00	3.000.000,00	2.384.000,00
9	DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu	6	28.373.950,00	28.373.950,00	0
10	Sekretariat DPRD	198	412.561.400,00	398.631.000,00	13.930.400,00
11	KecamatanCibeber	22	44.320.350,00	41.711.250,00	2.609.100,00
12	KecamatanCiwandan	6	11.827.900,00	11.597.900,00	230.000,00
13	KecamatanCitangkil	21	15.495.776,59	9.975.816,59	5.519.960,00
14	KecamatanJombang	5	5.547.500,00	4.997.500,00	550.000,00
15	KecamatanPulomerak	17	16.429.600,00	11.671.600,00	4.758.000,00
	Jumlah	2.041	3.375.694.793,18	3.026.563.918,85	349.130.874,33

Juga terdapat mutasi kurang berasal dari transaksi pemusnahan sebesar Rp359.821.292,08 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Sedangkan untuk mutasi kurang berasal dari transaksi hibah keluar sebesar Rp4.427.450,00, kemudian terdapat pula mutasi kurang berasal dari transaksi reklasifikasi pada OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp50.846.000,00, SDN Cikerai I sebesar Rp4.560.000,00 dan UPTD Puskesmas Kecamatan Jombang sebesar Rp14.431.333,33.

Buku Inventaris Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
192.613.832.091,20	163.872.375.830,29	28.741.456.260,91

Dari Jumlah Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	223.258
Kurang Baik (KB)	0
RusakBerat (RB)	0

Bidang barang Alat-alat Kantor dan RumahTangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit senilai Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Alat-alat Studio dan Komunikasi dan Pemancar

Saldo Alat-alat Studio dan Komunikasi pada Laporan Barang Milik Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp19.089.237.821,93 (*Sembilan Belas Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Koma Sembilan Puluh Tiga Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang

4.134 unit sebesar Rp17.679.953.044,73 (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Empat Koma Tujuh Tiga Rupiah) mutasi tambah jumlah barang 458 unit dengan nilai sebesar Rp1.688.121.577,20 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Dua Nol Rupiah). dan mutasi kurang jumlah barang 92 dengan nilai sebesar Rp278.836.800,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Buku Inventaris Alat-alat Studio dan Komunikasi Tangga Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
17.679.953.044,73	17.461.679.756,63	218.273.288,10

Mutasi Tambah Tahun 2019 Alat-alat Studio dan Komunikasi tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	1.673.804.577,20	14.317.000,00

Mutasi Kurang Tahun 2019 Alat-alat Studio dan Komunikasi tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL L (Rp)
Mutasi Kurang	273.318.800,00	5.518.000,00

Mutasi Kurang tersebut diantaranya adalah:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL EL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL EL (Rp)
Lelang	241.073.800,00	5.518.000,00
Pemusnahan	32.245.000,00	-
Ke Aset Lain-lain	-	-
Hibah Keluar	-	-
Reklasifikasi	-	-
Total	273.318.800,00	5.518.000,00

Rincian atas mutasi kurang dari transaksi lelang sebagai berikut:

No	Nama OPD	Volume (Unit)	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1	150.000,00	-	150.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	40	107.583.500,00	95.241.900,00	12.341.600,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1	9.660.000,00	9.660.000,00	-
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	22	62.100.000,00	62.100.000,00	-
5	Dinas Lingkungan Hidup	2	9.293.000,00	9.293.000,00	-
6	Dinas Perhubungan	2	2.476.350,00	2.476.350,00	-
7	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil	3	1.000.000,00	-	1.000.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1.500.000,00	1.500.000,00	-
9	Sekretariat DPRD	11	12.217.000,00	10.747.000,00	1.470.000,00
10	Kecamatan Cibeber	1	27.567.000,00	27.567.000,00	-
11	Kecamatan Ciwandan	1	300.000,00	-	300.000,00
12	Kecamatan Pulomerak	1	12.744.950,00	12.744.950,00	-
	Jumlah	86	246.591.800,00	231.330.200,00	15.261.600,00

Rincian atas mutasi kurang dari transaksi lelang terdapat pada OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp32.245.000,00 sebanyak 6 unit.

Buku Inventaris Alat-alat Studio dan Komunikasi Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
19.089.237.821,93	18.862.165.533,83	227.072.288,10

Dari jumlah Alat-alat Studio dan Komunikasi diatas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Alat-alat Studio dan Komunikasi diatas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	4.500
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Bidang barang Alat-alat Studio dan Komunikasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/ Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Alat Kedokteran dan Kesehatan

Saldo Alat-alat Kedokteran pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 sebesar Rp120.352.812.088,16 (*Seratus Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Delapan Puluh Delapan Koma Satu Enam Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 11.872 unit dengan nilai sebesar Rp110.969.964.857,72 (*Seratus Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Dua Rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 681 unit dengan nilai sebesar Rp19.383.374.531,76 (*Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Koma Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 1.177 unit dengan nilai sebesar Rp10.000.527.301,32 (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Satu Koma Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Buku Inventaris Alat-alat Kedokteran per Tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
110.969.964.857,72	109.986.527.421,57	983.437.436,15

Mutasi Tambah Tahun 2019 Alat-alat Kedokteran tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	19.315.653.359,07	67.721.172,69

Mutasi Kurang Tahun 2019 Alat-alat Kedokteran tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	9.886.267.724,32	114.259.577,00

Mutasi Kurang tersebut diantaranya adalah:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Lelang	9.766.764.564,32	110.626.577,00
Pemusnahan	119.103.160,00	0
Ke Aset Lain-lain	0	0
Hibah Keluar	0	0
Reklasifikasi	400.000,00	3.633.000,00
Total	9.886.267.724,32	114.259.577,00

Rincian atas mutasi kurang dari transaksi lelang terdapat pada OPD Dinas Kesehatan sebanyak 42 unit sebesar Rp18.882.625,00 dan RSUD Kota Cilegon sebanyak 1.124 unit sebesar Rp9.858.508.516,32, sedangkan mutasi kurang dari transaksi pemusnahan terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebanyak 8 unit dengan nilai Rp119.103.160,00 dan mutasi kurang dari transaksi reklasifikasi terdapat pada UPTD Puskesmas Kecamatan Jombang dengan nilai sebesar Rp400.000,00 sebanyak 1 unit dan pada RSUD Kota Cilegon dengan nilai 3.633.000,00 sebanyak 2 unit

Buku Inventaris Alat-alat Kedokteran Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
120.352.812.088,16	119.415.913.056,32	936.899.031,84

Dari Jumlah Alat-alat Kedokteran di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari Jumlah Alat-alat Kedokteran di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	11.376
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Bidang Barang Alat-alat Kedokteran yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/ Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Alat Laboratorium

Saldo Alat Laboratorium pada laporan barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 sebesar Rp42.927.343.684,27 (*Empat Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Koma Dua Tujuh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang 17.418 unit dengan nilai sebesar Rp37.621.238.242,27 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Koma Dua Tujuh Rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 116 unit dengan nilai sebesar Rp5.980.059.092,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 81 Unit dengan nilai sebesar Rp673.953.650,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Buku Inventaris Alat Laboratorium Per 31 Desember 2019 terdiridari :

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
37.621.238.242,27	36.422.733.282,12	1.198.504.960,15

Mutasi Tambah Tahun 2019 Alat Laboratorium tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL L (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi tambah	5.974.914.192,00	5.144.900,00

Mutasi Kurang Tahun 2019 Alat Laboratorium tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	668.843.920,00	5.109.730,00

Mutasi Kurang tersebut diantaranya adalah:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Lelang	593.330.420,00	5.109.730,00
Pemusnahan	75.513.500,00	-
Ke Aset Lain-lain	-	-
Hibah Keluar	-	-
Reklasifikasi	-	-
Total	668.843.920,00	5.109.730,00

Rincian atas Mutasi Kurang untuk transaksi lelang sebagai berikut:

No	Nama OPD	Volume (Unit)	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0
2	Dinas Kesehatan	1	2.500.000,00	2.500.000,00	0
3	Rumah Sakit Umum Daerah	59	185.540.150,00	167.435.420,00	18.104.730,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	3	2.250.000,00	0	2.250.000,00
5	Dinas Perhubungan	3	402.550.000,00	402.550.000,00	0
6	Kecamatan Jombang	2	4.600.000,00	1.533.333,33	3.066.666,67
	Jumlah	69	598.440.150,00	575.018.753,33	23.421.396,67

Rincian atas mutasi kurang transaksi pemusnahan terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebanyak 12 unit dengan nilai sebesar Rp75.513.500,00

Buku Inventaris Alat Laboratorium Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
42.927.343.684,27	41.728.803.554,12	1.198.540.130,15

Dari Jumlah Alat-alat Laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari Jumlah Alat-alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	17.453
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Bidang barang Alat-alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Alat-alat Persenjataan

Saldo Alat-alat Persenjataan pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.599.256.981,59 (*Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Koma Lima Sembilan Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang 507 unit dengan nilai sebesar Rp1.081.315.543,59 (*Satu Miliar Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Koma Lima Puluh Sembilan Rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 29 unit dengan nilai sebesar Rp523.041.438,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 1 unit dengan nilai sebesar Rp5.100.000,00 (*Lima Juta Seratus Ribu Rupiah*).

Buku Inventaris Alat-alat Persenjataan Per 31 Desember 2019 terdiri dari :

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
1.081.315.542,59	1.047.439.389,38	33.876.154,21

Mutasi Tambah Tahun 2019 Alat-alat Persenjataan tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi tambah	522.809.118,00	232.320,00

Mutasi Kurang Tahun 2019 Alat-alat Peralatan tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	5.100.000,00	-

Mutasi Kurang tersebut diantaranya adalah:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Lelang	-	-
Pemusnahan	5.100.000,00	-
Ke Aset Lain-lain	-	-
Hibah Keluar	-	-
Reklasifikasi	-	-
Total	5.100.000,00	-

Rincian atas mutasi kurang transaksi pemusnahan terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar 5.100.000,00 sebanyak 1 unit

Buku Inventaris Alat-alat Peralatan Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
1.599.256.981,59	1.565.148.507,38	34.108.474,21

Dari Jumlah Alat-alat Peralatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari Jumlah Alat-alat Peralatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	535
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Bidang barang Alat-alat Persenjataan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Komputer

Saldo Komputer pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 sebesar Rp.86.381.112.826,82 (*Delapan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Koma Delapan Dua Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang 11.681 unit dengan nilai sebesar Rp71.624.880.225,17 (*Tujuh Puluh Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Koma SatuTujuh Rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 2.192 unit dengan nilai sebesar Rp29.436.958.304,57 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Koma LimaTujuhRupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 384 unit dengan nilai sebesar Rp1.917.684.232,65 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Koma Enam Puluh Lima Rupiah*).

Buku Inventaris Komputer Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
71.624.880.225,17	71.428.040.403,13	196.839.822,04

Mutasi Tambah Tahun 2019 Komputer tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	16.668.335.650,30	5.581.184,00

Mutasi Kurang Tahun 2019 Komputer tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	1.893.565.872,65	24.118.360,00

Mutasi Kurang tersebut diantaranya adalah:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Lelang	1.782.382.682,65	3.316.000,00
Pemusnahan	111.183.190,00	-
Ke Aset Lain-lain	-	-
Hibah Keluar	-	-
Reklasifikasi	-	20.802.360,00
Total	1.893.565.872,65	24.118.360,00

Rincian atas mutasi kurang transaksi lelang sebagai berikut:

No	Nama OPD	Volume (Unit)	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1	519.000,00	259.500,00	259.500,00
2	Dinas Kesehatan	5	19.538.700,00	19.538.700,00	-
3	RumahSakitUmum Daerah	142	615.931.127,30	595.473.327,30	20.457.800,00
4	DinasPekerjaanUmum dan Tata Ruang	9	142.844.750,00	142.844.750,00	-
5	DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman	3	55.839.600,00	55.839.600,00	-
6	DinasSatuanPolisiPamongPr aja	14	73.864.800,00	73.864.800,00	-
7	DinasPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KeluargaBerencana	1	9.093.750,00	9.093.750,00	-
8	DinasLingkunganHidup	33	216.001.541,26	213.787.791,26	2.213.750,00
9	DinasPerhubungan	5	26.762.016,00	26.762.016,00	-
10	DinasKoperasi, Usaha Mikro dan Kecil	9	51.505.000,00	49.610.000,00	1.895.000,00

11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	95.170.000,00	95.170.000,00	-
12	Sekretariat DPRD	69	200.040.000,00	197.964.000,00	2.076.000,00
13	Kecamatan Cibeber	16	96.474.000,00	96.474.000,00	-
14	Kecamatan Ciwandan	3	10.427.500,00	10.427.500,00	-
15	Kecamatan Citangkil	7	16.500.000,00	16.500.000,00	-
16	Kecamatan Jombang	10	35.769.050,00	35.769.050,00	-
17	Kecamatan Pulomerak	6	43.184.100,00	43.184.100,00	-
18	Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	9	76.233.748,09	76.233.748,09	-
Jumlah			352,00	1.785.698.682,65	1.758.796.632,65

Sedangkan rincian atas mutasi kurang transaksi pemusnahan terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebanyak 24 unit dengan nilai Rp111.183.190,00

Buku Inventaris Alat-alat Komputer Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
86.098.160.826,82	86.202.810.180,78	178.302.646,04

Dari Jumlah Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari Jumlah Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	13.489
Kurang Baik (KB)	-
Rusak Berat (RB)	-

Bidang barang Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Alat Eksplorasi

Saldo Alat Eksplorasi pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 9.176.562,00 (*Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang 2 unit dengan nilai sebesar Rp157.300,00 (*Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 2 unit dengan nilai sebesar Rp9.019.262,00 (*Sembilan Juta Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Buku Inventaris Alat Eksplorasi Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
157.300,00	-	157.300,00

Mutasi Tambah Tahun 2019 Alat Eksplorasi tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	9.019.262,00	-

Mutasi Kurang Tahun 2019 Alat Eksplorasi tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	-	-

Mutasi Kurang tersebut diantaranya adalah:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Lelang	-	-
Pemusnahan	-	-
Ke Aset Lain-lain	-	-
Hibah Keluar	-	-
Reklasifikasi	-	-
Total	-	-

Buku Inventaris Alat Eksplorasi Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
9.176.562,00	9.019.262,00	157.300,00

Dari Jumlah Alat Eksplorasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari Jumlah Alat Eksplorasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	4
Kurang Baik (KB)	-
Rusak Berat (RB)	-

Bidang barang Alat Eksplorasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Alat Keselamatan Kerja

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 sebesar Rp183.799.050,00 (*Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang 22 unit dengan nilai sebesar Rp115.383.850,00 (*Seratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 86 unit dengan nilai sebesar Rp68.415.200,00 (*Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Buku Inventaris Alat Keselamatan Kerja Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
115.383.850,00	115.185.850,00	198.000,00

Mutasi Tambah Tahun 2019 Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	9.019.262,00	-

Mutasi Kurang Tahun 2019 Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	-	-

Mutasi Kurang tersebut diantaranya adalah:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Lelang	-	-
Pemusnahan	-	-
Ke Aset Lain-lain	-	-
Hibah Keluar	-	-
Reklasifikasi	-	-
Total	-	-

Buku Inventaris Alat Keselamatan Kerja Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
183.799.050,00	171.785.850,00	12.013.200,00

Dari Jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari Jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	108
Kurang Baik (KB)	0
RusakBerat (RB)	0

Bidang barang Alat Keselamatan Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Alat Peraga

Saldo Alat Peraga Kerja pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 sebesar Rp285.010.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sepuluh Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang 8 unit dengan nilai sebesar Rp285.010.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sepuluh Ribu Rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Buku Inventaris Alat Peraga Kerja Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
285.010.000,00	285.010.000,00	-

Mutasi Tambah Tahun 2019 Alat Peraga tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	-	-

Mutasi Kurang Tahun 2019 Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	0	0

Mutasi Kurang tersebut diantaranya adalah:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Lelang	-	-
Pemusnahan	-	-
Ke Aset Lain-lain	-	-
Hibah Keluar	-	-
Reklasifikasi	-	-
Total	-	-

Buku Inventaris Alat Peraga Kerja Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
285.010.000,00	285.010.000,00	-

Dari Jumlah Alat Peraga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari Jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	8
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Bidang barang Alat Peraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Peralatan Proses Atau Produksi

Saldo Peralatan Proses Atau Produksi pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 sebesar Rp96.672.600,00 (*Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang 6 unit dengan nilai sebesar Rp37.892.900,00 (*Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 7 unit dengan nilai sebesar Rp58.779.700,00 (*Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Buku Inventaris Peralatan Proses Atau Produksi Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
37.892.900,00	37.892.900,00	-

Mutasi Tambah Tahun 2019 Peralatan Proses Atau Produksi tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	58.779.700,00	-

Mutasi Kurang Tahun 2019 Peralatan Proses Atau Produksi tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	0	0

Mutasi Kurang tersebut diantaranya adalah:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Lelang	-	-
Pemusnahan	-	-
Ke Aset Lain-lain	-	-
Hibah Keluar	-	-
Reklasifikasi	-	-
Total	-	-

Buku Inventaris Peralatan Proses Atau Produksi Kerja Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL L (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
96.672.600,00	96.672.600,00	0

Dari Jumlah Peralatan Proses Atau Produksi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari Jumlah Peralatan Proses Atau Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	13
Kurang Baik (KB)	0
RusakBerat (RB)	0

Bidang barang Peralatan Proses Atau Produksi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Rambu-Rambu

Saldo Rambu-Rambu pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.541.341.903,00 (*Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang 1.721 unit dengan nilai sebesar Rp6.814.241.685,00 (*Enam Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 235 unit dengan nilai sebesar Rp727.100.218,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol Rupiah*).

Buku Inventaris Rambu-Rambu Per 31 Desember 2019 terdiri dari :

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
6.814.241.685,00	6.620.161.685,00	194.080.000,00

Mutasi Tambah Tahun 2019 Rambu-Rambu tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	698.885.218,00	28.215.000,00

Mutasi Kurang Tahun 2019 Rambu-Rambu tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	-	-

Mutasi Kurang tersebut diantaranya adalah:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Lelang	-	-
Pemusnahan	-	-
Ke Aset Lain-lain	-	-
Hibah Keluar	-	-
Reklasifikasi	-	-
Total	-	-

Buku Inventaris Rambu-Rambu Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
7.541.341.903,00	7.319.046.903,00	222.295.000,00

Dari Jumlah Rambu-Rambu di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari Jumlah Rambu-Rambu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	1.956
Kurang Baik (KB)	0
RusakBerat (RB)	0

Bidang barang Rambu-Rambu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Peralatan Olahraga

Saldo Peralatan Olahraga pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.985.999.543,83 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Koma Delapan Tiga Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang 1.842 unit dengan nilai sebesar Rp755.782.999,83 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Delapan Tiga Rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 49 unit dengan nilai sebesar Rp1.230.216.544,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Buku Inventaris Peralatan Olahraga Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
755.782.999,83	638.976.606,27	116.806.393,56

Mutasi Tambah Tahun 2019 Peralatan Olahraga tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	1.229.226.544,00	990.000,00

Mutasi Kurang Tahun 2019 Peralatan Olahraga tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	-	-

Buku Inventaris Peralatan Olahraga Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
1.985.999.543,83	1.868.203.150,27	117.796.393,56

Dari Jumlah Peralatan Olahraga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari Jumlah Peralatan Olahraga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	1.891
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Bidang barang Peralatan Olahraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Sehingga total Buku Inventaris Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2019 adalah:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
695.366.045.559,50	663.300.102.966,69	32.065.942.592,81

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp928.747.943.410,36 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sepuluh Koma Tiga Enam Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1.450 unit dengan nilai sebesar Rp869.035.919.778,69 (*Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan koma Enam Sembilan Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 596 unit sebesar Rp61.444.274.097,09 (*Enam Puluh Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Tujuh Koma Sembilan Rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 10 unit dengan nilai sebesar Rp1.732.250.465,42 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Koma Empat Puluh Dua Rupiah*).

Buku Inventaris Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2018 terdiri dari :

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
869.035.919.778,69	867.884.393.534,00	1.151.526.244,69

Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan Tahun 2019 tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Penambahan Tahun Berjalan (pengadaan/pembelian)	58.781.935.297,09	1.102.480.200,00
Reklasifikasi Masuk	1.559.858.600,00	0,00
Jumlah	60.341.793.897,09	1.102.480.200,00

Penambahan Aset Tetap Bangunan dan Gedung tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan pada tahun berjalan (T.A. 2019) diantaranya adalah:

NO	NAMA OPD/SUB UNIT	INTRA	EXTRA
1	SDN Bulakan II	67.596.150,00	-
2	SDN Cibeber I	368.501.683,00	-
3	SDN Cibeber II	281.712.400,00	-
4	SDN Cibeber III	407.776.750,00	-
5	SDN Jerang Barat	376.511.300,00	-
6	SDN Kalitimbang I	708.866.250,00	-
7	SDN Kedaleman I	338.165.338,00	-
8	TKN Perintis	101.745.600,00	-
9	SDN Blok I	1.713.298.000,00	-
10	SDN Cilegon VI	219.296.000,00	-
11	SDN Ciwedus I	982.095.000,00	-
12	SDN Ketileng I	439.886.100,00	-
13	SDN Ketileng III	217.113.800,00	-
14	SDN Babakan Turi	255.018.500,00	-
15	SDN Langon	337.639.400,00	-
16	SDN Gunung Batur	253.557.100,00	-
17	SDN Lebak Gede	197.815.480,00	-
18	SDN Pringori	216.567.450,00	-
19	SDN Taman Sari V	706.058.750,00	-
20	SDN Tembulun I	216.895.250,00	-
21	SDN Wilulang	759.489.518,00	-
22	SDN Banjarnegara	208.188.600,00	-
23	SDN Kubangsari II	441.348.750,00	-
24	SDN Belungbang	147.107.100,00	-
25	SDN Gunung Sugih	270.831.700,00	-
26	SDN Ciwandan	69.743.850,00	-
27	SDN Pematang Kepuh	57.539.550,00	-
28	SDN Blok C	273.534.450,00	-
29	SDN Cilegon II	1.301.978.000,00	-
30	SDN Cilegon III	326.478.650,00	-
31	SDN Cilegon IV	336.907.380,00	-
32	SDN Cilegon V	206.187.100,00	-
33	SDN Cilegon VIII	407.752.300,00	-

34	SDN Cilegon IX	186.854.730,00	-
35	SDN Cilegon XII	186.437.180,00	-
36	SDN Masigit III	197.771.650,00	-
37	SDN Kubang Laban	119.942.750,00	-
38	SDN Kranggot	433.199.135,00	-
39	SDN Bujang Gadung	723.063.900,00	-
40	SDN Cikuasa I	146.527.900,00	-
41	SDN Ciora	205.973.800,00	-
42	SDN Kebon Dalem	197.114.700,00	-
43	SDN Kenanga	186.750.340,00	-
44	SDN Kota Bumi	285.126.450,00	-
45	SDN Kubang Kutu I	57.772.000,00	-
46	SDN Pasar Bunder	57.655.800,00	-
47	SDN Pecinan	224.378.600,00	-
48	SDN Purwakarta II	422.049.200,00	-
49	SDN Sumampir	1.128.527.847,00	-
50	SDN Citangkil Baru	394.597.700,00	-
51	SDN Delingseng	419.998.700,00	-
52	SDN Kebonsari II	216.021.150,00	-
53	SDN Kerenceng I	216.895.250,00	-
54	SDN Kerenceng II	374.382.500,00	-
55	SDN Kubang Lesung Kulon	73.813.350,00	-
56	SDN Kubang Sepat I	198.330.350,00	-
57	SDN Samangraya II	405.359.440,00	-
58	SDN Taman Baru I	223.813.400,00	-
59	SDN Tegal Cabe	176.108.250,00	-
60	SDN Walikukun	186.645.950,00	-
61	SMP Negeri 1 Cilegon	206.440.000,00	-
62	SMP Negeri 2 Cilegon	1.920.965.316,00	-
63	SMP Negeri 3 Cilegon	898.568.100,00	-
64	SMP Negeri 4 Cilegon	1.903.943.633,00	-
65	SMP Negeri 5 Cilegon	2.142.814.867,00	-
66	SMP Negeri 6 Cilegon	788.984.150,00	-
67	SMP Negeri 7 Cilegon	4.007.358.600,00	-
68	SMP Negeri 8 Cilegon	400.092.330,00	-
69	SMP Negeri 9 Cilegon	630.201.900,00	-
70	SMP Negeri 11 Cilegon	775.730.900,00	-
71	DINAS KESEHATAN	320.156.178,00	-

72	UPTD Puskesmas DTP Kecamatan Cibeber	267.313.714,00	-
73	UPTD Puskesmas Kecamatan Cilegon	1.485.890.678,00	-
74	UPTD Puskesmas DTP Kecamatan Pulomerak	118.045.059,00	-
75	UPTD Puskesmas Kecamatan Jombang	3.736.239.114,00	-
76	UPTD Puskesmas Kecamatan Grogol	194.123.647,00	-
77	UPTD Puskesmas Kecamatan Purwakarta	1.349.054.893,00	-
78	UPTD Puskesmas Kecamatan Citangkil	1.448.296.586,00	-
79	UPT Pusat Gawat Darurat Terpadu	117.568.831,00	-
80	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.903.818.920,00	-
81	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	802.736.811,00	-
82	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.462.174.225,00	-
83	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	73.361.573,00	-
84	DINAS SOSIAL	260.668.900,00	-
85	DINAS TENAGA KERJA	246.639.926,00	-
86	UPT Balai Latihan Kerja	315.302.134,00	-
87	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.616.986.132,09	-
88	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.068.325.563,00	-
89	DINAS PERHUBUNGAN	279.000.000,00	1.095.140.200,00
90	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	279.089.300,00	-
91	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.067.153.996,00	-
92	Bagian Umum Setda	307.550.749,00	-
93	SEKRETARIAT DPRD	392.631.600,00	-
94	Kelurahan Randakari	-	7.340.000,00
95	Kelurahan Banjarnegara	46.930.769,00	-
96	Kelurahan Tegal Ratu	376.440.950,00	-
97	KECAMATAN CIBEBER	66.860.706,00	-
98	Kelurahan Kalitimbang	25.970.000,00	-
99	Kelurahan Bulakan	49.978.000,00	-
100	Kelurahan Kebon Dalem	29.975.000,00	-
101	Kelurahan Pabean	30.775.000,00	-
102	Kelurahan Tegal Bunder	29.985.000,00	-
103	Kelurahan Purwakarta	25.660.000,00	-
104	Kelurahan Panggung Rawi	28.000.000,00	-

105	Kelurahan Gedong Dalem	14.748.276,00	-
106	Kelurahan Citangkil	25.969.000,00	-
107	Kelurahan Lebak Denok	28.000.000,00	-
108	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	66.980.000,00	-
109	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	256.392.000,00	-
110	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	33.727.000,00	-
	JUMLAH	58.781.935.297,09	1.102.480.200,00

Penambahan pada tahun berjalan (T.A. 2019) dari Reklasifikasi masuk senilai Rp1.559.858.600,00 diantaranya adalah:

- i. Reklasifikasi Kode Belanja pada UPTD Puskesmas Cilegon senilai Rp2.293.050,00 berupa pekerjaan rehabilitasi Puskesmas Pembatu Ciwaduk yang berlokasi di Jl. Lada.
- ii. Reklasifikasi masuk pada DPUTR senilai Rp1.455.316.300,00
 - Pembangunan Gedung BPBD Rp. 195.500.000;
 - Pembangunan Gedung DPMPSTP Rp. 154.240.550;
 - Pembangunan Gedung Taining Center Rp. 1.105.575.650
- iii. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terjadi Reklasifikasi Jenis barang senilai Rp102.249.250,00. Yaitu dari Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp50.846.000,00 dan dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp51.403.250,00.

Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan Tahun 2019 tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
Penghapusan	564.658.441,00	0,00
Mutasi ke Aset Lain- lain	0,00	0,00
Reklasifikasi	354.783.100,00	78.431.050,00
Hibah	734.377.874,42	0,00
Jumlah	1.653.819.415,42	78.431.050,00

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan total nilai sejumlah Rp1.732.250.465,42 terdapat pada Pengguna Barang sebagai berikut :

- Penghapusan Aset senilai Rp564.658.441,00 yaitu pada UPTD

Puskesmas Jombang yang merupakan penghapusan bangunan lama, yang kemudian dibangun Gedung/Bangunan Baru.

- Reklasifikasi Keluar terdiri dari:

NO	NAMA OPD/SUB UNIT	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
1	SMP Negeri 2 Cilegon	0,00	76.138.000,00
2	UPTD Puskesmas Kecamatan Cilegon	0,00	2.293.050,00
3	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	354.783.100,00	0,00
	JUMLAH	354.783.100,00	78.431.050,00

- Mutasi kurang berupa hibah Aset Gedung dan Bangunan yang terdapat pada UPT Terminal yang merupakan unit dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon senilai Rp. 734.377.874,42 kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan BAST Nomor: 032/BA-HPL-06/Aset/2018 garis bawah Nomor: PL.301/3/11/DJPD/2018, dengan daftar barang sebagai berikut:

No	Jenis>Nama Barang	Nilai Perolehan (Rp.)	Keterangan
1	Bangunan gedung garasi / pool lain-lain	480.787.429,70	Fasilitas pejalan kaki
2	Bangunan gedung terminal lain-lain	19.451.922,50	Pos TPR I
3	Bangunan gedung terminal lain-lain	20.070.837,87	Pos TPR II
4	Bangunan gedung terminal lain-lain	27.754.684,35	Plafon Lintasan BUS
5	Gedung Pos Jaga Permanen	186.313.000,00	TTM
	JUMLAH	734.377.874,42	

Buku Inventaris Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2019 menjadi :

Buku Inventaris (Rp)	Intrakomptabel (Rp)	Extrakomptabel (Rp)
928.747.943.410,36	926.572.368.015,67	2.175.575.394,69

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Total Akumulasi Penyusutan pada Golongan Barang Gedung dan Bangunan pada LBMD Kota Cilegon *Unaudited* Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp191.646.878.518,87 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Belas Koma Delapan Tujuh Rupiah*).

Adapun Rincian Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

Bangunan Gedung

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp908.454.768.128,27 (*Sembilan Ratus Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Koma Dua Tujuh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1.606 unit dengan nilai sebesar Rp858.456.302.758,69 (*Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Koma Enam Sembilan Rupiah*), mutasi tambah 262 unit sebesar Rp51.654.577.835,00 (*Lima Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Koma Nol Nol Rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 9 unit dengan nilai sebesar Rp1.656.112.465,42 (*Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Koma Empat Dua Rupiah*).

Buku Inventaris Bangunan Gedung Per 31 Desember 2018 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp.)	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
858.456.302.758,69	857.682.481.414,00	773.821.344,69

Mutasi Tambah Tahun 2019 Bangunan Gedung tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (RP)	EXTRAKOMPTABEL (RP)
Mutasi Tambah	50.552.097.635,00	1.102.480.200,00

Mutasi Kurang Tahun 2019 Bangunan Gedung tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
Mutasi Kurang	1.653.819.415,42	2.293.050,00

Buku Inventaris Bangunan Gedung Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp.)	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
908.454.768.128,27	906.580.759.633,58	1.874.008.494,69

Dari jumlah bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan / pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	1.859
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Bangunan Monumen

Saldo Bangunan Monumen pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.669.495.090,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Koma Nol Nol Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 49 unit dengan nilai sebesar Rp5.669.495.090,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Koma Nol Nol Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 unit senilai Rp0,00 (*Nol Koma Nol Nol Rupiah*), mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Buku Inventaris Bangunan Monumen Per 31 Desember 2019 terdiri dari :

BUKU INVENTARIS (Rp.)	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
5.669.495.090,00	5.376.378.190,00	293.116.900,00

Mutasi Tambah Tahun 2019 Bangunan Monumen tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
Mutasi Tambah	0	0

Mutasi Kurang Tahun 2019 Bangunan Monumen tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
Mutasi Kurang	0	0

Buku Inventaris Bangunan Monumen Per 31 Desember 2019 menjadi :

BUKU INVENTARIS (Rp.)	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
5.669.495.090,00	5.376.378.190,00	293.116.900,00

Dari jumlah Bangunan Monumen di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Bangunan Monumen di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	95
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Bangunan Menara

Saldo Bangunan Menara pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp930.434.045,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Puluh Lima Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp750.060.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 8 unit dengan nilai sebesar Rp180.374.045,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Puluh Lima Koma Nol Nol Rupiah*), mutasi kurang sebanyak 0 unit

dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Buku Inventaris Bangunan Menara Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp.)	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
750.060.000,00	750.060.000,00	0

Mutasi Tambah Tahun 2019 Bangunan Menara tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	180.374.045,00	0

Mutasi Kurang Tahun 2019 Bangunan Menara tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
Mutasi Kurang	0	0

Buku Inventaris Bangunan Menara Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp.)	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
930.434.045,00	930.434.045,00	0

Dari jumlah bangunan Menara di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Bangunan Menara di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	9
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti

Saldo Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp13.693.246.147,09, (*Tiga Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Nol Sembilan*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 46 unit dengan nilai sebesar Rp4.160.061.930,00 (*Empat Miliar SeratusEnam Puluh Juta Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Koma Nol Nol Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 57 unit dengan nilai sebesar Rp9.609.322.217,09 (*Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Koma Nol Sembilan Rupiah*), mutasi kurang sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp76.138.000,00 (*Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Koma Nol Nol Rupiah*).

Buku Inventaris Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti Per 31 Desember 2019 terdiri dari :

BUKU INVENTARIS (Rp.)	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
4.160.061.930,00	4.075.473.930,00	84.588.000,00

Mutasi Tambah Tahun 2019 Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (RP)	EXTRAKOMPTABEL (RP)
Mutasi Tambah	9.609.322.217,09	0.00

Mutasi Kurang Tahun 2019 Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
Mutasi Kurang	0,00	76.138.000,00

Buku Inventaris Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti Per 31 Desember 2019 menjadi :

BUKU INVENTARIS (Rp.)	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
13.693.246.147,09	13.684.796.147,09	8.450.000,00

Dari jumlah bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	73
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Sehingga Buku Inventaris Gedung dan bangunan Per 31 Desember 2019 adalah:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
928.747.943.410,36	928.747.943.410,36	0

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.784.894.257.011,05 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sebelas Koma nol Lima Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah barang 5.130 unit dengan nilai sebesar Rp1.710.178.685.204,00 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Sepuluh Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Koma Nol Nol Rupiah*), mutasi tambah dengan jumlah barang 48 unit dengan nilai sebesar Rp74.715.571.807,00 (*Tujuh Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Koma Nol Nol Rupiah*), dan mutasi kurang dengan jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Koma Nol Nol Rupiah*).

Buku Inventaris Jalan Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2019 terdiri dari :

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
1.710.178.685.204,00	1.710.178.685.204,00	0

Mutasi Tambah Tahun 2019 Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
Penambahan Tahun Berjalan	72.527.641.307,00	0
Reklasifikasi Masuk	2.187.930.500,00	0
Total	74.715.571.807,00	0

Mutasi tambah senilai Rp74.715.571.807,00 terdapat pada Pengguna Barang sebagai berikut:

- Penambahan Tahun Berjalan terdiri dari:

NO	NAMA OPD/SUB UNIT	MUTASI TAMBAH (Rp.)	KETERANGAN
1	SMP Negeri 4 Cilegon	158.021.550,00	
2	SMP Negeri 10 Cilegon	230.717.450,00	
3	UPTD Puskesmas Kecamatan Cilegon	1.882.073.000,00	- Saluran Darainage Rp383.128.118,00 - Jalan Khusus Lainnya Rp1.498.944.882,00
4	UPTD Puskesmas Kecamatan Citangkil	954.399.500,00	- Saluran Darainage Rp377.518.168,00 - Jalan Khusus Lainnya Rp576.881.332,00
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	161.263.100,00	Jalan Khusus Lainnya berupa Conblok Lahan Parkir G. Central Jantung Pembayaran 95%
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	52.061.186.587,00	- Pengadaan Sejumlah Rp42.484.963.655, terdiri dari Kegiatan: 1. Pembangunan Dan Peningkatan Jalan dan Jembatan dan Keg. Peningkatan Struktur Jalan (Rigid Pavement)

			2. Pemeliharaan Berkala 3. Normalisasi Saluran/Drainase 4. Peningkatan sal drainase dan jaringan irigasi 5. Pembangunan Saluran Drainase dan Jaringan Irigasi 6. Pembangunan Tandon - Hibah Sejumlah Rp3.218.000.000, terdiri dari: 1. Jalan Khusus Komplek Hibah dari BPRS Kota Cilegon (Rp1.440.000.000) 2. Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Jl. Jendral A. Yani Cibeber dari DEVIS JAYA (Rp990.000.000) 3. Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Jl. SA. Tirtayasa Cilegon dari DUTA PROMOSI (Rp788.000.000) - Reklasifikasi Kode Belanja Rp6.538.222.932, terdiri dari kegiatan: 1. Pembangunan Dan Peningkatan Jalan dan Jembatan dan Keg. Peningkatan Struktur Jalan (Rigid Pavement) 2. Pemeliharaan Berkala 3. Normalisasi Saluran/Drainase 4. Peningkatan saluran drainase dan jaringan irigasi 5. Pembangunan Saluran Drainase dan Jaringan Irigasi 6. Pembangunan Tandon
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.687.305.572,00	1. Pengadaan Rp7.967.143.772

			2. Reklasifikasi Jenis Barang dari Jenis Barang Gedung dan Bangunan Rp435.307.550
			3. Hibah Masuk Rp274.684.100
			4. Reklasifikasi Kode Belanja dari 5.2.2.21.02 Rp10.170.150
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	116.837.000,00	Pengadaan Hidrant
9	DINAS TENAGA KERJA	381.429.000,00	Paving block untuk kantor Disnaker
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	158.133.000,00	Reklasifikasi Kode Belanja Instalasi Air Buangan Pertanian Kapasitas Kecil ke Bangunan IPAL
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.705.229.300,00	1. Pengadaan Rp.531.128.300,00
			2. Reklasifikasi Jenis Barang Rp945.961.000,00 berupa Pembuatan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta
			3. Hibah dari Kementerian PUPR Rp3.228.140.000,00
12	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2.885.486.004,00	1. Pengadaan TA. 2019 Rp1.838.778.000,00
			2. Reklasifikasi Jenis Barang Rp1.046.708.004,00
13	Bagian Umum Setda	49.289.450,00	
14	KECAMATAN CIBEBER	28.982.294,00	Paving block
15	Kelurahan Kebon Dalem	14.850.000,00	
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	52.438.500,00	Jaringan Listrik
	JUMLAH	72.527.641.307,00	

- Reklasifikasi terdiri dari:

NO	NAMA OPD/SUB UNIT	REKLASIFIKASI MASUK (Rp.)	KETERANGAN
1	SMP Negeri 2 Cilegon	76.138.000,00	
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA	1.706.676.700,00	

	RUANG		
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.332.700,00	1. Reklasifikasi Jenis Barang dibawah Tahun 2019 berupa KDP-DED Pembangunan Drainase Lingkungan 2017, Kec. Citangkil, Kec. Ciwandan, Kec. Purwakarta, Kec. Pulomerak, Kec. Cibeber, Kec. Grogol Rp48.350.000,- dibagi ke 7 Pekerjaan 2. Jaringan penyiraman Taman Kota Kecamatan Purwakarta Rp957.900 3. Instalasi Listrik Taman Kota Kecamatan Purwakarta Rp1.024.800
4	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	354.783.100,00	Reklasifikasi Jenis Barang dari Jenis Barang Gedung dan Bangunan berupa Studio/IPAL senilai Rp354.783.100
	JUMLAH	2.187.930.500,00	

- Mutasi Kurang Tahun 2019 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 0,00 (Nol Koma Nol Nol Rupiah).

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Total Akumulasi Penyusutan pada Golongan Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB-D) pada LBMD Kota Cilegon *Unaudited* Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp869.566.245.830,99 (*Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Koma Sembilan Sembilan Rupiah*).

Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Pada Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

KODE	URAIAN	SALDO TAHUN ANGGARAN 2019		
		NILAI ASET TETAP (RP.)	AK. PENYUSUTAN (RP.)	NILAI BUKU (RP.)
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	1.440.928.004.520,26	796.584.935.258,66	644.343.069.261,60
1.3.4.02	Bangunan Air/Irigasi	275.709.895.222,12	57.523.590.327,64	218.186.304.894,48
1.3.4.03	Instalasi	22.106.020.717,22	5.478.550.816,24	16.627.469.900,98
1.3.4.04	Jaringan	46.150.336.551,40	9.979.169.428,46	36.171.167.122,94
Jumlah		1.784.894.257.011,00	869.566.245.831,00	915.328.011.180,00

Adapun Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

Jalan dan Jembatan

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.440.928.004.520,26 (*Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Koma Dua Enam Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1.018 unit dengan nilai sebesar Rp1.399.641.418.761,26 (*Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Koma Dua Enam Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 22 unit dengan nilai sebesar Rp41.286.585.759,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Nol Nol Rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Koma Nol Nol Rupiah*).

Buku Inventaris Jalan dan Jembatan Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp.)	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
1.399.641.418.761,26	1.399.641.418.761,26	0

Mutasi Tambah Tahun 2019 Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
Mutasi Tambah	41.286.585.759,00	0

Mutasi Kurang Tahun 2019 Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
Mutasi Kurang	0	0

Buku Inventaris Jalan dan Jembatan Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp.)	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
1.440.928.004.520,26	1.440.928.004.520,26	0

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	1.040
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Bangunan Air/Irigasi

Saldo Bangunan Air/Irigasi pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp275.709.895.222,12 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Koma Satu Dua Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 948 unit dengan nilai sebesar Rp247.777.547.324,12 (*Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Koma Dua Belas Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 12 unit dengan nilai sebesar Rp27.932.347.898,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Nol Nol Rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Koma Nol Nol Rupiah*).

Buku Inventaris Bangunan Air/Irigasi Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp.)	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
247.777.547.324,12	247.777.547.324,12	0

Mutasi Tambah Tahun 2019 Bangunan Air/Irigasi tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL L (Rp.)
Mutasi Tambah	27.932.347.898,00	0

Mutasi Kurang Tahun 2019 Bangunan Air/Irigasi tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL L (Rp.)
Mutasi Kurang	0	0

Buku Inventaris Bangunan Air/Irigasi Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp.)	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL L (Rp.)
275.709.895.222,12	275.709.895.222,12	0

Dari jumlah Bangunan Air/Irigasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Bangunan Air/Irigasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	960
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Instalasi

Saldo Instalasi pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp22.106.020.717,22 (*Dua Puluh Dua Miliar Seratus Enam Juta Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Koma Dua Dua Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 952 unit dengan nilai sebesar Rp16.913.121.617,22 (*Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Koma Dua Dua Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp5.192.899.100,00 (*Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Koma Nol Nol Rupiah*).

Buku Inventaris Instalasi Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp.)	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL L (Rp.)
16.913.121.617,22	16.913.121.617,22	0

Mutasi Tambah Tahun 2019 Instalasi tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL L (Rp.)
5.192.899.100,00	5.192.899.100,00	0

Mutasi Kurang Tahun 2019 Instalasi tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL L (Rp.)
0.	0	0

Buku Inventaris Instalasi Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp.)	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
22.106.020.717,22	22.106.020.717,22	0

Dari jumlah Instalasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Instalasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	962
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Jaringan

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp46.150.336.551,40 (*Empat Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Koma Empat Nol Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2.212 unit dengan nilai sebesar Rp45.846.597.501,40 (*Empat Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Satu Koma Empat Nol Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 4 unit dengan nilai sebesar Rp303.739.050,00 (*Tiga Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Koma Nol Nol Rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Koma Nol Nol Rupiah*).

Buku Inventaris Jaringan Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp.)	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
45.846.597.501,40	45.846.597.501,40	0

Mutasi Tambah Tahun 2019 Jaringan tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
Mutasi Tambah	303.739.050,00	0

Mutasi Kurang Tahun 2019 Jaringan tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
Mutasi Kurang	0	0

Buku Inventaris Jaringan Per 31 Desember 2019 menjadi :

BUKU INVENTARIS (Rp.)	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
46.150.336.551,40	46.150.336.551,40	0

Dari jumlah Jaringan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Jaringan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	2.216
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Sehingga total Buku Inventaris Jalan, irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2019 adalah:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
1.784.894.257.011,00	1.784.894.257.011,00	0

f. Aset Tetap Lainnya (1.3.5)

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp125.829.530.767,47 (*Seratus Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Koma Empat Tujuh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah barang 691.044 unit/buah dengan nilai sebesar Rp118.000.635.704,26 (*Seratus Delapan Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Koma Dua Enam Rupiah*), mutasi tambah dengan jumlah barang 9.919 unit/buah dengan nilai sebesar Rp8.117.527.740,00 (*Delapan Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Koma Koma Nol Nol Rupiah*), dan mutasi kurang

dengan jumlah barang 12.118 unit/buah dengan nilai sebesar Rp288.632.676,79 (*Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Tujuh Sembilan Rupiah*).

Buku Inventaris Saldo Awal Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
118.000.635.704,26	118.000.635.704,26	0

Mutasi Tambah Tahun 2019 Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Penambahan Tahun Berjalan	8.073.340.740,00	0
ReklasifikasiMasuk	44.187.000,00	0
Total	8.117.527.740,00	0

Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya senilai Rp8.117.527.740,00 terjadi karena adanya Penambahan Tahun Berjalan dan Reklasifikasi Masuk, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Penambahan Tahun Berjalan Aset Tetap Lainnya senilai Rp8.073.340.740,00 terdapat pada perangkat daerah sebagai berikut :

NO	NAMA OPD/SUB UNIT	Penambahan Tahun Berjalan
1	SDN Bulakan I	3.254.000,00
2	SDN Cibeber III	3.650.000,00
3	SDN Cikerai I	9.763.600,00
4	SDN Kedaleman III	9.763.600,00
5	TKN Perintis	35.814.000,00
6	TKN Pembina (Cibeber)	35.814.000,00
7	SDN Bendungan I	950.000,00
8	SDN Blok I	1.800.000,00
9	SDN Babakan Turi	10.000.000,00
10	SDN Florida	10.000.000,00
11	SDN Mekarsari	10.000.000,00
12	SDN Merak	2.000.000,00
13	SDN Pringori	3.490.090,00

14	SDN Taman Sari IV	10.000.000,00
15	SDN Tanjung Sekong	10.800.000,00
16	SDN Wilulang	9.763.600,00
17	SDN Belungbang	9.763.600,00
18	SDN Jangkar	3.500.000,00
19	SDN Sukmajaya II	1.500.000,00
20	SDN Cilegon II	14.763.600,00
21	SDN Cilegon VIII	9.763.600,00
22	SDN Cilegon XI	15.000.000,00
23	SDN Masigit I	9.763.600,00
24	SDN Masigit III	9.763.600,00
25	SDN Kranggot	4.651.000,00
26	SDN Bujang Gadung	3.000.000,00
27	SDN Cikuasa II	9.763.600,00
28	SDN Gerem II	3.500.000,00
29	SDN Grogol II	6.500.000,00
30	SDN Tegal Wangi	866.000,00
31	TKN Pembina (Grogol)	35.814.000,00
32	SDN Kubang Kalak	2.340.000,00
33	SDN Purwakarta I	13.563.600,00
34	SDN Purwakarta II	9.763.600,00
35	SDN Ramanuju	1.700.000,00
36	SDN Sumampir	9.763.600,00
37	SDN Delingseng	9.763.600,00
38	SDN Kubang Lesung Kulon	9.763.600,00
39	SDN Kubang Sepat I	9.763.600,00
40	SDN Taman Baru II	12.600.000,00
41	SMP Negeri 3 Cilegon	3.650.000,00
42	SMP Negeri 5 Cilegon	8.100.000,00
43	SMP Negeri 6 Cilegon	138.535.500,00
44	SMP Negeri 11 Cilegon	18.293.000,00
45	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.260.109.150,00
46	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	48.000.000,00
47	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	194.170.000,00
48	Kelurahan Banjarnegara	9.948.000,00
49	Kelurahan Warnasari	5.000.000,00
50	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.738.000,00
	JUMLAH	8.073.340.740,00

- Reklasifikasai Masuk Aset Tetap Lainnya senilai Rp44.187.000,00 terdapat pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Cilegon, yaitu berupa pekerjaan penyusunan DED Tembok Penahan Tanah (TPT) yang tersebar pada wilayah:
 - a. Link. Cupas Kulon RT. 02/07 Kel. Gerem Kec. Grogol
 - b. Link. Jangkar Sukun Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan
 - c. Link. Kp. Baru Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan
 - d. Link. Pabuaran Kel. Taman Baru Kec. Citangkil
 - e. Link. Cigading Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan
- Pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp288.632.676,79 terdapat pada SMP Negeri 9 Cilegon yaitu Reklasifikasi Jenis Barang Ke Aset Tetap Lain-lain berupa Buku sejumlah 12.118 buah.

Buku Inventaris Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2019 menjadi :

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
125.829.530.767,47	125.829.530.767,47	0

Dari jumlah/nilai Aset Tetap Lainnya diatas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Rincian data Aset Tetap Lainnya berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	688.845
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Total Akumulasi Penyusutan pada Golongan Barang Aset Tetap Lainnya (KIB-E) pada LBMD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp45.631.407.855,45 (*Empat Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Koma Empat Lima Rupiah*).

Adapun Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut :

Bahan Perpustakaan

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp16.638.584.543,75 (*Enam Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Koma Tujuh Lima Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 543.139 unit dengan nilai sebesar Rp16.392.576.720,54 (*Enam Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Koma Lima Empat Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 9.716 unit dengan nilai sebesar Rp534.640.500.00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Koma Nol Nol Rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp288.632.676,79 (*Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Koma Tujuh Sembilan Rupiah*)

Buku Inventaris Bahan Perpustakaan Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
16.392.576.720,54	16.392.576.720,54	0

Mutasi Tambah Tahun 2019 Baha Perpustakaan tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	534.640.500.0 0	0

Mutasi Kurang Tahun 2019 Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	288.632.676,79	0

Buku Inventaris Bahan Perpustakaan Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
16.392.576.720,54	16.392.576.720,54	0

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	540.737
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.706.431.875,68 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Enam Delapan Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2.049 buah dengan nilai sebesar Rp4.437.788.785,68 (*Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Koma Enam Delapan Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 29 dengan nilai sebesar Rp268.643.090,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Koma Nol Nol Rupiah*), mutasi kurang sebanyak 0 dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Koma Nol Nol Rupiah*).

Buku Inventaris Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Per 31 Desember 2019 terdiri dari :

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
4.437.788.785,68	4.437.788.785,68	0

Mutasi Tambah Tahun 2019 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	268.643.090,0 0	0

Mutasi Kurang Tahun 2019 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	0	0

Buku Inventaris Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
4.706.431.875,68	4.706.431.875,68	0

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	2.078
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Hewan Ternak

Saldo Hewan Ternak pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp63.000,00 (*Enam Puluh Tiga Ribu Koma Nol Nol Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 3 buah dengan nilai sebesar 63.000,00 (*Enam Puluh Tiga Ribu Koma Nol Nol Rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.00 (*Nol Koma Nol Rupiah*), mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.00 (*Nol Koma Nol Rupiah*).

Buku Inventaris Hewan Ternak Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
63.000,00	63.000,00	0

Mutasi Tambah Tahun 2019 Hewan Ternak tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	0	0

Mutasi Kurang Tahun 2019 Hewan Ternak tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	0	0

Buku Inventaris Hewan Ternak Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
63.000,00	63.000,00	0

Dari jumlah Hewan Ternak di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Hewan Ternak di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	3
Kurang Baik (KB)	0
RusakBerat (RB)	0

Biota Perairan

Saldo Biota Perairan pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 (*Nol Koma Nol Nol Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Koma Nol Nol Rupiah*), mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.00 (*Nol Koma Nol Rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.00 (*Nol Koma Nol Rupiah*)

Buku Inventaris Biota Perairan Per 31 Desember 2019 terdiri dari :

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
0	0	0

Mutasi Tambah Tahun 2019 Biota Perairan tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	0	0

Mutasi Kurang Tahun 2019 Biota Perairan tersebut meliputi :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	0	0

Buku Inventaris Biota Perairan Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
0	0	0

Dari jumlah Biota Perairan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Biota Perairan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	0
Kurang Baik (KB)	0
RusakBerat (RB)	0

Tanaman

Saldo Tanaman pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.459.565.950,21 (*Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Koma Dua Satu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 145.692 buah dengan nilai sebesar Rp4.234.036.700,21 (*Empat Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Koma Dua Satu Rupiah*), mutasi tambah sejumlah 122 buah dengan nilai sebesar Rp225.529.250,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah Koma Nol Nol Rupiah*), mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.00 (*Nol Koma Nol Rupiah*)

Buku Inventaris Tanaman Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
4.234.036.700,21	4.234.036.700,21	0

Mutasi Tambah Tahun 2019 Tanaman tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	225.529.250,00	0

Mutasi Kurang Tahun 2019 Tanaman tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	0	0

Buku Inventaris Tanaman Per 31 Desember 2019 menjadi :

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
4.459.565.950,21	4.459.565.950,21	0

Dari jumlah Tanaman di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Tanaman di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	145.814
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Barang Koleksi Non Budaya

Saldo Barang Koleksi Non Budaya pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 (*Nol Koma Nol Nol Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Koma Nol Nol Rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Koma Nol Rupiah*), mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Koma Nol Rupiah*).

Buku Inventaris Barang Koleksi Non Budaya Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
0	0	0

Mutasi Tambah Tahun 2019 Barang Koleksi Non Budaya tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	0	0

Mutasi Kurang Tahun 2019 Barang Koleksi Non Budaya tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	0	0

Buku Inventaris Barang Koleksi Non Budaya Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
0	0	0

Dari jumlah Barang Koleksi Non Budaya di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Barang Koleksi Non Budaya di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	0
Kurang Baik (KB)	0
RusakBerat (RB)	0

Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada Laporan Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp100.024.885.397,83 (*Seratus Miliar Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Delapan Tiga Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 161 buah dengan nilai sebesar Rp92.936.170.497,83 (*Sembilan Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus*

Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Delapan Tiga Rupiah), mutasi tambah sejumlah 52 buah dengan nilai sebesar Rp7.088.714.900,00 (Tujuh Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Koma Nol Nol Rupiah), mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.00 (Nol Koma Nol Rupiah)

Buku Inventaris Aset Tetap Dalam Renovasi Per 31 Desember 2019 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
92.936.170.497,83	92.936.170.497,83	0

Mutasi Tambah Tahun 2019 Aset Tetap Dalam Renovasi tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Tambah	7.088.714.900,00	0

Mutasi Kurang Tahun 2019 Aset Tetap Dalam Renovasi tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
Mutasi Kurang	0	0

Buku Inventaris Aset Tetap Dalam Renovasi Per 31 Desember 2019 menjadi:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
100.024.885.397,83	100.024.885.397,83	0

Dari jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Dari jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)
Baik (B)	213
Kurang Baik (KB)	0
Rusak Berat (RB)	0

Sehingga total Buku Inventaris Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2019 adalah:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
125.829.530.767,47	125.829.530.767,47	0

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Milik Daerah Kota Cilegon Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp246.002.403.678,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Miliar Dua Juta Empat Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Koma Nol Nol Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah barang 140 unit/buah dengan nilai sebesar Rp167.456.703.571,00 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Koma Nol Nol Rupiah*) dan mutasi tambah sebanyak 55 unit/buah senilai Rp83.646.890.957,00 (*Delapan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Koma Nol Nol*), dan mutasi keluar sebesar Rp5.101.190.850,00 (*Lima Miliar Seratus Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Buku Inventaris Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2019 terdiri dari :

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
167.456.703.571,00	167.456.703.571,00	0

Mutasi Tambah Tahun 2019 Konstriksi Dalam Pengerjaan yaitu:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
Mutasi Tambah	83.646.890.957,00	0
Total	83.646.890.957,00	0

Mutasi Tambah Tahun 2019 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut meliputi :

- Penambahan tahun berjalan

NO	NAMA OPD/SUB UNIT	Penambahan Tahun Berjalan	
		INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	1.315.674.500,00	0,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	49.106.807.667,00	0,00
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.219.895.050,00	0,00
4	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	102.256.000,00	0,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	245.651.000,00	0,00
6	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	31.608.080.740,00	0,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	48.526.000,00	0,00
	JUMLAH	83.646.890.957,00	0,00

Mutasi Kurang Tahun 2019 Konstriksi Dalam Pengerjaan yaitu:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
Mutasi Kurang	5.101.190.850,00	0
Total	5.101.190.850,00	0

- Mutasi Kurang Tahun 2019 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut meliputi :

1. Hibah Keluar

NO	NAMA OPD/SUB UNIT	HIBAH KELUAR	
		INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	96.095.000,00	0,00
	JUMLAH	96.095.000,00	0,00

Hibah keluar dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada masyarakat berupa:

- 1) KDP-DED Deep Whell Ciwandan, Tahun 2017, yang terletak di Link. Combong Kel. Kepuh Kec. Ciwandan, Link. Cigeblag Kel. Banjarnegara Kec. Ciwandan, dan diserahkan Kepada Masyarakat.
- 2) KDP-DED Deep Whell Mekarsari, Tahun 2017, yang terletak di Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak, dan diserahkan Kepada Masyarakat

2. Reklasifikasi Keluar

NO	NAMA OPD/SUB UNIT	REKLASIFIKASI KELUAR	
		INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	4.436.709.950,00	0,00
2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	216.298.400,00	0,00
3	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	352.087.500,00	0,00
JUMLAH		5.005.095.850,00	0,00

Reklasifikasi Jenis Barang keluar terjadi pada :

- 1) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG sebesar Rp4.436.709.950,00, terdiri dari:
 - a. Pada Tahun 2016 Pek.Lanjutan Pembangunan Kali Cibeber /Nyikambang Sukmajaya masih Berupa KDP senilai Rp48.400.000,00
 - b. Pada tahun 2017 Pek.Pembangunan Cekdam/Bendung Kali Medaksa Lingk.Pengobelan Kel.Mekarsar masih Berupa KDP senilai Rp169.400.000,00.
 - c. Pada tahun 2017 Pek.Normalisasi Lanjutan Kali Sabrang Kel.Lebak Gede Kec.Pulomerak masih Berupa KDP senilai Rp47.724.000,00
 - d. Pada Tahun 2017 Pengadaan tanah Untuk JLU Berupa (Biaya Umum Belanja Jasa/Upah Tenaga Kerja,dan Bantuan Transportasi ,Belanja) Senilai Rp1.270.511.000,00
 - e. Pada Tahun 2016 Pengadaan Gedung Kantor BPBD Masih Berupa KDP Senilai Rp183.276.000,00 Kemudian dilanjutkan Kembali Pekerjaannya (Review DED) ditahun 2017 senilai Rp29.012.000,00 masih berupa KDP Dengan Total KDP Rp212.288.000,00
 - f. Pada Tahun 2016 Pembangunan Gedung DPMPSTP masih Berupa KDP senilai Rp169.650.000,00

-
- g. Pada Tahun 2018 terdapat DED untuk Pekerjaan Normalisasi saluran Tersier Kadipaten (Link.Belakang PCI Blok E) Kel.Kedaleman senilai Rp47.690.000,00
 - h. Pada Tahun 2018 terdapat DED senilai Rp170.480.000,00 kemudian dilanjutkan kembali pekerjaan fisiknya di tahun 2019.
 - i. Pada Tahun 2017 terdapat DED senilai Rp170.038.000,00terbagi dua senilai Rp85.019.000,00 masih tercatat di KDP senilai Rp85.019.000,00 karna pekerjaannya belum terelalisasi kemudian dilanjutkan kembali pekerjaan fisiknya di tahun 2019.
 - j. Pada Tahun 2017 terdapat DED senilai Rp46.624.000,00 kemudian dilanjutkan kembali pekerjaan fisiknya Tahun 2019 berupa Pek.Normalisasi Saluran Sekunder Kepuh (Link.Cilurah) Kel. Kepuh.
 - k. Pada Tahun 2017 Tandon Sukmajaya masih tercatat dalam proses pengerjaan senilai Rp1.063.348.300,00
 - l. Pada tahun 2018 Pembangunan Gedung Training Center masih Tercatat di KDP Rp1.105.575.650,00
- 2) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN sebesar Rp216.298.400,00 terdiri dari:
- a. KDP-DED Pembangunan Drainase Lingkungan, Tahun 2017, Kec. Citangkil, Kec. Ciwandan, Kec. Purwakarta, Kec. Pulomerak, Kec. Cibeber, Kec. Grogol Sebesar Rp48.350.000,00
 - b. KDP-Perencanaan Teknis SAK (Ruas PCI-Fly Over Cibeber) Kota Cilegon, Tahun 2017 untuk street furniture tipe 1 dan 2 Sebesar Rp70.136.000,00
 - c. Tangki Air Fiber glass Taman Kota Kecamatan Purwakarta Sebesar Rp239.450,00 ke Daftar Barang Peralatan dan Mesin.
 - d. Reklasifikasi Jenis Barang ke Daftar Barang Gedung dan Bangunan:
 - Bak Bunga di Taman Kota Kecamatan Purwakarta Rp29.900.000,00
 - Hutan Kota di Taman Kota Kecamatan Purwakarta Rp2.320.000,00
 - Lapangan Bola di Taman Kota Kecamatan Purwakarta Rp13.561.800,00
 - Ruang Pengawas dan Toilet Taman Kota Kecamatan Purwakarta Rp8.621.000,00
 - e. Reklasifikasi Jenis Barang ke Daftar Barang Jalan Irigasi dan Jaringan:
 - Jaringan penyiraman Taman Kota Kecamatan
-

- Purwakarta Rp957.900,00.
- Instalasi Listrik Taman Kota Kecamatan Purwakarta Rp1.024.800,00.
- f. Pada Tahun 2018 pekerjaan Penyusunan DED TPT Masih Tercatat di Daftar Barang KDP senilai Rp44.187.000,00, Kemudian dilanjutkan Kembali pekerjaan fisiknya di tahun 2019 dan terbagi ke beberapa pekerjaan , Berupa :
- Tembok Penahan Tanah (TPT) Link. Cupas Kulon RT. 02/07 Kel. Gerem Kec. Grogol Rp7.406.250,00.
 - Tembok Penahan Tanah (TPT) Perum Bumi Cibeber Kencana Kel. Cibeber Kec. Cibeber Rp7.575.650,00.
 - Tembok Penahan Tanah (TPT) Link. Jangkar Sukun Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Rp7.220.600,00.
 - Tembok Penahan Tanah (TPT) Link. Kp. Baru Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Rp7.306.500,00.
 - Tembok Penahan Tanah (TPT) Link. Pabuaran Kel. Taman Baru Kec. Citangkil Rp7.589.600,00.
 - Tembok Penahan Tanah (TPT) Link. Cigading Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Rp7.088.400,00.
- 3) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN sebesar Rp352.087.500,00 berupa Reklasifikasi Jenis Barang KDP Master Plant Belanja Pengadaan Tanah Tegalan TA.2017.

Buku Inventaris Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2019 menjadi :

BUKU INVENTARIS (Rp.)	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
246.002.403.678,00	246.002.403.678,00	0

B.1.4. Dana Cadangan

*Dana
Cadangan*

Dana cadangan merupakan aset dalam bentuk dana yang disimpan pada suatu bank tertentu yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, dimana kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran.

Dana Cadangan per 31 Desember 2019 sebesar NIHIL.

B.1.5. Aset Lainnya

Aset
Lainnya

Aset lainnya merupakan jenis aset selain aset lancar dan aset tetap. Yang termasuk dalam aset ini antara lain kerjasama pihak ketiga, aset tidak berwujud dan tagihan penjualan.

B.1.5.1. Tuntutan Ganti Rugi

TGR

Aset Lainnya Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp1.139.701.495,00. Merupakan reklasifikasi dari piutang bagian lancar tuntutan ganti rugi tahun 2019 dari piutang Bagian Lancar TGR tahun 2019 sebesar Rp922.943.654,00. Reklasifikasi Piutang lain-lain ke Aset lainnya dilakukan atas piutang yang tingkat kolektabilitasnya lebih dari 12 bulan,

NO	Uraian	TAHUN PENGAKUAN	saldo awal aset lainnya - TGR	penambahan	pengurangan	saldo awal aset lainnya - TGR
	ASET LAINNYA - TGR		216.757.841,00	922.943.654,00	0,00	1.139.701.495,00
1	Dadang	2006	57.062.625,00	0,00	0,00	57.062.625,00
2	Hilang Bukti	2006	159.695.216,00	0,00	0,00	159.695.216,00
3	Reklas Bagian Lancar TGR - Hd, A 175 U	2019	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
4	Reklas Bagian Lancar TGR - Ing, tekor kas	2019	0,00	894.899.379,00	0,00	894.899.379,00
5	Reklas Bagian Lancar TGR - ES, Inventaris	2019	0,00	8.863.625,00	0,00	8.863.625,00
6	Reklas Bagian Lancar TGR - AY, A 3209 U	2019	0,00	10.980.650,00	0,00	10.980.650,00

Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Kota Cilegon per 31 Desember 2019 dirinci pada tabel berikut:

NO	JENIS BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR SALDO PIUTANG					JUMLAH
			1 s/d < 2 TAHUN	2 s/d < 3 TAHUN	3 s/d < 4 TAHUN	4 s/d < 5 TAHUN	≥ 5 TAHUN	
1	Bagian Lancar TGR	922.943.654,00	0,00	0,00		19.844.275,00	903.099.379,00	922.943.654,00
	Jumlah	922.943.654,00	0,00	0,00	0,00	19.844.275,00	903.099.379,00	922.943.654,00
	% Penyisihan Piutang		0,5%	10%	50%	80%	100%	
	Penyisihan Putang Tak Tertagih		0,00		0,00	15.875.420,00	903.099.379,00	918.974.799,00

INFORMASI:

Penyisihan Piutang TGR sebesar Rp922.943.654,00 merupakan Reklas dari Penyisihan Piutang Bagian Lancar TGR yang sampai dengan 31 Desember 2019.

B.1.5.2. Aset Tidak Berwujud

ATB

Aset tidak berwujud merupakan aset Pemerintah Kota Cilegon yang tidak memiliki bentuk fisik. Aset ini terdiri dari Software dan Hasil Kajian.

B.1.5.2.1 Software

Software

Penambahan software lainnya sebesar Rp4.907.169.214,00 berasal dari realisasi belanja modal aset lainnya Rp4.635.462.714,00 dan software berasal dari belanja barang jasa Rp271.706.500,00. Serta Terdapat

penambahan nilai ATB sebesar Rp.32.256.500,00 pada dinas perpustakaan dan arsip daerah akibat koreksi kurang catat tahun sebelumnya.

NO	SKPD	KETERANGAN	BELANJA MODAL	BELANJA JASA	TOTAL
1	DINDIK	PENGADAAN SOFTWARE LAINNYA	Rp 726.467.500		Rp 726.467.500
		- Software Aplikasi Cilegon Digital Class	Rp 49.830.000		
		- Software Aplikasi Mutasi	Rp 71.665.000		
		- Software Sistem Akademik dan Pembelajaran SD + GU	Rp 541.420.000		
		- Software Kapitalisasi	Rp 63.552.500		
2	RSUD	PENGADAAN SOFTWARE LAINNYA	Rp 3.103.239.088		Rp 3.103.239.088
		- RIS & Picture Archiving & Communication System (APBC)	Rp 3.103.239.088		
3	DKPP	PENGADAAN SOFTWARE LAINNYA	Rp 79.010.000		Rp 79.010.000
		- Software komputer	Rp 79.010.000		
4	DLH	PENGADAAN SOFTWARE LAINNYA	Rp 139.700.000		Rp 139.700.000
		- Aplikasi Informasi Data Limbah B3	Rp 52.800.000		
		- Software Amdal	Rp 86.900.000		
		- Software ISPU dan Integrasi	Rp 57.314.273		
5	DKPS	PENGADAAN SOFTWARE LAINNYA	Rp 93.686.000		Rp 93.686.000
		- Software Sikoja	Rp 49.874.000		
		- Software Kios K	Rp 43.812.000		
6	DISHUB	PENGADAAN SOFTWARE LAINNYA	Rp 151.240.000		Rp 151.240.000
		- Software	Rp 41.510.000		
		- Software	Rp 109.730.000		
7	DPAD	PENGADAAN SOFTWARE LAINNYA	Rp 35.041.150	Rp 32.256.500	Rp 67.297.650
		- Software E Book	Rp 35.041.150		
		- Software E Book		Rp 32.256.500	
8	DISPERINDAG	PENGADAAN SOFTWARE LAINNYA	Rp 62.040.000		Rp 62.040.000
		Sistem harga Kebutuhan Pokok	Rp 24.640.000		
		Pemukhtahiran Sistem Harga Kebutuhan Pokok	Rp 37.400.000		
9	SETDA	PENGADAAN SOFTWARE LAINNYA	Rp 15.160.000		Rp 15.160.000
		- Software	Rp 15.160.000		
10	BPKAD	BELANJA MODAL PENGADAAN SOFTWARE LAINNYA	Rp 43.970.000		Rp 43.970.000
		- Software	Rp 43.970.000		
11	KESBANGPOL	PENGADAAN SOFTWARE LAINNYA	Rp 64.700.000	Rp 700.000	Rp 65.400.000
		- Software Penyusunan sistem ormas	Rp 64.700.000	Rp 700.000	
12	BPBJ	PENGADAAN SOFTWARE LAINNYA	Rp 121.208.976		Rp 121.208.976
		- Software	Rp 43.210.476		
		- Software	Rp 77.998.500		
13	DISKOMINFO	PENGADAAN SOFTWARE LAINNYA		Rp 238.750.000	Rp 238.750.000
		- Software Pengembangan SIMRAL		Rp 238.750.000	
JUMLAH			Rp 4.635.462.714	Rp 271.706.500	Rp 4.907.169.214

Informasi :

- Tahun 2019 Penyajian nilai aset tetap tidak berwujud di dapat melalui rekonsiliasi aset.

B.1.5.2.2 Hasil Kajian

Hasil
Kajian

Hasil kajian/penelitian per 31 Desember 2019 disajikan sebesar Rp6.507.549.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	OPD	URAIAN	NILAI TAHUN 2019 (Rp)
1	BAPPEDA		980.655.000,00
		Feasibility study pasar induk agribisnis	93.450.000,00
		feasibility study pengembangan pasar tradisional	239.332.500,00
		Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Susun Sewa	332.977.000,00
		Masterplan Pasar Induk Agribisnis	170.130.000,00
		Analisa Kebutuhan Rumah IPTEK di Kota Cilegon	144.765.500,00
2	DINAS PERHUBUNGAN		107.182.800,00
		Kajian sub terminal (Kranggot)	107.182.800,00
3	DAMKAR		49.270.000,00
		Feasibility Study Kantor Damkar	49.270.000,00
4	DINAS PENDIDIKAN		175.855.000,00
		Feasibility (study kelayakan) SMPN Kecamatan Purwakarta	48.015.000,00
		Feasibility (study kelayakan) Lahan Relokasi SDN Kalitimbang I	29.500.000,00
		Studi Kelayakan Pengadaan Lahan SMKN 2 dan SMKN 4	98.340.000,00
5	TATA KOTA		175.435.000,00
		DED Prasarana Utilitas Kota (BOX Cuvert)	175.435.000,00
6	DINAS SOSIAL		286.229.000,00
		Penyusunan DED Pembangunan Panti Rehabilitasi Terpadu	200.989.000,00
		Konsultasi Perencanaan Kegiatan Penataan Lahan TPU Cikerei	85.240.000,00
7	KPAD		48.595.000,00
		Kajian Feasibility Study Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah	48.595.000,00
8	DISPERINDAGKOP		310.368.000,00
		Perencanaan Peningkatan Pasar Baru Kecamatan Merak Kota Cilegon	137.599.000,00
		Rencana Teknik Revitalisasi Pasar Blok F	127.785.000,00
		Feasibility Study Sentra Pedagang Kaki Lima	44.984.000,00
9	DISBUDPAR		122.362.500,00
		Kajian Siteplan Rawa Arum	122.362.500,00
10	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN		47.850.000,00
		Detail Engineering Design (DED) Taman Kota Kecamatan Cilegon	47.850.000,00
11	SEKRETARIAT DAERAH		584.561.100,00
		Master Plan Dan DED Lingkungan Setda	290.070.000,00
		Perencanaan Penataan Drainase Jalan Lingkungan Setda Kota Cilegon	47.678.400,00
		DED Perluasan Gedung Utama Setda	194.500.000,00
		Perencanaan Penataan Lapangan Upacara Setda Kota Cilegon	26.655.200,00
		Perencanaan Penataan Lahan Parkir Belakang Setda Cilegon	25.657.500,00
12	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		49.570.000,00
		Jasa Konsultasi Perencanaan DED Hutan Kota TA 2014	49.570.000,00
13	DPUTR		3.569.616.000,00
		DED Bonakarta-Masigit	141.812.000,00
		DED Jalan Lingkar Utara	715.350.000,00
		DED Jembatan jalan sudirman	47.000.000,00
		DED Ketileng - Temu Putih	136.405.000,00
		DED Rehabilitasi Jembatan JLS	264.220.000,00
		DED Deep Well	70.048.000,00
		DED DKP	191.862.000,00
		DED Pos Damkar	102.950.000,00
		Siteplan DPU	47.250.000,00
		DED Peningkatan Jalan Lingkungan	48.780.000,00
		DED Peningkatan Drainase Lingkungan	48.680.000,00
		DED Kawasan Kumuh	392.760.000,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran dan Drainase	559.826.000,00
		Perencanaan Teknis Lanjutan Normalisasi Saluran	560.917.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan dan Rehabilitasi Saluran dan Drainase	241.756.000,00
JUMLAH			6.507.549.400

B.1.5.3. Aset Lain-Lain

No.	Uraian Rincian Aset Lain-lain	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	ASET LAIN-LAIN	31.565.835.550,00	767.958.877,00	960.707.702,00	31.373.086.725,00
1	Upah Pungut Retribusi	1.081.691.604,00	0,00	0,00	1.081.691.604,00
2	Tanah Griya Praja Mandiri	5.227.851.117,00	0,00	0,00	5.227.851.117,00
3	Hasil Kajian Usang	4.263.245.525,00	0,00	0,00	4.263.245.525,00
4	Investasi Jamkesos	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
5	Piutang Jk Panjang Dana Talangan Pasar Merak (PDB)	1.385.811.072,00	0,00	19.438.502,00	1.366.372.570,00
6	Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya Hibah	2.037.027.950,00	0,00	0,00	2.037.027.950,00
7	Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya Gedung (koreksi 2015)	6.561.106.781,00	0,00	0,00	6.561.106.781,00
8	Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya Jalan Jaringan (koreksi 2015)	93.234.850,00	0,00	0,00	93.234.850,00
9	Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya Lahan dan KDP Warnasari	2.563.355.400,00	0,00	0,00	2.563.355.400,00
10	Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa aset tetap gagal lelang	714.543.000,00	479.326.200,00	941.269.200,00	252.600.000,00
11	Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya Gedung (koreksi 2018)	6.137.968.251,00	0,00	0,00	6.137.968.251,00
12	Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa buku gagal lelang	0,00	288.632.677,00	0,00	288.632.677,00

INFORMASI:

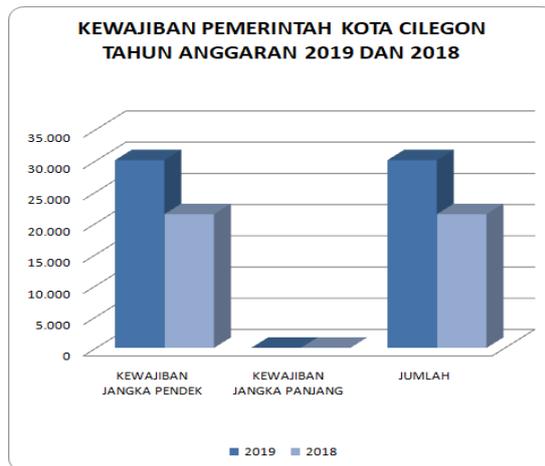
- Upah Pungut Retribusi Tahun 2005 yang mana pada saat itu terdapat perbedaan tafsir aturan dalam pemberiannya, sampai dengan 31 Desember 2018 belum ada proses penyelesaian.
- SK Walikota Penghapusan Investasi Jamkesos sampai dengan 31 Desember 2018 belum diperoleh .
- Pengurangan Piutang Jk Panjang Dana Talangan Pasar Merak (PDB) sebesar Rp19.438.502,00 berdasarkan pembayaran angsuran dana talangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan BLUD UPT PDB (Dinas KUMK) 2019.

B.2 Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp31.833.519.680,00 dapat dilihat dalam Tabel dan Grafik berikut :

Kewajiban

KEWAJIBAN	2019	2018
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31.833.519.680,00	21.417.730.223,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH	31.833.519.680,00	21.417.730.223,00



B.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Pemerintah Kota Cilegon yang akan dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun

*Kewajiban
Jk Pendek*

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR	KETERANGAN
I	HUTANG PFK	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	- PFK	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	SMPN 1 CILEGON
II	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	830.507.033,00	1.071.711.808,00	830.507.033,00	1.071.711.808,00	
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Aset Daerah	312.981.833,00	431.898.782,00	312.981.833,00	431.898.782,00	BPKAD
	- Angsuran Cicilan Kios	1.057.231,00	0,00	1.057.231,00	0,00	DISDAGPER
	- Pajak Reklame	516.467.969,00	639.813.026,00	516.467.969,00	639.813.026,00	BPKAD
III	HUTANG BELANJA	1.782.127.122,00	2.832.685.640,00	1.782.127.122,00	2.832.685.640,00	
	A. JASA KANTOR	1.782.127.122,00	767.885.431,00	1.782.127.122,00	767.885.431,00	
	- Telepon	25.911.647,00	29.247.937,00	25.911.647,00	29.247.937,00	SKPD DILINGKUNGAN PEMKOT CILEGON
	- Air	32.484.374,00	22.079.400,00	32.484.374,00	22.079.400,00	
	- Listrik	1.631.926.189,00	648.600.945,00	1.631.926.189,00	648.600.945,00	
	- Internet	91.804.912,00	67.957.149,00	91.804.912,00	67.957.149,00	
	B. JASA KONSULTANSI	0,00	681.321.300,00	0,00	681.321.300,00	
	- Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	275.888.800,00	0,00	275.888.800,00	DPUTR
	- Jasa Konsultansi Lainnya	0,00	405.432.500,00	0,00	405.432.500,00	DPUTR
	C. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	
	- Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	DPUTR
	D. HUTANG BEBAN PEGAWAI	0,00	1.373.578.909,00	0,00	1.373.578.909,00	
	- Hutang Gaji Pegawai	0,00	932.230.599,00	0,00	932.230.599,00	SKPD DILINGKUNGAN PEMKOT CILEGON
	- Hutang Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	DINDIK
	- Hutang Jasa Medis	0,00	221.348.310,00	0,00	221.348.310,00	DINKES
IV	HUTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	18.805.096.068,00	27.888.496.625,00	18.764.471.461,00	27.929.121.232,00	
	DPUTR	53.422.649,00	15.389.041.214,00	36.497.649,00	15.405.966.214,00	DPUTR
	2015	14.870.649,00	0,00	7.870.649,00	7.000.000,00	
	2017	28.627.000,00	0,00	28.627.000,00	0,00	
	2018	9.925.000,00	0,00	0,00	9.925.000,00	
	2019	0,00	15.389.041.214,00	0,00	15.389.041.214,00	
	DISHUB	0,00	13.581.000,00	0,00	13.581.000,00	DISHUB
	2019	0,00	13.581.000,00	0,00	13.581.000,00	
	DISPERIN	0,00	8.312.250,00	0,00	8.312.250,00	DISPERIN
	2019	0,00	8.312.250,00	0,00	8.312.250,00	
	RSUD - BLUD	18.751.673.419,00	12.477.562.161,00	18.727.973.812,00	12.501.261.768,00	RSUD - BLUD
	2018	18.751.673.419,00	0,00	18.727.973.812,00	23.699.607,00	
	2019	0,00	12.477.562.161,00	0,00	12.477.562.161,00	
	JUMLAH I+II+III+IV	21.417.730.223,00	31.792.895.073,00	21.377.105.616,00	31.833.519.680,00	

Informasi :

- Di tahun 2019, Pemerintah Kota Cilegon belum menyajikan Utang Pajak Kendaraan Bermotor, sudah dilakukan upaya koordinasi dengan pihak UPT Pelayanan pajak daerah Samsat Cilegon namun belum dilakukannya rekonsiliasi data utang pajak kendaraan bermotor.

B.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK di tahun 2019 sebesar Rp1.000,00 di Sub unit Dinas Pendidikan SMPN 1 Cilegon kewajiban PFK tersebut sudah disetorkan.

Utang PFK

B.2.1.2. Utang Bunga

Utang Bunga Pemerintah Kota Cilegon pada tahun 2019 sebesar NIHIL.

Utang Bunga

B.2.1.3. Utang Pajak

Utang Pajak PFK pada tahun 2019 sebesar Rp1.000,00.

Utang Pajak

B.2.1.4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar sebesar NIHIL.

Bagian Lancar Utang Jk Panjang

B.2.1.5. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.071.711.808,00 terdiri dari : Retribusi Sewa kekayaan Daerah di BPKAD sebesar Rp431.898.782,00, dan Pajak Reklame sebesar Rp639.813.026,00.

Pendapatan Diterima Dimuka

B.2.1.6. Utang Beban Barang dan Jasa

Utang Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet Kota Cilegon per 31 Desember 2019 atas beban jasa tahun 2019 yang akan dibayarkan tahun 2020 sebesar Rp767.885.431,00

Utang Beban Barang dan Jasa

Adapun rincian lebih lanjut atas beban jasa TALI Tahun 2019 yang akan dibayarkan tahun 2020 masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:

NO	SKPD	BEBAN TAHUN 2019 YANG DIBAYARKAN TAHUN 2020 (Rp)				JUMLAH
		TELEPON	AIR	LISTRIK	INTERNET	
1	DINAS PENDIDIKAN	1.855.742		55.924.950	5.744.169	63.524.861
2	DINAS KESEHATAN	2.396.869	1533500	65.456.886	4.706.044	74.093.299
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	0	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			25.124.681		25.124.681
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	913.918	8543000	12.007.568	489.500	21.953.986
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	770.230		6.958.038	805.300	8.533.568
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	62.910	0	11.314.547	687.000	12.064.457
8	DINAS SOSIAL	215.745		111.580		327.325
9	DINAS TENAGA KERJA	55.960	3294000	24.779.083		28.129.043
10	DINAS PP, PA DAN KB	1.012.979	314800	2.842.628		4.170.407
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.022.624	4562400	7.872.988	465.500	14.923.512
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1043900			1.043.900
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	60.910				60.910
14	DINAS PERHUBUNGAN	558.800		31.906.994		32.465.794
15	DINAS KOMINFO, SANDI DAN STATISTIK					-
16	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL	977.313	227300	5.712.878		6.917.491
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	798000	13.035.743	2.760.273	16.594.016
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	52.910	294500	12.453.763	712.500	13.513.673
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	126.700		8.222.283	713.500	9.062.483
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		125500	2.788.200	561.000	3.474.700
21	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	945.500	75500	4.332.458	-	5.353.458
22	SEKRETARIAT DAERAH	7.657.668	133000	167.025.323	12.556.518	187.372.509
23	SEKRETARIAT DPRD	466.880	63500	44.422.636	4.010.000	48.963.016
24	KECAMATAN CILEGON			10.325.354	3.905.662	14.231.016
25	KECAMATAN CIWANDAN			13.806.459	3.142.104	16.948.563
26	KECAMATAN CIBEKER			907.168	7.198.049	8.105.217
27	KECAMATAN GROGOL	1.204.332	52000	8.636.737	1.076.880	10.969.949
28	KECAMATAN PULOMERAK			17.216.654	4.683.786	21.900.440
29	KECAMATAN PURWAKARTA	531.925	190000	4.129.084	4.424.050	9.275.059
30	KECAMATAN JOMBANG	1.740.775	265000	12.495.069	1.675.100	16.175.944
31	KECAMATAN CITANGKIL	2.909.433	0	9.067.779	2.276.200	14.253.412
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	480.425				480.425
34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-				-
35	INSPEKTORAT DAERAH	55.410	70500	16.089.899		16.215.809
36	B A P P E D A	1.274.502	493000	43.614.946	4.112.114	49.494.562
37	BPKAD	428.370		2.242.200	214.900	2.885.470
38	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	469.107				469.107
	JUMLAH	29.247.937,0	22.079.400,0	648.600.945,0	67.957.149,0	767.885.431

Informasi :

- Untuk keperluan urusan teknologi informasi dan komunikasi salah satunya jaringan internet yang bisa diakses oleh SKPD dilingkungan pemerintah kota cilegon, Pemerintah Kota Cilegon telah menerapkan konsep smart city melalui e-government yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi, dan Statistik Kota Cilegon.
- Untuk keperluan urusan air bersih, beberapa SKPD ada yang menggunakan Jasa pihak ketiga dalam hal ini penyedia supply air minum daerah melalui PDAM, sebagian ada yang telah menggunakan sumur bor/jetpump.
- Untuk keperluan urusan listrik, ada beberapa SKPD dilingkungan SETDA Kota Cilegon yang pembayarannya masih melalui Sekretaris Daerah Kota Cilegon.

B.2.1.7. Utang Beban Gaji Pegawai

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.373.578.909,00 dapat di lihat pada tabel berikut:

NO	SKPD	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2019 YANG DIBAYARKAN TAHUN 2020 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	670.240.913
	DINAS PENDIDIKAN	640.997.000
	SMPN1	11.533.113
	SMPN2	3.135.000
	SMPN3	0,00
	SMPN4	0,00
	SMPN5	0,00
	SMPN6	14.117.700
	SMPN7	0,00
	SMPN8	0,00
	SMPN9	458.100
	SMPN10	0,00
	SMPN11	0,00
2	DINAS KESEHATAN	458.764.510
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11.788.400
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	0,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.407.700
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2.655.100
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.402.600
8	DINAS SOSIAL	1.503.700
9	DINAS TENAGA KERJA	0,00
10	DINAS PP, PA DAN KB	8.067.000
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	29.222.000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	0,00
15	DINAS KOMINFO, SANDI DAN STATISTIK	1.740.000
16	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL	8.022.300
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.513.900
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.765.394
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00
21	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	4.584.400
22	SEKRETARIAT DAERAH	46.031.700
23	SEKRETARIAT DPRD	0,00
24	KECAMATAN CILEGON	0,00
25	KECAMATAN CIWANDAN	30.116.900
26	KECAMATAN CIBEBER	0,00
27	KECAMATAN GROGOL	5.362.500
28	KECAMATAN PULOMERAK	8.928.748
29	KECAMATAN PURWAKARTA	0,00
30	KECAMATAN JOMBANG	3.377.100
31	KECAMATAN CITANGKIL	6.059.644
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.159.800
33	BADAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH	0,00
34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.332.300
35	INSPEKTORAT DAERAH	31.050.900
36	B A P P E D A	3.481.400
37	BPKAD	0,00
38	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00
	JUMLAH	1.373.578.909

B.2.1.8. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp27.929.121.232,00 dapat di lihat pada tabel berikut:

Utang Jk
Pendek
Lainnya

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
HUTANG KEGIATAN	18.805.096.068,00	27.888.496.625,00	18.764.471.461,00	27.929.121.232,00
DPUTR	53.422.649,00	15.389.041.214,00	36.497.649,00	15.405.966.214,00
2015	14.870.649,00	0,00	7.870.649,00	7.000.000,00
2017	28.627.000,00	0,00	28.627.000,00	0,00
2018	9.925.000,00	0,00	0,00	9.925.000,00
2019	0,00	15.389.041.214,00	0,00	15.389.041.214,00
DISPERIN	0,00	8.312.250,00	0,00	8.312.250,00
2019	0,00	8.312.250,00	0,00	8.312.250,00
DISHUB	0,00	13.581.000,00	0,00	13.581.000,00
2019	0,00	13.581.000,00	0,00	13.581.000,00
RSUD - BLUD	18.751.673.419,00	12.477.562.161,00	18.727.973.812,00	12.501.261.768,00
2018	18.751.673.419,00	0,00	18.727.973.812,00	23.699.607,00
2019	0,00	12.477.562.161,00	0,00	12.477.562.161,00

B.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Pemerintah Kota Cilegon yang akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun per 31 Desember 2019 sebesar NIHIL.

Kewajiban
Jk Panjang

B.3 Ekuitas

Ekuitas Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.683.205.602.309,83 atau meningkat sebesar Rp184.117.229.423,83 dari ekuitas Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2018 yang sebesar Rp4.499.088.372.886,00.

Ekuitas

F. LAPORAN ARUS KAS

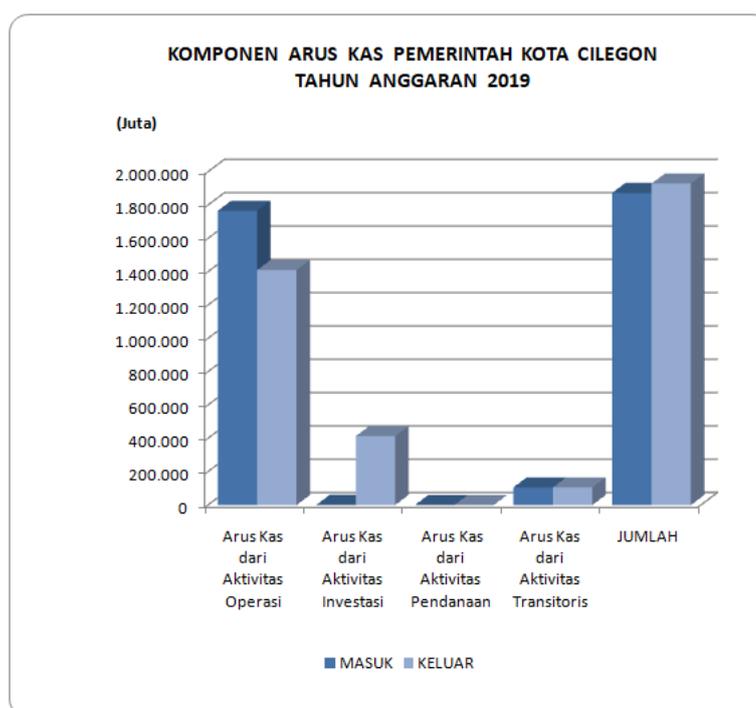
Laporan Arus Kas tahun anggaran 2019 menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan
Arus Kas

Komponen utama dari Laporan Arus Kas yaitu Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar yang terdiri dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

Komponen Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar tahun anggaran 2019 dan komparasinya dengan Arus Kas Masuk Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

LAPORAN ARUS KAS	MASUK	KELUAR	ARUS KAS BERSIH
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1.766.153.591.955,00	1.410.083.194.697,00	356.070.397.258,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	826.967.520,00	413.224.916.445,00	(412.397.948.925,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	106.270.264.470,00	106.270.263.470,00	1.000,00
JUMLAH	1.873.250.823.945,00	1.929.578.374.612,00	(56.327.550.667,00)



Komponen
Laporan

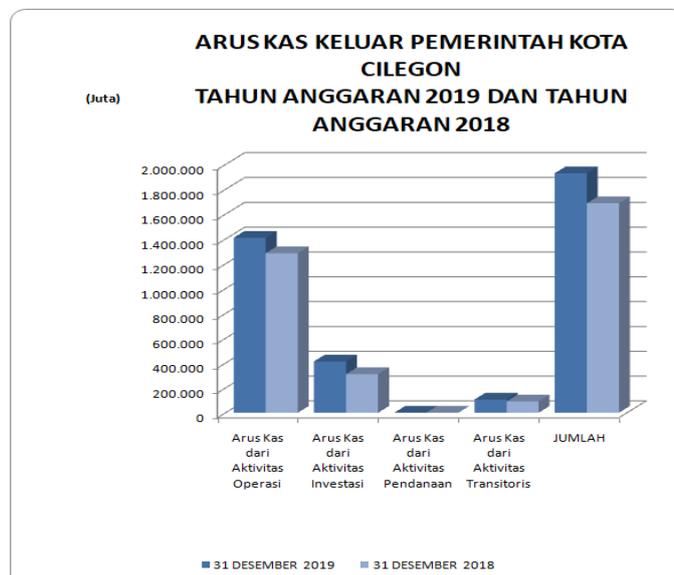
Komponen Arus Kas Masuk tahun anggaran 2019 dan komparasinya dengan Arus Kas Masuk Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

LAPORAN ARUS KAS MASUK	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1.766.153.591.955,00	1.629.427.497.950,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	826.967.520,00	592.527.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	106.270.264.470,00	91.043.973.587,00
JUMLAH	1.873.250.823.945,00	1.721.063.998.537,00



Komponen Arus Kas Keluar TA 2019 dan komparasinya dengan Arus Kas Keluar TA 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut :

LAPORAN ARUS KAS KELUAR	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1.410.083.194.697,00	1.285.450.465.240,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	413.224.916.445,00	310.636.617.802,00
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	106.270.263.470,00	91.043.973.587,00
JUMLAH	1.929.578.374.612,00	1.687.131.056.629,00



C.1. Arus Kas Aktivitas Operasi

C.1.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

(1) Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pajak Daerah

Arus Kas
Masuk dari
Pendapatan
Pajak

Arus kas masuk dari Pendapatan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2019 sebesar Rp488.733.629.539,00 dan TA 2018 yang sebesar Rp429.234.596.141,00.

(2) Arus Kas Masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah

Arus Kas
Masuk dari
Pendapatan
Retribusi

Arus kas masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp18.728.314.750,00 dan di tahun 2018 yang sebesar Rp18.827.127.530,00

(3) Arus Kas Masuk dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus Kas
Masuk dari
Pendapatan
Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah
yang
Dipisahkan

Arus kas masuk dari Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp17.127.057.370,00 dan tahun 2018 yang sebesar Rp18.027.533.084,00

(4) Arus Kas Masuk dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Arus Kas
Masuk dari
Pendapatan
Lain-lain
PAD yang
Sah

Arus kas masuk dari Lain-lain PAD yang Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp109.382.023.983,00 dan tahun 2018 Rp111.653.562.541,00.

(5) Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak

Arus Kas
Masuk dari
Pendapatan
Bagi
Hasil Pajak

Arus kas masuk dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp96.543.890.961,00 dan tahun 2018 yang sebesar Rp118.352.788.466,00.

(6) Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus Kas
Masuk dari
Pendapatan
Bagi
Hasil Bkn

Arus kas masuk dari Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam yang telah disetorkan ke Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp1.582.740.490,00 dan tahun 2018 yang sebesar Rp1.593.297.207,00.

-
- Pajak*
- (7) Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum**
Arus kas masuk dari Pendapatan Dana Alokasi Umum merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang telah disetorkan ke Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp643.891.037.000,00 dan tahun 2018 yang sebesar Rp597.861.841.963,00
- Arus Kas Masuk dari Pendapatan DAU*
- (8) Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus**
Arus kas masuk dari Pendapatan Dana Alokasi Khusus merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah disetorkan ke Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp124.713.795.569,00 dan tahun 2018 sebesar Rp123.996.175.236,00.
- Arus Kas Masuk dari Pendapatan DAK*
- (9) Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak**
Arus kas masuk dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi merupakan penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dari Propinsi yang telah disetorkan ke Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp153.420.457.880,00 dan tahun 2018 yang sebesar Rp141.530.983.941,00.
- Arus Kas Masuk dari Bagi Hasil Pajak Propinsi*
- (10) Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Penyesuaian**
Arus kas masuk dari Dana Penyesuaian merupakan penerimaan Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru serta Dana Insentif Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp33.166.816.000,00 dan tahun 2018 yang sebesar Rp0,00.
- Arus Kas Masuk dari Dana Penyesuaian*
- (11) Arus Kas Masuk dari Bantuan Keuangan dari Provinsi**
Arus Kas Masuk dari Pendapatan lainnya merupakan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi yang telah disetorkan ke Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp40.000.000.000,00 dan tahun 2018 yang sebesar Rp30.000.000.000,00.
- Arus Kas Masuk dari Bantuan Keuangan Propinsi*
- (12) Arus Kas Masuk dari Penerimaan Hibah**
Arus Kas Masuk dari Pendapatan hibah merupakan Penerimaan Hibah Dana BOS yang telah disetorkan ke Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp38.863.765.413,00 dan tahun 2018 yang sebesar Rp38.349.591.841.
- Arus Kas Masuk dari Hibah Dana BOS*
-

C.1.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Kas
Keluar dari
Belanja
Pegawai

(1) Arus Kas Keluar dari Pembayaran Pegawai

Arus kas keluar ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp681.225.108.290,00 dan tahun 2018 Rp562.943.533.507,00.

Arus Kas
Keluar dari
Belanja
Barang dan
Jasa

(2) Arus Kas Keluar dari Pembayaran Barang Jasa

Arus kas keluar dari Belanja Barang Jasa merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Barang Jasa yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp673.160.001.768,00 dan tahun 2018 sebesar Rp638.168.701.242,00.

Arus Kas
Keluar dari
Belanja
Subsidi

(3) Arus Kas Keluar dari Pembayaran Subsidi

Arus kas keluar dari Belanja Subsidi merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Subsidi yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp0,00 dan tahun 2018 Rp0,00.

Arus Kas
Keluar dari
Belanja
Hibah

(4) Arus Kas Keluar dari Pembayaran Hibah

Arus kas keluar dari Belanja Hibah merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp52.488.994.040,00 dan tahun 2018 yang sebesar Rp43.287.073.044,00.

Arus Kas
Keluar dari
Belanja
Bantuan
Sosial

(5) Arus Kas Keluar dari Pembayaran Bantuan Sosial

Arus kas keluar dari Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Bantuan Sosial yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp2.232.360.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp6.036.520.000,00

Arus Kas
Keluar dari
Belanja
Bantuan
Keuangan

(6) Arus Kas Keluar dari Belanja Bantuan Keuangan

Arus kas keluar dari Belanja Bantuan keuangan merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Bantuan keuangan yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp976.730.599,00 dan tahun 2018 sebesar Rp913.397.208,00.

(7) Arus Kas Keluar dari Pembayaran Tidak Terduga

Arus Kas
Keluar dari
Belanja
Tidak
Terduga

Arus kas keluar dari Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp,00 dan tahun 2018 sebesar Rp0,00.

C.1.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas
Bersih dari
Aktivitas
Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2019 sebesar Rp356.054.106.742,00 dan tahun 2018 sebesar Rp343.977.032.710,00.

C.2. Arus Kas Aktivitas Investasi**C.2.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi**

Arus kas masuk dari Aktivitas Investasi tahun 2019 sebesar Rp826.967.520,00 dan arus kas masuk dari Aktivitas investasi tahun 2018 sebesar Rp592.527.000,00.

C.2.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi**(1) Arus Kas Keluar dari Perolehan Modal Tanah**

Arus Kas
Keluar dari
Belanja
Tanah

Arus kas keluar dari Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Tanah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp117.515.997.654,00 dan tahun 2018 sebesar Rp57.333.558.721,00

(2) Arus Kas Keluar dari Perolehan Peralatan Mesin

Arus Kas
Keluar dari
Belanja
Peralatan
Mesin

Arus kas keluar dari Belanja Modal Peralatan Mesin merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Peralatan Mesin yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp89.775.337.181,00 dan tahun 2018 yang sebesar Rp48.497.428.363,00

(3) Arus Kas Keluar dari Perolehan Gedung dan Bangunan

Arus Kas
Keluar dari
Belanja
Gedung
Bangunan

Arus kas keluar dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp117.471.215.752,00 dan tahun 2018 sebesar Rp113.648.316.910,00.

(4) Arus Kas Keluar dari Perolehan Jalan, Irigasi & Jaringan

Arus Kas
Keluar dari
Belanja
Jalan,
Irigasi dan
Jaringan

Arus kas keluar dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah tahun 2018 sebesar Rp72.802.132.456,00 dan tahun 2018 sebesar Rp81.626.705.244,00 .

(5) Arus Kas Keluar dari Perolehan Aset Tetap Lainnya

Arus Kas
Keluar dari
Belanja
Aset Tetap
Lainnya

Arus kas keluar dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp10.630.570.252,00 dan tahun 2018 yang sebesar Rp3.026.360.364,00

(6) Arus Kas Keluar dari Perolehan Aset lainnya

Arus Kas
Keluar dari
Belanja
Aset
Lainnya

Arus kas keluar dari Belanja Modal Aset lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset lainnya yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp5.029.663.150,00 dan tahun 2018 yang sebesar Rp504.250.000,00.

(7) Arus Kas Keluar dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Arus Kas
Keluar dari
Penyertaan
Modal
Pemerintah
Daerah

Arus kas keluar dari Penyertaan Modal yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp0,00 dan tahun 2018 yang sebesar Rp0,00.

(8) Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen

Pengeluarn
Pembelian
Investasi
Non
Permanen

Arus kas keluar dari Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp0,00 dan tahun 2018 yang sebesarRp0,00.

C.2.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas
Bersih dari
Aktivitas
Investasi

Arus Kas bersih dari aktivitas Investasi tahun 2019 sebesar (Rp412.507.218.925,00)sedangkan tahun 2018 sebesar (Rp310.044.090.802,00).

C.3. Arus Kas Aktivitas Pendanaan

C.3.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas
Aktivitas
Pendanaan

- (1) **Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah**
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun 2019 sebesar Rp0,00
- (2) **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Tahun 2019 sebesar Rp0,00

C.3.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas
Keluar dari
Aktivitas
Pendanaan

- (1) **Arus Kas Keluar dari Pembayaran Pokok Hutang**
Arus kas keluar dari Pembayaran Pokok Hutang merupakan Pengeluaran yang berasal dari pos Pembayaran Pokok Hutang yang telah di keluarkan dari kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp0,00 dan di tahun 2018 sebesar Rp0,00.

Arus Kas
Keluar dari
Pembayarn
Pokok
Hutang

- (2) **Arus Kas Keluar dari Pemberian Pinjaman Daerah**
Arus kas keluar dari Pemberian Pinjaman Daerah merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Pemberian Pinjaman Daerah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah tahun 2019 sebesar Rp0,00 sedangkan di tahun 2018 sebesar Rp0,00.

Arus Kas
Keluar dari
Pemberian
Pinjaman
Daerah

C.3.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2019 sebesarRp0,00 sedangkan tahun2018 sebesar Rp0,00.

Arus Kas
Bersih dari
Aktivitas
Pendanaan

C.4. Arus Kas Aktivitas Transitoris

C.4.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas
Masuk dari
Penerimaan
n PFK

- (1) **Arus Kas Masuk dari Penerimaan PFK**
Arus kas masuk dari Penerimaan PFK merupakan penerimaan yang berasal dari pos Penerimaan PFK yang telah diterima di tahun 2019 sebesar Rp106.270.264.470 dan tahun 2018 sebesar Rp91.043.973.587,00.

C.4.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris**(1) Arus Kas Keluar dari Pengeluaran PFK**

Arus Kas
Keluar dari
Pengeluaran
PFK

Arus kas Keluar dari Pengeluaran PFK merupakan Pengeluaran yang berasal dari pos Pengeluaran PFK yang telah keluar dari tahun 2019 sebesar Rp106.270.263.470,00 dan tahun 2018 sebesar Rp91.043.973.587,00.

C.4.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas
Bersih dari
Aktivitas
Transitoris

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2019 sebesar Rp1.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp0,00.

Kenaikan/
Penurunan
Bersih Kas
Selama
Periode

Penyajian laporan arus kas aktivitas transitoris pada tahun 2019 ini berbeda dari tahun sebelumnya, dimana pelaporan transitoris tahun 2018 hanya menyajikan pajak yang bersumber dari SP2D LS, tahun 2019 menyajikan seluruh penerimaan dan pemotongan pajak.

C.5. Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

Penurunan bersih kas tahun 2019 sebesar (Rp56.327.550.667,00) sedangkan tahun 2018 sebesar Rp33.932.941.908,00

Saldo Awal
Kas BUD

C.6 Saldo Awal Kas BUD Kas Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kas BLUD dan Kas Lainnya

Saldo Akhir
Kas BUD

Saldo Awal Kas BUD sebesar Rp192.902.114.842,00 terdiri dari Saldo Awal Kas di Kas Daerah Rp188.396.494.503,00; Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp10.000,00; Saldo Awal Kas di Kas Lainnya Rp1.759.859.785,00; Saldo Awal kas BLUD sebesar Rp2.745.750.554,00;

C.7 Saldo Akhir Kas BUD Kas Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kas BLUD dan Kas Lainnya

Saldo Akhir
Kas
Pemerintah
Daerah

Saldo Akhir Kas BUD sebesar Rp136.558.504.745,00 terdiri dari Saldo Akhir Kas di Kas Daerah Rp131.065.822.742,00; Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp1.000,00; Kas di Bendahara Penerimaan Rp16.059.430,00; Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya Rp3.154.920.228,00; Saldo Akhir kas BLUD sebesar Rp2.337.760.775,00;

C.8 Saldo Akhir Kas Pemerintah Daerah

Saldo akhir Kas tahun 2019 sebesar Rp136.558.504.745,00 sedangkan di tahun 2018 sebesar Rp192.902.114.842,00.

Komposisi Saldo Akhir Kas Pemerintah Kota Cilegon dapat dilihat dalam Tabel berikut :

KAS		31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
11101	Kas di Kas Daerah	131.065.822.742,00	188.396.494.503,00
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.000,00	10.000,00
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	16.059.430,00	0,00
11104	Kas di BLUD	2.337.760.775,00	2.745.750.554,00
	Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD	863.040.650,00	1.122.110.307,00
	Kas di Badan Layanan Umum Daerah PDB	1.474.720.125,00	1.623.640.247,00
11105	Kas Lainnya	3.154.920.228,00	1.759.859.785,00
	Kas Lainnya- FKTP JKN	1.416.230.346,00	855.801.918,00
	Kas Lainnya-Dana Bos	1.738.689.882,00	904.057.867,00
	JUMLAH	136.558.504.745,00	192.902.114.842,00

VI. INFORMASI TAMBAHAN, KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

A. KONSOLIDASI BLUD RSUD & BLUD PDB

Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah di Pemerintah Kota Cilegon diterapkan pada 2 OPD yaitu BLUD rumah sakit di OPD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon dan BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir (PDB) di OPD Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil (DKUMK) Kota Cilegon.

BLUD RSUD dan BLUD PDB telah dikonsolidasi dalam laporan keuangan ini. Laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan sampai dengan objek belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Laporan realisasi BLUD RSUD tahun 2019 sebagai berikut :

Silpa Tahun Lalu	: Rp1.122.110.307,00
Pendapatan	: Rp73.815.024.258,00
Belanja	: Rp74.074.093.915,00
Silpa Tahun Ini	: Rp863.040.650,00

Laporan realisasi BLUD PDB tahun 2019 sebagai berikut :

Silpa Tahun Lalu	: Rp1.623.640.247,00
Pendapatan	: Rp3.210.649.402,00
Belanja	: Rp3.359.569.524,00
Silpa Tahun Ini	: Rp1.474.720.125,00

Terkait dengan penyajiannya di Laporan Arus Kas, pada tahun 2019 BLUD diperlakukan sebagai aktivitas arus kas sehingga disajikan sebagai komponen dari Saldo Kas di BUD sesuai dengan PSAP No 13 tentang Penyajian Laporan Badan Layanan Umum.

Laporan BLUD dikonsolidasikan dalam Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Terkait dana bergulir yang dikelola BLUD UPT PDB, disajikan sebagai Investasi Non Permanen di Neraca dengan metode Net Realizable Value (NRV) dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Cilegon Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon.

Laporan Keuangan BLUD yang dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 ini merupakan Laporan Keuangan BLUD Unaudited.

B. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada tahun 2019 di Dinas Pendidikan Kota Cilegon telah dikonsolidasikan pengelolaan dana BOS. Dana BOS ini dikelola secara mandiri oleh sekolah selaku sehingga pengelolaannya tidak melalui Kas Umum Daerah. Berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan, pengelolaan dana BOS tersebut dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan realisasi BOS tahun 2019 sebagai berikut :

Silpa Tahun Lalu	: Rp904.057.867,00
Pendapatan	: Rp38.863.765.413,00
Belanja	: Rp38.029.133.398,00
Silpa Tahun Ini	: Rp1.738.689.882,00

Terkait dengan penyajiannya di Laporan Arus Kas, BOS diperlakukan sebagai aktivitas arus kas sehingga disajikan sebagai komponen dari Saldo Kas di BUD.

Laporan BOS juga dikonsolidasikan dalam Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

C. FKTP JKN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, pada tahun 2019 di Dinas Kesehatan Kota Cilegon khususnya di 8 puskesmas yang ada telah diterapkan pengelolaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dana Kapitasi ini dikelola secara mandiri oleh puskesmas selaku Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah (FKTP) sehingga pengelolaannya tidak melalui Kas Umum Daerah. Berdasarkan laporan dari FKTP, pengelolaan dana Kapitasi JKN tersebut dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan realisasi FKTP JKN tahun 2019 sebagai berikut :

Silpa Tahun Lalu	: Rp855.801.918,00
Pendapatan	: Rp12.631.882.808,00
Belanja	: Rp12.071.454.380,00
Silpa Tahun Ini	: Rp1.416.230.346,00

Terkait dengan penyajiannya di Laporan Arus Kas, FKTP JKN diperlakukan sebagai aktivitas arus kas sehingga disajikan sebagai komponen dari Saldo Kas di BUD.

Laporan FKTP JKN juga dikonsolidasikan dalam Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili Kota Cilegon

Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten yang berada di ujung barat laut pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon pada Akhirnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Serang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan sejak tanggal 20 April 1999 Kota Cilegon menjadi kotamadya atau wilayah pemerintahan otonomi yang secara yuridis ditetapkan melalui Undang-Undang No.15 Tahun 1999. Sebagai kotamadya (sebutan kotamadya diganti dengan kota sejak tahun 2001), Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri dan menjadi pusat industri di kawasan Banten bagian barat. Kota Cilegon dilintasi jalan negara dan jalan tol lintas Jakarta-Merak, dilalui jalur kereta api Jakarta-Merak, serta merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Di Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital nasional antara lain Pelabuhan penyeberangan Merak, Pelabuhan PLTU Suralaya dan Industri Strategis Nasional Krakatau Steel.

Kota Cilegon dilintasi jalan negara dan jalan tol lintas Jakarta-Merak, dilalui jalur kereta api Jakarta-Merak, serta merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Di Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital nasional antara lain Pelabuhan penyeberangan Merak, Pelabuhan PLTU Suralaya dan Industri Strategis Nasional Krakatau Steel.

A.1. Kondisi Geografis Daerah

Kota Cilegon berada pada posisi paling barat pulau Jawa dan juga Provinsi Banten, yaitu terletak antara 105°54'05" - 106°05'11" Bujur Timur dan 5°52'24" - 6°04'07" Lintang Selatan yang dibatasi oleh :

Sebelah Barat	: Selat Sunda
Sebelah Utara	: Kec. Pulo Ampel (Kabupaten Serang)
Sebelah Timur	: Kec. Bojonegara dan Kec. Kramat (Kabupaten Serang)
Sebelah Selatan	: Kec. Waringin Kurung, Kec. Mancak dan Anyer (Kabupaten Serang)

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Cilegon berada di bagian ujung sebelah barat dari Pulau Jawa yang terletak pada posisi 5° 52' 24" – 6° 04' 07" Lintang Selatan (LS) dan 105° 54' 05" – 106° 05' 11" Bujur Timur (BT). Batasan ruang lingkup wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 luas wilayah administrasi 17.550,0 Ha dengan 4 kecamatan yang telah dimekarkan menjadi 8 kecamatan (Kecamatan Ciwandan, Citangkil, Pulomerak, Grogol, Purwakarta, Cilegon, Jombang, dan Cibeber) yang terdiri atas 43 kelurahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penentuan daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Kewenangan daerah kota terhadap laut adalah 1/3 dari wilayah laut Propinsi (yaitu 12 mil laut), atau kurang 4 mil laut (1 mil laut = 1.852 m, sehingga 4 mil laut = 7.408 m). Panjang pantai Kota Cilegon yang menghadap ke Selat Sunda bila diukur secara "lurus" adalah sekitar 25 Km. Sehingga secara tentatif luas laut yang menjadi kewenangan Kota Cilegon sekitar 185 Km², atau sedikit lebih luas dari wilayah daratan.

Kota Cilegon memiliki 5 (lima) pulau, yaitu: P. Merak Besar, P. Merak Kecil, P. Rida, P. Ular dan P. Tempurung. Pulau-pulau yang berada di perairan Kota Cilegon ini merupakan bagian ekosistem pantai yang keberadaannya secara ekologi berfungsi sebagai pengatur iklim, pengatur siklus hidrologi, penyerap limbah, penahan gelombang dan angin, sumber plasma nutfah dan penunjang kehidupan lainnya. Ditinjau dari aspek geostrategis, Kota Cilegon memiliki peran dan posisi yang sangat menentukan dalam mendukung arah dan pola pembangunan serta pengembangan perkotaan baik dalam konstelasi regional, nasional, dan bahkan internasional. Selain aspek geostrategis, karakteristik geografis Kota Cilegon masuk ke dalam kategori kota pesisir. Hal ini diindikasikan dengan membentangnya kawasan pesisir laut dari bagian utara hingga selatan wilayah kota serta hasil perhitungan Peta Topografi Kota Cilegon di mana panjang garis pantai Kota Cilegon adalah 40,88 km atau sekitar 43,6% dari total perimeter wilayah Kota Cilegon.

A.2. Luas Wilayah

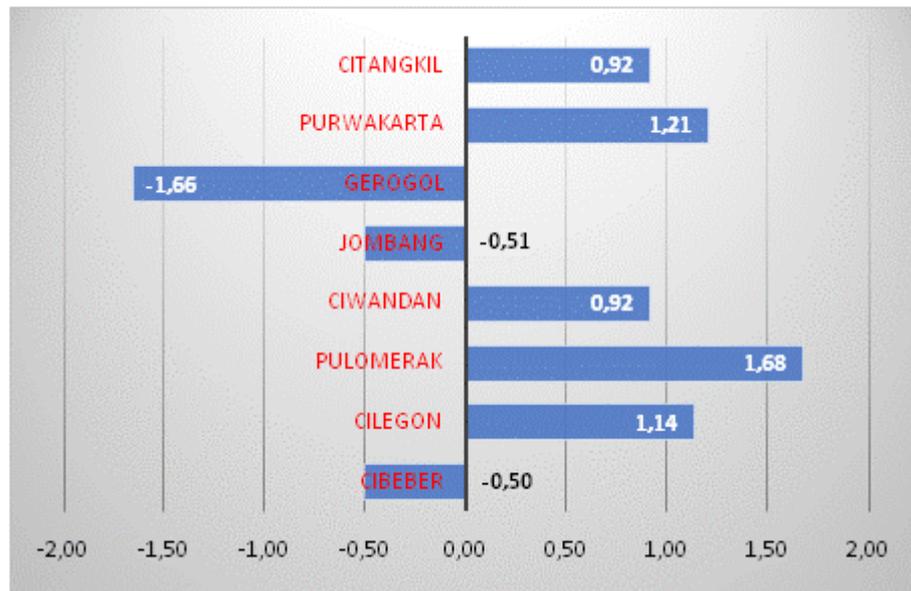
Kota Cilegon merupakan kota otonom yang secara yuridis dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok. Sebagai kota yang berada di ujung Barat Pulau Jawa, Kota Cilegon merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Secara administratif, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Cilegon, Kota Cilegon memiliki luas wilayah 175,51 km² yang terbagi kedalam 8 (delapan) Kecamatan dan 43 (empat puluh tiga) Kelurahan. Pembagian wilayah serta jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 **Error! No text of specified style in document.**-1. Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Pusat Kecamatan	Luas		Jumlah Kelurahan
			Km ²	%	
1	Ciwandan	Tegal Ratu	51,81	29,52	6
2	Citangkil	Kebonsari	22,98	13,09	7
3	Pulomerak	Tamansari	19,86	11,32	4
4	Purwakarta	Purwakarta	15,29	8,71	6
5	Grogol	Grogol	23,38	13,32	4
6	Cilegon	Ciwaduk	9,15	5,21	5
7	Jombang	Jombang Wetan	11,55	6,58	5
8	Cibeber	Kalitimbang	21,49	12,24	6
Kota Cilegon			175,51	100	43

A.3. Kondisi Demografis Daerah

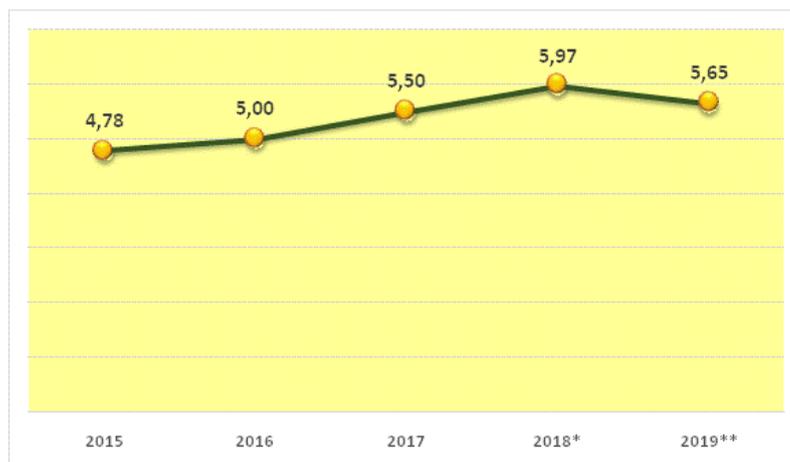
Penduduk Kota Cilegon berdasarkan Basis Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 adalah sebanyak 423.362 jiwa yang terdiri atas 215.245 jiwa penduduk laki-laki dan 208.117 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Cilegon mengalami pertumbuhan sebesar 1,55 persen.



Gambar 1-Error! No text of specified style in document.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cilegon Tahun 2016-2019. Sumber : BPS Kota Cilegon

A.4. Kondisi Ekonomi

Pada tahun 2015 sampai dengan 2018 Perekonomian Kota Cilegon semakin membaik seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon. Berdasarkan data BPS, perekonomian Kota Cilegon tahun 2018 mampu tumbuh sebesar 5,97% naik 1,19 poin dari tahun 2015 (4,78%), dan pada tahun 2019 melambat sebesar 5,65%. Kondisi tersebut didorong oleh realisasi investasi yang semakin membaik dan telah memberikan dampak bagi perekonomian Kota Cilegon. Pada gambar berikut adalah perjalanan Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon dari tahun 2015 sampai dengan 2019.



Gambar **Error! No text of specified style in document.**1-2. Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon 2015-2019.

Sumber : Cilegon Dalam Angka Tahun 2020

Secara global hal ini terdampak dari adanya perang dagang antara Amerika dan China yang masih terus berlanjut. Dengan struktur ekonomi yang sebagian besar disumbangkan dari sektor industri yang berorientasi ekspor import, kondisi ekonomi global sangat mempengaruhi terhadap kinerja sektor industri. Merupakan tantangan bagi Pemerintah daerah untuk mendorong sektor-sektor lainnya untuk mengurangi kebergantungan terhadap sektor industri.

A.4.1. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan karakteristik wilayah geostrategis, beberapa potensi yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunannya holistik diberbagai sektor strategis diantaranya adalah :

Pengembangan industri dan pelabuhan

Pertumbuhan dan perkembangan sektor industri diinisiasi oleh kondisi pesisir pantai Selat Sunda yang sangat ideal bagi pengembangan kepelabuhanan terutama ditinjau dari topografi (kedalaman) pantai yang ideal bagi penambatan kapal besar dan karakteristik perairan yang relatif tenang (selat). Posisi pelabuhan sendiri dalam perkembangan industri memegang peranan yang sangat sentral sebagai fasilitas utama dalam menunjang pergerakan barang dan produksi baik itu lalu lintas bahan baku maupun produk industri. Kondisi topografis pantai ini pun ditunjang oleh peran Selat Sunda sebagai jalur pelayaran internasional sehingga aksesibilitas perairan Kota Cilegon sangat tinggi. Dengan panjang pantai yang membentang dari utara hingga selatan wilayah Kota Cilegon (sekitar 40,88 km atau sekitar 43,6% dari total keliling wilayah Kota Cilegon), industri dan pelabuhan merupakan aktivitas yang intensitasnya paling tinggi di mana sekitar 52,3% dari panjang garis pantai telah terisi oleh kegiatan tersebut.

Pengembangan Perumahan. Sebagai efek berganda dari pertumbuhan aktivitas perkotaan yang disertai dengan bertambahnya laju pertumbuhan penduduk maka kebutuhan akan hunian pun semakin meningkat. Banyaknya commuter luar kota yang bekerja di Kota Cilegon harus dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dengan mendorong pertumbuhan perumahan-

perumahan yang memenuhi kebutuhan berbagai segmen pekerja di perusahaan industri maupun jasa untuk 'mendekatkan' tempat kerja dengan rumah tinggal.

Pengembangan Perdagangan dan Jasa

Potensi pengembangan perdagangan dan jasa akan semakin meningkat seiring dengan perubahan atas tiga hal yaitu meningkatnya status pelayanan perkotaan Kota Cilegon sebagai service-city bagi daerah sekitarnya (Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang), pembangunan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas kawasan, dan peningkatan pembangunan perumahan. Keberadaan Jalan Lingkar Selatan sebagai pusat pertumbuhan baru yang diproyeksikan memiliki peran strategis dalam menunjang pelayanan perkotaan. Di sisi lain, adanya pembangunan jalan lingkar utara yang diharapkan selesai pada akhir 2021 diharapkan dapat menambah dan memperluas pusat aktivitas perekonomian penduduk, disamping meningkatkan kualitas tata kelola perhubungan di Kota Cilegon.

Potensi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Keberadaan RTH di Kota Cilegon akan sangat bermanfaat sebagai penyeimbang tingginya intensitas kegiatan terutama industri dan kawasan terbangun dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Dalam konteks pengembangan RTH pada prinsipnya terdapat tiga fungsi yaitu sebagai konservasi, pelindung kelestarian objek/lingkungan tertentu, dan penunjang estetika kota.

RTH yang berfungsi sebagai pelindung kelestarian objek/lingkungan tertentu direalisasikan dalam alokasi RTH penyangga (buffer) antara kawasan industri dan perumahan, RTH di sekitar ruang sempadan sungai, jalur kereta api, jaringan listrik tegangan tinggi (SUTT/SUTET), jalan tol, sempadan pantai, areal sekitar waduk, dan sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sedangkan untuk pengembangan RTH yang berfungsi penunjang estetika kota dialokasikan pada pengembangan dan pembangunan taman RTH publik di setiap kecamatan hingga tahun 2021.

Potensi Pengembangan Pariwisata

Secara topologi lahan dan iklim, potensi pengembangan pariwisata di Kota Cilegon memang cukup terbatas. Salah satu opsi adalah pengembangan wisata edukasi dengan konsep peternakan yang kini sedang menjadi tren. Di Kota Cilegon, keberadaan jalan lingkar selatan juga telah mendorong “akses-akses” baru bagi lokasi-lokasi tempat wisata berkonsep serupa di daerah kecamatan Cikerei dan sekitarnya. Adapun wisata pantai di Kota Cilegon masih memerlukan upaya ekstra untuk “membuka” wilayah pesisir (di luar kawasan industri) yang representatif untuk aktivitas rekreasi masyarakat. Beberapa kawasan yang mungkin potensial untuk dikembangkan sebagai pusat “leisure” di Kota Cilegon adalah di kawasan grogol, yaitu di sekitar Batu Lawang, di kawasan Waduk Krenceng, dan beberapa kawasan di sisi selatan dari jalan lingkar selatan Kota Cilegon.

B. Gambaran Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

B.1 Visi dan Misi (Periode RPJMD 2016-2021)

B.1.1. Visi Kota Cilegon

Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD 2016-2021 merupakan perwujudan dari tahapan ke 3 RPJPD kota Cilegon. Merujuk kepada dokumen RPJPD kota Cilegon tahun 2005-2025 pada Periode ketiga (2016-2020), arah kebijakan pencapaian visi jangka panjang diletakkan pada upaya penguatan kapasitas keunggulan daerah melalui optimalisasi fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah, peningkatan kompetensi SDM, dan akselerasi potensi ekonomi daerah berbasis industri, perdagangan, dan jasa, disertai penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut maka Visi kota Cilegon untuk RPJMD 2016-2021 adalah “TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA BERBASIS INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA”.

Visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 yaitu: “CILEGON PUSAT INDUSTRI,

PERDAGANGAN, DAN JASA TERDEPAN DI PULAU JAWA”, serta juga merupakan kelanjutan perwujudan dari visi pembangunan RPJMD Kota Cilegon periode sebelumnya (RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015).

Adapun indikasi wujud pencapaian sasaran strategis visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021 adalah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; Menurunnya kemiskinan; Menurunnya pengangguran; Meningkatnya kinerja dan kualitas perekonomian; serta Meningkatnya pelayanan publik.

B.1.2. Misi Kota Cilegon Tahun 2016-2021

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya - upaya dan tahapan-tahapan yang harus dilalui yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Bertitik tolak dari visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021 maka dirumuskan “misi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021” adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Kemandirian Perekonomian Daerah;
2. Memantapkan Lingkungan Kota Yang Asri dan Lestari;
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
4. Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota;
5. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan;

B.2. STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

B.2.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Memantapkan Kemandirian Perekonomian Daerah RPJMD Kota Cilegon 2016-2021

Rumusan kebijakan tahunan selama periode 2016-2021 dalam rangka pencapaian visi dan misi ke-1 Melalui misi ini diharapkan, Kota Cilegon mampu mengembangkan dan memperkuat perekonomiannya agar memiliki daya saing secara nasional maupun global dengan menggunakan seluruh potensi yang ada yang berorientasi kepada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berbasis pada industri, perdagangan dan jasa. Misi ke-1 ini selanjutnya dituangkan dalam Agenda Pembangunan yang pertama, yaitu Agenda Cilegon Mandiri yang berfokus pada pengembangan dan penguatan kemandirian perekonomian daerah sehingga mampu bertahan di perekonomian nasional maupun global dengan menggunakan seluruh

potensi yang ada yang berorientasi kepada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berbasis pada industri, perdagangan dan jasa

Dalam rangka mencapai sasaran misi ke-1, yaitu memantapkan kemandirian perekonomian daerah maka ditetapkan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program-program sebagai berikut:

Tabel 2.2

Strategi dan arah kebijakan misi ke-1 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021

No.	Strategi Misi I	Arah Kebijakan Misi I	Program Misi I
1	Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan	Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Hubungan Industrial
2	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, Pelayanan dan Aksesibilitas Informasi Ketenagakerjaan	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja melalui Optimalisasi Fungsi BLK dan meningkatkan Aksesibilitas Informasi Ketenagakerjaan dan Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, serta Kompetensi Tenaga Kerja
3	Peningkatan pembinaan, fasilitasi peningkatan kualitas SDM, kapasitas kelembagaan dan manajemen, akses permodalan, pemasaran produk dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. bagi UMKM dan koperasi	Memberdayakan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan serta pemanfaatan teknologi yang dimanifestasikan dalam konsep science and technopark dengan memberdayakan interaksi pemerintah, masyarakat, civitas perguruan tinggi, dan pelaku industri untuk meningkatkan kapasitas produksi serta menjalin konektivitas hasil produksi UMKM dengan rantai produksi industri menengah di Kota Cilegon	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
		Memberdayakan usaha Koperasi melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan
4	Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui aspek pemanfaatan teknologi dan kelembagaan/komunitas	Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) yang dimanifestasikan dalam wadah interaksi antar kelompok usaha bersama/kelembagaan swadaya masyarakat, civitas perguruan tinggi, dan pelaku industri di Kota	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

		Cilegon	
5	Peningkatan daya saing SDM dan pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan & teknologi, serta pemberdayaan berbasis komunitas.	Program Pengembangan Pertanian
		Meningkatkan produktivitas peternakan dan perikanan melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan & teknologi, peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta pemberdayaan masyarakat atau komunitas pelaku usaha sektor peternakan	Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatkan produktivitas perikanan dan perikanan melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan & teknologi, serta pemberdayaan masyarakat atau komunitas pelaku usaha sektor perikanan	Program Pengembangan Perikanan
6	Peningkatan tata kelola ketahanan pangan	Meningkatkan upaya-upaya diversifikasi dan keamanan pangan	Program Konsumsi, Diversifikasi dan Keamanan Pangan
		Meningkatkan tata kelola distribusi pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga	Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan
7	Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah	Mendorong industri kecil dan menengah dalam pemenuhan standar/regulasi dan meningkatkan konektivitas rantai produksi industri kecil dan menengah (IKM) terhadap rantai produksi industri besar	Program Pengembangan Kemitraan Industri
8	Peningkatan tata kelola dan pengembangan sarana & prasarana perdagangan perkotaan	Mengembangkan fungsi dan pengelolaan pasar	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar
		Meningkatkan pengawasan aktivitas perdagangan dalam upaya melindungi konsumen dan menjaga stabilitas harga barang pokok dan barang penting	Program Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan
9	Pengembangan sektor pariwisata	Pengembangan destinasi wisata daerah serta pembinaan, fasilitasi usaha kepariwisataan, dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10	Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan kualitas pelayanan penanaman modal	Meningkatkan upaya promotif Kota Cilegon sebagai tujuan investasi pada skala nasional dan internasional	Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal
		Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Berbagai kebijakan yang diperlukan untuk mendukung Kemandirian Daerah diantaranya kebijakan investasi padat karya, meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, peningkatan peran industri mikro, kecil, menengah dan koperasi, peningkatan produktifitas pertanian, serta pembangunan pelabuhan daerah dan optimalisasi wilayah pesisir guna mencapai Ketahanan ekonomi masyarakat.

B.2.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Memantapkan Lingkungan Kota yang Asri dan Lestari

Melalui misi kedua ini diharapkan, Kota Cilegon mampu mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga daya dukung dan fungsi lingkungan, serta menjaga rasio keseimbangan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rumusan kebijakan tahunan selama periode 2016-2021 dalam rangka pencapaian visi dan misi ke-2, dituangkan lebih lanjut dalam Agenda Pembangunan yang kedua, yaitu **Agenda Cilegon Bersih dan Asri**. Dalam Agenda ini diharapkan, Kota Cilegon mampu **mengelola** sumber daya daerah dan **kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan**, menjaga daya dukung dan fungsi lingkungan, serta **menjaga rasio keseimbangan ruang** yang serasi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Dalam rangka mencapai sasaran misi ke-2, yaitu Memantapkan Lingkungan Kota yang Asri dan Lestari maka ditetapkan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program-program sebagai berikut:

Tabel 2.3

Strategi dan arah kebijakan misi ke-2 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021

No.	Strategi Misi II	Arah Kebijakan Misi II	Program Misi II
1	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang dan bangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang	Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
		Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang	Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah
		Meningkatkan pengendalian tata bangunan, reklame, dan pengembangan gedung negara	Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan dan Pengendalian Reklame
		Mewujudkan kualitas Data	Program Pengelolaan Data

		Perencanaan Tata Ruang dan Pekerjaan Umum	Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi
2	Peningkatan pelayanan persampahan	Meningkatkan pelayanan persampahan melalui pengembangan sarana dan prasarana persampahan serta pengelolaan sampah berbasis komunitas	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
3	Peningkatan ketersediaan taman publik untuk menunjang keberadaan ruang terbuka hijau	Mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan taman sebagai ruang publik yang terpadu	Program Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota
		Mewujudkan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana arsitektur perkotaan	
4	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman secara terpadu	Mewujudkan penanganan kawasan kumuh secara terpadu serta meningkatkan kualitas penataan, pengembangan dan pengendalian kawasan pemukiman dan perumahan	Program Penataan Perumahan dan Permukiman
		Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
5	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara dan air	Meningkatkan pengawasan pencemaran sungai dan udara serta mengendalikan limbah industri sesuai dengan regulasi lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Mewujudkan perencanaan tata kelola lingkungan dan upaya-upaya promotif pengelolaan lingkungan berbasis komunitas	Program Penataan Lingkungan
6	Peningkatan pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan, serta melestarikan vegetasi	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan dan lingkungan, serta meningkatkan daya dukung lingkungan melalui pelestarian vegetasi	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Agenda Cilegon Bersih dan Asri juga mensyaratkan kondisi penataan perkotaan yang berkualitas, terjaganya ketertiban dan keindahan kota, terciptanya kondisi kebersihan kota yang memadai, serta terpenuhinya ruang publik bagi seluruh warga masyarakat.

B.2.3. Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Melalui misi ketiga ini diharapkan, Kota Cilegon mampu membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dari segi jasmani dan rohani, berkualitas dan produktif serta memiliki kompetensi yang tinggi sehingga memiliki daya saing baik lokal ataupun global, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan kearifan budaya, serta memiliki akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka mencapai sasaran misi ke-3, yaitu Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial dituangkan ke dalam program-program sebagai berikut :

Tabel 2.4
Strategi dan arah kebijakan misi ke-3 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021

No	Strategi Misi III	Arah Kebijakan Misi III	Program Misi III
1	Memperluas cakupan dan meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang merata, terjangkau dan bermutu serta memperluas cakupan pelayanan dan pembinaan pendidikan kesetaraan, anak usia dini, kemasyarakatan, dan informal	Penyediaan sarana dan fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung, serta bantuan biaya pendidikan bagi Sekolah Dasar	Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar
		Penyediaan sarana dan fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung, serta bantuan biaya pendidikan bagi Sekolah Menengah Pertama	Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama
		Pembinaan dan pengembangan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan serta sosialisasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, dan Lembaga Kursus	Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan
2	Mewujudkan kelestarian seni dan budaya untuk mendukung pendidikan karakter bagi usia sekolah serta menjaga kearifan lokal	Meningkatkan pembinaan seni tradisional, kelestarian nilai budaya, pembinaan sejarah, pengelolaan museum dan cagar budaya	Program Pembinaan dan Pelestarian Seni, Budaya dan Sejarah Daerah

3	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, kualitas gizi masyarakat dan perluasan cakupan pelayanan kesehatan khusus dan rujukan	Meningkatkan pola hidup sehat masyarakat melalui upaya-upaya promotif terkait kesehatan pada keluarga, pemenuhan gizi, dan kebiasaan berolahraga	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
		Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang kesehatan melalui mekanisme pembiayaan kesehatan (Jaminan Kesehatan), penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, mengembangkan sumber-sumber daya kesehatan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas penyedia jasa kesehatan serta peredaran obat dan makanan	Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
		Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan Kesehatan pada RSUD	Program Peningkatan Pelayanan RSUD
4	Peningkatan prestasi olahraga, dan pembudayaan olahraga melalui pembinaan	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pemuda dan olahraga	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
		Meningkatkan upaya promosi dalam rangka membudayakan olahraga dan melaksanakan pembinaan dan pelatihan atlet	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
		Meningkatkan Pembinaan terhadap organisasi Kepemudaan dalam rangka menyalurkan program kerja kepemudaan	Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda
5	Peningkatan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat	Meningkatkan cakupan layanan perlindungan sosial dan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat miskin	Program Perlindungan Jaminan Sosial
		Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial yang terkait kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas & Tuna Sosial serta Peningkatan Kapasitas PMKS dan Pengelolaan Rumah Singgah	Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial
6	Peningkatan pemberdayaan	Meningkatkan keberdayaan sosial masyarakat melalui	Program Pemberdayaan Sosial

	sosial dalam penanggulangan kemiskinan	pendekatan pemberdayaan perorangan dan keluarga, kelembagaan, serta penanganan fakir miskin	
7	Peningkatan upaya pengendalian penduduk	Melaksanakan Pembinaan Masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan Keluarga	Program Bina Keluarga Sejahtera
		Melaksanakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dalam upaya mengendalikan penduduk	Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
8	Mewujudkan pembangunan berbasis gender dan meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomi, bidang sosial, hukum dan politik, serta upaya peningkatan kualitas keluarga	Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
		meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menciptakan kondisi kota yang layak anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Agenda Pembangunan yang ditetapkan untuk mendukung misi ke-3 yaitu **Agenda Cilegon Sehat dan Cerdas** yang berfokus kepada **pembangunan sumberdaya manusia** yang cerdas, sehat dari segi jasmani dan rohani, berkualitas dan produktif serta memiliki kompetensi yang tinggi sehingga memiliki daya saing baik lokal ataupun global, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan kearifan budaya, **serta memiliki akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan masyarakat** yang berkualitas, terpadu, adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menjadi prioritas penuh Pemerintah Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan dikeluarkannya SMA/SMK dari kewenangan Pemerintah Kota maka substitusi anggaran sebesar 20% dari APBD akan dimaksimalkan seluruhnya untuk pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama, termasuk meningkatkan kesejahteraan guru negeri dan swasta. Selain itu pengembangan fisik gedung serta sarana prasarana pembelajaran di sekolah akan menjadi prioritas.

Selain bidang Pendidikan, **infrastruktur kesehatan** juga terus dikembangkan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan terjangkau. Oleh karena itu, penyediaan sarana kesehatan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat

serta mudah diakses secara cepat adalah suatu keharusan. Selain itu, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran pembangunan bidang kesehatan dengan prosentase sebesar 10% dari total belanja langsung sesuai amanat undang-undang kesehatan, menjadi rujukan utama prioritas perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD setiap tahunnya. Agenda ini diarahkan pada peningkatan kecerdasan, kesehatan masyarakat, serta kualitas dan ketrampilan SDM, dalam koridor pembangunan berkelanjutan.

B.2.4. Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota

Melalui misi ke-4 ini diharapkan, Kota Cilegon mampu mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana kota yang merata dan berkualitas yang berorientasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga dapat menunjang akselerasi pertumbuhan dan pembangunan kota

Berpijak pada upaya untuk mencapai **sasaran** misi **Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kotamaka** ditetapkan **strategi** dan **arah kebijakan** sebagai berikut:

Tabel 2.5

Strategi dan arah kebijakan misi ke-4 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021

No	Strategi Misi IV	Arah Kebijakan Misi IV	Program Misi IV
1	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan konektivitas transportasi	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan konektivitas transportasi	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2	Peningkatan pengawasan dan pengendalian angkutan/transportasi umum serta manajemen lalu lintas	Mengoptimalkan penerapan peraturan lalu lintas angkutan jalan serta melaksanakan upaya-upaya promotif terkait keselamatan dan ketertiban berkendara bagi masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		Mengoptimalkan penerapan peraturan lalu lintas angkutan jalan serta melaksanakan upaya-upaya promotif terkait keselamatan dan ketertiban berkendara bagi masyarakat	Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas
		Meningkatkan pengawasan	Program Dukungan

		dan tata kelola kepelabuhanan	Pelayanan Perhubungan Laut
3	Mewujudkan Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perhubungan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perhubungan (kelayakan angkutan jalan, halte penerangan jalan umum, dsb)	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
4	Mengoptimalkan sumber-sumber daya air beserta saluran/jaringannya serta meningkatkan cakupan layanan dan distribusi air bersih bagi masyarakat melalui jaringan air perpipaan dan non-perpipaan	Mewujudkan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sumber-sumber daya air beserta jaringannya dalam rangka mendukung penurunan titik banjir	Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Guna mengarahkan rumusan kebijakan tahunan selama periode 2016-2021 dalam rangka pencapaian visi dan misi ke-4, dituangkan lebih lanjut dalam Agenda Pembangunan yang pertama, yaitu Agenda Cilegon Nyaman.

Agenda Cilegon Nyaman, dicerminkan dengan kondisi infrastruktur kota yang memadai serta mampu memenuhi kebutuhan aktifitas ekonomi segenap warga masyarakatnya. agenda ini berfokus kepada pelayanan sarana dan prasarana kota yang merata dan berkualitas yang berorientasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga dapat menunjang akselerasi pertumbuhan dan pembangunan kota.

B.2.5. Strategi dan Arah kebijakan Pada Misi Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan

Melalui misi ke-5 ini diharapkan, Kota Cilegon mampu membangun pemerintahan yang akuntabel, bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta sadar akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi dari birokrasi, membangun kemitraan yang serasi antara eksekutif dan legislatif, dan penciptaan kondisi politik yang stabil dan konsisten dalam penegakan hukum.

Dalam rangka untuk mencapai sasaran misi ke-5, yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan maka ditetapkan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program-program sebagai berikut:

Tabel 2.6

Strategi dan arah kebijakan misi ke-5 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021

No	Strategi Misi V	Arah Kebijakan	Program
1	Peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur	Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
		Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional maupun jabatan	Program Diklat dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara
		Mewujudkan tata kelola administrasi sumber daya aparatur sipil negara secara terpadu	Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA)
		Peningkatan etos kerja, kedisiplinan dan motivasi aparatur sipil negara melalui mekanisme penilaian kinerja pegawai, penjaminan kesejahteraan, dan fasilitasi mutasi/kepangkatan serta promosi/ pengembangan karir pegawai	Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN
2	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Optimalisasi fungsi organisasi perangkat daerah melalui penyesuaian formasi jabatan dan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah
		Meningkatkan koordinasi kerjasama daerah, meningkatkan kualitas perangkat kecamatan & kelurahan, serta peningkatan fungsi koordinasi sektoral di	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

		bidang pemerintahan umum, ketentraman & ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat	
		Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pemuda, olahraga, teknologi informasi, statistik, persandian, serta bina keagamaan dan pembinaan mental	Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan
		Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan daerah	Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
		Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD)	Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman	Program Peningkatan Infrastruktur dan Kewilayahan
		Meningkatkan fungsi pengawasan pada tata laksana pembangunan daerah	Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah
3	Peningkatan kualitas tata kelola kearsipan di seluruh unit pemerintahan	Mewujudkan tata kelola arsip dinamis dan statis secara optimal dan terintegrasi	Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah
4	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan, proses penyusunan dan administrasi penganggaran	Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan
		Meningkatkan kualitas pencatatan keuangan daerah melalui efisiensi tata kelola penerimaan, pengeluaran dan pelaporan neraca keuangan daerah	Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah

		Mengoptimalkan rangkaian proses pengeloan aset daerah secara terpadu terkait proses perencanaan aset, manajemen pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset daerah	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
		Meningkatkan kualitas administrasi dan tata kelola aliran keuangan daerah	Program Perbendaharaan Keuangan Daerah
		Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset di setiap unit satuan kerja perangkat daerah	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
			Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
5	Meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah	Mewujudkan peningkatan pajak daerah dengan mengoptimalkan potensi-potensi wajib pajak daerah serta peningkatan pelayanan perpajakan serta tata kelola data & informasi wajib pajak secara terpadu	Program Peningkatan Pajak Daerah
6	Optimalisasi belanja program/kegiatan melalui peningkatan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Optimalisasi dan peningkatan kualitas sistem layanan pengadaan barang dan jasa	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
		Peningkatan transparansi proses pengadaan barang dan jasa	Program Layanan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
7	Mewujudkan ketersediaan data dan informasi daerah dalam rangka mendukung kualitas perencanaan sektoral dan makro daerah	Penyediaan data statistik sektoral dan data statistik makro daerah melalui sistem manajemen data dan informasi sektoral secara terpadu	Program Pengembangan Data dan Statistik Daerah
		Melaksanakan pengamanan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian
		Meningkatkan inovasi daerah melalui penelitian dan pengembangan serta kerjasama dengan lembaga penelitian atau instansi lainnya	Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah
8	Memadukan dan meningkatkan kualitas seluruh tahapan/proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas koordinasi antar sektor pada seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi di bidang ekonomi dan infrastruktur	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Wilayah
		Meningkatkan kualitas koordinasi antar sektoral pada seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi di bidang pembangunan sosial dan	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan

		budaya	
		Mengoptimalkan keterlaksanaan dan integrasi program pembangunan melalui mekanisme pengendalian, evaluasi dan pelaporan,	Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi
		Meningkatkan kinerja penyediaan data-data dan perencanaan sektoral	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
			Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
9	Meningkatkan fasilitasi produk hukum antara eksekutif dan legislatif	Peningkatan fasilitasi produk hukum, bantuan hukum dan konsultasi, dokumentasi, evaluasi, dan penyuluhan hukum	Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah
		Pengembangan produk hukum dan regulasi melalui instrumen legislatif daerah	Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah
10	Pengembangan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, perangkat keras serta sumber daya lainnya dalam rangka penerapan e-government	Mengembangkan interkoneksi jaringan teknologi informasi, membangun & mengintegrasikan sistem informasi manajemen tata kelola pemerintahan secara terpadu, serta mendorong pertumbuhan pemanfaatan teknologi dan informasi bagi masyarakat.	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi
11	Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pada instansi daerah	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pada kecamatan dan kelurahan	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
		Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan pendaftaran penduduk	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan Catatan Sipil	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
		Meningkatkan pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
		Meningkatkan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Meningkatkan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
		Meningkatkan pelayanan pengaduan perizinan dan penyediaan data dan informasi perizinan	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan
12	Mewujudkan tata	Meningkatkan efektifitas	Program Pengembangan

	kelola dan diseminasi informasi publik	pelayanan informasi publik dan tata kelola informasi pemerintah daerah	Komunikasi dan Pengelolaan Informasi Daerah
13	Mewujudkan perpustakaan sebagai ruang publik fungsional serta memenuhi kebutuhan informasi & kepastakaan bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan daerah sebagai pusat referensi kepastakaan, aktivitas akademis, serta sarana pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah
14	Peningkatan pengawasan, pembinaan dan penegakkan Perda dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatkan pengawasan, pembinaan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan pengawasan, pembinaan dalam rangka melaksanakan perlindungan masyarakat	Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
		Mewujudkan penegakkan Perda dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
15	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam konstelasi pembangunan daerah	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam konstelasi pembangunan daerah	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan LSM dan ORMAS
16	Peningkatan upaya pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan bahaya kebakaran	Meningkatkan upaya pencegahan dan menyediakan sarana prasarana penanganan kebakaran	Program Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran
		Meningkatkan pelayanan pengaduan dan optimalisasi waktu kecepatan tanggap penanganan kebakaran	Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan
		Memetakan potensi bencana serta meningkatkan upaya mitigasi bencana dalam rangka meminimalisir dampak bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
		Meningkatkan utilitas dan koordinasi penanganan bencana	Program Kedaruratan dan Logistik
		Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Agenda Pembangunan yang diterapkan pada misi ini yaitu Agenda Cilegon Berwibawa, yang bermakna pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel, bertanggung jawab, serta sadar akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi dari birokrasi, membangun kemitraan yang serasi antara eksekutif dan legislatif, dan penciptaan kondisi politik yang stabil dan konsisten dalam penegakan hukum.

Reformasi birokrasi yang sekarang berjalan, perlu ditingkatkan akselerasinya, untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap birokrasi yang tangkas, tanggap, dan cepat. Oleh karena itu, sudah sangat mendesak untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Restrukturisasi organisasi pemerintahan harus dilakukan dengan memperkuat *front office* pelayanan publik.

Di samping itu, *reward* dan *punishment* di dalam birokrasi harus ditata ulang agar lebih adil dan proporsional. Gebrakan-gebrakan dalam reformasi birokrasi ini adalah suatu keharusan untuk menyesuaikan dengan dinamika demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi. Agenda ini diarahkan pada peningkatan tatakelola pemerintahan dalam koridor pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

B.3. PRIORITAS DAERAH (RKPD KOTA CILEGON TAHUN 2019)

Berpijak pada kondisi dan tantangan pembangunan di tahun berkenan, agenda dan prioritas pembangunan Kota Cilegon tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing perekonomian;

Struktur perekonomian daerah Kota Cilegon yang didominasi oleh sektor industri, pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap tingginya laju pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kerawanan sosial serta pencemaran lingkungan. Hal tersebut dikarenakan sektor industri yang berkembang di Kota Cilegon bukan merupakan industri yang berbasis sumberdaya lokal, namun merupakan industri yang padat modal serta membutuhkan tenaga kerja dengan skill atau keahlian khusus.

Disamping itu, perekonomian yang didominasi oleh industri, strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumberdaya lokal berupa UMKM dan Koperasi harus lebih ditingkatkan kinerjanya agar

dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah, serta mampu mendukung kinerja sektor industri daerah.

2. Peningkatan tata kelola lingkungan dan estetika perkotaan;
Sebagaimana umumnya kawasan perkotaan yang memiliki lahan yang sangat terbatas, Kota Cilegon dihadapkan dengan semakin menurunnya luas lahan terbuka akibat semakin intensifnya penggunaan lahan khususnya untuk permukiman. Dengan kecenderungan demikian, maka konsistensi terhadap implementasi perda penataan ruang harus diupayakan guna mencegah terjadinya konversi lahan yang masif sehingga akan berakibat pada menurunnya daya dukung lahan. Lebih jauh lagi, aktivitas di kawasan perkotaan yang sangat tinggi tanpa diimbangi oleh upaya pengendalian lingkungan, pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang akan sangat merugikan bagi kelangsungan pembangunan.
3. Peningkatan kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial;
Isu kualitas sumber daya manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial merupakan isu yang sangat substansial dalam kerangka pembangunan daerah Kota Cilegon. Hal tersebut terkait dengan fungsi manusia itu sendiri sebagai subjek dan juga sekaligus objek dari kegiatan pembangunan, sehingga seluruh upaya pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk menunjang kelangsungan aktivitas manusia. Kesejahteraan sosial masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembangunan Kota Cilegon. Taraf kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator tercapai atau tidaknya program-program pembangunan yang telah dilaksanakan.
4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan
Peningkatan daya dukung dan pelayanan prasarana dan sarana serta infrastruktur kota merupakan hal yang krusial dilakukan. Hal tersebut mengingat dampak yang sangat signifikan yang dapat ditimbulkan akibat kurang memadainya daya dukung infrastruktur tersebut, baik dampak secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Secara sosial, dampak yang ditimbulkan akibat keterbatasan infrastruktur kota adalah semakin meningkatnya kerawanan sosial yang mengancam ketentraman dan ketertiban umum. Dari sisi ekonomi, dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya aksesibilitas pergerakan barang dan angkutan sehingga kegiatan koleksi dan distribusi menjadi terganggu.

Adapun dari sisi lingkungan, berbagai dampak yang dapat ditimbulkan diantaranya banjir, kawasan kumuh, kurangnya suplai air bersih, dll.

5. Peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum.

Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan di Kota Cilegon. Kinerja birokrasi yang efisien dan efektif dengan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang profesional dan akuntabel pada gilirannya dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat maka diharapkan masyarakat akan semakin produktif dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya. Berikut adalah beberapa kegiatan prioritas daerah di tahun anggaran 2019 :

Tabel 2.7 Prioritas Daerah Kota Cilegon Tahun 2019

N O.	KEGIATAN PRIORITAS	OPD
1	Pembinaan Manajemen Sekolah Mantap	Dinas Pendidikan
2	Pengembangan Kurikulum Sekolah mantap	Dinas Pendidikan
3	Pendamping Sekolah Model dan Sekolah Mantap	Dinas Pendidikan
4	Workshop Pemantapan Mata Pelajaran SMP Sekolah Mantap	Dinas Pendidikan
5	Workshop Pemantapan Guru Kelas Sekolah Mantap	Dinas Pendidikan
6	Pembangunan Jalan Lingkar Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
7	Pembangunan Jalan Lingkar Utara (Bantuan Keuangan)	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
8	Pengendalian Banjir dan Genangan (Prioritas Daerah)	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
9	Perencanaan Teknis (DED) Revitalisasi Situ Rawa Arum (Prioritas Daerah)	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
10	Revitalisasi Situ Rawa Arum (Prioritas Daerah)	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
11	Perencanaan Teknis Cipta Karya (Prioritas Daerah)	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang

12	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan (Prioritas Daerah)	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
13	Peningkatan/Penataan Sarana Arsitektur Kota (Prioritas Daerah)	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
14	Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum PDAM (Prioritas Daerah)	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
15	Penyusunan naskah akademis evaluasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 (Prioritas Daerah)	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
16	Pengembangan BLK	Dinas Tenaga Kerja
17	Kegiatan pengembangan kawasan pertanian terpadu (prioritas daerah)	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
18	Pengadaan dan Pembangunan Alat Instalasi Stasiun Pemantau Udara (ISPU)	Dinas Lingkungan Hidup
19	Pembangunan Kantong Parkir Angkutan Barang (Penyusunan DED)	Dinas Perhubungan
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana SAUM (DID)	Dinas Perhubungan
21	Operasional SAUM (DID)	Dinas Perhubungan
22	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Integrated Control City System and Room (Prioritas Daerah)	Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi & Statistik
23	Pengelolaan Smart City (Prioritas Daerah)	Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi & Statistik
24	Pengelolaan Panggilan Darurat Terpadu (Prioritas Daerah)	Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi & Statistik
25	Pembangunan Sport center (Prioritas Daerah)	Dinas Pemuda dan Olahraga
26	Revitalisasi dan Penataan Pasar Rakyat (Prioritas Daerah)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
27	Penumbuhan Sentra Industri Kecil Aneka (IK. Sarung Tangan dan IK. Majun (Prioritas Daerah)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan evaluasi kinerja.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019 telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya, laporan keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Cilegon dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi laporan keuangan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019 berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Kota Cilegon di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan, khususnya untuk Pemerintah Kota Cilegon yang lebih baik.

WALIKOTA CILEGON



H. EDI ARIADI, M.Si
